RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KOTA BANDA ACEH 2017 - 2022

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

2017

QANUN KOTA BANDA ACEH

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 -2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kurun waktu 5 (lima) tahun;
b. bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 ditetapkan dengan Qanun;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang ..

2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

11. Peraturan ..

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas walikota dan perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah organisasi perangkat daerah pada pemerintah kota selaku pengguna anggaran.
7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRA dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan.
8. Pembangunan kota adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

9. Perencanaan ..

9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota yang selanjutnya disingkat RPJPK adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.
12. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Rencana Kerja Pembangunan Kota Banda Aceh yang disusun setiap tahun.
14. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD merupakan :

a. dokumen perencanaan pembangunan Kota sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dalam mewujudkan pembangunan Kota yang berkesinambungan dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPK; dan
b. penjabaran visi, misi dan program Walikota ke dalam strategi pembangunan Kota, kebijakan umum, program prioritas Walikota dan arah kebijakan keuangan daerah dengan mempertimbangkan RPJPK.

BAB ...

BAB III
TUJUAN PENETAPAN

Pasal 3

Penetapan RPJMD bertujuan untuk :

a. menyusun Renstra-OPD, RKPK, Renja-OPD dan perencanaan penganggaran;
b. mewujudkan perencanaan pembangunan Kota yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota;
c. mencapai visi dan misi Kota melalui serangkaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah jangka menengah;
d. menyediakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif, yang memuat kerangka makro Kota dan pilihan program prioritas; dan
e. menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan OPD.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN
   Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika tulisan.

b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
   Gambaran umum kondisi daerah menguraikan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
   Gambaran keuangan daerah menjelaskan tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan.

d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
   Dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJM karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Isu Strategis berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan, serta isu-isu yang berkembang secara Nasional dan International.

e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
   Dalam Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

f. BAB ..

f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Dalam bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra OPD Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.

h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Dalam bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

i. BAB IX PENUTUP

BAB V
ISI DAN URAIAN

Pasal 5

Isi dan uraian RPJMD berikut matriknya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebijakan perencanaan pembangunan Kota; dan
   b. pelaksanaan rencana pembangunan Kota.
(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERUBAHAN

Pasal 7

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPK dan Perubahan Renstra OPD.

(5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kota.

(6) Dalam hal terjadi perubahan RPJMD yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Dokumen perencanaan pembangunan Kota yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

(2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan Kota sampai tahun 2022 dan dapat dijadikan sebagai RPJMD Transisi untuk dipedomani dalam penyusunan RKPK Tahun 2023 sebelum ditetapkannya RPJMD Tahun 2023-2028.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 6 Maret 2018 M
18 Jumadil Akhir 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 6 Maret 2018 M
18 Jumadil Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

BAHAGIA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR .1.

NOMOR REGISTER QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH (1/24/2018)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KOTA BANDA ACEH

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017-2022

I. UMUM

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPK untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota ke dalam strategi pembangunan Kota, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada Qanun Kota Banda Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh.

RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPK, yang merupakan rencana pembangunan tahunan kota, serta memuat prioritas pembangunan Kota, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan ekonomi daerah, serta program dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJMD adalah 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJMD terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam :

1. RKPK Tahun 2018
2. RKPK Tahun 2019
3. RKPK Tahun 2020
4. RKPK Tahun 2021
5. RKPK Tahun 2022

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan di Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

RPJMD mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran pembangunan Kota yang dituangkan dalam RKPK. Dalam penjabaran visi, misi dan program Walikota yang dituangkan dalam strategi pembangunan Kota, kebijakan umum, program prioritas walikota dan arah kebijakan keuangan kota turut mempertimbangkan RPJPK.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR .....

11

LAMPIRAN – QANUN KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 1 TAHUN 2018
TANGGAL : 6 MARET 2018 M
18 J. AKHIR 1439 H

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ..... I - 1
1.1 Latar Belakang ..... I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... I - 3
1.3 Hubungan Antar Dokumen ..... I - 4
1.4 Maksud dan Tujuan ..... I - 6
1.4.1. Maksud ..... I - 6
1.4.2. Tujuan ..... I - 6
1.5 Sistematika Penulisan ..... I - 6

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... II - 1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... II - 1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah ..... II - 1
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi ..... II - 1
2.1.1.2 Topografi ..... II - 2
2.1.1.2.1 Kemiringan Lahan ..... II - 2
2.1.1.2.2 Ketinggian Tempat ..... II - 2
2.1.1.3 Geomorfologi ..... II - 3
2.1.1.4 Geologi ..... II - 3
2.1.1.5 Hidrologi ..... II - 4
2.1.1.6 Klimatologi ..... II - 5
2.1.2 Penggunaan Lahan ..... II - 6
2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah ..... II - 8
2.1.3.1 Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota ..... II - 8
2.1.3.2 Rencana Pengembangan Kawasan Pusat Kota Lama Kota Banda Aceh II - 11
2.1.4 Wilayah Rawan Bencana ..... II - 13
2.1.5 Demografi ..... II - 16
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II - 17
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... II - 17
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB ..... II - 17
2.2.1.2 Laju Inflasi ..... II - 21
2.2.1.3 PDRB Perkapita ..... II - 22
2.2.1.4 Indeks Gini ..... II - 23
2.2.1.5 Kemiskinan ..... II - 23
2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ..... II - 26
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat ..... II - 27
2.2.2.1 Angka Melek Huruf (AMF) ..... II - 27
2.2.2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah ..... II - 27
2.2.2.3 Angka Usia Harapan Hidup ..... II - 28
2.2.2.4 Persentase Balita Gizi Buruk ..... II - 29
2.2.2.5 Prevalensi Balita Gizi Kurang ..... II - 29
2.2.2.6 Cakupan Desa Siaga Aktif ..... II - 29
2.2.2.7 Angka Partisipasi Angkatan Kerja ..... II - 30
2.2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ..... II - 31
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga ..... II - 33
2.2.3.1 Kebudayaan ..... II - 33
2.2.3.1.1 Jumlah Grup Kesenian ..... II - 33
2.2.3.1.2 Jumlah gedung kesenian ..... II - 34
2.2.3.2 Pemuda dan Olahraga ..... II - 34
2.2.3.2.1 Jumlah Klub Olahraga ..... II - 34

2.2.3.2.2 Sarana dan Prasarana Olahraga ..... II - 34
2.3 Aspek Pelayanan Umum ..... II - 35
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan ..... II - 35
2.3.1.1 Syariat Islam ..... II - 35
2.3.1.1.1 Jumlah Pelanggaran Qanun Syariat Islam ..... II - 35
2.3.1.1.2 Kemampuan Baca Al-Quran Siswa Tingkat Sekolah Menengah... ..... II - 36
2.3.1.1.3 Kemampuan Baca Tulis Arab Jawi Siswa Sekolah ..... II - 36
2.3.1.1.4 Frekuensi Kegiatan Syiar dan Dakwah di Masyarakat ..... II - 36
2.3.1.1.5 Jumlah Masjid yang Memenuhi Standar Kebersihan, Ketertiban, dan Asessibel ..... II - 36
2.3.1.2 Pendidikan Dayah ..... II - 38
2.3.1.2.1 Jumlah Dayah, Guru dan Santri ..... II - 38
2.3.1.2.2 Kurikulum ..... II - 38
2.3.1.3 Baitul Mal ..... II - 39
2.3.1.3.1 Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh ..... II - 39
2.3.1.3.2 Sertifikasi Tanah Wakaf ..... II - 40
2.3.1.4 Majelis Ulama ..... II - 41
2.3.1.4.1 Jumlah Fatwa, Himbauan, Tausyiah yang Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Syariat ..... II - 41
2.3.1.4.2 Kewenangan MPU : ..... II - 42
2.3.1.4.3 Sertifikasi produk halal ..... II - 43
2.3.1.5 Majelia Adat Aceh ..... II - 43
2.3.1.6 Majelis Pendidikan Daerah ..... II - 44
2.3.2 Fokus Layanan Wajib Dasar ..... II - 44
2.3.2.1 Pendidikan ..... II - 44
2.3.2.1.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ..... II - 44
2.3.2.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) ..... II - 45
2.3.2.1.3 Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) ..... II - 45
2.3.2.1.4 Angka Partisipasi Murni (APM) ..... II - 46
2.3.2.1.5 Angka Partisipasi Sekolah (APS) ..... II - 46
2.3.2.1.6 Angka Putus Sekolah (APtS) ..... II - 47
2.3.2.1.7 Angka Melanjutkan (AM) ..... II - 47
2.3.2.1.8 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar ..... II - 47
2.3.2.1.9 Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Dasar ..... II - 48
2.3.2.1.10 Jumlah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tercapai II - 49
2.3.2.1.11 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV ..... II - 49
2.3.2.2 Kesehatan ..... II - 50
2.3.2.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup ..... II - 50
2.3.2.2.2 Angka Kelangsungan Hidup Bayi ..... II - 51
2.3.2.2.3 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup ..... II - 51
2.3.2.2.4 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup ..... II - 51
2.3.2.2.5 Rasio Posyandu per Satuan Balita ..... II - 51
2.3.2.2.6 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk ..... II - 52
2.3.2.2.7 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk ..... II - 52
2.3.2.2.8 Rasio Dokter per Satuan Penduduk ..... II - 53
2.3.2.2.9 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk ..... II - 53
2.3.2.2.10 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani ..... II - 54
2.3.2.2.11 Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan ..... II - 54
2.3.2.2.12 Cakupan Desa/ Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) ..... II - 54
2.3.2.2.13 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan ..... II - 55
2.3.2.2.14 Cakupan Imunisasi Campak Bayi ..... II - 55
2.3.2.2.15 Jumlah Kasus Campak ..... II - 55
2.3.2.2.16 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC... ..... II - 55

2.3.2.2.17 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) ..... II - 56
2.3.2.2.18 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD ..... II - 56
2.3.2.2.19 Penderita Diare yang Ditangani ..... II - 57
2.3.2.2.20 Angka Kesakitan Malaria *(Annual Parasit Incidence)* ..... II - 57
2.3.2.2.21 Jumlah Kasus Baru HIV ..... II - 57
2.3.2.2.22 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin ..... II - 58
2.3.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... II - 58
2.3.2.3.1 Pekerjaan Umum ..... II - 58
2.3.2.3.1.1 Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik ..... II - 58
2.3.2.3.1.2 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi ..... II - 59
2.3.2.3.1.3 Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembangunan Aliran Air Tidak Tersumbat ..... II - 60
2.3.2.3.1.4 Persentase Penduduk Berakses Air Minum ..... II - 62
2.3.2.3.1.5 Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk ..... II - 65
2.3.2.3.2 Penataan Ruang ..... II - 65
2.3.2.3.2.1 Rasio Ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/ HGB ..... II - 65
2.3.2.3.2.2 Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan ..... II - 65
2.3.2.3.2.3 Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya II - 66
2.3.2.3.2.4 Ketaatan Terhadap RTRW ..... II - 66
2.3.2.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..... II - 67
2.3.2.4.1 Rasio Rumah Layak Huni ..... II - 67
2.3.2.4.2 Persentase Permukiman yang Tertata ..... II - 67
2.3.2.4.3 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh ..... II - 67
2.3.2.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ..... II - 68
2.3.2.5.1 Cakupan Patroli Petugas Satpol PP ..... II - 68
2.3.2.5.2 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) ..... II - 68
2.3.2.5.3 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota ..... II - 69
2.3.2.5.4 Tingkat Waktu Tanggap *(Renponse Time Rate)* Daerah Layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK) ..... II - 70
2.3.2.5.5 Persentase Penegakan Perda ..... II - 70
2.3.2.6 Sosial ..... II - 70
2.3.2.6.1 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial ..... II - 71
2.3.2.6.2 Jumlah PMKS yang Mendapat Pembinaan Dalam dan Luar Panti ..... II - 72
2.3.2.6.3 Persentase Bantuan Melalui Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya ..... II - 72
2.3.2.6.4 Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat ..... II - 72
2.3.2.6.5 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial ..... II - 72
2.3.3 Fokus layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar ..... II - 72
2.3.3.1 Bidang Tenaga Kerja ..... II - 72
2.3.3.1.1 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun ..... II - 73
2.3.3.1.2 Pencari Kerja yang Ditempatkan ..... II - 73
2.3.3.1.3 Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah ..... II - 73
2.3.3.1.4 Rasio Lulusan S1/S2/S3 ..... II - 74
2.3.3.2 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... II - 74

2.3.3.2.1 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%) ..... II - 74
2.3.3.2.2 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ..... II - 75
2.3.3.2.3 Kota Layak Anak ..... II - 75
2.3.3.2.4 Perluasan Jaringan Khususnya Untuk Panti dan Pusat Rehabilitasi ..... II - 75
2.3.3.2.5 Cakupan Penegakan Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ..... II - 76
2.3.3.3 Bidang Pangan ..... II - 76
2.3.3.3.1 Ketersediaan Pangan Utama ..... II - 76
2.3.3.4 Bidang Lingkungan hidup ..... II - 77
2.3.3.4.1 Timbulan Sampah yang Ditangani ..... II - 77
2.3.3.4.2 Pencemaran Status Mutu Air ..... II - 78
2.3.3.4.3 Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ..... II - 79
2.3.3.4.4 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan penduduk ..... II - 79
2.3.3.4.5 IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) Gampong Jawa ..... II - 80
2.3.3.4.6 Pemanfaatan Gas Metana dari TPA Gampong Jawa ..... II - 81
2.3.3.4.7 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ..... II - 81
2.3.3.4.8 Pencemaran Tingkat Kebisingan ..... II - 83
2.3.3.4.9 Meraih Adipura ..... II - 84
2.3.3.4.10 Persentase Penerangan Jalan Umum ..... II - 85
2.3.3.5 Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..... II - 85
2.3.3.5.1 Kepemilikan KTP ..... II - 85
2.3.3.5.2 Rasio Bayi Berakta Kelahiran ..... II - 86
2.3.3.5.3 Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk ..... II - 86
2.3.3.6 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..... II - 87
2.3.3.6.1 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik ..... II - 87
2.3.3.6.2 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Mukim yang Baik ..... II - 87
2.3.3.6.3 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ..... II - 88
2.3.3.6.4 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK ..... II - 88
2.3.3.6.5 Persentase PKK aktif ..... II - 89
2.3.3.6.6 Persentase Posyandu aktif ..... II - 89
2.3.3.6.7 Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) ..... II - 90
2.3.3.6.8 Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kota ..... II - 90
2.3.3.6.9 Presentase Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang baik ..... II - 91
2.3.3.6.10 Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat ..... II - 91
2.3.3.6.11 Presentase Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang Baik ..... II - 92
2.3.3.6.12 Presentase Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/ Gampong yang baik ..... II - 92
2.3.3.7 Bidang Kependudukan Dan Keluarga Berencana ..... II - 93
2.3.3.7.1 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga ..... II - 93
2.3.3.7.2 Ratio Akseptor KB ..... II - 93
2.3.3.8 Bidang Perhubungan ..... II - 93
2.3.3.8.1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum ..... II - 93
2.3.3.8.2 Rasio Ijin Trayek ..... II - 94
2.3.3.8.3 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum ..... II - 94
2.3.3.8.4 Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis ..... II - 95

2.3.3.8.5 Persentase Layanan Angkutan Darat ..... II - 95
2.3.3.8.6 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum ..... II - 95
2.3.3.8.7 Pemasangan Rambu-rambu ..... II - 96
2.3.3.8.8 Perparkiran ..... II - 96
2.3.3.9 Bidang Komunikasi dan Informatika ..... II - 97
2.3.3.9.1 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong di Tingkat kecamatan ..... II - 97
2.3.3.10 Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah ..... II - 98
2.3.3.10.1 Persentase Koperasi Aktif ..... II - 98
2.3.3.10.2 Jumlah BPR/ LKM ..... II - 99
2.3.3.11 Bidang Penanaman Modal ..... II - 99
2.3.3.11.1 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA) ..... II - 99
2.3.3.11.2 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) ..... II - 99
2.3.3.11.3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja ..... II - 99
2.3.3.11.4 Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) ..... II - 100
2.3.3.12 Bidang Kepemudaan dan Olahraga ..... II - 100
2.3.3.12.1 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif ..... II - 100
2.3.3.12.2 Persentase Wirausaha Muda ..... II - 101
2.3.3.12.3 Pembinaan Atlet dan Pelatih ..... II - 101
2.3.3.12.4 Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Pemuda ..... II - 101
2.3.4 Fokus Layanan Urusan Pilihan ..... II - 102
2.3.4.1 Pariwisata ..... II - 102
2.3.4.1.1 Kunjungan Wisata ..... II - 102
2.3.4.2 Pertanian ..... II - 103
2.3.4.2.1 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar ..... II - 103
2.3.4.2.2 Cakupan Bina Kelompok Petani ..... II - 103
2.3.4.2.3 Peternakan ..... II - 103
2.3.4.3 Energi dan Sumber Daya Mineral ..... II - 104
2.3.4.3.1 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik ..... II - 104
2.3.4.3.2 Rasio Ketersediaan Daya Listrik ..... II - 105
2.3.4.4 Perindustrian ..... II - 105
2.3.4.4.1 Jumlah IKM yang Mendapatkan Bantuan Perbankan ..... II - 105
2.3.4.4.2 Jumlah IKM yang Mampu Melakukan Pemasaran Komoditi ..... II - 106
2.3.4.4.3 Jumlah Produk yang Menunjang Program One Village One Product ..... II - 106
2.3.4.4.4 Jumlah Pasar yang Sudah Berfungsi Sccara Optimal ..... II - 107
2.3.4.5 Kelautan dan Perikanan ..... II - 108
2.3.4.5.1 Cakupan Bina Kelompok Nelayan ..... II - 108
2.3.4.5.2 Produksi Perikanan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya ..... II - 108
2.3.5 Fokus Penunjang Urusan ..... II - 108
2.3.5.1 Perencanaan Pembangunan ..... II - 108
2.3.5.1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJP, RPJM, dan RKPK Kota Banda Aceh ..... II - 108
2.3.5.2 Keuangan ..... II - 109
2.3.5.2.1 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan ..... II - 109
2.3.5.2.2 Persentase SILPA ..... II - 109
2.3.5.2.3 Persentase SILPA Terhadap APBD ..... II - 109
2.3.5.2.4 Persentase Belanja Pendidikan ..... II - 110
2.3.5.2.5 Persentase Belanja Kesehatan ..... II - 110
2.3.5.2.6 Persentase Belanja Langsung dan Tidak Langsung ..... II - 110
2.3.5.2.7 Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa ..... II - 110
2.3.5.2.8 Penetapan APBD ..... II - 111
2.3.5.3 Pengawasan ..... II - 111
2.3.5.2.1 Persentase Tindak Lanjut Temuan ..... II - 111

2.3.6 Fokus Otonomi Daerah ..... II - 112
2.3.6.1 Pemerintahan Umum ..... II - 112
2.3.6.1.1 Nilai SAKIP Pemerintah Kota ..... II - 112
2.3.6.1.2 Pembangunan Zona Integritas ..... II - 112
2.3.6.1.3 Kapabilitas APIP ..... II - 112
2.3.6.1.4 Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur ..... II - 113
2.3.6.1.5 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk ..... II - 113
2.3.6.1.6 Jumlah Linmas Per Jumlah Penduduk ..... II - 113
2.3.6.1.7 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Gampong ..... II - 114
2.3.6.2 Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri ..... II - 115
2.3.6.2.1 LSM, Ormas dan OKP Terdaftar ..... II - 115
2.3.6.2.2 Kegiatan Pembinaan Politik daerah ..... II - 115
2.3.6.2.3 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba ..... II - 116
2.4 Aspek Daya Saing Daerah ..... II - 116
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ..... II - 116
2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita ..... II - 116
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ..... II - 117
2.4.2.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan ..... II - 117
2.4.2.2 Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum ..... II - 118
2.4.2.3 Jumlah Orang/ Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal per Tahun ..... II - 118
2.4.2.4 Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang ..... II - 118
2.4.2.5 Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran ..... II - 118
2.4.2.6 Jenis Kelas dan Jumlah Hotel dan Penginapan ..... II - 119
2.4.2.7 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih ..... II - 119
2.4.2.8 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik ..... II - 120
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi ..... II - 121
2.4.3.1 Angka Kriminalitas ..... II - 121
2.4.3.2 Jumlah Demonstrasi ..... II - 121
2.4.3.3 Lama Proses Perizinan ..... II - 121
2.4.3.4 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha ..... II - 122
2.4.3.5 Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah) ..... II - 122
2.4.3.6 Pembinaan dan Pengawasan ..... II - 123
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia ..... II - 123
2.4.4.1 Rasio Ketergantungan ..... II - 123

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ..... III - 1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu ..... III - 3
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD ..... III - 3
3.1.2 Neraca Daerah ..... III - 8
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ..... III - 12
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran ..... III - 12
3.2.2 Analisis Pembiayaan ..... III - 13
3.3 Kerangka Pendanaan ..... III - 16
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja ..... III - 16
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan ..... III - 20

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH ..... IV - 1
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah ..... IV - 1
4.1.1 Penegakan Syariat Islam ..... IV - 1
4.1.2 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Gampong ..... IV - 3
4.1.3 Ekonomi dan Kesejahteraan ..... IV - 4
4.1.4 Kesehatan ..... IV - 5
4.1.5 Pendidikan ..... IV - 6
4.1.6 Pariwisata ..... IV - 7
4.1.7 Reformasi Birokrasi ..... IV - 7

4.1.8 Pengembangan Sistem Transportasi dan TIK ..... IV - 8
4.1.9 Perumahan dan Pemukiman ..... IV - 8
4.1.10 Kemiskinan ..... IV - 9
4.1.11 RTH dan Pencemaran Lingkungan ..... IV - 10
4.1.12 Pengelolaan Air Bersih ..... IV - 10
4.1.13 Mitigasi Bencana ..... IV - 11
4.1.14 Iklim Investasi ..... IV - 11
4.1.15 Kerjasama Regional ..... IV - 11
4.1.16 Energi Listrik ..... IV - 12
4.1.17 Kependudukan, Perempuan dan Anak ..... IV - 12
4.1.18 Kesempatan Kerja ..... IV - 13
4.1.19 Pembangunan Kependudukan ..... IV - 14
4.1.20 Pengembangan Budaya ..... IV - 15
4.1.21 Pemuda dan Olahraga ..... IV - 16
4.2 Isu Strategis ..... IV - 17
4.2.1 Syariat Islam ..... IV - 17
4.2.2 Stabilitas Ekonomi ..... IV - 17
4.2.3 Sistem transportasi dan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) ..... IV - 17
4.2.4 Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota ..... IV - 19
4.2.5 Bidang Kepariwisataan dan Budaya ..... IV - 19
4.2.6 Peningkatan Kualitas Pendidikan ..... IV - 21
4.2.7 Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat ..... IV - 21
4.2.8 RTH dan Pencemaran Lingkungan ..... IV - 21
4.2.9 Pengelolaan Air Bersih ..... IV - 22
4.2.10 Mitigasi Bencana ..... IV - 22
4.2.11 Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Gender ..... IV - 22
4.2.12 Pengembangan Reformasi Birokrasi ..... IV - 23
4.2.13 Kepemudaan dan Olahraga ..... IV - 23

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ..... V - 1
5.1 Visi ..... V - 1
5.2 Misi ..... V - 2
5.3 Tujuan dan Sasaran ..... V - 16
5.4 Keselarasan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) kota Banda Aceh Dengan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh. ..... V - 16
5.5 Keselarasan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Dengan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA). ..... V - 16
5.6 Keselarasan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kota Banda Aceh dengan Misi Rencana Tata Ruang Wilayah Kerja (RTRW) Kota Banda Aceh ..... V - 17

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ..... VI - 1

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ..... VII - 1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..... VIII - 1

BAB IX PENUTUP ..... VIII - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh	II - 1
Tabel 2.2	Nama Sungai dan Luas Daerah Alirannya di Kota Banda Aceh	II - 4
Tabel 2.3	Kondisi Klimatologi Kota Banda Aceh Tahun 2015	II - 5
Tabel 2.4	Penggunaan Lahan Eksiting –Lahan Terbangun di Kota Banda Aceh Tahun 2015	II - 6
Tabel 2.5	Penggunaan Lahan Eksiting –Lahan Belum Terbangun di Kota Banda Aceh Tahun 2015	II - 7
Tabel 2.6	Rencana Pusat – Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh	II - 10
Tabel 2.7	Indikator kependudukan Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016	II - 17
Tabel 2.8	Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015 Kota Banda Aceh	II - 18
Tabel 2.9	Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 Kota Banda Aceh	II - 19
Tabel2.10	Perkembangan Konstribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016 Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) Kota Banda Aceh	II - 19
Tabel 2.11	Laju Pertumbuhan Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2012 sd 2016 Kota Banda Aceh	II - 20
Tabel 2.12	Nilai Inflasi rata-rata Tahun 2012 s.d 2016	II - 21
Tabel 2.13	PDRB perkapita Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan	II - 22
Tabel 2.14	Indeks Gini Kota Banda Aceh 2012-2016	II - 23
Tabel 2.15	Penduduk Miskin Kota Banda Aceh 2012-2016	II - 26
Tabel 2.16	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2012-2016	II - 26
Tabel 2.17	Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 30
Tabel 2.18	Jenis Pelatihan yang dilakukan Disnaker Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016	II - 32
Tabel 2.19	Jumlah Pencari Kerja Tahun 2012-2016	II - 32
Tabel 2.20	Capaian Kebudayaan Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 34
Tabel 2.21	Perkembangan Olahraga Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 34
Tabel 2.22	Tabel Jumlah Siswa Menengah yang Mampu Baca Al-Quran	II - 36
Tabel 2.23	Tabel Jumlah siswa yang Mampu Baca Tulis Arab Jawi	II - 36
Tabel 2.24	Tabel frekuensi Syiar dan dakwah di Kota Banda Aceh	II - 36
Tabel 2.25	Tabel Jumlah masjid yang memenuhi standar kebersihan, Ketertiban dan Asessibel	II - 36
Tabel 2.26	Data 7 Cabang yang diperlombakan Dalam MTQ (data series)	II - 37
Tabel 2.27	Tabel penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Baitul Mal Kota Banda Aceh	II - 39
Tabel 2.28	Tabel Jumlah Muzakki	II - 39
Tabel 2.29	Tabel Data Mustahiq	II - 39
Tabel 2.30	Tabel Data Penerimaan Zakat Per Tahun	II - 39
Tabel 2.31	Jumlah Rumah dhuafa yang telah dibangun	II - 40
Tabel 2.32	Jumlah Penerima Beasiswa	II - 40
Tabel 2.33	Sertifikasi Tanah Wakaf	II - 40
Tabel 2.34	Data Tapem	II - 41
Tabel 2.35	Tabel Keputusan Keulamaan	II - 42
Tabel 2.36	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 44
Tabel 2.37	Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 49
Tabel 2.38	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 47
Tabel 2.39	Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Banda Aceh Tahun 2016	II - 47
Tabel 2.40	Perkembangan Angka Melanjutkan Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2016	II - 47
Tabel 2.41	Tabel Jumlah Standar Nasional Pendidikan di Kota Banda Aceh	II - 49
Tabel 2.42	Perkembangan Guru Memenuhi Kualifikasi S-I/D-IV Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 50
Tabel 2.43	Tabel Angka Kelangsungan Hidup Bayi	II - 51

Tabel 2.44	Perkembangan Rasio Pelayanan Posyandu Per-Satuan Balita di Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 52
Tabel 2.45	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2016	II - 52
Tabel 2.46	Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per-Satuan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 52
Tabel 2.47	Perkembangan Rasio Dokter Per-Satuan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 53
Tabel 2.48	Data Sebaran Kasus DBD Tahun 2012-2016	II - 56
Tabel 2.49	Tabel Jumlah Kasus Baru HIV	II - 57
Tabel 2.50	Tabel Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2012-2016	II - 58
Tabel 2.51	Data Perbandingan Panjang Ruas Jalan Berdasarkan Status (Jalan Nasional, Provinsi dan Kota)	II - 58
Tabel 2.52	Data Status Kondisi Jalan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2012-2016	II - 58
Tabel 2.53	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 60
Tabel 2.54	Data Kondisi Drainase Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016	II - 60
Tabel 2.55	Persentase Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase	II - 62
Tabel 2.56	Tabel Lokasi Tempat Pemakaman Umum di Kota Banda Aceh dibawah Pengelolaan DLHK3	II - 65
Tabel 2.57	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 65
Tabel 2.58	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 66
Tabel 2.59	Tabel Jumlah ruang Publik yang tersedia	II - 66
Tabel 2.60	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 67
Tabel 2.61	Tabel Rumah Layak Huni Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016	II - 67
Tabel 2.62	Persentase Luas Pemukiman Tertata	II - 67
Tabel 2.63	Luas Kawasan Kumuh Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 68
Tabel 2.64	Tabel Cakupan Patroli Personil Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh tahun 2013-2016	II - 68
Tabel 2.65	Tabel Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	II - 69
Tabel 2.66	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Banda Aceh	II - 69
Tabel 2.67	Tingkat Waktu Tanggap Darurat (Response Time) Layanan	II - 70
Tabel 2.68	Jumlah Kasus Kebakaran Tahun 2012 – 2016	II - 70
Tabel 2.69	Tabel Persentase Penegakan Perda Tahun 2012-2016 Kabupaten Kota	II - 70
Tabel 2.70	Daftar Penyandang Masalah Sosial di Kota Banda Aceh	II - 71
Tabel 2.71	Jangkauan PKH Dan Jumlah Bantuan Tahun 2013-2016	II - 71
Tabel 2.72	Tabel Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	II - 72
Tabel 2.73	Tabel Jumlah Penyelesaian Perselisihan Tahun 2012-2016	II - 73
Tabel 2.74	Tabel Pencari Kerja yang Ditempatkan	II - 73
Tabel 2.75	Tabel tingkat Pendidikan di Kota Banda Aceh	II - 74
Tabel 2.76	Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016	II - 74
Tabel 2.77	Tabel Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	II - 75
Tabel 2.78	Tabel indikator KLH yang dicapai tahun 2012-2016	II - 75
Tabel 2.79	Tabel Mitra P2TP2A	II - 75
Tabel 2.80	Tabel Ketersediaan Pangan Utama	II - 77
Tabel 2.81	Tabel Realisasi Persentase Cakupan Pelayanan Sampah Periode 2012-2016	II - 77
Tabel 2.82	Data Sumber Pencemaran Air Tahun 2016	II - 78
Tabel 2.83	Tingkat Pencemaran Air Sungai Krueng Aceh Tahun 2016	II - 78
Tabel 2.84	Tingkat Pencemaran Air Sungai Krueng Daroy Tahun 2016	II - 79
Tabel 2.85	Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	II - 79
Tabel 2.86	Tabel Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan Penduduk	II - 79
Tabel 2.87	Tabel Volume Tinja dibuang ke IPLT	II - 81
Tabel 2.88	Tabel Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	II - 81
Tabel 2.89	Tabel Pemeliharaan dan Penanganan RTH	II - 82

Tabel 2.90	Tabel Pencemaran Tingkat Kebisingan di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016	II - 83
Tabel 2.91	Tabel Jenis dan Sumber Pencemaran Udara	II - 84
Tabel 2.92	Total Penghargaan Adipura di Kota Banda Aceh	II - 85
Tabel 2.93	Persentase Penerangan Jalan Umum di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2017	II - 85
Tabel 2.94	Rasio Kepemilikan KTP di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016	II - 85
Tabel 2.95	Tabel Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016	II - 86
Tabel 2.96	Tabel Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016	II - 86
Tabel 2.97	Tabel Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik	II - 87
Tabel 2.98	Tabel Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Mukim yang Baik	II - 88
Tabel 2.99	Tabel Kelompok Binaan LPM Tahun 2012-2016 Kota Banda Aceh	II - 88
Tabel 2.100	Kelompok Binaan PKK Tahun 2012-2016 Kota Banda Aceh	II - 89
Tabel 2.101	PKK Aktif Tahun 2012-2016 Kota Banda Aceh	II - 89
Tabel 2.102	Tabel Jumlah Posyandu dalam Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016	II - 89
Tabel 2.103	Strata Posyandu Tahun 2012 – 2016 di Kota Banda Aceh	II - 90
Tabel 2.104	Data Partisipasi Masyarakat dalam Pilchiksung di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016	II - 90
Tabel 2.105	Data Mukim dalam Kota	II - 91
Tabel 2.106	Tabel Fasilitasi Dana Pembangunan Untuk Gampong di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016	II - 91
Tabel 2.107	Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang Baik Tahun 2012-2016	II - 91
Tabel 2.108	Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Melalui Program PUEM di Kota Banda Aceh Tahun 2012 2016	II - 92
Tabel 2.109	Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang baik Tahun 2012-2016	II - 92
Tabel 2.110	Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong yang baik Tahun 2012-2016	II - 92
Tabel 2.111	Tabel Jumlah Anak Per Keluarga	II - 93
Tabel 2.112	Tabel Ratio Akseptor KB	II - 93
Tabel 2.113	Tabel Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016	II - 93
Tabel 2.114	Tabel jumlah Penumpang dan Angkutan Umum Darat Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016	II - 93
Tabel 2.115	Tabel Rasio Izin Trayek Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 94
Tabel 2.116	Tabel Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 94
Tabel 2.117	Tabel Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 95
Tabel 2.118	Tabel Persentase Angkutan Darat tahun 2012-2016	II - 95
Tabel 2.119	Tabel Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 95
Tabel 2.120	Persentase Pemasangan Rambu Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 96
Tabel 2.121	Kondisi Perparkiran Di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016	II - 96
Tabel 2.122	Perparkiran Kendaraan Bermotor Di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016	II - 97
Tabel 2.123	Tabel terminal angkutan penumpang/barang di Kota Banda Aceh yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek kota Banda Aceh 2012-2016	II - 97
Tabel 2.124	Tabel angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota Banda Aceh 2012-2016	II - 97
Tabel 2.125	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Tingkat Kecamatan	II - 98
Tabel 2.126	Persentase Koperasi Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 98
Tabel 2.127	Perkembangan jumlah BPR/ LKM di Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 99
Tabel 2.128	Tabel realisasi investasi dari Izin Prinsip dan SIUP (Menengah dan Besar) dari Tahun 2012 s.d 2016	II - 99
Tabel 2.129	Tabel Jumlah Nilai Investasi Tahun 2012-2017	II - 99
Tabel 2.130	Tabel Nilai Realisasi PMDN di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2015	II -100
Tabel 2.131	Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II -101
Tabel 2.132	Tabel Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Tahun 2012-2016 Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh	II -102

Tabel 2.133	Tabel Luas Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Kota Banda Aceh	II - 103
Tabel 2.134	Tabel Rumus Cakupan Bina Kelompok Pertanian	II - 103
Tabel 2.135	Tabel Data Potensi Ternak Tahun 2012-2017	II -104
Tabel 2.136	Tabel Penggunaan Energi Listrik	II - 105
Tabel 2.137	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	II - 105
Tabel 2.138	Tabel Data Perkembangan Industri Kecil Kota Banda Aceh	II - 105
Tabel 2.139	Tabel Perkembangan Industri Kecil dan Menengah	II - 105
Tabel 2.140	Nama Pasar di Kota Banda Aceh	II - 107
Tabel 2.141	Tabel Rumus Cakupan Binaan Kelompok Nelayan	II - 108
Tabel 2.142	Tabel Rumus Produksi Ikan	II - 108
Tabel 2.143	Tabel Opini BPK Tahun 2012 – 2016	II - 109
Tabel 2.144	Tabel Persentase SILPA Kota Banda Aceh	II - 109
Tabel 2.145	Tabel Persentase SILPA Terhadap APBD	II - 109
Tabel 2.146	Tabel Persentase Belanja Pendidikan	II -110
Tabel 2.147	Tabel Persentase Belanja Kesehatan	II - 110
Tabel 2.148	Tabel Persentase Belanja Langsung	II - 110
Tabel 2.149	Tabel Persentase Belanja Tidak Langsung	II - 110
Tabel 2.150	Tabel Persentase Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa	II - 110
Tabel 2.151	Tabel Penetapan APBD	II - 111
Tabel 2.152	Jumlah Temuan BPK, Inspektorat Aceh dan Inspektorat Kota Banda Aceh Serta Penyelesaian TLHP Tahun 2012 – 2016	II - 111
Tabel 2.153	Tabel hasil Evaluasi SAKIP	II -112
Tabel 2.154	Tabel SKPD yang mendapat predikat WBK	II - 112
Tabel 2.155	Level Kapabilitas APIP	II - 113
Tabel 2.156	Jumlah Pegawai dan Tingkat Kompetensi Aparatur Pengawasan dari Tahun 2012 – 2016	II - 113
Tabel 2.157	Tabel Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2012-2016 Kabupaten/ Kota	II - 113
Tabel 2.158	Rasio Jumlah Linmas Kota Banda Aceh Per 10.000 Penduduk Tahun 2012 – 2016	II -114
Tabel 2.159	Rasio Jumlah Siskamling Per Kecamatan Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten/ Kota Banda Aceh	II - 114
Tabel 2.160	Jumlah LSM Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 115
Tabel 2.161	Jumlah Ormas, OKP Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 115
Tabel 2.162	Realisasi Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat Tahun 2012-2017	II - 115
Tabel 2.163	Target Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat Tahun 2018-2022	II - 116
Tabel 2.164	Realisasi Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Tahun 2012-2017	II - 116
Tabel 2.165	Target Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Tahun 2018-2022	II - 116
Tabel 2.166	Rasio panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Banda Aceh Tahun 2012–2016	II -117
Tabel 2.167	Tabel Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Tahun 2012-2016	II -118
Tabel 2.168	Jumlah orang/ barang melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Per Tahun 2012-2016	II - 118
Tabel 2.169	Jumlah Perusahaan Asuransi	II - 118
Tabel 2.170	Tabel Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran	II - 119
Tabel 2.171	kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kota Banda Aceh	II - 119
Tabel 2.172	Proporsi Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih dan Jumlah Rumah Tangga Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 119
Tabel 2.173	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	II - 120
Tabel 2.174	Persentase Jumlah Rumah tangga yang menggunakan listrik	II - 120
Tabel 2.175	Tabel Angka Kriminalitas di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2016	II - 121
Tabel 2.176	Kasus Narkoba di Kota Banda Aceh	II - 121
Tabel 2.177	Tabel Jumlah Demonstrasi	II - 121

Tabel 2.178	Lama Proses Perizinan Kota Banda Aceh	II -122
Tabel 2.179	Jumlah Perda yang mendukung Iklim Investasi	II - 122
Tabel 2.180	Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang mendukung Iklim Investasi	II - 122
Tabel 2.181	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan serta Jumlah Objek Pemeriksaan dan Ratio Pembinaan/Obrik dari Tahun 2012 – 2016	II - 123
Tabel 2.182	Tabel Tingkat Ketergantungan	II - 123
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	III - 5
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Nerca Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016	III - 9
Tabel 3.3	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Banda Aceh	III - 13
Tabel 3.4	Defisit Riil Anggaran Kota Banda Aceh	III - 14
Tabel 3.5	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Banda Aceh	III - 14
Tabel 3.6	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Banda Aceh	III - 15
Tabel 3.7	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 s/d 2022 Kota Banda Aceh	III - 18
Tabel 3.8	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh	III - 21
Tabel 3.9	Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Banda Aceh	III - 23
Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran	V - 15
Tabel 5.2	Tabel Keselarasan Misi RPJM dan Misi RPJP	V - 16
Tabel 5.3	Tabel Keselarasan Misi RPJM dan Misi RPJMA	V - 16
Tabel 5.4	Tabel Keselarasan Misi RPJM dan Misi RTRW	V - 17
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan 2017-2022	VI - 4
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022	VI - 6
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif	VI - 8
Tabel 7.1	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017-2022 Kota Banda Aceh	VII - 2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017-2022	VII - 4
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama	VIII - 2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	VIII - 5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan RPJMD Kota Banda Aceh	I - 3
Gambar 1.2	Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah	I - 5
Gambar 2.1	Letak geografis Kota Banda Aceh	II - 1
Gambar 2.2	Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh	II - 2
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lereng Banda Aceh	II - 3
Gambar 2.4	Kondisi Geologi Kota Banda Aceh	II - 4
Gambar 2.5	Peta Hidrologi Kota Banda Aceh	II - 5
Gambar 2.6	Peta Penggunaan Lahan eksisting Kota Banda Aceh Tahun 2015	II - 8
Gambar 2.7	Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh	II - 10
Gambar 2.8	Kawasan Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman	II - 11
Gambar 2.9	Rencana Pengembangan Central Bussiness District (CBD) Keudah	II - 12
Gambar 2.10	Konsep Pengembangan Jembatan Keudah-Peunayong	II - 13
Gambar 2.11	Peta Bahaya Angin Puting Beliung Kota Banda Aceh	II - 14
Gambar 2.12	Peta Bahaya Banjir Kota Banda Aceh	II - 14
Gambar 2.13	Peta Bahaya DBD Kota Banda Aceh	II - 15
Gambar 2.14	Peta Bahaya Gempa Kota Banda Aceh	II - 15
Gambar 2.15	Peta Bahaya Tsunami Kota Banda Aceh	II - 16
Gambar 2.16	Grafik Jumlah Pertumbuhan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2004-2005	II - 16
Gambar 2.17	Piramida penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2015	II - 17
Gambar 2.18	Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016	II - 18
Gambar 2.19	Grafik Laju Inflasi tahun 2012-2016	II - 22
Gambar 2.20	PDB Perkapita Banda Aceh Tahun 2012-2016	II - 22
Gambar 2.21	Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2012 – 2016	II - 27
Gambar 2.22	Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2012 – 2016	II - 28
Gambar 2.23	Angka Harapan Hidup di Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 29
Gambar 2.24	Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2012 – 2015	II - 31
Gambar 2.25	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2012 – 2016	II - 31
Gambar 2.26	Perbandingan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan oleh Pengangguran di Kota Banda Aceh dan Nasional tahun 2012 -2015	II - 33
Gambar 2.27	Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Qanun Syari'at Islam di Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 36
Gambar 2.28	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 45
Gambar 2.29	Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 46
Gambar 2.30	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 48
Gambar 2.31	Rasio Guru/Murid Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 49
Gambar 2.32	Perkembangan AKB Banda Aceh, Aceh, dan Nasional Tahun 2012 – 2015	II - 50
Gambar 2.33	Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk Tahun 2012-2016	II - 53
Gambar 2.34	Cakupan Desa/ Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Tahun 2012-2016 di Kota Banda Aceh	II - 54
Gambar 2.35	Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan	II - 55
Gambar 2.36	Data Kasus Kematian Akihat DBD tahun 2012-2016	II - 57
Gambar 2.37	Grafik Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun Anggaran 2012-2016	II - 58
Gambar 2.38	Grafik Jumlah Rumah Tangga yang Bersanitasi Tahun 2012 - 2016	II - 60
Gambar 2.39	Peta Pembagian Zona Drainase Kota Banda Aceh	II - 61
Gambar 2.40	Grafik Perkembangan Kondisi Main Drain Kota Banda Aceh 2012 – 2016	II - 62
Gambar 2.41	Peta Rencana Zona Wilayah Pelayanan Teknis PDAM Tirta Daroy	II - 63
Gambar 2.42	Peta Rencana Jaringan Air Bersih Kota Banda Aceh Tahun 2029	II - 64
Gambar 2.43	Grafik Jumlah Bangunan ber IMB Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 66
Gambar 2.44	Gambar Penyelesaian Kasus	II - 75
Gambar 2.45	Keadaan sampah di Kota Banda Aceh	II - 78

Gambar 2.46	Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Penanaman Pohon Tahun 2015-2016	II - 82
Gambar 2.47	Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Lokasi Taman yang Dipelihara Pada Tahun 2015-2016	II - 83
Gambar 2.48	Keadaan Adipura di Kota Banda Aceh	II - 84
Gambar 2.49	Persentase Koperasi Aktif di Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016	II - 98
Gambar 2.50	Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang Bekerja) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional tahun 2012 – 2015	II - 100
Gambar 2.51	Grafik Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara	II - 102
Gambar 2.52	Grafik Jumlah IKM yang Mampu Melakukan Pemasaran Komoditi Tahun 2012-2016	II - 106
Gambar 2.53	Jumlah Produk yang menunjang OVOP di Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017	II -107
Gambar 2.54	Pengeluaran Perkapita per bulan di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional pada Tahun 2011-2015	II - 117
Gambar 2.55	Grafik Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2012 – 2016	II -120
Gambar 3.1	Kerangka Hubungan Antara Kebijakan Keuangan Daerah/APBD dengan RKPD dan Visi, Misi, Strategi RPJMD	III - 1
Gambar 3.2	Kerangka Hubungan Antara Strategi dan Komponen APBD	III - 2
Gambar 5.1	Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah	V - 3
Gambar 5.2	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah	V - 3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banda Aceh sebagai ibukota Propinsi Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berkewajiban untuk mendorong filosofi pembangunannya sebagaimana tujuan pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan serta memahami peran dan posisi daerahnya. RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022 merupakan media untuk mengimplementasikan kewajiban tersebut serta sarana perwujudan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat. RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun Kota Banda Aceh.

Walikota Banda Aceh dan Wakil Walikota Kota Banda Aceh masa bakti periode Tahun 2017 - 2022 telah dilantik pada tanggal 7 Juli 2017. Maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.11 – 2923 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Walikota Banda Aceh dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.11 – 2924 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Wakil Walikota Banda Aceh, maka melekatlah kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022 sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan, maka RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian,Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2017 - 2022 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu, RKPD sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022.

RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu RPJMD yang disusun ini juga telah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional. Penyusunan

RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 dengan tahunpertama perencanaan 2018, merupakan Tahap III (ketiga) RPJPD Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2027 dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya yang akhirnya disusun berdasarkan beberapa pendekataan berikut:

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD;
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
4. Pendekatan Atas-Bawah *(top-down*) dan Bawah-Atas *(bottom-up),* pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan. Pendekatan-pendekatan tersebut secara utuh diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan telah dilaksanakan secara konsisten. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas telah dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sedangkan pendekatan partisipatif dilakukan melalui forum konsultasi publik.

Terakhir, Pendekatan Politis dilakukan melalui pembahasan di DPRK Kota Banda Aceh yang mengacu pada ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu: Bupati/Walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasioleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati/ Walikota dan Wakil Bupati Walikota dilantik.

Proses penting lainnya dalam penyusunan RPJMD Kota Banda Aceh ini adalah pemahaman awal posisi Kota Banda Aceh yang unik atau berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Keunikan ini muncul dari faktor implementasi syariat Islam, karakteristik geografis serta sejarahnya. Penyusunan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

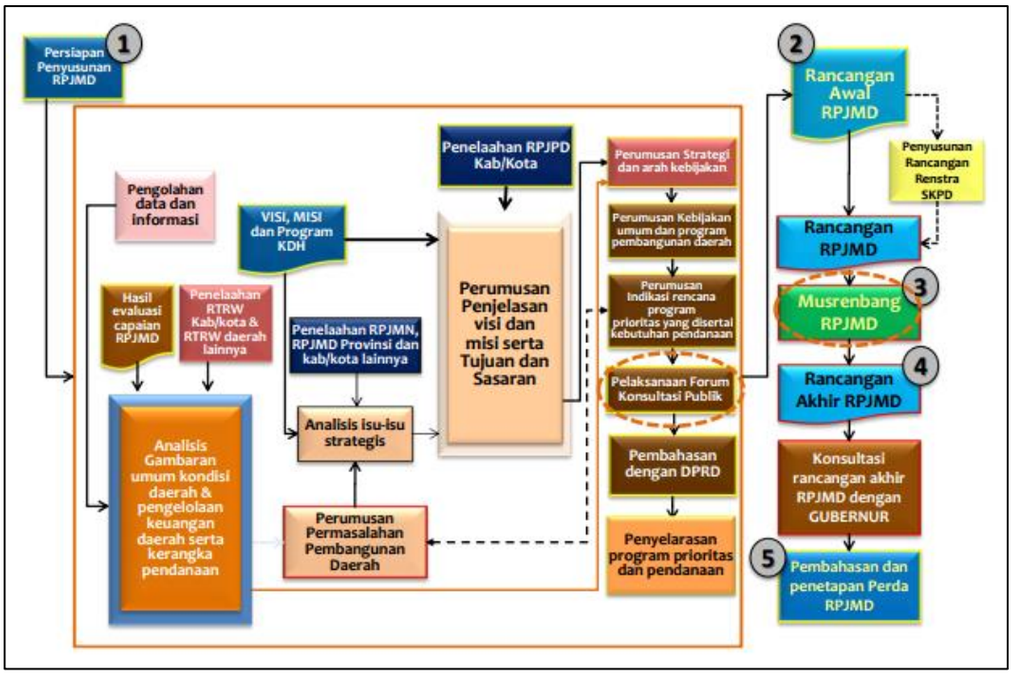

Gambar 1.1
Proses Penyusunan RPJMD Kota Banda Aceh

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukan bahwa RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu:

1. RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD);
2. RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 merupakan alat atau instrument pengendalian bagi satuan pengawas internal dan Bappeda;
3. RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama 5 (lima) tahun;
4. RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selaras dengan arah kebijakan provinsi;
5. RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);
12. Qanun RTRW Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang RTRW Kota Banda Aceh;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai sebuah dokumen perencanaan dengan jangka menengah, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Aceh. Penyusunan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022 memperhatikan pada RPJM Nasional, serta RPJMD Provinsi Aceh.

Sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas tanggal 23 Desember 2016 tentang Penyelarasan RPJMN dengan RPJMD, maka perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Disamping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain yang berdekatan secara geografis serta kerjasama regional yang dilakukan oleh daerah.

Telaahan sebagaimana tersebut di atas dilakukan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan yang bersinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

RPJMN 2015 - 2019 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: **TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini :

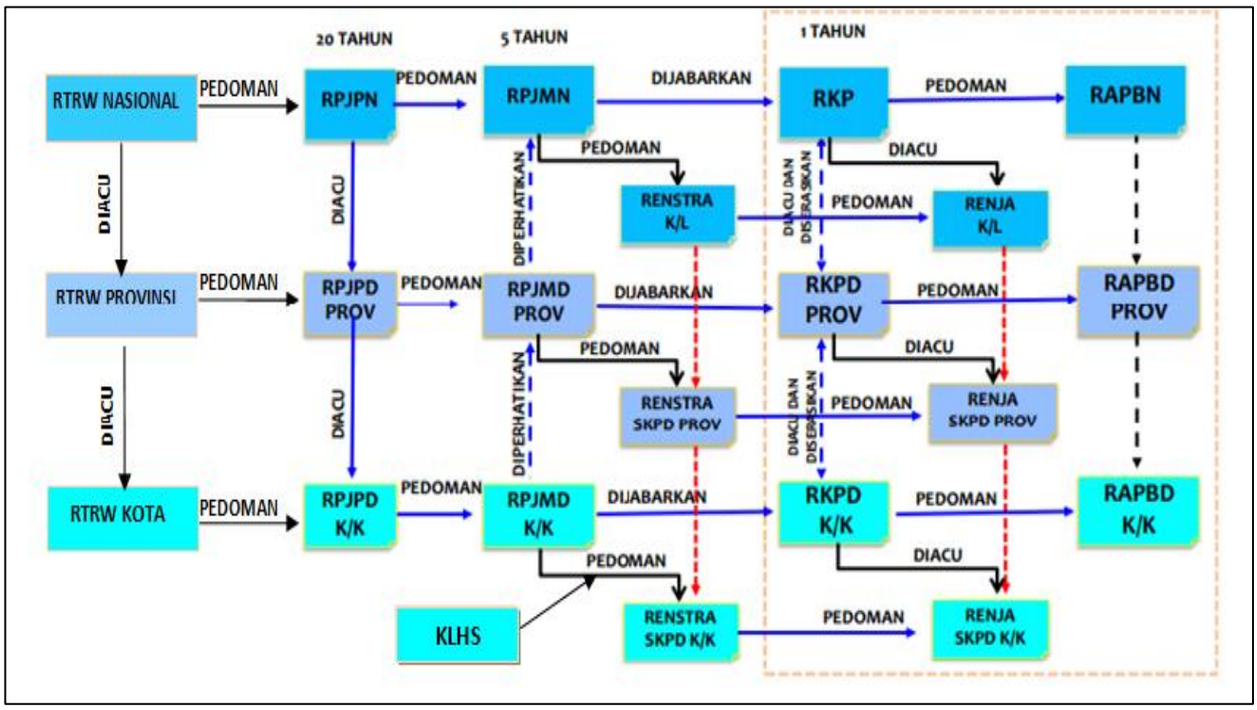

Gambar 1.2
Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah

Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan RPJMD Kota Banda Aceh berpedoman pada RTRW Kota Banda Aceh yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kota.
   Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 - 2029, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.
2) Memperhatikan RTRW daerah regional, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

3) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan pertimbangan aspek kelanjutan lingkungan ekonomi, sosial berdasarkan kebijakan rencana dan program RPJM Kota Banda Aceh.

RPJPD Kota Banda Aceh merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD 2007 - 2027 juga merupakan pedoman yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMD dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Banda Aceh, yang kemudian akan dijabarkan secara tahunan kedalam dokumen RKPK. Renstra juga menjadi pedoman dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD yang mengacu pada RKPK. Pada akhirnya RKPK menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBK.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Adapun maksud disusunnya RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 adalah untuk :

1. Memberikan arah pembangunan jangka menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPK Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. Menjadi landasan penyusunan Renstra SKPD;
4. Sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Banda Aceh sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan Walikota terpilih masa bakti 2017 - 2022, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.4.2. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya RPJM Kota Banda Aceh 2017 - 2022 adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dan merumuskan dalam Renstra SKPD periode 2017 - 2022;
2. Mewujudkankonsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Menetapkan berbagai program prioritas, dan arah kebijakan tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 - 2022.
4. Menetapkan indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja Kepala Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh periode 2017 - 2022.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, terdiri dari 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika tulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menguraikan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran keuangan daerah menjelaskan tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJM karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Isu Strategis berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan, serta isu-isu yang berkembang secara Nasional dan International.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB IX PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis Kota Banda Aceh memiliki posisi sangat strategis yang berhadapan dengan negara-negara di Selatan Benua Asia dan merupakan pintu gerbang Republik Indonesia di bagian Barat.

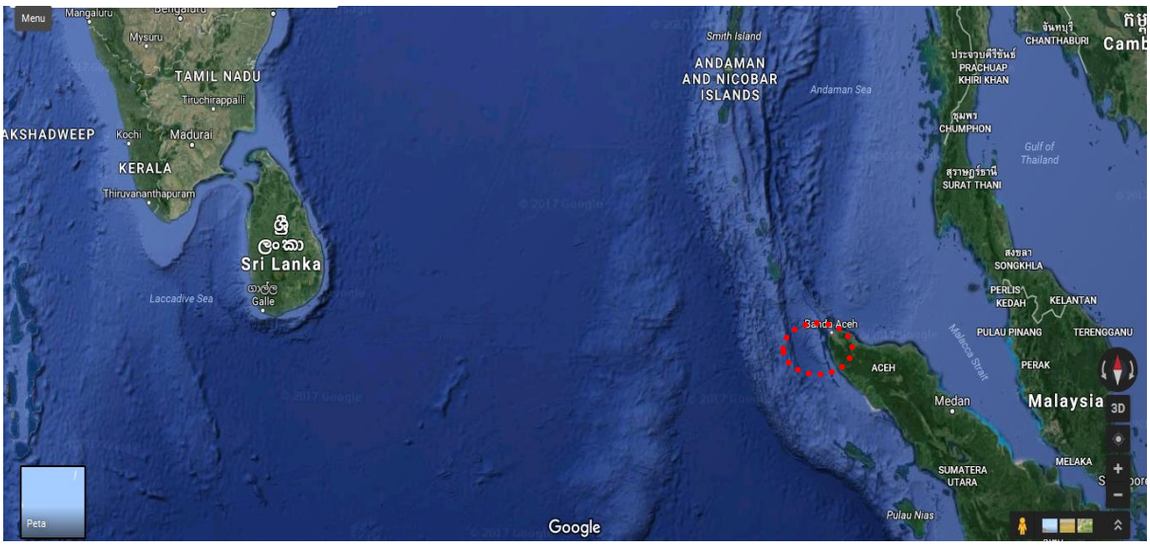

Sumber : www.google.com/maps

Gambar 2.1
Letak geografis Kota Banda Aceh

Letak geografis Kota Banda Aceh berada antara 05°30' – 05°35' LU dan 95°30' – 99°16' BT, yang terdiri dari 9 kecamatan, 90 Gampong. Berdasarkan hasil digitasi GIS Citra Satelit pada Tahun 2015, luas wilayah Kota Banda Aceh adalah 59,002 km², dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Luas	
		(Km²)	Persentase
1	Kec. Meuraxa	8,459	14,34%
2	Kec. Baiturrahman	4,142	7,02%
3	Kec. Kuta Alam	9,587	16,25%
4	Kec. Syiah Kuala	13,591	23,03%
5	Kec. Ulee Kareng	5,182	8,78%
6	Kec. Banda Raya	4,949	8,39%
7	Kec. Kuta Raja	3,889	6,59%
8	Kec. Lueng Bata	4,445	7,53%
9	Kec. Jaya Baru	4,759	8,07%
JUMLAH		**59,002**	**100,00%**

Sumber : Hasil Digitasi GIS, Citra Satelit Tahun 2015.

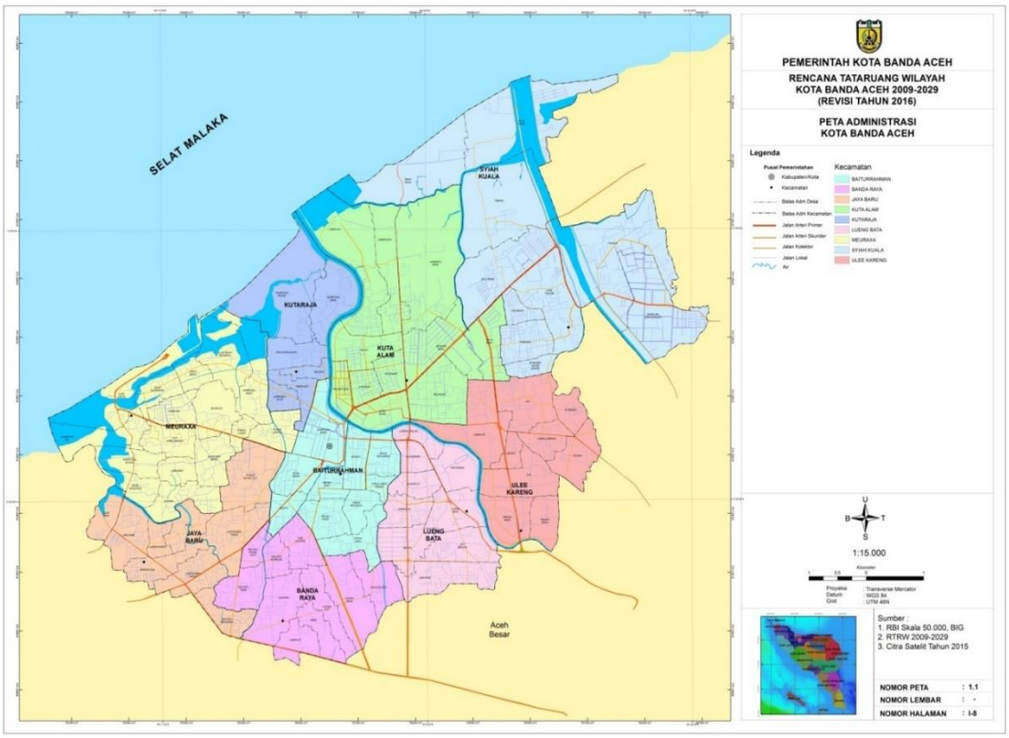

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 2.2

Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh

Adapun batas-batas administrasi wilayah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Selat Malaka
Sebelah Timur	:	Kecamatan Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar
Sebelah Selatan	:	Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar
Sebelah Barat	:	Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar

2.1.1.2 Topografi

2.1.1.2.1 Kemiringan Lahan

Kondisi topografi (ketinggian) Kota Banda Aceh berkisar antara -0,45 m sampai dengan +1,00 m di atas permukaan laut (dpl), dengan rata-rata ketinggian 0,80 m dpl. Bentuk permukaan lahannya (fisiografi) relatif datar dengan kemiringan (lereng) antara 2 - 8%. Bentuk permukaan ini menandakan bahwa tingkat erosi relatif rendah, namun sangat rentan terhadap genangan khususnya pada saat terjadinya pasang dan gelombang air laut terutama pada wilayah bagian Utara atau pesisir pantai.

2.1.1.2.2 Ketinggian Tempat

Dalam lingkup makro, Kota Banda Aceh dan sekitarnya secara topografi merupakan dataran banjir Krueng Aceh dan 70% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 5 meter dpl. Ke arah hulu dataran ini menyempit dan bergelombang dengan ketinggian hingga 50 meter dpl. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah Barat dan Timur dan ketinggian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke laut.

Kondisi topografi dan fisiografi lahan sangat berpengaruh terhadap sistem drainase. Kondisi drainase di Kota Banda Aceh cukup bervariasi, yaitu jarang tergenang seperti pada wilayah Timur dan Selatan kota, kadang-kadang tergenang dan tergenang terus-menerus seperti pada kawasan rawa-rawa/genangan air asin, tambak dan atau pada lahan dengan ketinggian di bawah permukaan laut baik pada saat pasang maupun surut air laut. Lebih jelasnya gambaran kondisi topografi kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Banda Aceh Sekitarnya berikut ini.

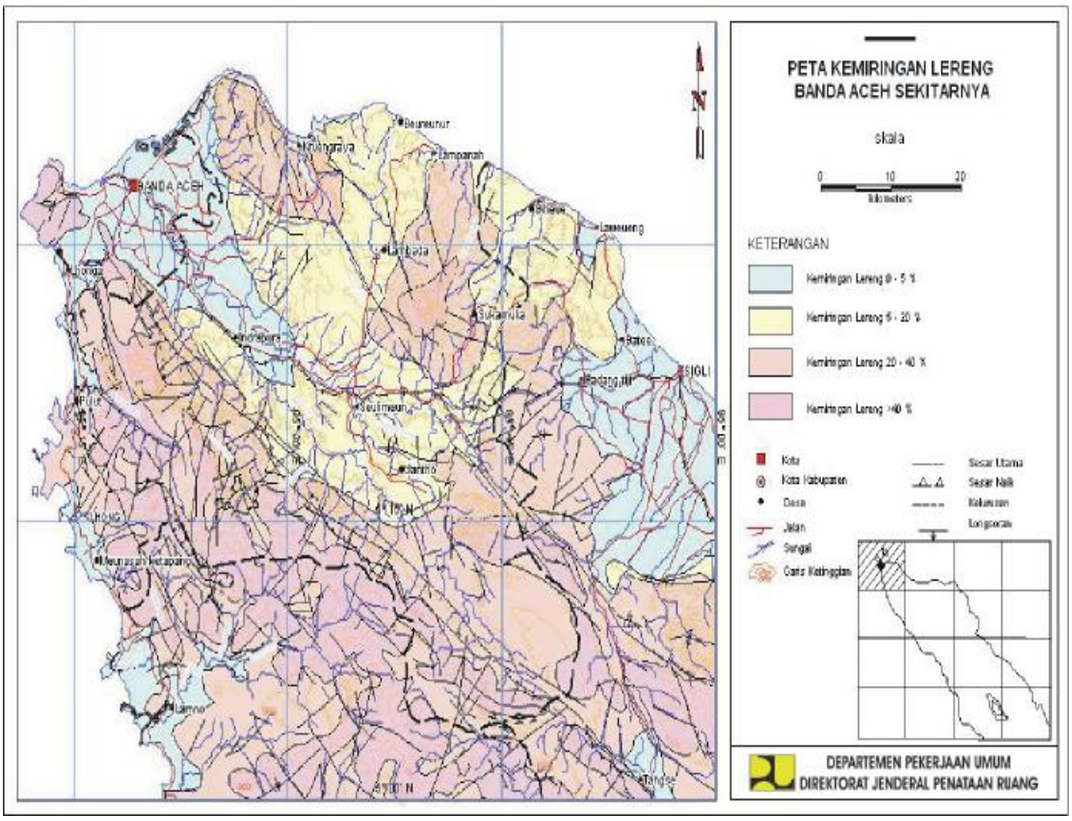

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 2.3

Peta Kemiringan Lereng Banda Aceh

2.1.1.3 Geomorfologi

Secara umum geomorfologi wilayah Kota Banda Aceh terletak di atas formasi batuan vulkanis tertier (sekitar Gunung Seulawah dan Pulau Breueh), formasi batuan sedimen, formasi endapan batu (di sepanjang Kr. Aceh), formasi batuan kapur (di bagian timur), formasi batuan vulkanis tua terlipat (dibagian selatan), formasi batuan sedimen terlipat dan formasi batuan dalam. Geomorfologi daerah pesisir Kota Banda Aceh secara garis besar dibagi menjadi pedataran yang terdapat di pesisir pantai utara dari Kecamatan Kuta Alam hingga sebagian Kecamatan Kuta Raja, dan pesisir pantai yang terletak di wilayah barat atau sebagian Kecamatan Meuraxa. Daerah pedataran di pesisir Kota Banda Aceh secara umum terbentuk dari endapan sistim marin yang merupakan satuan unit yang berasal dari bahan endapan (aluvial) marin yang terdiri dari pasir, lumpur dan kerikil. Kelompok ini dijumpai di dataran pantai yang memanjang sejajar dengan garis pantai dan berupa jalur-jalur beting pasir resen dan subresen. Beting pasir resen berada paling dekat dengan laut dan selalu mendapat tambahan baru yang berupa endapan pasir, sedangkan beting pasir subresen dibentuk oleh bahan-bahan yang berupa endapan pasir tua, endapan sungai, dan bahan-bahan aluvial/ koluvial dari daerah sekitarnya.

2.1.1.4 Geologi

Secara geologis, Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif yang memanjang dari Banda Aceh di utara hingga Lampung di selatan, yang dikenal sebagai Sesar Semangko (*Semangko Fault*). Oleh karenanya daerah yang terlintasi patahan ini rentan terhadap gempa dan longsor. Kota Banda Aceh terletak diantara dua patahan (sebelah timur – utara dan sebelah barat – selatan kota). Berada pada pertemuan Plate Euroasia dan Australia berjarak $\pm$ 130 km dari garis pantai barat sehingga daerah ini rawan terhadap Tsunami. Litologi Kota Banda Aceh merupakan susunan batuan yang kompleks, terdiri dari batuan sedimen, meta sedimen, batu gamping, batuan hasil letusan gunung api, endapan alluvium, dan intrusi batuan beku, berumur holosen hingga Pra-Tersier, dan secara umum dibagi atas 4 (empat) kelompok, yaitu :

- Alluvium
- Batuan Kuarter (sedimen dan volkanik)
- Batuan Tersier (sedimen dan volkanik)
- Batuan metasedimen, malihan, dan terobosan Pra-Tersier

Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif Sesar Semangko yang memanjang dari Banda Aceh hingga Lampung. Patahan ini bergeser sekitar 11 cm/tahun dan merupakan daerah rawan gempa dan longsor. Pada Gambar. 2.3. Kondisi Geologi Kota Banda Aceh berikut ini, menunjukkan ruas-ruas patahan Semangko di Pulau Sumatera dan juga kedudukan-nya terhadap Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh diapit oleh dua patahan di Barat dan Timur kota, yaitu patahan Darul Imarah dan Darussalam, dan kedua patahan yang merupakan sesar aktif tersebut diperkirakan bertemu pada pegunungan di Tenggara Kota. Sehingga sesungguhnya Banda Aceh adalah suatu daratan hasil ambalasan sejak Pilosen, membentuk suatu Graben, sehingga dataran Banda Aceh ini merupakan batuan sedimen yang berpengaruh kuat apabila terjadi gempa di sekitarnya.

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 2.4

Kondisi Geologi Kota Banda Aceh

2.1.1.5 Hidrologi

Terdapat 7 (tujuh) sungai yang melalui Kota Banda Aceh yang berfungsi sebagai daerah aliran sungai dan sumber air baku, kegiatan perikanan, dan sebagainya. Wilayah Kota Banda Aceh memiliki air tanah yang bersifat asin, payau dan tawar. Daerah dengan air tanah asin terdapat pada bagian utara dan timur kota sampai ke tengah kota. Air payau berada di bagian tengah kota membujur dari timur ke barat. Sedangkan wilayah yang memiliki air tanah tawar berada di bagian selatan kota membentang dari Kecamatan Baiturrahman sampai Kecamatan Jaya Baru, yang juga mencakup Kecamatan Lueng Bata, Ulee Kareng, Banda Raya, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 2.2. Nama Sungai dan luas daerah alirannya di Kota Banda Aceh berikut ini :

Tabel 2.2

Nama Sungai dan Luas Daerah Alirannya di Kota Banda Aceh

No	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Krueng Aceh	723,60
2	Krueng Daroy	3,60
3	Krueng Doy	2,00
4	Krueng Neng	4,10
5	Krueng Lueng Paga	26,33
6	Krueng Tanjong	2,25
7	Krueng Titi Panjang	1,60
8	Krueng Kon Keumeh	3,27
9	Krueng Geunasen	1,25

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Untuk lebih jelasnya mengenai Peta Hidrologi di Kota Banda Aceh dapat di lihat pada Gambar. 2.5 Peta Hidrologi Kota Banda Aceh berikut ini.

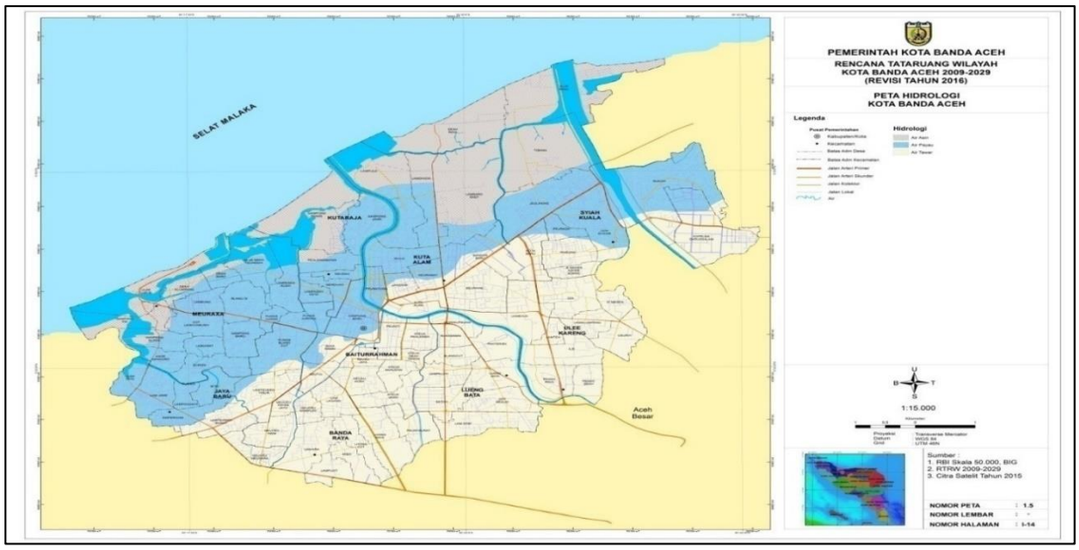

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 2.5

Peta Hidrologi Kota Banda Aceh

2.1.1.6 Klimatologi

Berdasarkan data klimatologi untuk wilayah Kota Banda Aceh yang diperoleh dari Stasiun Meteorologi Blang Bintang menunjukkan bahwa dari tahun 2012 sampai dengan 2015, suhu udara rata-rata bulanan berkisar antara 27,2^{0}C hingga 27,1^{0}C, atau suhu rata-rata udara 27^{0}C, dan tekanan (minibar) antara 1009,5–1010,7. Curah hujan kota Banda Aceh terbesar pada tahun 2015 terjadi pada bulan April yaitu sebesar 354,9mm dan terkecil terjadi pada bulan Februari sebesar 20,2 mm. Jumlah curah hujan ini selama tahun 2015 yaitu sebesar 1.383,6 mm, dengan rata-rata per bulannya sebesar 115,3 mm/bulan. Sementara itu kelembaban udara rata-rata per bulan dalam satu tahun yaitu 80,2%.

Bulan kering ditandai dengan jumlah curah hujan kurang dari 60 mm, sedangkan bulan basah adalah jumlah curah hujan di atas 100 mm. Menurut Schmidt dan Ferguson, untuk menentukan tipe iklim adalah dengan menghitung angka perbandingan antara rata-rata bulan kering (BK) dengan bulan basah (BB) dikali 100%. Dari hasil perbandingan didapatkan nilai Q sebesar 0,25 berarti tipe iklim pada Kota Banda Aceh termasuk iklim tipe B (iklim basah). Lebih jelasnya mengenai kondisi iklim ini dapat dilihat pada Tabel 2.3 kondisi klimatologi Kota Banda Aceh Tahun 2015.

Tabel 2.3

Kondisi Klimatologi Kota Banda Aceh Tahun 2015

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Suhu (ºC)	Kelembaban (%)
1	Januari	81,6	13	26,5	81,0
2	Februari	20,2	5	26,3	79,0
3	Maret	124,0	8	27,1	80,0
4	April	354,9	18	26,7	84,0
5	Mei	47,9	6	27,8	79,0
6	Juni	43,5	5	28,0	76,0
7	Juli	84,0	19	28,0	75,0
8	Agustus	56,1	10	27,7	77,0
9	September	184,5	16	27,1	79,0
10	Oktober	220,92	16	26,7	85,0
11	November	24,6	22	26,7	85,0
12	Desember	141,4	12	26,8	83,0
Jumlah		**1.383,6**	**150**	**-**	**-**
Rata-rata		**115,3**	**12,5**	**27,1**	**80,2**

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

2.1.2 Penggunaan Lahan

Berdasarkan kondisi saat ini, kecenderungan perkembangan Kota Banda Aceh lebih mengarah pada bagian timur dan bagian selatan kota. Di bagian timur, berada di wilayah Ulee Kareeng dan sekitarnya. Kawasan Ulee Kareng, saat ini telah didominasi oleh aktivitas perdagangan dan jasa dan aktivitas permukiman. Kawasan Ulee Kareeng semakin berkembang akibat adanya pergeseran atau perembetan perkembangan fisik kota dikarenakan kawasan ini tidak ikut terkena dampak bencana tsunami. Ditambah dengan lokasinya yang tidak jauh darikawasan pusat pendidikan yakni Kopelma Darussalam (IAIN, dan Unsyiah) dan Lampoh Keudee (Universitas Abulyama), kemudian menarik aktivitas lain seperti permukiman yang terlihat dari tingginya alih fungi lahan dari ex-persawahan menjadi permukiman – permukiman baru. Sedangkan untuk bagian selatan, perkembangan fisik kota sebagian bahkan telah merembet hingga ke wilayah kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Hal ini dikarenakan secara administratif, wilayah yang mengalami perkembangan berbatasan langsung dengan kabupaten Aceh Besar. Adapun perkembangan dibagian selatan ini meliputi sebagian wilayah kecamatan Baiturrahman (Neusu) dan kecamatan Banda Raya (Lamlagang, Lhong Raya, Lampeuot), dan wilayah Batoh dan Lamdom.

Perkembangan fisik kota dibagian selatan ini salah satunya dilatar belakangi karena bagian selatan ini tidak terkena dampak langsung bencana tsunami 2004 silam. Adapun aktivitas yang berkembang di bagian selatan ini meliputi aktivitas permukiman yang perdagangan dan jasa, permukiman dan olahraga (keberadaan stadion harapan bangsa Lhoong raya sebagai sport center). Penggunaan lahan eksisting di Kota Banda Aceh yang dilakukan analisis berdasarkan Citra Satelit Resolusi Tinggi edisi Februari tahun 2015, secara umum pola penggunaan lahan dikelompokan dengan klasifikasi kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun.

Pemanfaatan kawasan terbangun antara lain kawasan perumahan, perdagangan & jasa, perkantoran, perikanan, pelabuhan, area cagar budaya, lapangan olah raga, ruang terbuka non hijau, peruntukan lainnya (peruntukan militer, peruntukan keamanan dan keselamatan, peruntukan peribadatan, peruntukan kesehatan, peruntukan pendidikan, peruntukan transportasi, peruntukan PLTD, peruntukan pasar, peruntukan museum, peruntukan olah raga, peruntukan tempat pembuangan akhir), dan pemanfaatan area jalan. Bedasarkan digitasi dari Citra Satelit Tahun 2015 yaitu dengan luas wilayah kota seluas 5.900,20 Hektar, bahwa penggunaan lahan kawasan yang sudah terbangun dengan luas area seluas 3.137, 12 Hektar atau 53,17 % dari luas wilayah kota, dominasi pemanfaatan eksisting lahan terbangun yaitu pemanfaatan kawasan perumahan, pemanfaatan peruntukan lainnya serta pemanfaatan area infrastruktur jalan. Penggunaan lahan kawasan terbangun dan lahan Eksiting – Lahan Terbangun dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5

Tabel 2.4

Penggunaan Lahan Eksiting –Lahan Terbangun di Kota Banda Aceh Tahun 2015

No	Penggunaan Lahan	Luas	
		Hzektar	%
1	Perumahan	1866.36	59.49
2	Perdagangan dan Jasa	225.74	7.20
3	Perkantoran	116.84	3.72
4	Kawasan Perikanan	73.67	2.35
5	Kawasan Pelabuhan	10.48	0.33
6	Cagar Budaya	7.18	0.23
7	Lapangan Olah Raga	28.38	0.90
8	Ruang Terbuka Non Hijau	39.15	1.25
9	Peruntukan Lainnya	366.96	11.70
10	Jalan	402.36	12.83
	Total	**3137.12**	**100.00**

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Sedangkan kawasan belum terbangun pemanfaatannya antara lain area Air/ Sungai, RTH (hutan kota dan taman kota, RTH lainnya), Sempadan pantai, Sempadan sungai, Jalur hijau sungai, Jalur hijau jalan, Taman pulau jalan, Kebun masyarakat, Lahan kosong masyarakat, Lahan pemakaman, Sawah, Tambak, Hutan Bakau dan Kawasan wisata. Area yang yang belum terbangun di wilayah

Kota Banda Aceh dengan luasan 2.763, 08 Hektar atau 46,83% dari luas wilayah kota, area yang belum terbangun didominasi oleh area lahan terbuka produktif, area air/ sungai serta ruang terbuka hijau. Penggunaan lahan kawasan belum terbangun dapat dilihat pada Tabel 2.5 Penggunaan Lahan Eksiting – Lahan Belum Terbangun di Kota Banda Aceh – Tahun 2015

Tabel 2.5

Penggunaan Lahan Eksiting –Lahan Belum Terbangun di Kota Banda Aceh Tahun 2015

No	Penggunaan Lahan	Luas	
		Hektar	%
1	Air/Sungai	573.82	20.77
2	Hutan Kota	19.46	0.70
3	Jalur Hijau Jalan	58.15	2.10
4	Jalur Hijau Sungai	20.55	0.74
5	Kawasan Hutan Bakau	308.84	11.18
6	Kawasan Pariwisata	33.29	1.20
7	Kebun	179.41	6.49
8	Lahan Terbuka Produktif	801.61	29.01
9	Pemakaman	22.85	0.83
10	Ruang Terbuka Hijau	431.31	15.61
11	Sawah	39.57	1.43
12	Sempadan Pantai	37.85	1.37
13	Sempadan Sungai	102.16	3.70
14	Taman Kota	37.06	1.34
15	Taman Pulau Jalan	0.61	0.02
16	Tambak	96.53	3.49
	Total	**2763.08**	**100.00**

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Berdasarkan analisis pemanfaatan lahan eksisting area terbangun dan area belum terbangun di Kota Banda Aceh dengan menggunakan Citra Satelit keluaran Februari tahun 2015, bahwa area tebangun mencapai 53,17 % dan lahan belum terbangun 46,83 % dari luas wilayah kota, hal tersebut menunjukan bahwa kecendrungan pembangunan fisik di wilayah Kota Banda Aceh semakin pesat setiap tahunnya, oleh karena itu proses perkembangan fisik wilayah kota perlu diantisipasi terhadap daya dukung dan daya tampung terhadap proses pemanfaatan lahan serta perlu diantisipasi ketersedian ruang terbuka hijau yang berkelanjutan untuk keseimbangan ekosistem lingkungan di wilayah Kota Banda Aceh.

Pemanfaatan lahan eksisting di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada pada Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan eksisting Kota Banda Aceh Tahun 2015 berikut ini.

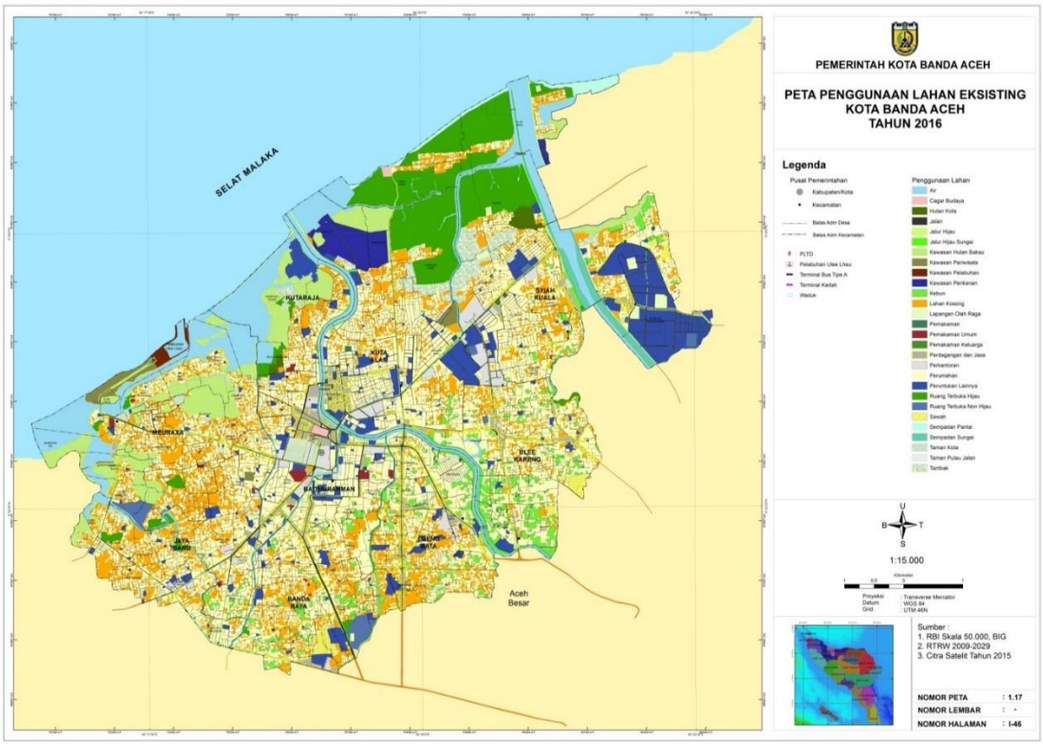

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 2.6

Peta Penggunaan Lahan eksisting Kota Banda Aceh Tahun 2015

2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam Sistem Perkotaan Nasional, Kota Banda Aceh ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana yang dikemukakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, yang disusun berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007. Namun seiring dengan isu penataan ruang yang mendasari perumusan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Banda Aceh 20 tahun ke depan, maka hirarki Kota Banda Aceh diusulkan untuk dipromosikan dan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Penetapan Kota Banda Aceh sebagai PKN ini juga sejalan dengan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang serta Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Aceh Tahun 2013-2033. Beberapa faktor yang mendasari penetapan sebagai PKN tersebut adalah :

1. Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh;
2. Kota Banda Aceh sebagai pintu gerbang provinsi dari segi transportasi darat, laut dan udara;
3. Fungsi Kota Banda Aceh sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan dan jasa, pelayanan pendidikan dan kesehatan, pusat keagamaan;
4. Dukungan nilai historis yang terdapat di Kota Banda Aceh untuk pengembangan kegiatan pariwisata.

2.1.3.1 Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Rencana sistem pusat pelayanan dimaksudkan untuk memperjelas hirarki kota sesuai dengan struktur kota yang ditetapkan sehingga diperoleh suatu sistem pemanfaatan ruang yang optimal untuk setiap bagian kota. Dalam realitanya, pengembangan sistem pusat pelayanan akan mempermudah masyarakat kota untuk mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan.

Pembagian sistem pusat pelayanan dilakukan atas dasar pertimbangan berikut:

1. Fungsi Kota Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, pusat keagamaan
2. Penetapan Kota Banda Aceh sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang dipromosikan

sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam Rencana Sistem Perkotaan Nasional
3. Jangkauan pelayanan secara fungsional
4. Aksesibilitas antar kawasan dan antar wilayah
5. Kelengkapan dan pemusatan sarana dan prasarana
6. Efisiensi pemanfaatan lahan

Dalam pengembangan ke depannya, Kota Banda Aceh direncanakan dikembangkan dalam 4 Wilayah Pengembangan (WP), yaitu :

1. WP Pusat Kota Lama
   WP ini terdiri dari wilayah Kecamatan Baiturrahman, Kuta Alam dan Kuta Raja, berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan regional dan pemerintahan. Fungsi ini didukung oleh kegiatan jasa komersial, perbankan, perkantoran, pelayanan umum dan sosial, kawasan permukiman perkotaan, industri kecil/kerajinan, pusat kebudayaan dan Islamic Center. WP ini juga berfungsi sebagai pusat pelayanan tujuan wisata budaya dan agama bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Banda Aceh. Pusat WP ditetapkan di Kawasan Pasar Aceh dan Peunayong
2. WP Pusat Kota Baru
   WP ini terdiri dari wilayah Kecamatan Banda Raya dan Lueng Bata, merupakan pengembangan wilayah kota ke arah bagian Selatan, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan olah raga (sport centre), terminal AKAP dan AKDP, perdagangan dan jasa serta pergudangan. Pusat WP ditetapkan di Batoh dan Lamdom.
3. WP Keutapang
   WP ini terdiri dari wilayah Kecamatan Meuraxa dan Jaya Baru, merupakan pengembangan wilayah kota ke arah bagian Barat. WP ini difungsikan sebagai pusat kegiatan pelabuhan dan wisata, yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, dan sebagainya. Pusat WP ditetapkan di Keutapang.
4. WP Ulee Kareng
   WP ini terdiri dari wilayah Kecamatan Syiah Kuala dan Ulee Kareng, merupakan pengembangan wilayah kota ke bagian Timur, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan sosial kota seperti halnya pendidikan, kesehatan dan kegiatan lain yang komplementer dengan kedua kegiatan tersebut. Pusat WP ditetapkan di Ulee Kareng.

Ke-4 Wilayah Pengembangan tersebut menjadi dasar dalam menentukan Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh 20 tahun depan, dimana direncanakan 2 Pusat Kota dan 2 Sub Pusat Kota, yaitu :

1. Pusat Kota Lama Pasar Aceh – Peunayong
2. Pusat Kota Baru Batoh/Lamdom
3. Sub Pusat Kota Keutapang
4. Sub Pusat Kota Ulee Kareng

Untuk lebih jelas mengenai sistem pusat pelayanan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.7 Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh dan Tabel 2.6 Rencana Pusat – pusat Pelayanan Kota Banda Aceh berikut ini.

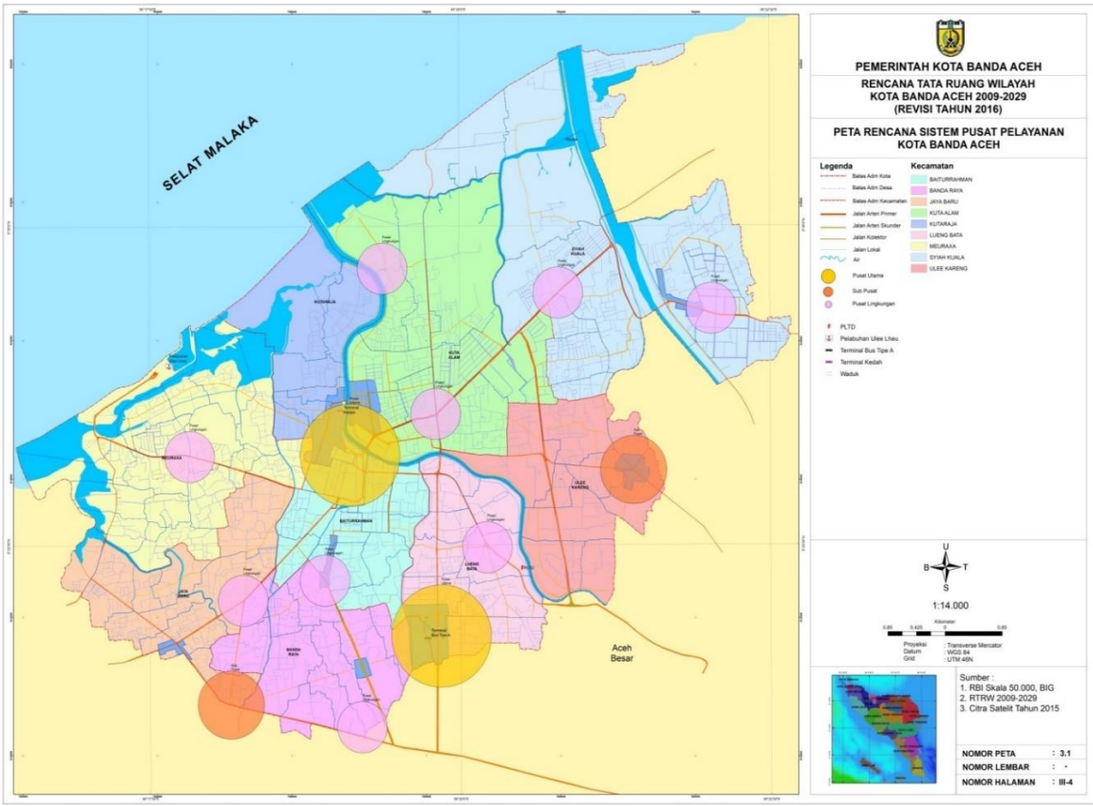

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 2.7

Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh

Tabel 2.6

Rencana Pusat – Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh

No	Pusat Pelayanan / Subpusat Pelayanan/ Unit Lingkungan	Fungsi	Skala Pelayanan
A.	Pusat Kota		
1.	Peunayong / Kampung Baru (Pusat Kota Lama)	• Pusat pemerintahan Kota Banda Aceh • Perdagangan dan Jasa • Perkantoran	Regional & Kota
2.	Batoh/Lamdom (Pusat Kota Baru)	• Pusat pemerintahan / perkantoran yang baru • Pusat perdagangan dan jasa • Permukiman	Regional Regional & Kota
B.	Sub Pusat Kota		
1.	Keutapang	• Perdagangan dan Jasa • Permukiman	Regional dan Lokal
2.	Ulee Kareng	• Perdagangan dan jasa • Permukiman	Kota dan lokal
C.	Pusat Lingkungan		
1.	Lampulo	• Pelabuhan ikan • Galangan kapal • Industri pengolahan ikan • Perumahan nelayan	Regional & Kota
2.	Jambo Tape	• Pusat Pemerintahan Prov Aceh & Perkantoran Provinsi Aceh (eksisting) • Perdagangan dan jasa	Regional Kota dan Lokal
3.	Neusu	• Perdagangan dan jasa • Permukiman	Kota dan lokal
4.	Kopelma Darussalam	• Pendidikan • Perdagangan dan jasa	Regional Kota dan lokal

5	Jeulingke	• Pusat Pemerintahan Prov Aceh & Perkantoran Provinsi Aceh (eksisting) • Perdagangan dan jasa • Permukiman	Regional Kota dan Lokal
6	Lueng Bata	• Perdagangan dan jasa • Permukiman	Kota dan lokal
7	Mibo	• Pusat Pemerintahan dan Perkantoran Kota Banda Aceh • Perdagangan dan jasa • Permukiman	Kota dan Lokal
8	Blang Oi	• Perdagangan dan jasa • Permukiman • Perikanan • Pelabuhan • Wisata	Kota dan lokal Regional dan Lokal
9	Lamteumen	• Perkantoran • Perdagangan dan jasa • Permukiman	Regional, Kota dan lokal

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

2.1.3.2 Rencana Pengembangan Kawasan Pusat Kota Lama Kota Banda Aceh

Rencana pengembangan kawasan pusat kota lama Kota Banda Aceh, bertujuan untuk meningkatkan nilai *heritage* kawasan pusat kota lama, sehingga meningkatkan nilai historis Kota Banda Aceh. Beberapa kawasan yang menjadi perhatian dalam rencana ini adalah:

1. Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman

   Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman bertujuan untuk meningkatkan nilai historis dan memberikan citra baru terhadap *landmark* Provinsi Aceh, sehingga kawasan ini dapat terpadu sebagai kawasan *heritage* dengan kawasan komersial Kota Banda Aceh yang memiliki nilai yang tinggi terhadap fungsi dan citra kawasan. Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan terhadap pengembangan kawasan ini adalah peningkatan *landmark* Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh serta mendukung penataan kawasan *water front city,* dimana Sungai Krueng Aceh dan jembatan Pante Pirak menjadi salah satu gerbang masuk ke kawasan Mesjid Raya Baiturrahman. Adapun luas kawasan yang akan digunakan untuk area pengembangan Mesjid Raya Baiturrahman ini adalah sekitar 12,08 Ha, sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2.8 Kawasan Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 2.8
Kawasan Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman

2. Pengembangan Kawasan CBD Peunayong

   Rencana Pengembangan Kawasan CBD Peunayong terdiri atas dua rencana pengembangan ; (1) Pengembangan Kawasan Terminal Keudah, yang terintegrasi dengan zona komersial; dan (2) Pengembangan Jembatan Penyebrangan Pedestrian Keudah-Peunayong. Pengembangan kawasan ini adalah untuk me-revitalisasi kawasan Pusat Kota Lama kawasan Peunayong.

3. Pengembangan Kawasan Terminal Keudah

   Pengembangan Kawasan Terminal Keudah bertujuan untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik di Kota Banda Aceh, meningkatkan akses dan kenyamanan publik terhadap transportasi publik. Rencana pengembangan kawasan ini mengadaptasikan konsep *mix-use building*, dimana Kawasan Terminal Keudah akan diarahkan untuk menjadi kawasan *one-stop shopping*, sehingga kawasan ini mampu untuk menjadi titik transit bagi pengguna angkutan umum. Kawasan ini juga akan diarahkan untuk memiliki ruang parkir yang luas dan terintegrasi dengan sisi Barat (Jl. Tentara Pelajar) sebagai pintu masuk dan sisi Timur (Jl. Cut Mutia) sebagai pintu keluar. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana pengembangan kawasan ini dapat dilihat pada Gambar 2.9. Rencana Pengembangan *Central Bussiness District* (CBD) Keudah berikut ini

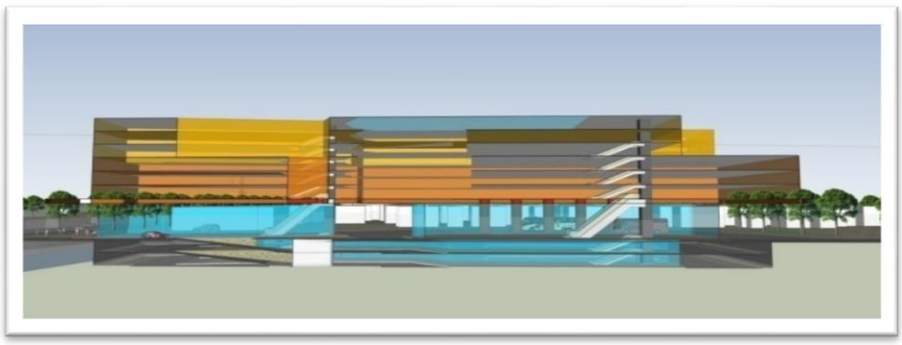

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 2.9

Rencana Pengembangan Central Bussiness District (CBD) Keudah

4. Rencana Jembatan Penyebrangan Pedestrian Keudah-Peunayong

   Jembatan penyebrangan pedestrian Keudah-Peunayong direncanakan selain fungsinya sebagai jembatan penyebrangan pedestrian, juga akan memiliki fungsi sebagai daya tarik antara Peunayong dan Keudah, jembatan ini diarahkan untuk dapat menciptakan ruang publik yang terpadu dengan kawasan perdagangan dan jasa (dengan spesialisasi kuliner; restoran, warung kopi, dan cafe). Konsep rencana pengembangan ini dapat dilihat pada Gambar 2.10 Konsep Pengembangan Jembatan Keudah-Peunayong berikut ini ;

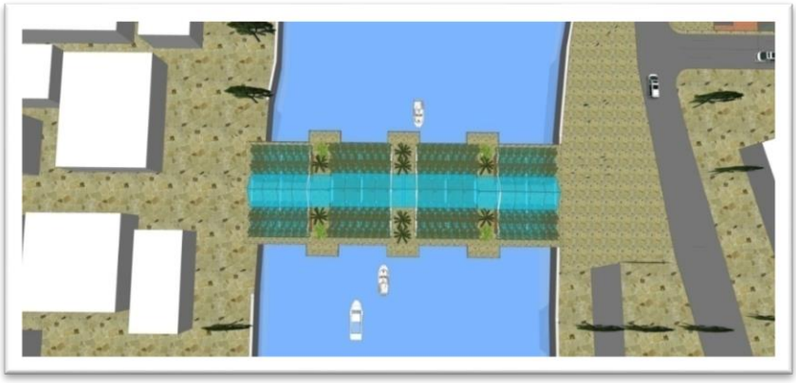

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 2.10

Konsep Pengembangan Jembatan Keudah-Peunayong

2.1.4 Wilayah Rawan Bencana

Kota Banda Aceh dalam dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki indeks resiko bencana tinggi dengan skor 167, adapun ancaman bencana di Kota Banda Aceh antara lain:

1. Rawan bencana angin puting beliung
2. Rawan bencana banjir
3. Rawan bencana penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
4. Rawan bencana gempa dan
5. Rawan bencana tsunami

Kawasan rawan bencana yang telah ditetapkan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan Banda Aceh ke depan baik dari segi penetapan struktur ruang dan pola ruang, maupun dalam menentukan pengaturan bangunan (*building code*) dan manajemen mitigasi bencana. Untuk lebih jelasnya kawasan rawan bencana di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.11 Peta Bahaya Angin Puting Beliung Kota Banda Aceh, Gambar 2.12 Peta Bahaya Banjir Kota Banda Aceh, Gambar 2.13 Peta Bahaya DBD Kota Banda Aceh, Gambar 2.14 Peta Bahaya Gempa Kota Banda Aceh dan Gambar2.15 Peta Bahaya Tsunami Kota Banda Aceh berikut ini.

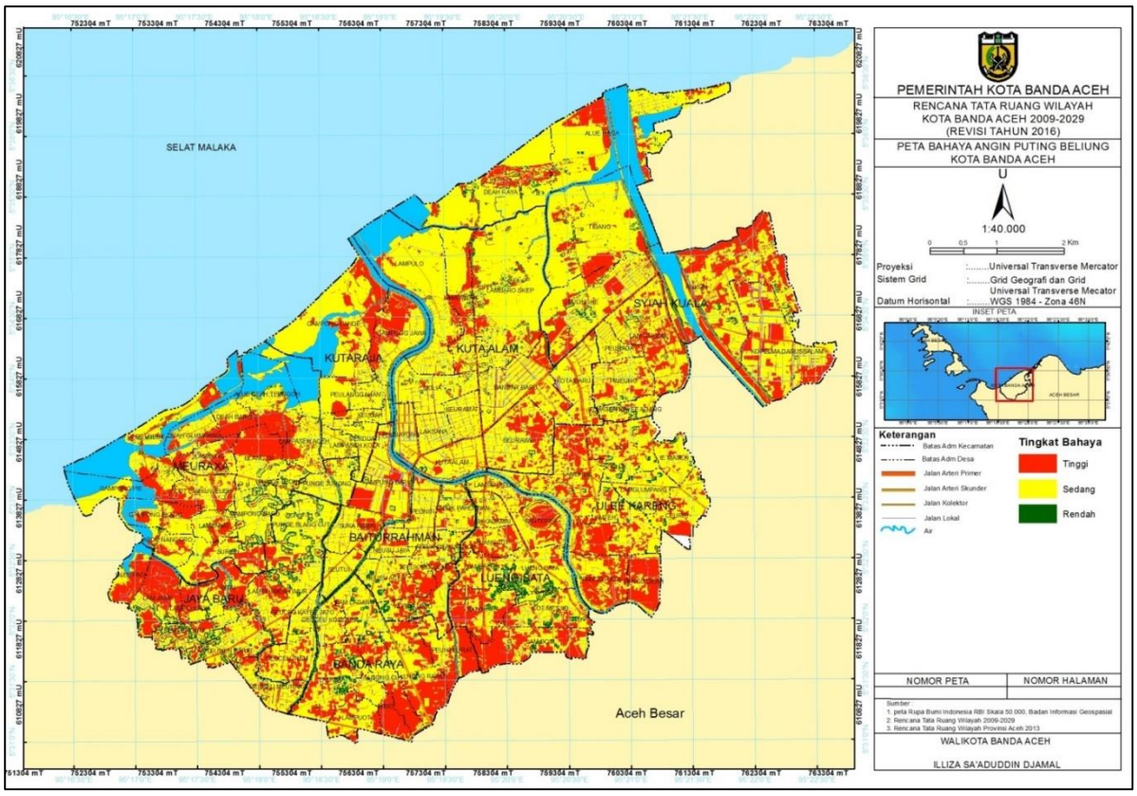

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 2.11

Peta Bahaya Angin Puting Beliung Kota Banda Aceh

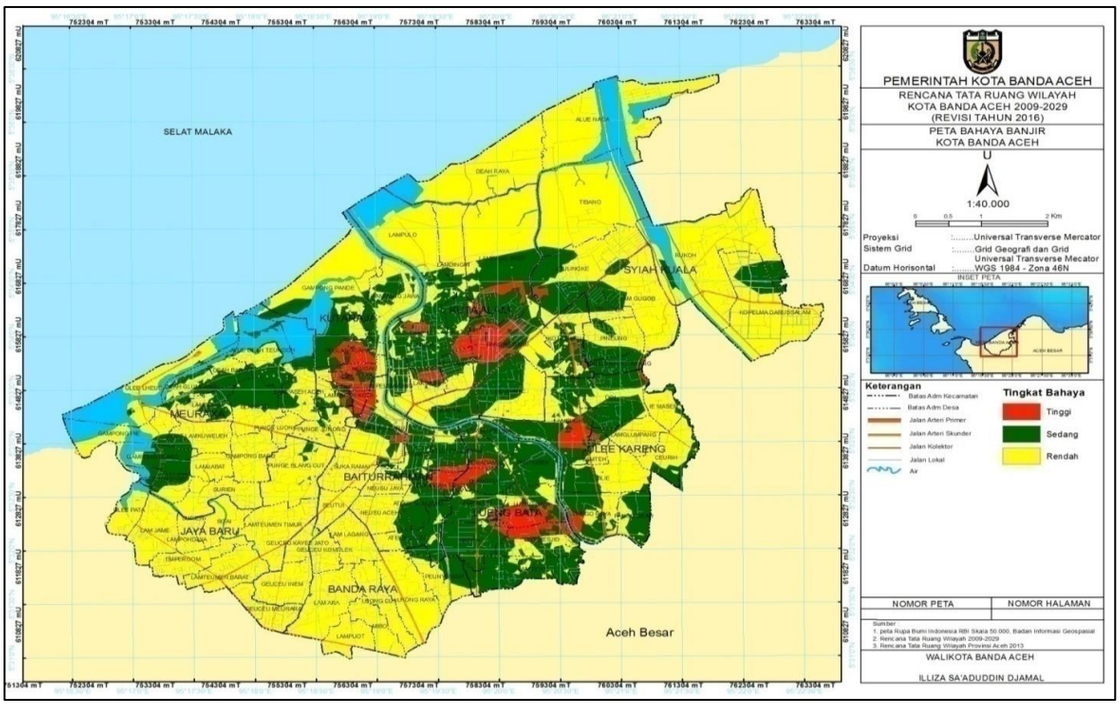

sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 2.12

Peta Bahaya Banjir Kota Banda Aceh

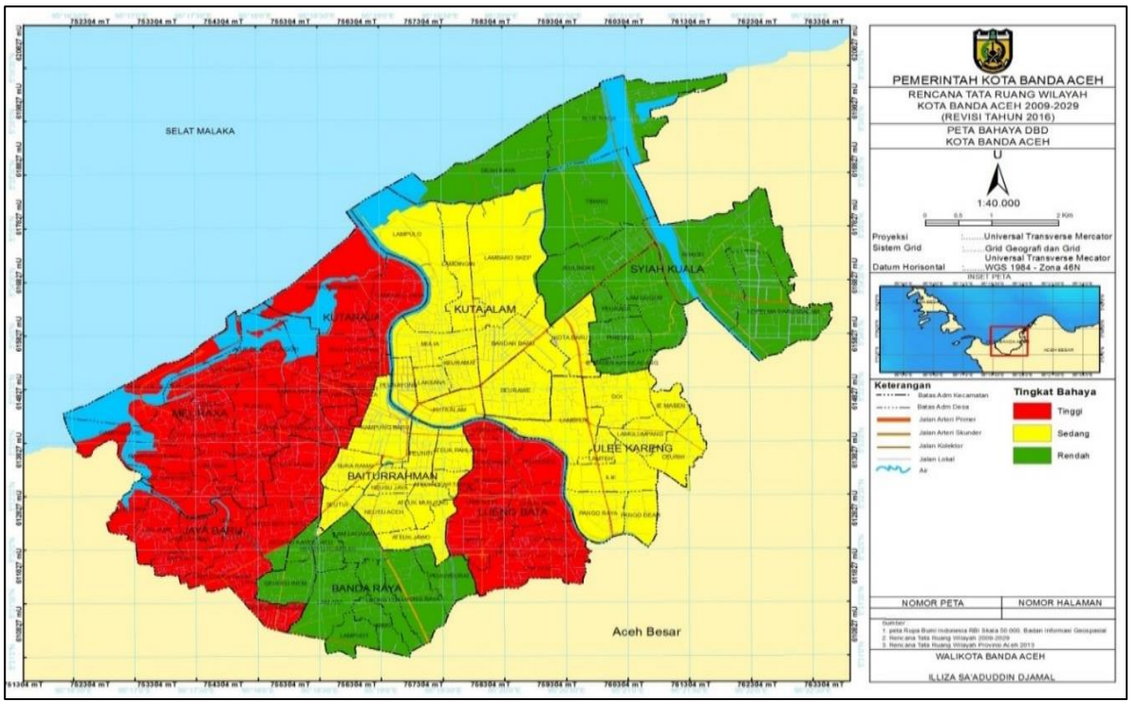

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 2.13

Peta Bahaya DBD Kota Banda Aceh

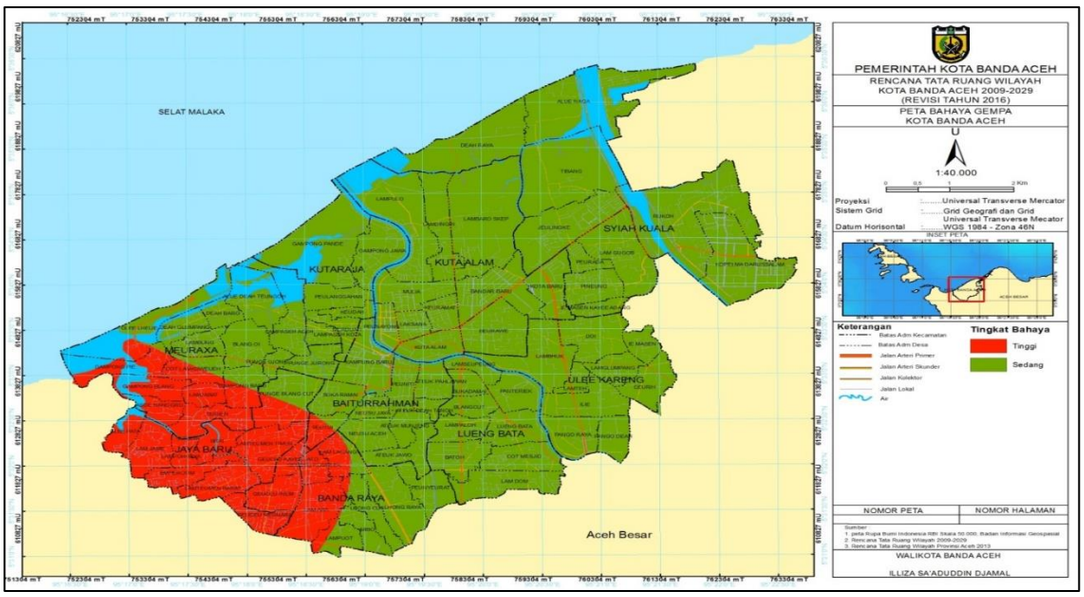

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 2.14

Peta Bahaya Gempa Kota Banda Aceh

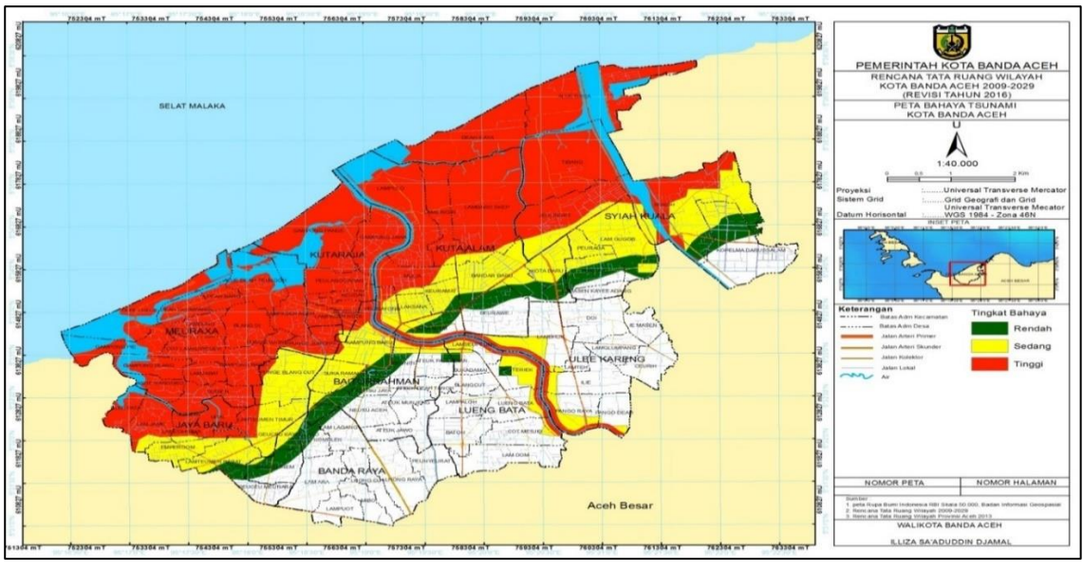

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Gambar 2.15

Peta Bahaya Tsunami Kota Banda Aceh

2.1.5 Demografi

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pasca bencana Gempa dan Tsunami di Tahun 2004, jumlah penduduk dari 265.098 jiwa di Tahun 2004 menurun 87.217 jiwa sehingga menjadi 177.881 jiwa di Tahun 2005, akan tetapi berlahan jumlah penduduk di Kota Banda Aceh hampir mendekati pra bencana Gempa dan Tsunami, yakni 254.904 jiwa pada Tahun 2016.

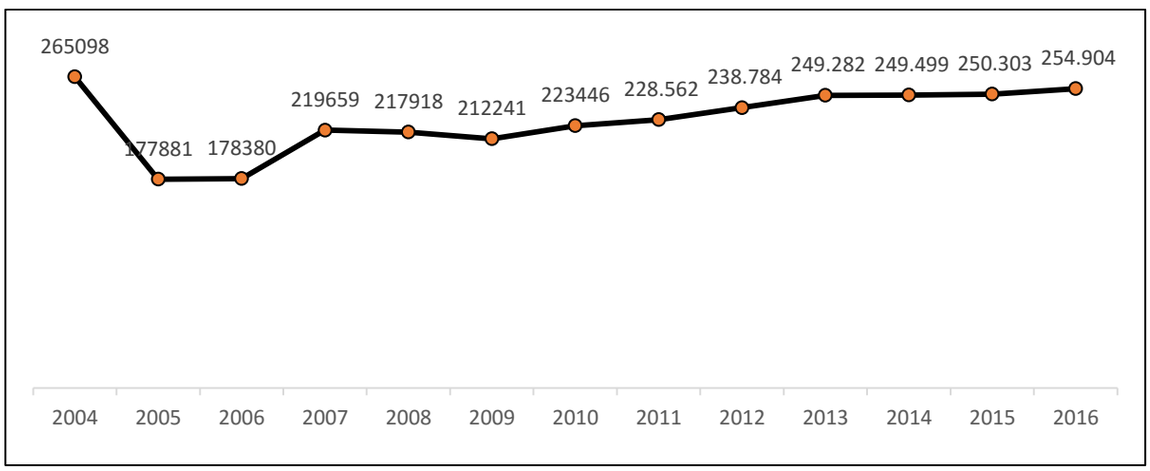

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

Gambar 2.16

Grafik Jumlah Pertumbuhan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2004-2016

Penduduk Kota Banda Aceh pada Tahun 2015 terdiri dari 128.962 jiwa penduduk laki-laki dan 121.321 jiwa penduduk perempuan, dengan pertumbuhan penduduk 0,32% dari tahun sebelumnya. Berikut ini adalah Tabel 2.7 Indikator kependudukan Kota Banda Aceh Tahun 2013-2015

Tabel 2.7

Indikator kependudukan Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah	Jiwa	238.784	249.282	249.499	250.303	254.904
Pertumbuhan	%	4.47	4.40	0.08	0.32	1.84
Kepadatan	Jiwa/km	3.892	4.063	4.066	4.079	4.154
Sex Ratio	%	106.01	106.11	106.18	106.31	105.74

Sumber : Statistik Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016

Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 4.154 jiwa per km². Angka ini diperkirakan akan terus meningkat mengingat penduduk Kota Banda Aceh didominasi oleh penduduk usia muda. Kecamatan terpadat adalah Baiturrahman (7.932 jiwa per km²) sedangkan kecamatan Kuta Raja (2.516 jiwa per km²) memiliki kepadatan penduduk terkecil.

Bila dilihat dari struktur penduduk, Kota Banda Aceh didominasi penduduk usia muda. Jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 39.905 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk umur 25-29 tahun sebanyak 29.475 jiwa dan penduduk umur 0-4 tahun sebanyak 27.098 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.17

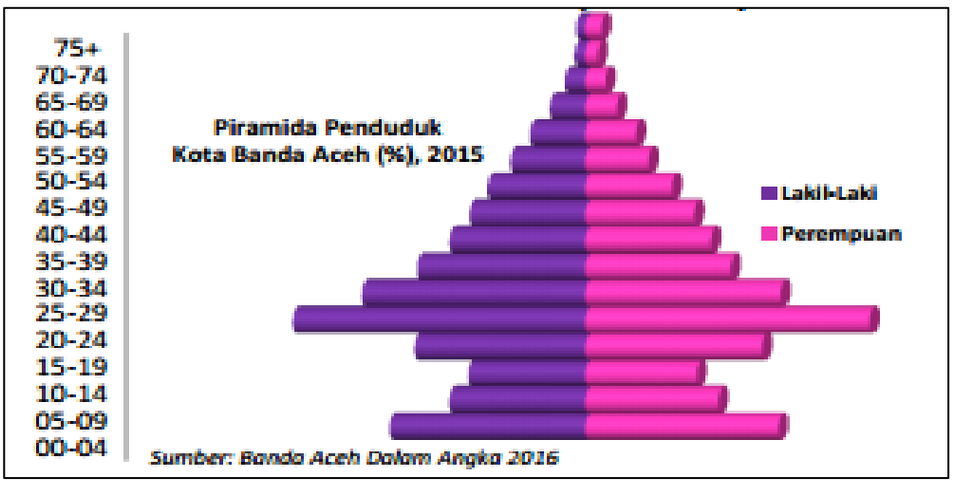

Sumber : Statistik Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016

Gambar 2.17

Piramida penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2015

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Kota Banda Aceh sebagai kesatuan ekonomi yang menyeluruh dapat digambarkan dengan PDRB. Setelah sempat mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Kota Banda Aceh pada Tahun 2015 mulai membaik atau meningkat 0,51 persen dibandingkan Tahun 2014, hal ini ditunjang dengan adanya geliat pertumbuhan kegiatan ekonomi pada sektor konstruksi, yang tumbuh sebesar 0.45 poin dan real estate 0.51 poin. Dan hal ini juga yang mendasari pertumbuhan PDRB menjadi 6,31 Persen di tahun 2016.

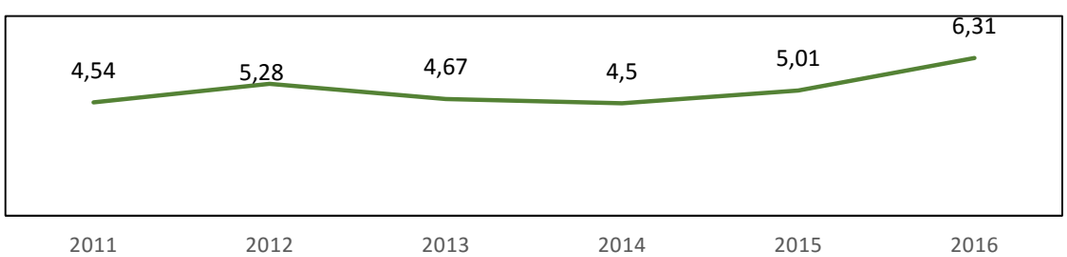

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2016

Gambar 2.18

Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh Tahun 2011-2016

Meningkatnya nilai PDRB menunjukkan peningkatan kinerja perekonomian, begitu pula sebaliknya. Perekonomian Kota Banda Aceh terus meningkat dilihat dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku selama lima tahun terakhir.

PDRB ADHB secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar Rp 845.57 milyar per tahun selama kurun waktu 2010-2016. Pada tahun 2015 PDRB meningkat sebesar Rp 1,09 triliun dari Rp 13,64 triliun pada tahun 2014 dan di tahun 2016 meningkat sebesar Rp. 1,3 Trilyun dari Rp.14,48 triliun

di tahun 2015. Kenaikan ini tertinggi selama 4 tahun terakhir (tahun 2015) disebabkan adanya pelaksanaan proyek konstruksi tahun jamak (multiyears) dengan nilai kontrak besar.

Selama lima tahun terakhir, ekonomi Kota Banda Aceh terus tumbuh meski dengan laju pertumbuhan yang berbeda-beda. Setelah mencapai laju pertumbuhan 5,33 persen di tahun 2012, ekonomi Kota Banda Aceh sempat mengalami perlambatan di tahun 2013 dan 2014. Ekonomi Kota Banda Aceh kemudian mengalami percepatan di tahun 2015 yang berlanjut hingga tahun 2016. Hal ini ditunjukkan dengan laju pertumbuhan 6,31 persen di tahun 2016.

Tabel 2.8

Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016 Atas Dasar Harga Konstan Kota Banda Aceh

No	Sektor	2012		2013		2014		2015		2016	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	111401,2	3,93	115843,2	3,99	118948,4	2,68	123626,9	3,93	128549,5	3.98
2	Pertambangan dan Penggalian	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0	0
3	Industri Pengolahan	228900,6	7,15	241926,1	5,69	254139,0	5,05	263261,8	3,59	268244	2.71
4	Pengadaan Listrik dan Gas	36176,0	9,02	38164,4	5,50	40952,5	7,31	40802,1	-0,37	51470	15.92
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8981,6	9,12	9843,8	9,60	10615,1	7,84	11492,7	8,27	12827	12,84
6	Konstruksi	882313,5	-2,48	874894,3	-0,84	874192,1	-0,08	1000391,6	14,44	1408789	40.96
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2451964,6	9,97	2559857,3	4,40	2672562,1	4,40	2763488,9	3,40	2814397	1,84
8	Transportasi dan Pergudangan	1758677,2	0,84	1782819,3	1,37	1807892,5	1,41	1833657,4	1,43	1717796	-4,92
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	270815,7	9,56	296942,3	9,65	326888,8	10,08	358122,2	9,55	400.264.4	7.81
10	Informasi dan Komunikasi	978214,4	6,76	1030141,2	5,31	1093525,3	6,15	1112387,4	1,72	1105546.2	1.02
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	286301,2	5,05	322832,4	12,76	311750,4	-3,43	320492,1	2,80	339224,8	5.84
12	Real Estate	588859,5	6,65	638269,6	8,39	692403,3	8,48	752913,4	8,74	838247.5	10.06
13	Jasa Perusahaan	239100,9	7,35	254111,0	6,28	270352,6	6,39	279812,4	3,50	310573	9.05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2103986,8	5,62	2229707,5	5,98	2363106,5	5,98	2504665,2	5,99	2646798,4	5,67
15	Jasa Pendidikan	592927,9	4,29	624101,7	5,26	660937,6	5,90	693918,9	4,99	761390,9	7.40
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	359403,4	7,12	384899,8	7,09	415021,1	7,83	448064,3	7,96	485843,7	8.92
17	Jasa lainnya	181655,7	6,15	192874,6	6,18	205760,1	6,68	218826,8	6,35	238331	6.96
	PDRB	**11079680,2**	**5.33**	**11511597228,55**	**4.67**	**12119047,3**	**4.5**	**12725924,1**	**5.01**	**13528294,8**	**6.31**

Sumber: Tinjauan Perekonomian Kota Banda Aceh 2016

Kota Banda Aceh sebagai pusat ibukota Provinsi Aceh menjadi tempat beraktivitas pemerintahan Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, serta berbagai instansi vertikal. Sehingga tidak mengherankan bila struktur ekonomi Kota Banda Aceh hingga tahun 2015 masih didominasi oleh sektor jasa yakni kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Kedua kategori tersebut memiliki peranan yang besar hingga 42,22 persen terhadap pembentukan PDRB (masing-masing 21,86 persen dan 20,36 persen), meski peranan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung berkurang dari tahun ke tahun selama empat tahun terakhir.

Sektor konstruksi menjadi kategori yang mengalami pertumbuhan terbesar mencapai 40,96 persen. Pengerjaan beberapa proyek infrastruktur berskala besar seperti penyelesaian Pembangunan Landscape dan Infrastruktur Masjid Raya Baiturrahman, Proyek Pelebaran Jembatan Lamnyong dan Krueng Cut serta Proyek Pembangunan Banda Aceh Madani Education Center menjadi kegiatan ekonomi penyumbang nilai tambah yang besar sekaligus meningkatkan percepatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh secara keseluruhan.

Terdapat empat sektor yang tumbuh di atas 10 persen (dua digit) pada tahun 2016 yakni sektor konstruksi (40,96 persen), Pengadaan Listrik dan Gas (15,92 persen), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (12,84 persen) serta Real Estate (10,06 persen). Sedangkan Transportasi dan Pergudangan menjadi satu-satunya kategori yang mengalami kontraksi/ kemunduran pada tahun 2016 sebesar -4,92 persen.

Dari keempat kategori dengan laju pertumbuhan dua digit tersebut, hanya sektor Konstruksi yang mampu memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi di atas 1 persen. Dengan kontribusi atas

laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,22 poin, kategori ini telah menyumbang lebih dari separuh laju pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh (6,31 persen).

Tabel 2.9

Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Banda Aceh

No	Sektor	2012		2013		2014		2015		2016	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	117403,2	1,01	126329,3	1,01	135264,6	0,99	142201,5	0,96	154320.8	0.98
2	Pertambangan dan Penggalian	0,0		0,0		0,0		0,0		0	0
3	Industri Pengolahan	242273,7	2,09	262640,8	2,09	283696,6	2,08	299660,1	2,03	317841.2	2.01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	32100,0	0,28	32502,3	0,26	35781,5	0,26	36657,9	0,25	47.729,5	0.30
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9161,2	0,08	10440,7	0,08	11639,5	0,09	13898,8	0,09	18900,1	0.12
6	Konstruksi	934143,9	8,07	958082,6	7,62	960238,1	7,04	1103743,6	7,49	1579485,3	10
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2619273,1	22,63	2827199,8	22,50	3059382,8	22,42	3223290,0	21,86	3375398,8	21.36
8	Transportasi dan Pergudangan	1833820,2	15,84	1948671,9	15,51	2072370,4	15,18	2116684,7	14,36	1783937,7	11.29
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	285854,9	2,47	331148,8	2,63	382551,5	2,80	432808,4	2,94	538249,8	3.41
10	Informasi dan Komunikasi	900348,5	7,78	942579,2	7,50	999810,2	7,33	1073443,1	7,28	957384,4	6.06
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	328004,7	2,83	389608,8	3,10	395006,6	2,89	423800,0	2,87	459951,1	2.91
12	Real Estate	608221,2	5,26	700447,4	5,57	830077,6	6,08	970979,0	6,59	1081187.3	6.84
13	Jasa Perusahaan	260880,5	2,25	288493,0	2,30	321106,6	2,35	338943,9	2,30	373078.6	2.36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2225309,3	19,23	2456331,4	19,54	2730681,1	20,01	3001088,0	20,36	3332436,1	21.09
15	Jasa Pendidikan	606128,9	5,24	659443,4	5,25	715857,0	5,25	777814,8	5,28	922468,1	5.84
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	387603,7	3,35	432781,4	3,44	488777,1	3,58	540726,2	3,67	580124,4	3.67
17	Jasa lainnya	183399,6	1,58	201303,2	1,60	205760,1	1,65	246129,5	1,67	279334	1.77
	PDRB	**11079680,2**	**100**	**11511597228,5**	**100**	**12119047,3**	**100**	**12725924,1**	**100**	**15.801.791,3**	**100**

Sumber: Tinjauan Perekonomian Kota Banda Aceh 2016

Tabel 2.10

Perkembangan Konstribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kota Banda Aceh

No	Sektor	2012		2013		2014		2015		2016	
		HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,01	3,93	1,01	3,99	0,99	2,68	0,96	3,93	0.98	3,98
2	Pertambangan dan Penggalian		0,00		0,00		0,00		0,00	0	0
3	Industri Pengolahan	2,09	7,15	2,09	5,69	2,08	5,05	2,03	3,59	2.01	2.71
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,28	9,02	0,26	5,50	0,26	7,31	0,25	-0,37	0.30	15.92
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	9,12	0,08	9,60	0,09	7,84	0,09	8,27	0.12	12,84
6	Konstruksi	8,07	-2,48	7,62	-0,84	7,04	-0,08	7,49	14,44	10	40.96
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,63	9,97	22,50	4,40	22,42	4,40	21,86	3,40	21.36	1.84
8	Transportasi dan Pergudangan	15,84	0,84	15,51	1,37	15,18	1,41	14,36	1,43	11.29	-4,92
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,47	9,56	2,63	9,65	2,80	10,08	2,94	9,55	3.41	7.81
10	Informasi dan Komunikasi	7,78	6,76	7,50	5,31	7,33	6,15	7,28	1,72	6.06	1.02
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,83	5,05	3,10	12,76	2,89	-3,43	2,87	2,80	2.91	5.84
12	Real Estate	5,26	6,65	5,57	8,39	6,08	8,48	6,59	8,74	6.84	10.06
13	Jasa Perusahaan	2,25	7,35	2,30	6,28	2,35	6,39	2,30	3,50	2.36	9.05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	19,23	5,62	19,54	5,98	20,01	5,98	20,36	5,99	21.09	5.67
15	Jasa Pendidikan	5,24	4,29	5,25	5,26	5,25	5,90	5,28	4,99	5.84	7.40
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,35	7,12	3,44	7,09	3,58	7,83	3,67	7,96	3.67	8.92
17	Jasa lainnya	1,58	6,15	1,60	6,18	1,65	6,68	1,67	6,35	1.77	6.96
	PDRB	**100**	**5.33**	**100**	**4.67**	**100**	**4.5**	**100**	**5.01**	**100**	**6.31**

Sumber: Tinjauan Perekonomian Kota Banda Aceh 2016

Bila dibandingkan untuk setiap lapangan usaha/sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 pada masing-masing lapangan usaha ada yang meningkat namun ada juga yang mengalami penurunan dibandingkan di tahun 2014. Peningkatan laju pertumbuhan terbesar dialami sektor Konstruksi. Sektor ini mengalami peningkatan laju pertumbuhan sebesar 14,44

persen di banding tahun 2014. Dan di tahun 2016 sektor ini juga menajadi salah satu penyumbang terbesar bagi kenaikan PDRB. Terdapat empat kategori yang tumbuh di atas 10 persen (dua digit) pada tahun 2016 yakni Konstruksi (40,96 persen); Pengadaan Listrik dan Gas (15,92 persen); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (12,84 persen); serta Real Estate (10,06 persen). Sedangkan Transportasi dan Pergudangan menjadi satu-satunya kategori yang mengalami kontraksi/kemunduran pada tahun 2016 sebesar -4,92 persen.

Dari keempat kategori dengan laju pertumbuhan dua digit tersebut, hanya kategori Konstruksi yang mampu memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi di atas 1 persen. Dengan kontribusi atas laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,22 poin, kategori ini telah menyumbang lebih dari separuh laju pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh (6,31 persen). Sebaliknya, meskipun Industri Pengolahan hanya tumbuh 2,71 persen namun kategori tersebut memberikan kontribusi yang sama (sebesar 0,06 poin) atas laju pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh bila dibandingkan dengan kategori Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh hingga 15,92 persen.

Untuk Distribusi PDRB berdasarkan pengeluaran dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pembangunan proyek konstruksi besar di Kota Banda Aceh seperti pembangunan mesjid raya, perluasan jembatan lamnyong dan fly over menjadi salah satu kontributor terbesar PDRB pada tahun-tahun terakhir ini (2015-2016). Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto menjadi salah satu kontributor terbesar PDRB 40,70 persen.

Tabel 2.11

Distribusi PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran, 2012-2016

Komponen	2012		2013		2014		2015*		2016**	
	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	57,17	3,64	58,43	3,87	60,03	4,02	60,21	3,91	59,16	4,27
a. Makanan, Minuman & Rokok	18,11	3,26	18,25	2,98	18,71	3,18	18,76	3,70	18,97	4,29
b. Pakaian & Alas Kaki	2,59	4,07	2,68	3,74	2,72	3,07	2,71	3,07	2,72	4,14
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga/	9,36	3,54	9,80	4,47	10,33	3,61	10,85	6,03	10,79	6,86
d. Kesehatan & Pendidikan	4,05	5,45	4,10	5,22	4,16	5,58	4,24	5,58	4,17	3,41
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	16,94	2,61	17,31	3,80	17,49	4,72	17,00	2,57	15,70	2,12
f. Hotel & Restoran	3,03	1,15	3,05	2,67	3,15	3,02	3,11	3,02	3,18	7,66
g. Lainnya	3,07	11,78	3,23	6,79	3,45	5,45	3,54	5,45	3,63	6,28
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,07	4,99	1,13	9,50	1,40	24,67	1,27	(4,87)	1,32	9,42
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	59,01	7,76	65,24	4,74	62,62	4,73	61,42	1,81	48,29	(9,99)
Pembentukan Modal Tetap Bruto	25,98	0,16	26,05	-0,08	25,49	(0,32)	29,10	20,39	40,70	42,20
a. Bangunan/	22,53	-0,94	22,58	-0,57	21,97	(0,39)	24,79	18,95	36,29	49,44
b. Non-Bangunan	3,46	7,64	3,46	2,96	3,52	0,09	4,31	29,06	4,41	2,23
Perubahan Inventori	3,74	764,94	0,05	-98,51	(0,00)	(100,50)	(0,05)	21.933,33	0,01	(114,97)
Ekspor	37,98	4,33	40,02	9,86	40,61	10,07	39,98	7,53	37,16	2,66
Dikurangi Impor	84,94	7,51	90,91	0,84	90,15	6,22	91,94	7,87	86,65	3,89
P D R B	100	5,33	100	4.67	100	4.50	100	5.01	100	6.31

Sumber: Tinjauan Perekonomian Kota Banda Aceh 2016

Di tahun 2016 peningkatan PDRB juga dipengaruhi oleh Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Walikota Provinsi Aceh tahun 2017 menyebabkan semaraknya kampanye pada tahun sebelumnya yakni di tahun 2016. Pengeluaran partai politik yang meningkat tersebut menyebabkan komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga non profit yang melayani rumah tangga

(LNPRT) sedikit meningkat kontribusinya menjadi 1,32 dari tahun sebelumnya 1,27 persen. Kenaikan kontribusi juga dialami komponen Perubahan Inventori dimana menjadi positif 0,01 persen setelah tahun sebelumnya negatif 0,05 persen serta Net Ekspor dimana meningkat dari negatif 51,96 persen menjadi negatif 49,49 persen.

Tetapi pengeluaran pemerintah selain belanja modal juga mengalami pembatasan anggaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Kombinasi hal tersebut dan rendahnya serapan anggaran menyebabkan kontribusi komponen pengeluaran pemerintah terhadap pembentukan PDRB hanya sebesar 48,29 persen. Kontribusi ini sangat menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 60-an persen dimana tahun 2015 sebesar 61,42 persen. Penurunan kontribusi juga dialami komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang turun menjadi 59,16 persen dari tahun sebelumnya yaitu 60,21 persen.

Dalam perubahan nilai PDRB atas dasar harga berlaku masih terdapat pengaruh perubahan harga sehingga dapat memberikan pengertian yang salah akan perkembangan perekonomian. Untuk itu agar dapat melihat perkembangan riil PDRB maka digunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010. Nilai PDRB ADHK Kota Banda Aceh pada tahun 2016 telah mencapai sebesar Rp 13,53 triliun, naik sebesar 803,13 milyar dari tahun 2015. Dari tahun 2012 sampai dengan 2016 Banda Aceh merupakan kab/ kota kedua terbesar penyumbang PDRB di Prov. Aceh dibawah Kab Aceh Utara yang merupakan kabupaten penghasil migas terbesar di Provinsi Aceh dan diperkirakan Kota Banda Aceh memiliki peluang menjadi penyumbang PDRB di Aceh dimasa yang akan datang dengan berakhirnya periode migas.

2.2.1.2 Laju Inflasi

Laju inflasi kota Banda Aceh menurut data terakhir yang diperoleh (tahun 2015) mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2014 dan 2013), hal ini menunjukkan bahwa kejutan/shock yang disebabkan faktor-faktor penyebab inflasi tahun sebelumnya sudah dapat diredam oleh pelaku usaha dan masyarakat. Perhitungan inflasi sejak tahun 2014 menggunakan tahun dasar hasil SBH 2012 dimana tahun-tahun sebelumnya menggunakan tahun dasar hasil SBH 2007.

Laju inflasi tahunan di Kota Banda Aceh tahun 2015 merupakan perubahan IHK antara bulan Desember 2015 terhadap bulan Desember 2014 sebesar 1,27 persen. Angka ini juga masih lebih kecil dari inflasi nasional yang mencapai 1,53 persen. Laju Inflasi dari tahun 2012 sampai 2014 menunjukkan kenaikan namun tahun 2015 turun sebesar 1,27 persen dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 3.13 persen yang disebabkan oleh kenaikan di kelompok bahan makanan. Laju Inflasi kota Banda Aceh dari tahun 2012-2016 ditunjukkan grafik 2.19 berikut :

Tabel 2.12

Nilai Inflasi rata-rata Tahun 2012 s.d 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Inflasi	0.06	6.39	7.83	1.27	3,13

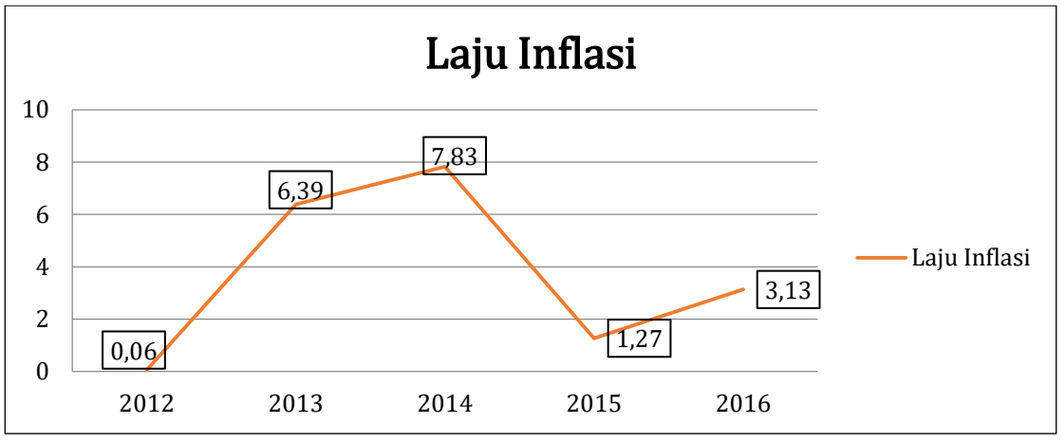

Gambar 2.19
Grafik Laju Inflasi tahun 2012-2016

Untuk pulau sumatera di tahun 2014 dan 2015 laju inflasi kota Banda Aceh merupakan salah satu dari 6 kota yang memiliki laju inflasi dibawah 1,53 %. Untuk tahun 2016 di Provinsi Aceh inflasi Kota Banda Aceh lebih baik dari pada Lhokseumawe (5,6 %) dan Meulaboh (3,77%) Untuk Sumatera Inflasi Banda Aceh 2016 masuk ke peringkat 7.

2.2.1.3 PDRB Perkapita

PDRB perkapita sering digunakan sebagai indikator awal untuk mengukur kesejahteraan penduduk suatu daerah. Untuk perbandingan antar waktu PDRB Perkapita atas Dasar Harga Konstan (ADHK) lebih tepat. Dari tahun 2012-2016 terlihat kenaikan tingkat PDRB ADHK sehingga mencapai angka 53.07 di tahun 2016. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi kota Banda Aceh yang meningkat dari tahun ke tahun. PDRB per kapita Kota Banda Aceh ADHK tercatat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, PDRB per kapita Kota Banda Aceh atas dasar harga konstan sudah mencapai 53,07 juta rupiah bila dibandingkan pencapaian 47,24 juta rupiah di tahun 2012. Kenaikan 5,83 juta rupiah selama periode 5 tahun tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan rata-rata 1,16 juta rupiah PDRB perkapita setiap tahunnya.

PDRB per kapita Kota Banda Aceh sebesar 61,99 juta rupiah di tahun 2016 jauh di atas rata-rata Provinsi Aceh sebesar 26,93 juta rupiah. Pun bila dilakukan perbandingan dengan kota/kabupaten lain di provinsi ini. Yang terdekat, PDRB per kapita Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Nagan Raya masing-masing baru mencapai 39,60 juta rupiah dan 39,07 juta rupiah.

Tabel 2.13
PDRB perkapita Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan

Tahun	PDRB Perkapita
2012	47,24
2013	48,44
2014	48,57
2015	50,84
2016	53,07

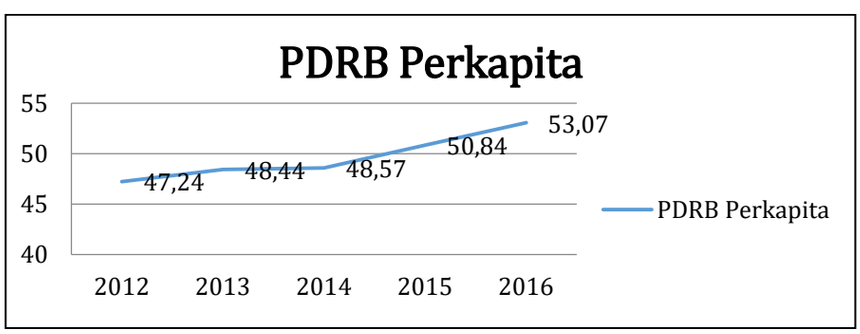

Gambar 2.20
PDB Perkapita Banda Aceh Tahun 2012-2016

2.2.1.4 Indeks Gini

Koefisien Gini adalah ukuran yang dikembangkan oleh statistikus Italia, Corrado Gini Nilai Koefisien Gini Koefisien ini biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama koefisien Gini dunia bervariasi dari 0.25 (Denmark) hingga 0.70 (Namibia).

Tabel 2.14
Indeks Gini Kota Banda Aceh Tahun 2012- 2016

Tahun	Indeks Gini
2012	0,327
2013	0,285
2014	0,288
2015	0,328
2016	0,316

2.2.1.5 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang melingkupi banyak faktor termasuk ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Arti kemiskinan lebih dari sekedar rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari indikator kesejahteraan terukur seperti garis kemiskinan, namun berkaitan juga dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan *(non-income factors)* seperti akses kebutuhan dasar, misalnya kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi. Mengingat multidimensionalnya permasalahan kemiskinan, penanganannya memerlukan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh.

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin yang dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu. Dalam hal ini, perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin" yang ditetapkan misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/ pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti "orang miskin selalu hadir bersama kita". dengan menggunakan definisi ini, penduduk miskin di suatu negara kaya dapat dikategorikan sebagai penduduk sejahtera di negara berkembang seperti Indonesia. (Ravallion, 1998 : 26).

Selain itu, juga dikenal terminologi kemiskinan lain seperti kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Soetandyo Wignjosoebroto dalam "Suyanto (1995:59) mendefinisikan bahwa "Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan". Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat.

Kemiskinan kultural disebabkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang sehingga ia tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Dalam hal ini, faktor-faktor adat dan budaya justru menyebabkan seseorang tetap dalam kemiskinan. Hal ini seperti yang dialami oleh suku terasing yang terikat dengan tradisi sosio-kultural seperti suku Badui, suku Dayak di pedalaman Kalimantan dan lain-lain. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar *(basic needs approach).* Dengan demikian, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan dapat diinterpretasikan sebagai jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Penyebab kemiskinan di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Tingginya angka pengangguran
2. Kurangnya lapangan pekerjaan
3. Pertumbuhan lapangan pekerjaan tidak bisa mengikuti pertumbuhan angkatan kerja
4. Lapangan pekerjaan yang kurang variatif
5. Tidak berkembangnya sektor bisnis berbasis inovasi sehingga terjadi kekurangan lapangan pekerjaan yang bisa mengakomodasi tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus berbasis inovasi seperti teknologi informasi,
6. Migrasi tenaga kerja dari luar daerah, terutama tenaga kerja dengan keahlian rendah
7. Kurangnya keahlian tenaga kerja
8. Golongan disabilitas dan rawan yang tidak memiliki penanggung
9. Banyaknya tanggungan bagi kepala keluarga
10. Harga properti yang makin tinggi
11. Korban bencana alam terutama bencana gempa dan tsunami 2004 yang belum berdaya hingga saat ini
12. Kualitas infrastruktur yang tidak baik
13. Penyakit dan kesehatan yang buruk
14. Diskriminasi profesi bagi penyandang cacat dan kelompok rawan
15. Rendahnya minat entrepreneurship
16. Tidak adanya pemberdayaan bagi kelompok pekerja berpendapatan rendah, seperti pemulung, pedagang kaki lima, nelayan dan lain-lain.
17. Kemiskinan kultural yang muncul akibat budaya yang tidak produktif seperti kebiasaan merokok, kebiasaan menghabiskan waktu, narkoba dan lain-lain.

Untuk mengurangi kemiskinan di Kota Banda Aceh, maka pemerintah perlu menyusun prioritas kebijakan dan rencana aksi. Penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh bisa dilakukan dengan berpegang pada 5 (lima) prinsip utama, yaitu:

1. Memperbaiki program perlindungan sosial;
2. Peningkatan akses pelayanan dasar;
3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin;
4. Pembangunan yang inklusif.
5. Kebijakan percepatan pertumbuhan lapangan kerja.

Prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan adalah:

1. Prioritas peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor.
   Upaya penurunan penduduk miskin dapat dicapai melalui perbaikan dan peningkatan kesempatan kerja yang seluas-luasnya. Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran secara berkesinambungan, diperlukan pertumbuhan yang lebih tinggi, lebih adil serta berkesinambungan didorong oleh sumber-sumber pertumbuhan yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, pertumbuhan yang utamanya digerakkan oleh sektor riil, ekspor dan investasi harus meningkat.
2. Prioritas meningkatkan kualitas tenaga kerja
   Menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan/keahlian melalui pendidikan formal, seperti pendidikan kejuruan (vocational school) dan non formal seperti pelatihan keterampilan (vocational training) sehingga pencari kerja memiliki daya saing dalam mendapatkan pekerjaan.Salah satu langkah strategis yang harus diambil adalah dengan merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja serta mengurangi angka pengangguran.

3. Prioritas menyusun kebijakan penguatan sektor riil
   Sektor riil merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi suatu daerah, agar sektor riil sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi tetap dapat berkembang dengan baik perlu dibuat kebijakan-kebijakan tepat sasaran. Kebijakan penguatan sektor riil utamanya harus difokuskan untuk memajukan sektor-sektor yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan utama penduduk miskin,

seperti sektor jasa pendidikan, pemerintahan, kesehatan, kemasyarakatan dan perorangan, sektor perdagangan, hotel dan rumah makan, serta sektor bangunan dan konstruksi.

4. Prioritas memperkuat ekonomi kerakyatan
   Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang menekankan pada keadilan dalam penguasaan sumberdaya ekonomi, proses produksi dan konsumsi.Dalam ekonomi kerakyatan kemakmuran rakyat lebih diutamakan daripada kemakmuran individu.Dilaksanakan dengan benar-benar memberi perhatian utama kepada rakyat kecil lewat program-program operasional yang nyata dan mampu merangsang kegiatan ekonomi produktif di tingkat rakyat sekaligus memupuk jiwa kewirausahaan, ekonomi kerakyatan ini dapat memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi.
5. Prioritas membangun kerjasama dalam bidang agrikultur
   Kebutuhan terhadap bahan pangan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh semua manusia.Mengingat keterbatasan kemampuan dalam bidang Agrikultur, dukungan dari daerah sekitarnya dalam bidang tersebut menjadi sangat penting.Oleh karena itu, dengan tujuan mengendalikan harga bahan pokok di pasaran, kerjasama dalam bidang agrikultur dengan daerah tetangga perlu dilakukan.Bentuk kerjasama yang perlu dilakukan adalah mendorong daerah tetangga yang memiliki potensi agrikultur untuk mengembangkan industri agrikultur, sehingga dapat dijadikan sebagai pemasok utama bahan pangan.Selain itu, secara luas kerjasama ini juga dapat mendukung pencapaian sasaran penciptaan lapangan kerja.
6. Prioritas peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan.
   Peningkatan aksesisibilitas masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas.Pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai pelaku sekaligus objek pembangunan. Pendidikan dan kesehatan sangat penting sebagai salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta peningkatan keadilan sosial. Dengan kondisi kualitas pendidikan dan kesehatan penduduk masih relative rendah, upaya untuk memperbaiki kualitas dan akses penduduk terhadap pendidikan dan kesehatan harus dipercepat untuk mencapai kualitas manusia yang sejahtera dan berdaya saing.
7. Prioritas memperbaiki program perlindungan sosial
   Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan.Perlindungan sosial terdiri dari bantuan sosial dan sistem jaminan sosial. Bantuan sosial diberikan kepada mereka yang sangat rentan, seperti mereka yang hidup dalam kemiskinan absolut, cacat, lanjut usia, atau mereka yang hidup di daerah terpencil.
8. Prioritas penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
   Upaya penegakan hukum secara konsisten sangat penting untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. Perilaku korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, akan tetapi juga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, serta rusaknya moral bangsa yang pada akhirnya menjadi beban masyarakat luas. Birokrasi yang seharusnya adalah dinamisator pembangunan dan mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat.Pada kenyataannya sarat dengan masalah KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), birokrasi masih dianggap lemah dan tidak profesional dan seringkali dilihat sebagai penghambat pelaksanaan pembangunan.Oleh karena itu reformasi birokrasi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi perlu menjadi prioritas.

Strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh dilakukan dengan:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan
5. Mensinergikan kegiatan anggaran program sektor dan daerah yang diarahkan langsung kepada kelompok masyarakat miskin

6. Meningkatkan kapasitas pemerintah Kecamatan dan Gampong/Desa melalui forum Musrenbang, forum SKPD dan forum publik lainnya
7. Mengembangkan forum publik untuk monev dalam pelaksanaan pembangunan daerah

Dalam rangka percepatan penanggulangan permasalahan kemiskinan, pemerintah Kota Banda Aceh perlu melakukan berapa kebijakan, di antaranya:
1. Meningkatkan kualitas dan akurasi database angka kemiskinan
2. Meningkatkan kualitas kebijakan dan program serta kegiatan yang pro poor dan pro job.
3. Mengkoordinasi perumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
4. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi serta memfasilitasi lintas pelaku serta menyebarluaskan informasi penanggulangan kemiskinan di lembaga atau dinas terkait.
5. Melakukan evaluasi dan monitoring, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program penaggulangan kemiskinan
6. Mengalokasikan dana setiap tahun melalui pendampingan PNPM
7. Malahirkan kebijakan percepatan pertumbuhan lapangan pekerjaan berbasis inovasi dan teknologi seperti teknologi informasi, energi terbaharukan, *research and development* (R&D) dan lain-lain.

Tabel 2.15

Penduduk Miskin Kota Banda Aceh 2012-2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	20,39	19,42	19,42	19,30	18,80
2	Nasional	11,96	11,37	11,25	11,22	10,70
3	Provinsi Aceh	19,46	17,60	18,05	17,08	16,43
4	Banda Aceh	8,65	8,03	7,78	7,72	7,41
5	Penduduk Miskin (%)	8,65	8,03	7,78	7,72	7,41
6	Garis Kemiskinan (Rp.)	485.543	493.588	500.768	523.444	541,732

Sumber data: BPS Pusat, BPS Propinsi Aceh dan BPS Kota Banda Aceh

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase Penduduk Miskin Kota Banda Aceh lebih rendah dari pada Propinsi Aceh dan Nasional. Lebih lanjut, untuk Tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh jauh lebih rendah dari pada Propinsi Aceh. Tingkat kemiskinan Propinsi Aceh sendiri masih yang jauh lebih buruk daripada nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Propinsi Aceh merupakan salah satu Propinsi dengan tingkat kemiskinan terburuk di Indonesia.

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk). Dengan kata lain, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM dapat digunakan sebagai data strategis untuk mengukur kinerja Pemerintah. Di Indonesia, IPM juga merupakan salah satu faktor penentu Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM digunakan dengan mengukur 3 dimensi, yaitu kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak. Ada 4 indikator yang digunakan yaitu angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita disesuaikan. IPM juga dapat digunakan untuk memperbandingkan kualitas pembangunan manusia lintas daerah dan tingkat adminintrasi. IPM Kota Banda Aceh dibandingkan dengan Propinsi Aceh dan nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2012-2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	IPM nasional	67,70	68,31	68,9	69,55	70,18
2	IPM Propinsi Aceh	67,81	68,30	68,81	69,45	70,00
3	Index Pembangunan Manusia Kota Banda Aceh	81,30	81,84	82,22	83,25	83,73
4	Pertumbuhan IPM	0,53	0,66	0,77	1,03	0,48

Sumber: Banda Aceh Dalam Angka dan BPS Pusat

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa IPM Kota Banda Aceh telah melewati IPM Aceh dan nasional.Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup di Kota Banda Aceh telah lebih baik dari Aceh dan Indonesia. Sementara itu, IPM Propinsi Aceh masih dibawah IPM nasional. Selain itu, IPM Kota Banda Aceh juga menunjukkan kecenderungan terus meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Banda aceh terus membaik seiring waktu.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Propinsi Aceh masih dibawah nasional. Kesenjangan IPM antara Banda Aceh dan Propinsi Aceh menunjukkan adanya kesenjangan kualitas pembangunan manusia antara Kota Banda Aceh dan kabupaten lainnya di Propinsi Aceh. Kesenjangan ini adalah salah satu pemicu tingginya migrasi penduduk terutama tenaga kerja ke Kota Banda Aceh.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

2.2.2.1 Angka Melek Huruf (AMF)

Upaya pembangunan dan pengembangan pendidikan pada umumnya lebih diarahkan pada usaha memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Untuk mecapai hal tersebut pemerintah berupaya menyediakan sarana wajib belajar 6 tahun yang dicanangkan tahun 1984 menjadi wajib belajar 9 tahun yang dimulai tahun 1994. Dengan demikian diharapkan tingkat pendidikan penduduk menjadi lebih baik dan jumlah penduduk buta huruf akan berkurang terutama pada usia sekolah (7-18 tahun).

Berdasarkan grafik berikut, dapat dilihat persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang mampu baca tulis di Kota Banda Aceh pada tahun 2016 sebesar 99,99 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas masyarakat Kota Banda Aceh sudah sangat baik dari sisi literasi. Nyaris tidak ada penduduk Kota Banda Aceh yang tidak mampu baca tulis.Ini menunjukkan sistem pendidikan dasar yang dijalankan di Kota Banda Aceh telah berjalan efektif.

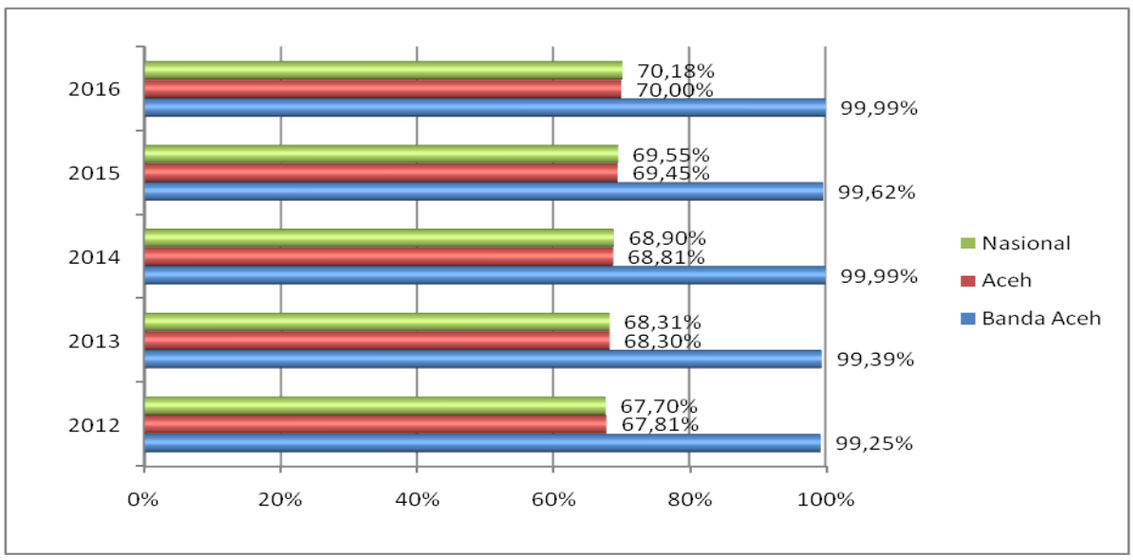

Sumber : BPS Kota Aceh, BPS Aceh, dan BPS Pusat

Gambar 2.21

Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2012 – 2016

2.2.2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen IPM yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun). Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa secara umum tingkat pendidikan penduduk dewasa di suatu daerah. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Banda Aceh mencapai 12,01 tahun pada tahun 2016, artinya penduduk Kota Banda Aceh usia 15 tahun ke-atas sudah menyelesaikan pendidikan SMA

sederajat. Namun angka rata-rata lama sekolah tahun 2016 tersebut turun dibandingkan tahun 2015 dari 12,38 tahun menjadi 12,01 tahun. Angka rata-rata tersebut mengalami peningkatan dari 12,07 tahun pada tahun 2012. Pencapaian angka pada tahun 2016 tersebut sudah memenuhi target pencapaian nasional rata-rata 12 tahun. Grafik berikut menggambarkan perbandingan kondisi angka rata-rata lama sekolah di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional selama lima tahun terakhir.

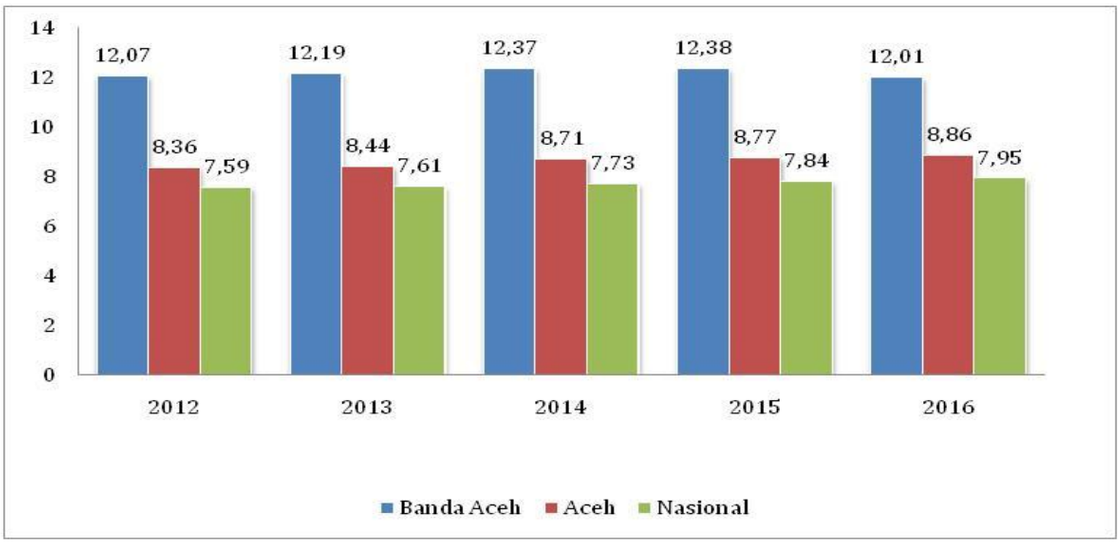

Sumber : BPS Kota Aceh, BPS Aceh, dan BPS Pusat

Gambar 2.22
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2012 – 2016

Grafik diatas menunjukkan posisi penduduk usia sekolah di Banda Aceh mengenyam masa pendidikan jauh lebih lama dibandingkan rata-rata lama sekolah pada Provinsi Aceh dan Nasional.

2.2.2.3 Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Usia harapan hidup di Kota Banda Aceh secara konstan mengalami peningkatan dari 70,76 tahun 2012 menjadi 70,92 tahun 2016. Hal ini menunjukkan derajat kesehatan penduduk Kota Banda Aceh sudah membaik. Namun pencapaian tersebut tidak sampai mengurangi program-program peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sehingga AHH tersebut tetap terjaga dan meningkat.

Dibandingkan harapan hidup provinsi Aceh dan Nasional posisi AHH Banda Aceh juga jauh lebih baik. Grafik berikut menggambarkan perkembangan AHH Banda Aceh, Aceh, dan Nasional tahun 2012 – 2016.

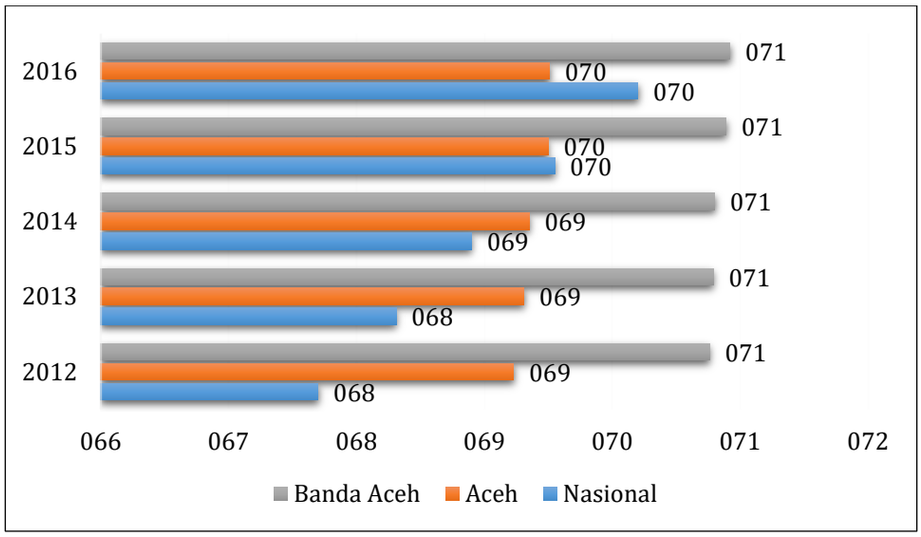

Sumber BPS Banda Aceh dan BPS Aceh

Gambar 2.23

Angka Harapan Hidup di Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

2.2.2.4 Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk yang diukur dari jumlah balita gizi buruk dibagi dengan jumlah balita dikalikan 100, pada akhir tahun periode RPJM yang lalu hanya terdapat angka 0.04% saja. Mengacu pada profil kesehatan tahun 2016, balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan sudah mencapai 100%, itu artinya semua kasus yang dilaporkan sudah ditangani maksimal, adapun 0.04% yang didapatkan merupakan kasus yang terlambat dilaporkan, atau kasus penelantaran.

2.2.2.5 Prevalensi Balita Gizi Kurang

Permasalahan gizi kurang dan buruk pada balita sangat penting diketahui secara dini, kaerena penanggulangannya tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja. Pada umumnya, masalah gizi muncul akibat masalah ketahanan pangan ditingkat rumah tangga, yaitu karena ketidakmampuan rumah tangga memperoleh makanan untuk semua anggota keluarganya.

Penyebab langsung kurang gizi yaitu asupan makanan tidak seimbang dan penyakit infeksi. Sedangkan untuk penyebab tidak langsung diantaranya tidak cukup persediaan pangan, pola asuh anak tidak memadai, sanitasi/pelayanan kesehatan dasar tidak memadai. Kekurangan gizi akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pada anak usia dini akan mengakibatkan rendahnya kemampuan kognitif dan kecerdasan anak, serta berpengaruh terhadap menurunnya produktivitas anak. Sedangkan pada anak, anak yang kurang gizi akan tumbuh kecil, kurus, dan pendek.

2.2.2.6 Cakupan Desa Siaga Aktif

Gampong Siaga merupakan gambaran masyarakat yang sadar, mau dan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat seperti kurang gizi, penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB), kejadian bencana, kecelakaan, dan lain-lain, dengan memanfaatkan potensi setempat, secara gotong royong. Pengembangan Gampong Siaga mencakup upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat Gampong, menyiap-siagakan masyarakat menghadapi masalah-masalah kesehatan, memandirikan masyarakat dalam mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Suatu gampong dinamakan gampong siaga bila mempunyai 8 indikator yaitu :

1. Adanya Forum Masyarakat Gampong
2. Adanya Fasilitas Pelayanan kesehatan Dasar dan Sistem Rujukannya
3. Adanya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yang dikembangkan
4. Adanya Sistem Pengamatan Penyakit (Surveilance) berbasis Masyarakat

5. Adanya Sistem Kesiapsiagaan bencana dan Kegawatdaruratan berbasis masyarakat
6. Adanya upaya menciptakan Lingkungan Sehat
7. Adanya Upaya mewujudkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
8. Adanya Upaya mewujudkan Kadarzi (Keluarga Sadar Gizi)

2.2.2.7 Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja yang merupakan modal dasar dalam menggerakkan roda pembangunan pada suatu negara ataupun daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mempercepat pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih tinggi. Permasalahan ketenagakerjaan menjadi isu disetiap Daerah sehingga harus mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah pokok yang harus merangkul swasta untuk bersama-sama mengurangi dan menuntaskan masalah ketenagakerjaan di Indonesia khusunya di Banda Aceh. Banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan ketenagakerjaan. Kebijakan-kebijakan tersebut diwujudkan dalam usaha konkret, yaitu memperluas kesempatan kerja dan lapangan kerja serta meningkatkan mutu tenaga kerja.

Pada tahun 2012 berdasarkan Badan Pusat Statistik jumlah angkatan kerja di Banda Aceh tercatat 97.973 jiwa, pada tahun 2015 meningkat menjadi 115 696 jiwa atau 61,05%, tidak tersedia data untuk tahun 2016 karena BPS Kota Banda Aceh tidak melakukan survey terhadap kondisi ketenagakerjaan Kota Banda Aceh tahun 2016 (tabel 2.17).

Tabel 2.17

Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Angkatan Kerja (jiwa)	97 973	np	112 067	115 696	np
	- Bekerja	90 944	np	100 592	101 808	np
	- Pengangguran	7 029	np	11 475	13 888	np
2	Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	73 728	np	76 014	73 816	np
	- Sekolah	25 771	np	37 826	35 205	np
	- Mengurus RumahTangga	36 529	np	31 077	32 796	np
	- Lainnya	11 428	np	7 111	5 815	np
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK	57,06	np	59,58	61,05	np
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,17	np	10,24	12,00	np

Sumber : Badan Pusat Statitik Kota Banda Aceh 2013-2016

Keterangan : BPS Kota Banda Aceh tidak menyediakan Data tahun 2013 dan 2016 (np:not published)

Belum bisa ditemukan data kondisi ketenagakerjaan kota Banda Aceh di Website BPS Provinsi Aceh

Peningkatan jumlah angkatan kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tersebut tidak dibarengi dengan perluasan lapangan kerja atau kapasitas produksi, akibatnya jumlah pengangguranpun meningkat seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah pengangguran merupakan masalah yang sangat serius dan sangat mempengaruhi kondisi daerah, karena jumlah pengangguran merupakan indikator majunya perekonomian suatu daerah yang dapat menunjukkan tingkat distribusi pendapatan yang merata atau tidak di daerah tersebut. Selain masih terbatasnya lapangan pekerjaan, pengangguran di kota Banda Aceh disebabkan juga oleh beberapa faktor seperti arus urbanisasi dari daerah kabupaten lain ke Kota Banda Aceh untuk mencari pekerjaan, skill yang masih kurang dari pencaker yang tidak sesuai dengan standar dunia kerja dan masih kurangnya minat pencari kerja untuk berwirausaha secara mandiri.

Perkembangan TPAK setiap tahunnya semakin meningkat baik Kota Banda Aceh maupun Provinsi Aceh dan Naional, TPAK kota Banda Aceh selama beberapa tahun terakhir selalu lebih rendah dari Provinsi Aceh dan Nasional, grafik perkembangan TPAK kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional dilihat pada grafik berikut

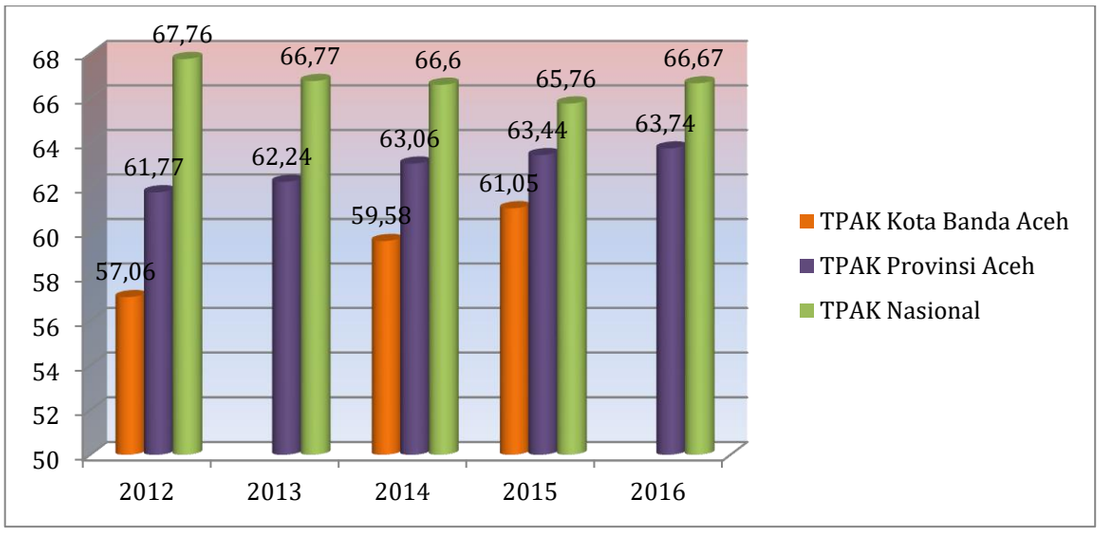

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional 2013-2016
Keterangan : BPS Kota Banda Aceh tidak menyediakan Data tahun 2013 (np:not published)

Gambar 2.24
Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2012 – 2015

2.2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi berbagai negara di dunia, tingginya angka pengangguran akan berakibat pada lambannya jalan perekonomian. Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang harus dapat diatasi dengan baik. Pengangguran yang terlalu besar membawa efek terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan, seperti meningkatnya angka kemiskinan, memperlambat proses pembangunan, meningkatnya angka kriminalitas dan lain sebagainya. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kota Banda Aceh dapat dilihat pada grafik berikut ini:

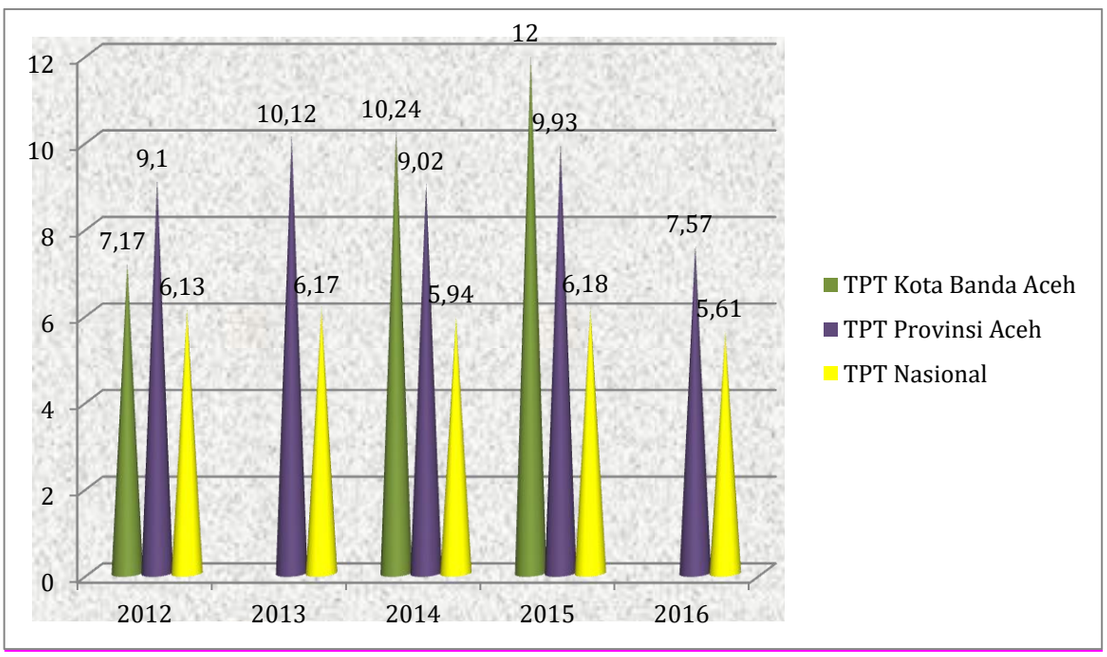

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional 2012-2016
Keterangan : BPS Kota Banda Aceh tidak menyediakan Data tahun 2013 dan 2016 (np : not published)

Gambar 2.25
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2012 – 2016

Dari grafik diatas dapat dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka di kota Banda Aceh mengalami peningkatan dari 7,17 persen pada tahun 2012 menjadi 12,00 persen pada tahun 2015 dari jumlah angkatan kerja sebanyak 115.696 orang, 13.888 orang tidak bekerja. Jika dibandingkan dengan

TPT Provinsi Aceh, kondisi pengangguran di Kota Banda Aceh pada tahun 2015 berada diatas persentase pengangguran Provinsi Aceh yang rata-rata 9,93 persen dan tingkat pengangguran rata-rata nasional sebesar 6,18 persen. Pada tahun 2016 TPT Provinsi Aceh dan Nasional mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015 dan untuk Kota Banda Aceh pada tahun 2016 tidak diketahui apakah mengalami peningkatan atau penurunan dari tahun 2015 karena pada tahun 2016 tidak tersedia data disebabkan BPS Kota Banda Aceh tidak melakukan survey terhadap TPT Kota Banda Aceh tahun 2016,

Jumlah penduduk masuk ke kota Banda Aceh pada tahun 2011 (12.000 jiwa) hingga tahun 2015 (7.274 jiwa) yang justru menurun, maka faktor migrasi penduduk ke Kota Banda Aceh bukanlah penyebab utama tingginya tingkat pengangguran di Banda Aceh. Yang menjadi factor pendukung tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Banda Aceh adalah kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan sebagian angkatan kerja serta melambatnya perekonomian secara nasional.

Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh sebagai SKPD yang berhubungan langsung dengan pengangguran telah melakukan usaha-usaha pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja setiap tahunnya melalui BLK Kota Banda Aceh. Pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan setiap tahun nya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.18

Jenis Pelatihan yang dilakukan Disnaker Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016

Kejuruan Pelatihan	Tahun					Jumlah
	2012	2013	2014	2015	2016	
Menjahit	15	35	65	15	80	210
Teknisi Cooling System	15	15	-	-	20	50
Teknisi Sepeda Motor	-	-	15	15	20	50
Las Listrik	-	-	0	15	-	15
Kewirausahaan Membuat Kue	-	180	300	-	-	480
Jumlah	**30**	**230**	**380**	**45**	**120**	**805**

Sebagaimana tabel di atas, setiap tahun pemerintah hanya mampu mengalokasikan dana untuk pelatihan bagi pengangguran/ pencari kerja rata-rata 160 orang per tahun, sementara pengangguran yang terdata di Dinas Tenaga Kerja setiap tahun nya rata-rata 1000 orang per tahun sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.19

Jumlah Pencari Kerja Tahun 2012-2016

Pencari Kerja	Tahun					Jumlah
	2012	2013	2014	2015	2016	
Terdaftar di Dinas Tenaga Kerja	659	2,004	1,238	389	715	**5,005**
Jumlah	**659**	**2,004**	**1,238**	**389**	**715**	**5,005**

Antara jumlah pencari kerja terdaftar dan pencari kerja yang diberikan pelatihan persentasenya masih sangat kecil, yaitu 16 %. Seharusnya minimlah jumlah pencari kerja yang terdaftar dan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan mencapai 50%.

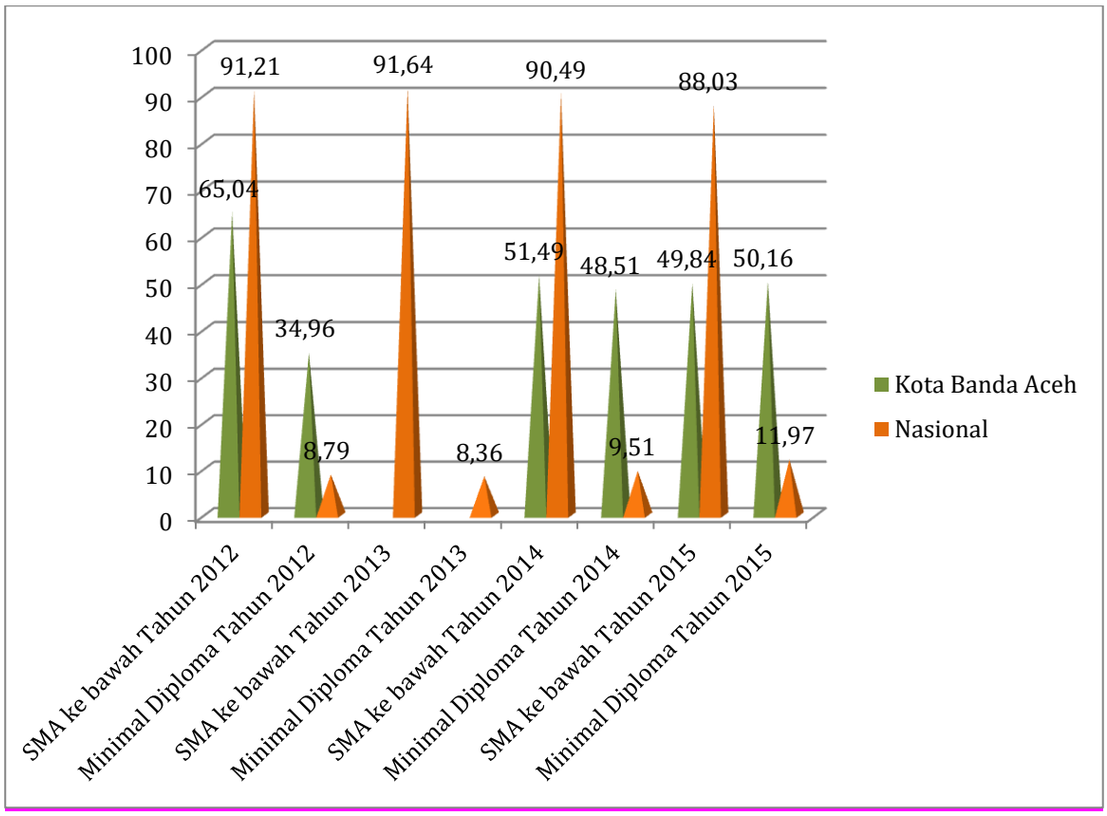

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh dan Nasional 2013-2016
Keterangan : BPS Kota Banda Aceh tidak menyediakan Data tahun 2013 (np:not published)
Belum bisa ditemukan data tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pengangguran di Aceh di Website BPS Provinsi Aceh

Gambar 2.26
Perbandingan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan oleh Pengangguran di Kota Banda Aceh dan Nasional tahun 2012 -2015

Dari grafik di atas dapat dilihat dari komposisi mereka yang menganggur dari tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan. Pada tahun 2012, lebih dari dua pertiga (65,04) pengangguran di Kota Banda Aceh menamatkan pendidikan setingkat SMA/ sederajat atau dibawahnya. Hanya sepertiga di antara mereka yang menamatkan pendidikan minimal diploma. Pada tahun 2015, pengangguran yang menamatkan pendidikan minimal diploma justru sedikit lebih banyak dibandingkan mereka yang hanya menamatkan pendidikan setingkat SMA/sederajat atau dibawahnya (50,16 persen dibandingkan 49,84 persen). Sementara jika dilihat secara Nasional pengangguran yang menamatkan pendidikan minimal diploma ke bawah pada tahun 2012 sampai tahun 2015 sangat sedikit jika dibandingkan dengan pengangguran dengan tingkat pendidikan SMA ke bawah.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1 Kebudayaan

2.2.3.1.1 Jumlah Grup Kesenian

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Kota Banda Aceh memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki masyarakat. Pengembangan seni budaya diharap dapat menjadi pendorong berkembangnya potensi daerah. Di bawah ini disampaikan data capaian pembangunan tentang grup kesenian serta gedung kesenian yang ada di Kota Banda Aceh, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.20

Capaian Kebudayaan Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

No	Capaian Pembangunan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	89	46	50	65	65
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	0	1	1	1	1

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh

2.2.3.1.2 Jumlah gedung kesenian

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perkembangan grup kesenian dan gedung kesenian per 10.000 penduduk. Jumlah grup kesenian tahun 2013 menurun dibandingkan tahun 2012, namun meningkat di tahun 2014 menjadi 50 grup, dan seterusnya tahun 2015 dan 2016 meningkat menjadi 65 grup kesenian, sedangkan jumlah gedung kesenian yang dikelola oleh Pemerintah Kota Banda Aceh hanya 1 unit.

2.2.3.2 Pemuda dan Olahraga

2.2.3.2.1 Jumlah Klub Olahraga

Pengembangan olahraga dapat menjadi salah satu faktor pendorong perekonomian daerah dikaitkan dengan pariwisata. Saat ini berkembang kegiatan olahraga yang disebut wisata olahraga atau sport tourism. Wisata olahraga dapa membuka peluang investasi melalui kerja sama antara pemerintah, perusahaan swasta serta masyarakat di daerah yang memiliki potensi wisata.

Selain untuk pengembangan pariwisata, pembangunan olahraga juga diperlukan untuk membangun penduduk yang sehat secara jasmani dan rohani terutama generasi muda. Pembinaan olahraga yang berkesinambungan dapat menghasilkan atlet-atlet berprestasi baik tingkat lokal maupun nasional. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan olahraga :

1. Sumberdaya manusia olahraga (pelatih, atlet, wasit dan pengurus olahraga)
2. Sarana dan prasarana
3. Kebijakan pemerintah daerah
4. Kinerja organisasi

Pemerintah Kota Banda Aceh terus berusaha meningkatkan pembinaan olahraga didaerah melalui instansi berwenang dan melibatkan partisipasi masyarakat. Pengembangan olahraga diharap dapat menjadi pendorong berkembangnya potensi daerah. Berikut dapat dilihat perkembangan seni, budaya, dan olahraga di Kota Banda Aceh dari 2012 – 2016.

Tabel 2.21

Perkembangan Olahraga Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

No	Capaian Pembangunan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	0	0	32	32	32
2	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	1	1	1	1	1

Sumber Dispora Kota Banda Aceh

2.2.3.2.2 Sarana dan Prasarana Olahraga

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perkembangan klub olahraga, dan gedung olahraga per 10.000 penduduk. Tahun 2012 – 2013 tidak data klub olahraga karena tidak ada klub olahraga yang dibina oleh Dispora Kota Banda Aceh. Tahun 2014 – 2016 terdapat 32 klub olahraga namun klub tersebut bukanlah klub binaan Dispora. Gedung olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota Banda Aceh hanya 1 gedung olahraga, sehingga jika dilihat dari table bahwa hanya tersedia 1 gedung untuk digunakan oleh 10.000 penduduk. Namun partisipasi masyarakat gampong dalam membangun sarana olahraga dimasing-masing gampong juga tinggi, seperti lapangan volley, lapangan futsal, lapangan bola kaki, dan lain-lain sehingga para pemuda gampong dapat mengisi waktu luang mereka dengan berolahraga.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan

2.3.1.1 Syariat Islam

Urusan keagamaan merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan signifikan di Provinsi Aceh. Setelah lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh, pelaksanaan syariat islam di Aceh telah memiliki payung hukum yang kuat. UU Nomor 11 Tahun 2016 merupakan pengakuan Negara terhadap keistimewaan dan kekhususan Aceh. Pelaksanaan syariat islam meliputi ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islamyang ketentuannya diatur dalam Qanun (Peraturan Daerah). Kota Banda Aceh memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan syariat islam, sebagai ibukota propinsi otomatis Kota Banda Aceh menjadi barometer dan sorotan terhadap penerapan syariat islam. Kota Banda Aceh yang memiliki penduduk heterogen, merupakan tempat berkumpulnya orang dengan suku, adat istiadat, budaya, dan agama berbeda, sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh negatif.

2.3.1.1.1 Jumlah Pelanggaran Qanun Syariat Islam

Aceh merupakan salah satu daerah yang diberi status khusus oleh Pemerintah untuk melaksanakan penerapan kekhususan di bidang Syari'at Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh berwenang untuk melaksanakan keistimewaan Aceh yang berkaitan dengan Syari'at Islam.

Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi, menjadi barometer dalam penerapan pelaksanaan Syari'at Islam. Penduduk kota Banda Aceh yang heterogen, dimana penduduknya juga banyak yang berasal dari luar Aceh menjadikan penerapan Syari'at Islam seperti yang diharapkan tidaklah mudah. Untuk menjaga agar keistimewaan Aceh dalam bidang pengamalan Syari'at Islam dapat berjalan sebagaimana diharapkan, maka dikeluarkan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), dan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat dan Mesum.

Perkembangan kota dan arus informasi yang pesat membuat pola kehidupan warga kota menjadi berubah, seperti cara pergaulan, berpakaian, dan sebagainya. Hal tersebut berimbas pada terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap Qanun Syari'at Islam. Dalam rentang waktu 2012 – 2016 terjadi beberapa kasus pelanggaran Qanun Syari'at Islam.

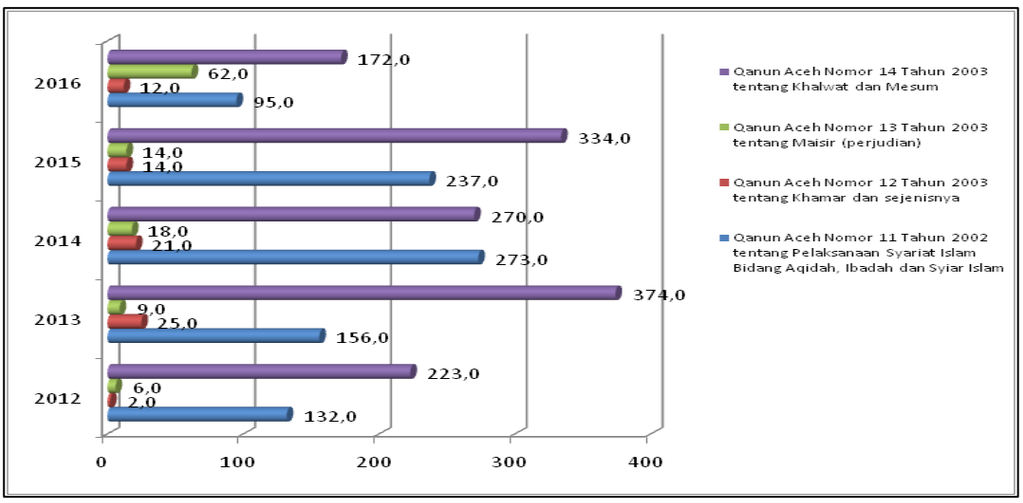

Sumber : Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Gambar 2.27

Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Qanun Syari'at Islam di Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

Grafik diatas menggambarkan kondisi penanganan terhadap pelanggaran Qanun Syari'at Islam selama 2012 – 2016. Pelanngaraan qanun didominasi oleh pelanggaran terhadap Qanun nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat dan Mesum, kemudian diikuti oleh pelanggaran Qanun Nomor 11

Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Hal ini menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dijalankan untuk penegakan qanun Syariat Islam.

2.3.1.1.2 Kemampuan Baca Al-Quran Siswa Tingkat Sekolah Menengah

Tabel 2.22

Tabel Jumlah Siswa Menengah yang Mampu Baca Al-Quran

No	Capaian Pembangunan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah siswa SMP dan SMA yang mampu Baca Al-quran	31,20	69,92	82,99	86,70	95,25

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.3.1.1.3 Kemampuan Baca Tulis Arab Jawi Siswa Sekolah

Tabel 2.23

Tabel Jumlah siswa yang Mampu Baca Tulis Arab Jawi

No	Capaian Pembangunan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah siswa yang mampu Baca Tulis Arab Jawi	0,00	62,99	75,99	83,50	88,26

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.3.1.1.4 Frekuensi Kegiatan Syiar dan Dakwah di Masyarakat

Tabel 2.24

Tabel frekuensi Syiar dan dakwah di Kota Banda Aceh

No	Kegiatan	Frekwensi Pelaksanaan Pertahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Safari Dakwah (Safda) Malam Minggu	0	0	44 Kali	44 Kali	44 Kali
2	Dakwah Umum Jumatan	0	9 Kali	11 Kali	12 Kali	6 Kali
3	Safari Da'iyah (Jumat Siang)	0	0	0	0	44 Kali
4	Kajian Pejabat (Jumat Malam)	11 Kali	11 Kali	11 Kali	11 Kali	11 Kali
5	Safari Sekolah	0	0	0	0	44 Kali
6	Ceramah Penyejuk Hati	0	0	290 Kali	290 Kali	290 Kali
7	Dakwah Da'iyah Ramadhan	0	0	90 Kali	90 Kali	90 Kali
8	IRUP ke Sekolah	0	0	40 Kali	40 Kali	15 Kali
	Total	**11 Kali**	**20 Kali**	**486 Kali**	**487 Kali**	**544 Kali**

Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada kegiatan dakwah umum jumatan terjadi penurunan dikarenakan telah dimunculkannya beberapa kegiatan baru yaitu kegiatan safari da'iyah jumat siang, Safari dakwah (Safda) malam minggu dan Kegiatan Safari Sekolah sehingga kegiatan Dakwah Umum Jumatan dikecilkan jumlah kegiatan dakwahnya.

Sedangkan untuk kegiatan IRUP ke sekolah volume kunjungan diperkecil setiap tahunnya dari 40 Sekolah menjadi 15 sekolah mengingat sudah meratanya sekolah yang dikunjungi dan Materi yang disampaikan juga sama setiap tahunnya yaitu mengenai sosialisasi Qanun Syariat Islam.

2.3.1.1.5 Jumlah Masjid yang Memenuhi Standar Kebersihan, Ketertiban, dan Asessibel

Tabel 2.25

Tabel Jumlah masjid yang memenuhi standar kebersihan, Ketertiban dan Asessibel

No	Tahun	Jumlah Masjid	Masjid yang memenuhi standar kebersihan	Masjid yang ramah disabilitas
1	2012	92	15	0
2	2013	92	18	0
3	2014	98	21	0
4	2015	98	24	1
5	2016	98	27	1

Masjid merupakan bangunan monumental bagi umat Islam yang dibangun dengan banyak menyita perhatian bahkan dengan mengerahkan segala daya upaya, sehingga untuk mewujudkan bangunan yang megah dilakukan penggalangan dana baik dengan swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, swasta atau dengan bantuan dari luar negeri. Agar segala daya upaya tersebut tidak menjadi pekerjaan yang sia-sia, maka peran dari BKM dan juga masyarakat untuk menjaga, memelihara menjadi hal yang mutlak diperlukan. Kondisi masjid yang jorok, kotor kumuh dan

tatakelola yang tidak transparan akan berpengaruh kepada kelancaran proses pelaksanaan ibadah di masjid tersebut.

Sebagai salah satu bentuk peran dan tanggung jawab Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh adalah melaksanakan pembinaan kepada pengurus masjid mengenai tata kelola sebagaimana yang diharapkan sehingga para jamaah yang akan melaksanakan ibadah merasa aman, nyaman dan tentram. Pembinaan tersebut diharapkan dapat memberi masukan dan pengetahuan kepada Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) untuk dapat mengelola masjid secara professional.

Adapun materi pembinaan tersebut meliputi beberapa unsur, yaitu:

- Bidang Idarah yang meliputi aspek administrasi dan aspek organisasi dan pendukung bidang idarah.
- Bidang Imarah yang meliputi aspek peribadatan dan aspek kegiatan pendukung bidang imarah.
- Bidang Riayah yang meliputi aspek sarana dan prasarana, fisik bangunan, dan aspek kebersihan dan keindahan.

Dari hasil pembinaan dan penilaian terhadap mesjid-mesjid tersebut akan dilanjutkan dengan penilaian untuk memilih beberapa masjid yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai pemenang lomba kebersihan dan ketertiban masjid dalam Kota Banda Aceh.

Pembinaan yang dilaksanakan untuk periode 2012-2016 adalah sebanyak 27 masjid dari jumlah masjid total sebanyak 98 masjid dengan rincian per tahun dilaksanakan sebanyak 9 masjid yang merupakan perwakilan dari 9 kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh yang telah diseleksi di tingkat kecamatan. Dari 9 masjid yang telah dibina akan dilanjutkan dengan penilaian oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Syariat Islam untuk memberi apresiasi dan penghargaan terhadap keberhasilan dalam mengelola masjid sebagaimana yang diharapkan pada saat pembinaan. Dari sembilan masjid yang menjadi peserta lomba kebersihan dan ketertiban masjid, panitia hanya memilih 3 pemenang, yaitu juara I, II dan III.

Dengan terlaksananya pembinaan secara rutin setiap tahun diharapkan tingkat pemahaman dan pengetahuan bagi Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dalam mengelola rumah ibadah semakin baik sehingga akan berdampak kepada meningkatnya tingkat kemakmuran di masjid-masjid dalam wilayah Kota Banda Aceh.

Tabel 2.26

Data 7 Cabang yang diperlombakan Dalam MTQ (data series)

No	Cabang-Cabang MTQ	2012	2013	2014	2015	2016
1	*Tilawah*	12 Org	12 Org	14 Org	14 Org	14 Org
2	*Tafsir*	6 Org	6 Org	6 Org	6 Org	6 Org
3	*Tahfizh*	10 Org	10 Org	10 Org	10 Org	10 Org
4	*Fahmil Qur'an*	6 Org	6 Org	6 Org	6 Org	6 Org
5	*Syarhil Qur'an*	3 Org	3 Org	3 Org	3 Org	6 Org
6	*Khattil Qur'an*	6 Org	6 Org	6 Org	6 Org	8 Org
7	*MMQ*	2 Org	2 Org	2 Org	2 Org	2 Org
	Total	**45 Org**	**45 Org**	**47 Org**	**47 Org**	**52 Org**

MTQ merupakan ajang kreatifitas bagi para qari-qariah, hafizh-hafizah, pensyarah dan penghapal Al-Qur'an. Event ini juga bertujuan untuk mensyiarkan Islam melalui media Al-Qur'an. Khususnya untuk Kota Banda Aceh kegiatan MTQ sudah dilaksanakan secara kontinyu setiap 2 (dua) tahun sekali dan sampai saat ini telah dilaksanakan sebanyak 34 kali. Demikian pula halnya dengan MTQ Aceh yang dilaksanakan secara rutin setiap dua tahun sekali.

Prestasi Kafilah MTQ Kota Banda Aceh dalam beberapa tahun belakangan ini tampak menurun, apalagi setelah Kota Banda Aceh ditimpa musibah Gempa Bumi dan Tsunami. Pada awal-awal pelaksanaan MTQ, Kafilah dari Kota Banda Aceh selalu menjadi juara Umum bahkan lebih dari 7 kali Juara Umum. Namun saat ini Kafilah Banda Aceh hanya mampu mencapai prestasi peringkat 4

(empat) besar pada MTQ Aceh tahun 2015 di Kab. Nagan Raya. Dimana telah terjadi peningkatan dibandingkan dengan prestasi Kafilah Banda Aceh pada MTQ XXXII di Kota Subulussalam, Kafilah Banda Aceh hanya mampu menduduki peringkat ke-6 dari 23 Kab/Kota yang mengikuti MTQ Aceh.

Peringkat dan prestasi ini diupayakan untuk terus diperbaiki salah satunya adalah dengan melakukan Pembinaan secara berkelanjutan dan sistematis di bawah binaan LPTQ Kota Banda Aceh.

2.3.1.2 Pendidikan Dayah

2.3.1.2.1 Jumlah Dayah, Guru dan Santri

Dayah sebagai pusat peradaban nusantara, telah memainkan perannya dalam peningkatan sumber daya manusia terutama dalam mewujudkan Baanda Aceh sebagai Kota Gemilang. Dalam Konteks Banda Aceh saat ini Dayah di Banda Aceh berjumlah 33 Dayah dengan 2 Tipe yaitu Salafi (Tradisional) dan Terpadu (Modern).

Berdasarkan Data yang ada saat ini Jumlah tenaga Pengajar pada 33 Dayah sebesar ; 886 Guru Laki-laki dan 130 Guru Perempuan. Sementara Jumlah Santri nya sebesar ; 4976 Santri. Tentu ini menjadi potensi besar dalam rangka menyongsong Banda Aceh sebagai Kota Gemilang. Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai Upaya dalam melakukan sinergisitas antara ulama dengan umara.

Bahwa saat ini semua guru Dayah belum bersertifikasi karena belum ada format dari Instansi Pemerintah. Untuk itu perlu dipikirkan langkah-langkah strategis guna mewujudkan sertifikasi Guru Dayah. Terkait dengan akreditasi Dayah saat ini dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Berdasarkan Data dari Dinas Pendidikan Dayah Aceh hanya Ada 4 Dayah yang telah terakreditasi yaitu Darul Ulum, Babun Najah, Inshafuddin dan Al Ishlah Al-Aziziyah.

Dalam Konteks saat ini, Dinas Pendidikan Dayah telah melakukan terobosan guna memetakan cirikhas masing-masing Dayah. Secara Umum dapat dibagi menjadi 3 pola Kurikulum yang berkembang Yaitu Pola Kurikulom Pantai Barat Selatan dengan Pendekatan Darussalam, Pantai Timur dengan Pola Al-Aziyah dan Utara dengan Pendekatan Al-Fata. Pendekatan Model Kurukulm yang saat ini muncul khusunya pada Dayah Tradisional tidak terlepas pada 3 Pendekatan diatas.

2.3.1.2.2 Kurikulum

Model Kurikulum Modern umumnya mengacu pada Standarisasi Kementrian Agama dan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Banda Aceh. Adapun Dayah-Dayah yang menerapkan Kurikulum modern antara lain; Dayah Darul Ulum, Dayah Inshafuddin, Dayah Al-Ishlah Al-Aziziyah dan Dayah Babun Najah. Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh yang lahir dari manifetasi PP Nomor 18 Tahun 2006 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh, berupaya melakukan berbagai terobosan dalam melakukan Pembinaan Dayah. Sejak di bentuk telah melakukan berbagai aktifitas diantaranya Pemutakhiran Data Dayah, Rapat Koordinasi Pimpinan Daya, Pembentukan Forum Pimpinan Dayah serta berbagai kegiatan Mitra Bestari dengan Kementrian Antar Lembaga, termasuk BUMN, BI dan Perguruan Tinggi.

Dalam melaksanakan berbagai aktifitasnya ditemukan berbagai Problem diantaranya:

- Belum adanya Regulasi tentang penyelenggaraan system pendidikan daerah
- Keterbatasan jumlah tenaga pengajar yang handal dan professional terutama penguasaan kitab kuning (Qiraatul Kutub)
- Pengelolaan manajemen dayah masih tradisional
- Terbatasnya dana jumlah operasional dayah
- Belum adanya standarisasi kebersihan dan kesehatan dayah
- Belum maksimalnya sarana dan prasarana fasilitas pendukung lainnya

- Masih rendahnya kualitas kelulusan santri
- Terbatasnya relasi dayah dengan dunia luar
- Belum adanya profil dayah yang terintegrasi

2.3.1.3 Baitul Mal

2.3.1.3.1 Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Baitul Mal terus meningkatkan upaya penerimaan zakat dari masyarakat. Sejak tahun 2012 penerimaan zakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, seiring dengan kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat di lembaga amil zakat pemerintah yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh. Selain zakat penghasilan, zakat perniagaan, infaq dan sadaqah. Baitul Mal juga melaksanakan pemotongan zakat pada setiap SP2D belanja daerah sesuai ketentuan yang telah di tetapkan melalui peraturan Walikota nomor

Tabel 2.27

Tabel penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Thn	Target	Realisasi Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah				
		Zakat Penghasilan	Zakat Perniagaan	Infaq	Shadaqah	Jumlah
2012	8.000.000.000,00	7.639.152.153,00	785.335.365,00	445.232.943,00	144.755,00	8.869.865.216,00
2013	14.237.722.547,00	12.129.553.464,0	1.221.060.259,00	1.147.168.873,00	2.602.375,00	14.500.384.971,00
2014	15.736.222.547,00	12.650.123.139,0	1.019.512.201,00	1.064.746.613,00	1.317.640,00	14.735.699.593,00
2015	17.368.836.141,00	13.789.549.463,0	2.031.487.788,00	1.022.893.124,00	5.223.644,00	16.849.154.019,00
2016	18.504.500.000,00	17.936.139.683,0	738.534.696,00	806.516.960,00	-	19.481.191.339,00
Jmlh	**73.847.281.235,00**	**64.144.517.902,0**	**5.795.930.309,00**	**4.486.558.513,00**	**9.288.414,00**	**74.436.295.138,00**

Sumber : Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh

Jumlah Muzaki

Tabel 2.28

Tabel Jumlah Muzakki

Tahun	Target	Jumlah Muzzaki
2012	8.531	8.166
2013	8.705	7.953
2014	8.851	8.099
2015	8.943	9.193
2016	9.195	9054
Jumlah	**44.225**	**42.465**

Data Mustahiq (penerima Zakat)

Tabel 2.29

Tabel Data Mustahiq

Senif	2012	2013	2014	2015	2016
Faqir	3.576	3.159	3.122	3.142	2.952
Miskin	4.522	5.298	5.407	5.351	5.388
Fisabillah	4.797	5.205	5.306	4.589	4.449
Ibnu Sabil	28	53	13	14	15
Muallaf	56	37	12	14	1
Gharim	13	16	24	1	2
Jumlah	12.992	13.768	13.884	13.111	12.807

Data Penerimaan Zakat Per Tahun

Tabel 2.30

Tabel Data Penerimaan Zakat Per Tahun

Tahun	Jumlah Penerimaan Zakat
2012	8.869.865.216,00
2013	14.500.384.971,00
2014	14.735.699.593,00
2015	16.849.154.019,00
2016	19.481.191.339,00

Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terjadi peningkatan penerimaan zakat dari Rp 8.869.865.216 sampai Rp 19.481.191.339. Peningkatan penerimaan Zakat ini merupakan hasil upaya sosialisasi yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Baitul Mal kepada

masyarakat dan dunia usaha. Penyaluran zakat yang telah dikumpulkan telah disalurkan untuk beberapa kegiatan kemasyarakatan antara lain pembangunan dan perbaikan rumah dhuafa, penyaluran beasiswa, bantuan modal usaha dan bantuan fakir miskin dan fakir uzur.

Tabel 2.31
Jumlah Rumah dhuafa yang telah dibangun

Tahun	Jumlah rumah
2012	-
2013	30
2014	30
2015	30
2016	32

Tabel 2.32
Jumlah Penerima Beasiswa

Tahun	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	Beasiswa ½ penuh	Beasiswa Tahfidz	Beasiswa santri Salafi	Total
2012	1.840	1.050	1.100	100	18	-	4.108
2013	1.840	1.050	1.100	200	24	31	4.245
2014	1.837	1.029	1.100	300	23	53	4.342
2015	1.505	826	776	299	20	57	3.483
2016	1.567	948	1.083	188	14	49	3.849
Jumlah	**8.589**	**4.903**	**5.159**	**1.087**	**99**	**190**	**20.027**

2.3.1.3.2 Sertifikasi Tanah Wakaf

Tabel 2.33
Sertifikasi Tanah Wakaf

Kecamatan	Bersertifikat	Belum Bersertifikat	Total
Jaya Baru	21	52	73
Banda Raya	40	38	78
Baiturrahman	65	35	100
Kuta Raja	115	20	135
Kuta Alam	23	73	96
Ulee Kareng	35	27	62
Meuraxa	45	41	86
Lueng Bata	32	37	69
Syiah Kuala	29	63	92
Jumlah	**405**	**386**	**791**

Sumber : Pendataan Tahun 2013.

Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Walikota. Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri atas 4 Bidang terdiri atas : Bagian Pengumpulan, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bagian Sosialisasi dan Pembinaan serta Bagian perwalian dan Harta Agama.

Bidang Perwalian dan Harta Agama memiliki tugas pokok dan fungsi salah satunya adalah Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan harta agama yang tidak jelas status kepemilikannya.Harta agama tersebut diantaranya merupakan harta wakaf yang terdapat diseluruh gampong dalam kota Banda Aceh.

Pada tahun 2013 yang lalu Baitul Mal Kota Banda Aceh berkerjasama dengan Kementerian Agama Kota Banda Aceh pernah melakukan kegiatan inventarisasi dan pendataan tanah wakaf dan harta agama pada kecamatan dalam wilayah kota banda aceh, jumlah rekapitulasi hasil pendataan dari kecamatan Jaya Baru berjumlah 73 Persil (bersertifikat 21 Persil, belum bersertifikat 52 Persil), Kecamatan Banda Raya berjumlah 78 Persil (bersertifikat 40 Persil, belum bersertifikat 38 Persil), Kecamatan Baiturrahman berjumlah 100 Persil (bersertifikat 65, belum bersertifikat 35), Kecamatan Kuta Raja berjumlah 135 Persil (bersertifikat 115, belum bersertifikat 20), Kecamatan Kuta Alam berjumlah 96 Persil (bersertifikat 23, belum bersertifikat 73), Kecamatan Ulee Kareng berjumlah 62 Persil (bersertifikat 35, belum bersertifikat 27), Kecamatan Meuraxa berjumlah 86 Persil (bersertifikat 45, belum bersertifikat 41) Kecamatan Lueng Bata 69 Persil (bersertifikat 32, belum bersertifikat 37), Kecamatan Syiah Kuala 92 Persil (bersertifikat 29, belum bersertifikat

63). Jumlah tanah wakaf seluruh kecamatan yang bersertifikat 405 Persil, sedangkan yang belum bersertifikat 386 Persil. Total keseluruhan berjumlah 791 Persil.

Kondisi tanah wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum seperti masjid, mushalla, pemakaman/ kuburan umum, persawahan, sekolah, kantor pemerintahan gampong, posyandu, toko/rumah sewa, tempat pendidikan agama. Selain itu banyak juga terdapat tanah wakaf yang tidak dikelola dengan baik untuk sektor produktif, artinya masih banyak lahan-lahan kosong yang harusnya bisa diproduktifkan tapi dibiarkan jadi lahan tidur. Disamping itu juga terdapat permasalahan yang sangat besar didalam pengusahaan tanah wakaf ini, karena banyak terdapat tanah wakaf yang diatasnya sudah dibangun rumah-rumah masyarakat seperti di gampong Merduati. Di gampong Peulanggahan juga terdapat 9 (sembilan) rumah yang memiliki kasus serupa plus satu rumah di Keudah yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah Banda Aceh untuk dititipkan ke Baitul Mal karena tidak ada ahli warisnya tetapi sampai dengan saat ini belum bisa dieksekusi lantaran terbentur biaya operasional.

Dengan banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan, menunjukkan bahwa butuh kerja keras bersama dalam mengembalikan tanah-tanah wakaf tersebut kepada pihak yang ditunjuk oleh negara untuk mengelola harta wakaf ini. Disamping itu juga banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat maka Baitul Mal Kota Banda Aceh merencanakan akan melaksanakan kegiatan sertifikasi terhadap tanah wakaf tersebut. Karena dinilai sangat penting untuk lebih terjamin menyelamatkan asset harta agama agar tidak menimbulkan sengketa, disalah gunakan, dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sehingga dapat terjaga keberadaannya dan mamfaat dari wakaf tersebut dapat mensejahterakan ummat dimasa mendatang.

Kegiatan sertifikasi nantinya melibatkan Baitul Mal Kota Banda Aceh, Baitul Mal Gampong, Kementerian Agama Kota Banda Aceh, Badan Pertanahan Nasiaonal (BPN). Kegiatan sertifikasi tersebut dilakukan bertahap. Jumlah biaya tergantung luas dari setiap persil biasanya berkisar Rp. 500.000 s/d Rp. 2.000.000.-.

Tabel 2.34
Data Tapem

No	Uraian	s/d 2016
1	Luas Wilayah Dataran	5.676,09 Ha
2	Luas Tanah bersertifikat HGB	1.959,00 Ha
3	Luas Tanah Bersertifikat HGU	0,25 Ha
4	Luas Tanah Bersertifikat HM	844,10 Ha
5	Luas Tanah Bersertifikat HP	287,80 Ha
6	Luas Tanah Bersertifikat HPL	52,20 Ha

Sumber : tapem

2.3.1.4 Majelis Ulama

2.3.1.4.1 Jumlah Fatwa, Himbauan, Tausyiah yang Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Syariat

Majelis Permusyawaratan Ulama yang disingkat dengan MPU adalah suatu lembaga independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRK. MPU merupakan wadah untuk meningkatkan peran ulama dalam pembangunan Kota Banda Aceh. MPU merupakan mitra kerja Pemerintahan Daerah dan DPRK dalam perumusan Kebijakan Daerah, yang berfungsi " memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan berdasarkan Syariat Islam serta memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan Syariat Islam ". Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, maka MPU Kota Banda Aceh mempunyai tugas:

a. Memberi masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syariat Islam
b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan Syariat Islam
c. Melakukan pengkaderan Ulama.

d. Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU.

2.3.1.4.2 Kewenangan MPU :

a. Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh;
b. memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh telah melaksanakan segenap kegiatan yang telah direncanakan secara proposional dan terstruktur pada sistem perencanaan, dan telah pula melakukan kegiatan yang didasari pada prakarsa insidental, temporal dan profesionalisme keulamaan dengan mengeluarkan :

Tabel 2.35

Tabel Keputusan Keulamaan

No	Tahun		Keterangan
1	2012	a.	Surat Keputusan hasil Mudzakarah Ulama MPU Kota Banda Aceh dengan tema " Melalui Mudzakarah Ulama Kita Berdayakan Ekonomi Umat Yang Berbasis Syariah"
		b.	Surat keputusan hasil Rapat Kerja MPU Kota Banda Aceh dengan tema " Peran Ulama Dalam Mensukseskan Pemilikada Tahun 2012 Yang Aman dan Damai (Kriteria Pemimpin Dalam Islam)
2	2013	a.	Surat Keputusan hasil Mudzakarah Ulama MPU Kota Banda Aceh dengan tema " Melalui Mudzakarah Ulama Kita Tingkatkan Pemahaman Masyarakat Dalam Memanfaatkan Produk Halalan Thayyiban"
		b.	Surat keputusan hasil Rapat Kerja MPU Kota Banda Aceh dengan tema " Optimalisasi Peran MPU Dalam Memberikan Pertimbangan Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK Untuk Penguatan Syariat Islam"
		c.	Surat Edaran larangan merayakan Natal danTahun Baru
3	2014	a.	Surat Keputusan hasil Mudzakarah Ulama MPU Kota Banda Aceh dengan tema " Perbankan Syariah Menuju Masyarakat Adil dan Makmur"
		b.	Surat keputusan hasil Rapat Kerja MPU Kota Banda Aceh dengan tema " Peran MPU Dalam Mewujudkan Pemilu Damai di Kota Banda Aceh"
		c.	Surat Keputusan hasil Lokakarya Ulama dengan tema " Melalui Lokakarya Ulama Kita Tingkatkan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal "
		d.	Hasil Penelitian Tentang Fenomena Keagamaan di Kota Banda Aceh
		e.	Surat Edaran larangan merayakan Natal danTahun Baru
		f.	Tausiyah Tentang Pemilu damai
		g.	Himbauan Untuk Qunut Naqzilah
		h.	Surat Arahan izin Daurah/Pengajian;
		i	Surat Arahan Kepada Perusahaan Craiving Light Vintage Café and Cake Shop
		j.	Surat Arahan kepada Ketum Pengprov gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI ACEH)
4	2015	a.	Surat Keputusan hasil Mudzakarah Ulama MPU Kota Banda Aceh dengan tema " Pemberdayaan Zakat Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Syar'I"
		b.	Surat keputusan hasil Rapat Kerja MPU Kota Banda Aceh dengan tema " Melalui Raker Kita Tingkatkan Profesionalisme dan Kualitas Kinerja Pengurus dan Pegawai MPU Kota Banda Aceh"
		c.	Surat Keputusan hasil Lokakarya Ulama dengan tema " Telaahan Rancangan Draft Perwal Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Pangan Halal dan Higienis "
		d.	Hasil Penelitian tentang Zikir Berjamaah di Kota Banda Aceh
		e.	Surat Edaran larangan merayakan Natal danTahun Baru
		f.	Rekomendasi kepada Gubernur Aceh dan DPRA Aceh terkait dengan Percepatan Lahirnya Qanun Aceh tentang Pendangkalan Aqidah dan Pemurtadan
		g.	Surat Arahan kepada CV. Utama Arsy Akbar Resources
		h.	Surat Arahan kepada Ketua Panitia Pelaksaan Zikir Akbar Radio Seulawat Ke-8
		i.	Surat Arahan kepada Ketua Panitia Mechanical Engineering Festival 2015
5	2016	a.	Surat Keputusan hasil Mudzakarah Ulama MPU Kota Banda Aceh dengan tema " Melalui Mudzakarah Ulama Kita Tingkatkan Peran Pemerintah Dalam Penetapan Mekanisme Pasar Yang Syar'I"
		b.	Surat keputusan hasil Rapat Kerja MPU Kota Banda Aceh dengan tema " Kemitraan MPU dan Pemerintah Kota Dalam Meningkatkan Kinerja Yang Bersyariah di Kota Banda Aceh"
		c.	Surat Keputusan hasil Lokakarya Ulama dengan tema " Melalui Lokakarya Ulama Kota banda Aceh Kita Aktualisasikan Praktek Penyembelihan Yang Halal dan Higienis "

No	Tahun		Keterangan
		d.	Hasil Penelitian tentang Gampong Syariat di Kota Banda Aceh
		e.	Tausiyah tentang Larangan Perayaan Valentine Day Bagi Umat Islam
		f.	Rekomendasi MPU tentang Produk Makanan Halalan Thayyiban kepada Pemerintah Aceh
		g.	Surat Arahan Kepada Pemko Banda Aceh tentang Hasil pembahasan terhadap penulisan Kaligrafi Asma'al-Husna pada Tugu Simpang Lima Kota Banda Aceh
		h.	Surat Arahan kepada Pimpinan PT. Bintang Perkasa Indah Motor
		i.	Surat Arahan kepada Ketua Stand-Up Comedy Banda Aceh
		j.	Surat Arahan kepada Pimpinan CV. Cipta Bintang Manajemen
		k.	Surat Arahan kepada CV. Mahkota Production Penyelenggara Konser Muusik Religi
		l.	Surat Arahan kepada Pimpinan Boesa management selaku penyelenggara Aceh Fashion Week
		m.	Surat Arahan kepada Pimpinan CV. Mahkota Production selaku penyelenggara acara Signature Moment

2.3.1.4.3 Sertifikasi produk halal

Sertifikasi produk halal dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan lembaga pelaksana Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan, Kosmetika dan Makanan (LPPOM).

Untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan ke LPPOM MPU Aceh. Adapun persyaratan yang harus disiapkan oleh pelaku usaha sebagai pemohon, antara lain: KTP, Profil Perusahaan, matrik bahan baku dan diagram alur proses produksi. Tata cara sertifikasi halal dimulai dengan menyampaikan pengajuan permohonan sertifikasi halal kepada LPPOM MPU, melengkapi persyaratan yang diminta dan penjadwalan audit.

2.3.1.5 Majelia Adat Aceh

Adat dan Adat Istiadat merupakan salah satu pilar Keistimewaan Aceh, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Dengan demikian, Pemerintahan Aceh wajib melaksanakan pembangunan di bidang Adat dan Adat Istiadat.

Lembaga keistimewaan Aceh yang melaksanakan pembangunan bidang Adat Istiadat adalah Majelis Adat Aceh (MAA), sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga-lembaga Adat. Selanjutnya, dikuatkan keberadaan Sekretariatnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2011 untuk mengisi Keistimewaaan Aceh dibidang Adat Istiadat yang merupakan seperangkat nilai-nilai keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Adat Istiadat tersebut telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat. Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh merupakan lembaga non struktural berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Dalam menentukan kebijakan di bidang adat serta untuk melestarikan, membina, mengkaji dan mengembangkan Adat-istiadat.

2.3.1.6 Majelis Pendidikan Daerah

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) merupakan sebuah lembaga setingkat Musyawarah Pimpinan Daerah sebagaimana lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU/MUI) dan Majelis Adat Aceh (MAA).

Lembaga ini hanya ada di Aceh sebagai sebuah kekhususan Aceh yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. MPD adalah lembaga yang mengkhususkan diri dalam urusan pendidikan. MPD Banda Aceh merupakan lembaga yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. MPD lahir sejak tahun 1990 di Banda Aceh yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 420/435/1990. Kemudian juga dilahirkan di seluruh kabupaten di Aceh.

a. Tugas Pokok MPD

1. Memberi pendapat dan pertimbangan mengenai pendidikan
2. Menyusun konsep-konsep pengembangan sistem pendidikan Islami
3. Mengawasi dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan
4. Menampung aspirasi masyarakat mengenai pendidikan dan mendorong partisipasi mereka dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan
5. Meningkatkan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan di Provinsi Aceh

b. Fungsi MPD

1. Sebagai badan pemikir (*Think tank body*)
2. Sebagai badan pemberi pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah mengenai pendidikan (*advisory body*)
3. Sebagai badan penggerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun dan meningkatkan mutu pendidikan (*motivating body*)
4. Sebagai badan pengawas pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan (*controlling body*)
5. Sebagai badan mediator antara masyarakat dan pemerintah serta antara sekolah, keluarga dan masyarakat (*mediating body*)

c. Wewenang MPD

1. Mengawasi dan menilai penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta.
2. Memberikan pendapat dan pertimbangan dalam menyusun rancangan anggaran pendidikan Provinsi Aceh.
3. Menjaga standar mutu pendidikan.
4. Mengembangkan sistem pendidikan Islami di Provinsi Aceh.

2.3.2 Fokus Layanan Wajib Dasar

2.3.2.1 Pendidikan

2.3.2.1.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan PAUD terdiri dari TK usia 4-6 tahun, KB usia 2-4 tahun, TPA usia 0-2 tahun, dan SPS usia 0-6 tahun.

Berdasarkan tabel dibawah ini diketahui bahwa perkembangan PAUD pada tahun ajaran 2016 mengalami peningkatan sebesar 64,53 persen dibanding tahun 2015. Hal ini menandakan bahwa adanya kesadaran dari orang tua akan pentingnya pendidikan PAUD walaupun PAUD merupakan pendidikan Non Formal saat ini.

Tabel 2.36

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0,00	61,00	51,00	49,00	64,53

Sumber Profil Pendidikan 2012 s.d 2016

2.3.2.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar merupakan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK yang tinggi menandakan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

Berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang tercatat pada tahun 2016, APK tertinggi di Kota Banda Aceh terdapat di tingkat SD yaitu 158,52 persen dan yang terendah di tingkat SMA/MA/SMK yaitu 100,19 persen. Tingginya APK adalah akibat banyaknya siswa usia di luar usia sekolah yang berada di jenjang tersebut ditambah dengan siswa lain penduduk luar Kota Banda Aceh yang bersekolah di Kota Banda Aceh. Berikut grafik penjelasan perkembangan APK Kota Banda Aceh tahun 2012 – 2016.

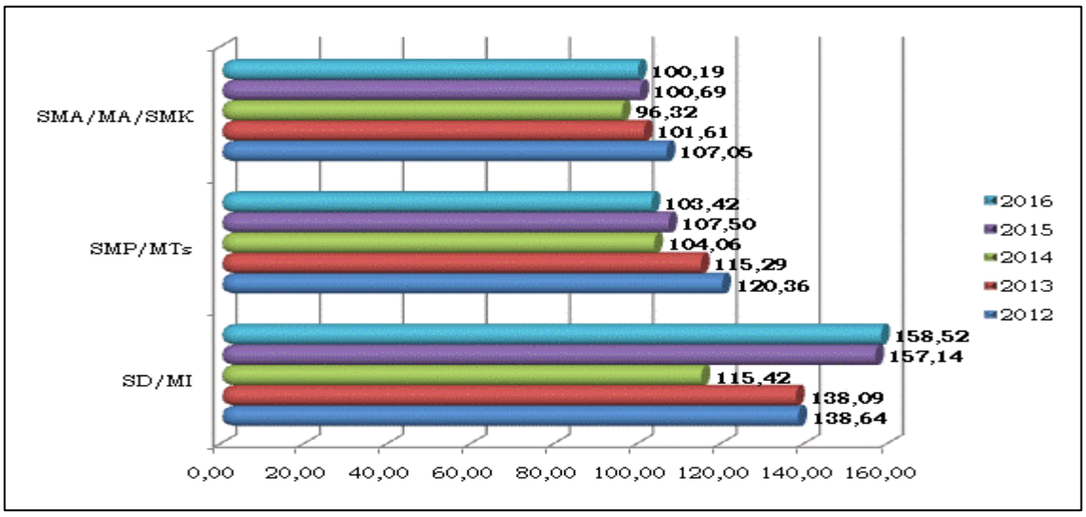

Sumber Profil Pendidikan 2012/2013 s.d 2016/2017

Gambar 2.28

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

2.3.2.1.3 Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Artinya semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan juga semakin besar dan dapat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan, sedangkan pengaruh tidak langsung akan terlihat pada pola pikir masyarakat, karena semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, maka cara berpikir juga akan lebih maju dan mudah menerima perubahan.

Berdasarkan tabel berikut menunjukkan angka pendidikan yang ditamatkan di Kota Banda Aceh pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs tahun 2016/2017 mencapai 99,88 persen, walaupun angka ini belum genap 100 persen, namun pencapaian tingkat kelulusan sudah baik. APT tersebut selama kurun waktu 2011/2012 – 2016/2017 cenderung stabil.

Tabel 2.37
Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah siswa Lulusan di jenjang pendidikan SD/MI	4.188	4.214	4.708	4.160	4.217
1.2.	Jumlah Siswa Tkt. VI	4.188	4.221	4.712	4.161	4.218
1.3.	APT SD/MI	100,00	99,83	99,92	99,98	99,97
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah siswa lulusan di jenjang SMP/MTs	4.071	4.144	4.518	4.428	4.414
2.2.	Jumlah siswa Tkt. III	4.086	4.152	4.524	4.432	4.423
2.3.	APT SMP/MTs	99,63	99,81	99,87	99,91	99.77
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	Jumlah siswa Lulusan di jenjang SMA/MA/ SMK	4.211	4.807	4697	4.641	
3.2.	Jumlah Tkt. Siswa III	4.449	4.818	4.708	4.695	
3.3.	APT SMA/MA/SMK	94,65	99,77	99,77	98,85	

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh

2.3.2.1.4 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun. APM tahun 2016 di Kota Banda Aceh untuk tingkat SD/MI 135,21 persen, SMP/MTs 76,33 persen, dan SMA/MA/SMK 62,44 persen. Penyebaran sekolah untuk jenjang SD/MI sampai sekolah menengah sudah merata dan menjangkau seluruh wilayah Kota Banda Aceh sampai ke daerah pinggiran kota. Sedangkan untuk SMA/MA/SMK juga tersebar di Kota Banda Aceh dan mudah dijangkau dan berada di setiap kecamatan. Grafik berikut menganggambarkan perkembangan APM Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016.

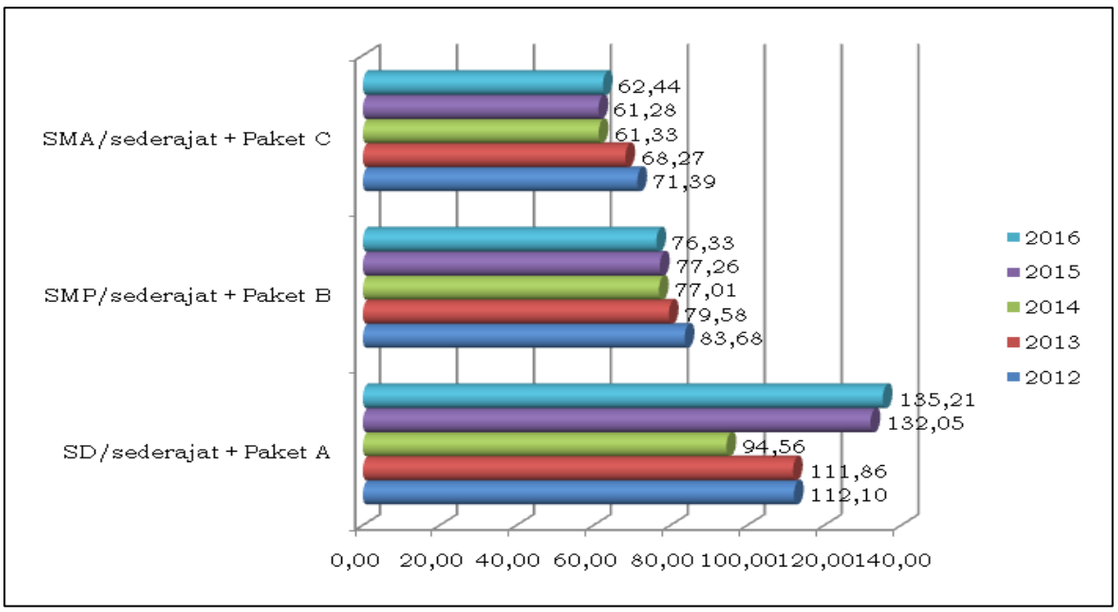

Sumber Profil Pendidikan 2012/2013s.d 2016/2017

Gambar 2.29
Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

2.3.2.1.5 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan rasio anak yang masih sekolah pada usia tertentu (usia sekolah) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sama tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang dijalani. APS juga merupakan indikator yang digunakan sebagai petunjuk keberhasilan program wajib belajar. Program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai APS umur 7 – 12 tahun lebih dari 95 persen dan APS umur 13 – 15 tahun lebih dari 70 persen.

Berdasarkan tabel dibawah ini diketahui bahwa pada tahun ajaran 2016 APS usia 7 – 12 tahun sebesar 100 persen, APS usia 13 – 15 tahun sebesar 100 persen, dan APS usia 16 – 18 tahun sebesar 96,74 persen. Angka tersebut menunjukkan pencapaian APS usia 13 – 15 tahun dan APS usia 7 – 12 tahun sudah melebihi standar yang ditetapkan.

Tabel 2.38

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	APS SD/MI (usia 7 -12 tahun)	100,00	99,65	100,00	99,65	100,00
2	APS SMP/MTs (usia 13 – 15 tahun)	97,32	99,12	97,82	99,12	100,00
3	APS SMA/MA/SMK (16 – 18 tahun)	80,95	88,32	80,95	88,32	96,74

Sumber BPS Kota Banda Aceh

2.3.2.1.6 Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu, hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan dibidang pendidikan. Penyebab utama putus sekolah antara lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya; kondisi ekonomi orang tua yang miskin; dan adanya keterbatasan si anak.

Meskipun angka partisipasi sekolah terus meningkat, namun masih terdapat sejumlah siswa yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya atau putus sekolah. Menurut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tahun 2016 memperkirakan bahwa angka putus sekolah di tingkat pendidikan menengah dan atas masih relatif tinggi, yaitu masing-masing sekitar 38 siswa dan 66 siswa, di mana menurut jenis kelamin kelompok siswa laki-laki memiliki kecenderung yang lebih tinggi untuk meninggalkan sekolah dibandingkan siswa perempuan. Hal ini dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.39

Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Banda Aceh Tahun 2016

No.	Kecamatan	Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan									Keterangan
		7-12 thn			13-15 thn			16-18 thn			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Meuraxa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Baiturrahman	5	2	7	7	1	8	4	2	6	
3	Kuta Alam	3	4	7	5		5	2	4	6	
4	Syiah Kuala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kuta Raja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Ulee Kareng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Lueng Bata	4	1	5	5	-	5	27	6	33	
8	Banda Raya	-	-	-	20	-	20	21	-	21	
9	Jaya Baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		12	**7**	**19**	**37**	**1**	**38**	**54**	**12**	**66**	

Sumber Data PKBM 2006/2017

2.3.2.1.7 Angka Melanjutkan (AM)

Tabel 2.40

Perkembangan Angka Melanjutkan Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2016

No	Jenjang Pendidikan	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
1	SMP/MTs/Paket B	99,66	105,75	106,78	106,90	105,75
2	SMA/SMK/MA/ Paket C	100	98,34	123,12	120,10	138,50

Sumber Profil Pendidikan 2012 s.d 2016

2.3.2.1.8 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan seluruh sekolah yang ada di suatu daerah untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI cukup baik. Jumlah SD/MI di Kota Banda Aceh tahun 2016 sebanyak 97 sekolah, jumlah SMP/MTs sebanyak 41 sekolah, dan jumlah SMA/SMK/MA sebesar

46 sekolah. Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun sebesar 19.838 orang, penduduk usia 13 – 15 tahun seberas 12.456 orang dan penduduk usia 16 – 18 tahun 15.270 orang.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah untuk jenjang SD/MI sebesar 1 : 205. Kondisi ini menujukkan bahwa ketersediaan SD/MI sudah ideal. Jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 1 : 304, kondisi ini menunjukkan tingkat ketersediaan SMP/MTs sudah cukup baik, dan rasio untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK sebesar 1 : 332, sudah termasuk baik.

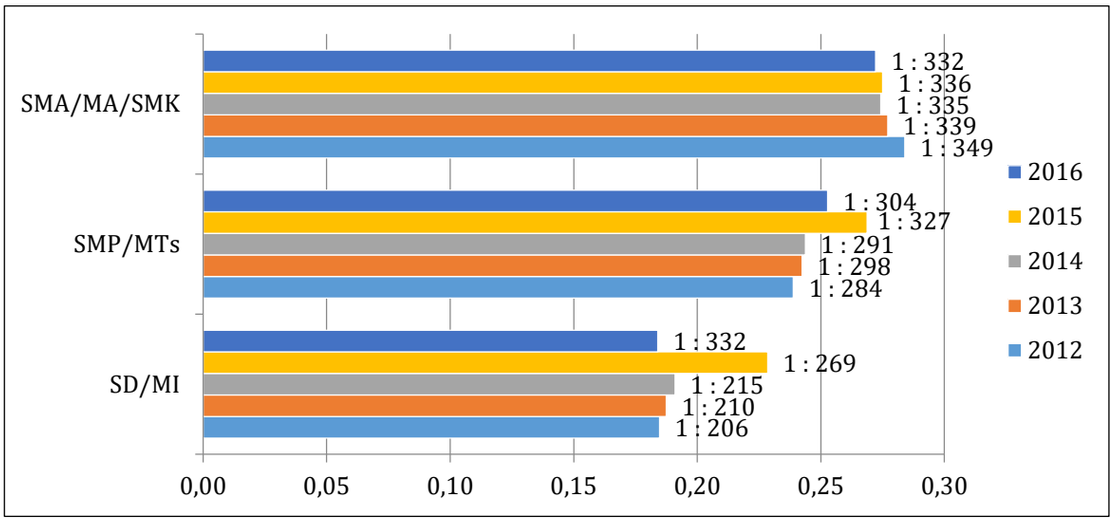

Sumber Profil Pendidikan Kota Banda Aceh

Gambar 2.30

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

2.3.2.1.9 Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 1.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mulai berlaku efektif tahun ajaran 2016/2017menetapkan tunjangan profesi akan didapatkan oleh guru jika mengajar di satuan pendidikan dengan rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru adalah sebagai berikut :

a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 1 : 15;
b. untuk SD atau yang sederajat 1 : 20;
c. untuk MI atau yang sederajat 1 : 15;
d. untuk SMP atau yang sederajat 1 : 20;
e. untuk MTs atau yang sederajat 1 : 15;
f. untuk SMA atau yang sederajat 1 : 20;
g. untuk MA atau yang sederajat 1 : 15;
h. untuk SMK atau yang sederajat 1 : 15; dan
i. untuk MAK atau yang sederajat 1 : 12.

Selama tahun 2012 hingga tahun 2016, dibandingkan standar nasional terlihat bahwa rasio guru terhadap siswa pada per-jenjang sekolah ada yang sudah memenuhi standar minimal, naum masih ada yang masih dibawah standar. Hal ini hendaknya menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat dipenuhi standar minimal tersebut.

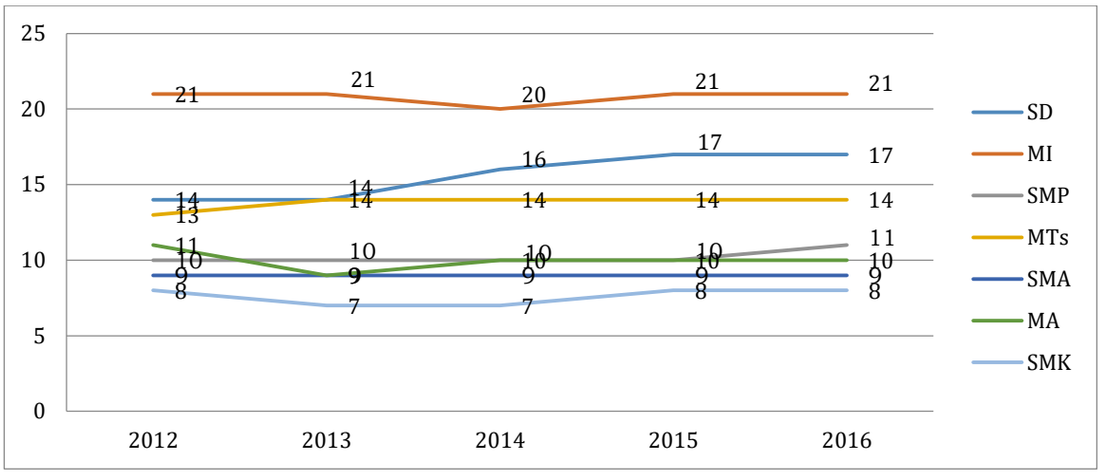

Sumber Profil Pendidikan Kota Banda Aceh

Gambar 2.31
Rasio Guru/Murid Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

2.3.2.1.10 Jumlah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tercapai

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu yang bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan meliputi 8 SNP, yaitu : 1) standar isi, 2) standar kompetensi lulusan, 3) standar proses 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, dan 8) standar penilaian pendidikan.

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 11 menyatakan bahwa dengan diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan, maka pemerintah memiliki kepentingan untuk memetakan sekolah/madrasah menjadi sekolah/ madrasah yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Pencapaian SNP di Kota Banda Aceh dari tahun 2012 sampai 2016 terus mengalami peningkatan dari 25 persen tahun 2012 menjadi 50 persen ditahun 2016. Diperlukan upaya keras dan terus menerus bai Pemerintah Kota Banda Aceh dan khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan pencapaian delapan SNP tersebut.

Tabel 2.41
Tabel Jumlah Standar Nasional Pendidikan di Kota Banda Aceh

No	Capaian Pembangunan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Standar Nasional Pendidikan (8 SNP)	25,00	30,50	37,00	43,20	50,00

Data tahun 2012 – 2016 Indikator Pendidikan

2.3.2.1.11 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang amat penting sebagai penjamin mutu pendidikan. Oleh karena itu, guru sebagai penjamin mutu dalam proses pendidikan merupakan tenaga pendidik profesional yang dituntut mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompetensi yang teruji yang dinyatakan dengan sertifikat profesi untuk dapat mewujudkan kinerja yang bermutu.

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kuali-fikasi akademik guru sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah (SD/ MI), guru sekolah menengah pertama/ madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs), guru sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/ MA), guru sekolah

dasar luar biasa/ sekolah menengah luar biasa/ sekolah menengah atas luar biasa (SDLB/SMPLB/SMALB), dan guru sekolah menengah kejuruan (SMK) sebagai berikut:

Tabel 2.42

Perkembangan Guru Memenuhi Kualifikasi S-I/D-IV Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	Keterangan
1	Guru yang memenuhi kualifiksi SI/ D-IV	72,65	72,65	72,81	73,12	84,57	Tidak termasuk Guru Depag

Sumber Profil Pendidikan 2012 s.d 2016

2.3.2.2 Kesehatan

2.3.2.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Salah satu indikator utama kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan naik turunnya angka kematian bayi, diantaranya :

1) masih ada ibu dengan penaykit penyerta yang ingin hamil tanpa direncanakan dengan baik;
2) masih rendahnya kepedulian dan keterampilan petugas dalam penatalaksanaan ibu hamil dan bayi;
3) kurangnya kepedulian keluarga terhadap ibu hamil dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perawatan bayi;
4) wanita usia subur (WUS) yang menderita Kurang Energi Kronis (KEK) dan anemia kurang mendapat perhatian sehingga saat hali akan menimbulkan risiko bagi janin yang dikandung.

Sampai dengan akhir tahun 2016 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Banda Aceh sebesar 4 per 1000 kelahiran hidup, meningkat dibandingkan kasus kematian bayi tahun 2015 dimana AKB sebesar 3 per 1000 kelahiran hidup. Ada banyak faktor yang mempengaruhi AKB tetapi tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat AKB.

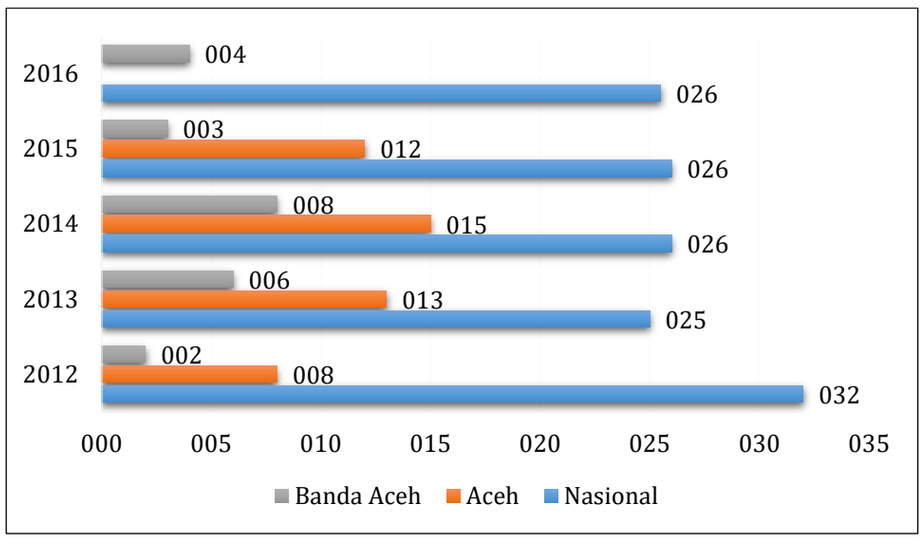

Sumber BPS, Profil Kesehatan Banda Aceh, dan Profil Kesehatan Aceh(Data AKB Provinsi Aceh Tahun 2016 tidak tersedia)

Gambar 2.32

Perkembangan AKB Banda Aceh, Aceh, dan Nasional Tahun 2012 – 2016

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan angka kematian bayi di Kota Banda Aceh masih lebih rendah dibandingkan kematian bayi Aceh dan Nasional. Kecuali tahun 2014 angka kematian bayi di Kota Banda Aceh diatas angka kematian bayi Aceh dan Nasional.

2.3.2.2.2 Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Tabel 2.43

Tabel Angka Kelangsungan Hidup Bayi

No	Fokus/aspek/Bidang Urusan/ Kinerja Pemb	Indikator	Rumus	Capaian Setiap Tahun				
				2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi		AKHB = (1 - AKB)	997	994	992	997	996

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa Angka kelangsungan hidup bayi di kota Banda Aceh dalam 5 tahun terakhir sangat fluktuatif dimana angka terendah dicapai pada tahun 2014 dan angka tertinggi untuk kelangsungan hidup bayi dicapai pada tahun 2012 dan 2015. adanya peningkatan terhadap angka kelangsungan hidup bayi dapat tercapai di sebabkan oleh beberapa faktor , yang pertama meningkatkan mutu SDM kesehatan dengan pelatihan dan akreditasi fasilitas kesehatan, kedua dengan melakukan penguatan manajemen dan sistem informasi (seluruh kematian dilakukan audit), ketiga meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (melalui program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga /PIS-PK) dan hal lain peningkatan sistem rujukan, menjamin ter integrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier.

2.3.2.2.3 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian neonatal merupakan pantauan terhadap kasus kematian bayi yang berumur kurang dari 1 bulan pada satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah bayi lahir hidup dikalikan 1000. Di kota banda aceh, angka kematian neonatal ini hanya terdapat 3 kasus/kejadian atau 0.07% saja. Umumnya dikarenakan faktor gizi, kurangnya pemeriksaan pada periode kehamilan, adanya komplikasi sehingga bayi lahir dengan berat badan rendah.

2.3.2.2.4 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu Melahirkan yang dilaporkan pada tahun 2016 cukup tinggi yakni sejumlah 37 kasus dari 100.000 kelahiran hidup, hal ini dipengaruhi faktor masih kurangnya ibu-ibu yang memeriksakan kesehatan pasca melahirkan, sehingga berbagai faktor penyebab tidak terpantau dan dukungan suplemen yang tersedia tidak diakses. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya tata cara adat yang memberikan larangan atau pantangan-pantangan makanan bagi ibu pasca melahirkan sehingga menyebabkan suplai gizi yang sangat dibutuhkan untuk pemulihan ibu serta kesiapan menyusui menjadi kurang.

2.3.2.2.5 Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak balita. Jadi posyandu adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat. Posyandu dibentuk bertujuan untuk :

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas)
2. Membudayakan NKKBS.
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Tujuan pembentukan posyandu tersebut didukung dengan 5 kegiatan pokok posyandu, yaitu :

1. KIA
2. KB
3. lmunisasi.
4. Gizi.
5. Penanggulangan Diare.

Tabel 2.44
Perkembangan Rasio Pelayanan Posyandu Per-Satuan Balita di Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
2012	113	20.520	182
2013	113	19.739	175
2014	114	15.490	136
2015	114	22.055	193
2016	114	23.781	208

Sumber Statistik Banda Aceh

2.3.2.2.6 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk

Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia meliputi pelayanan rujukan yang berupa:

1. Pelayanan Kesehatan Dasar
   Pada umumnya pelayanan dasar dilaksanakan di puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan Pelayanan lainnya di wilayah kerja puskesmas selain rumah sakit.
2. Pelayanan Kesehatan Rujukan
   Pada umumnya dilaksanakan di rumah sakit. Pelayanan keperawatan diperlukan, baik dalam pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan.

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Pelayanan kesehatan dasar yang diterapkan di Indonesia memegang peranan penting dalam pemberian layanan kesehatan yang dapat menjangkau wilayah-wilayah pedesaan. Untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang terjangkau, maka sarana dan prasarana pelayanan kesehatan harus tersedia atau tersebar di setiap kecamatan. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajad kesehatan yang lebih baik. Kota Banda Aceh saat ini telah memiliki 11 puskesmas, 30 Poliklinik, 26 Puskesmas pembantu yang tersebar di 9 kecamatan dan 90 gampong. Gambaran fasilitas kesehatan di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2016

Fasilitas Kesehatan	2012	2013	2014	2015	2016
Puskesmas	11	11	11	11	11
Poliklinik	12	1	33	30	30
Puskesmas Pembantu	25	26	26	26	26

Sumber Statistik Banda Aceh

2.3.2.2.7 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan kesehatan masyarakat. Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan kesehatan dibidang pelayanan langsung seperti Rumah sakit, bertujuan untuk meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensi pelaksanaan rujukan medik dan rujukan kesehatan secara terpadu serta meningkatkan dan memantapkan manajemen pelayanan kesehatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian.

Pelayanan kesehatan rumah sakit di Kota Banda Aceh telah menunjukkan kinerja yang baik. Ketersediaan rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta sudah tersebar dan mencukupi untuk pelayanan kesehatan rujukan. Dengan adanya program BPJS dan JKA pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat sudah memberikan pelayanan yang maksimal.

Tabel 2.46
Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per-Satuan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2015

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Rumah Sakit (Umum + Swasta)	15	14	14	14	14
Jumlah Penduduk	238.784	249.282	249.499	250.303	254.904
Rasio	1 : 15.919	1 : 17.806	1 : 17.821	1 : 17.879	1 : 18.207

Sumber Statistik Banda Aceh

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dilihat bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit masih memenuhi standar rasio rumah per-satuan penduduk. Idealnya satu rumah sakit melayani seratus ribu penduduk, sementara data diatas menunjukkan rata-rata rumah sakit melayani penduduk dibawah seratus ribu penduduk. Namun over capacity pelayanan dapat terjadi apabila banyaknya pasien dari luar wilayah Kota Banda Aceh yang dirujuk ke rumah sakit di Banda Aceh terutama rumah sakit pemerintah.

Ket :
- Provinsi 3 unit
- Pemko 1 unit
- TNI/Polri 2 unit
- Swasta 8 unit
- Dikti 2 unit

2.3.2.2.8 Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio Dokter per 100.000 Penduduk adalah Dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di suatu wilayah (di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain) per 100.000 penduduk. Ketersediaan jumlah dokter memberikan gambaran pelayanan kesehatan dari sisi kuantitas tenaga medis terhadap masyarakat. Pola hidup yang semakin berubah terutama diperkotaan menjadikan masyarakat rentan terhadap gejala penyakit maupun keluhan kesehatan lainnya yang membutuhkan penanganan dokter. Kota Banda Aceh sebagai pusat pelayanan kesehatan di Provinsi Aceh memiliki beban besar dalam pelayanan kesehatan terutama penyediaan tenaga medis. Tabel berikut menggambarkan kondisi pelayanan dokter terhadap penduduk di Kota Banda Aceh.

Tabel 2.47
Perkembangan Rasio Dokter Per-Satuan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Dokter (rumah sakit dan puskesmas)	699	675	687	165	129
Jumlah Penduduk	238.784	249.282	249.499	250.303	254.904
Rasio/100.000 penduduk	1 : 341	1 : 369	1 : 363	1 : 1.516	1 : 1.976

Sumber BPS Kota Banda Aceh dan Profil Kesehatan Kota Banda Aceh

2.3.2.2.9 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Salah satu pengelompokan tenaga kesehatan adalah tenaga medis. Rasio tenaga medis persatuan penduduk Tahun 2012 s/d 2016 dapat dilihat pada grafik berikut :

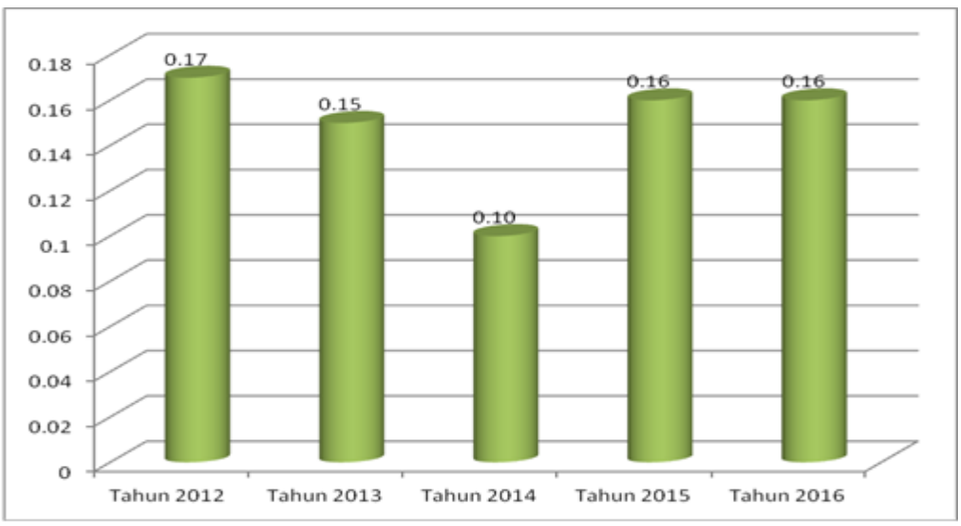

Gambar 2.33
Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk Tahun 2012-2016

Rasio tenaga medis di Puskesmas Kota Banda Aceh Tahun 2012 adalah 0.17 terjadi penurunan sampai dengan Tahun 2016, hal ini diakibatkan karena adanya penurunan jumlah tenaga medis yang melakukan pelayanan pada UPTD Puskesmas Kota Banda Aceh.

2.3.2.2.10 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Pada tahun 2016 tercatat 1.126 kasus perkiraan ibu hamil dengan komplikasi kebidanan, dari jumlah tersebut terdapat 57 kasus yang dilakukan penanganan komplikasi kebidanan.

2.3.2.2.11 Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan

Jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan pada tahun 2016 sebanyak 5.456 persalinan dari 5.854 persalinan (93,20%), diduga 6,80% merupakan persalinan yang tidak dilaporkan dan atau persalinan yang dilaksanakan di luar kota banda aceh.

2.3.2.2.12 Cakupan Desa/ Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Imunisasi sangat penting untuk melindungi bayi dari penyakit berbahaya dan menular, imunisasi bersifat komunitas maknanya adalah imunisasi harus bersifat menyeluruh atau dalam kata lain keseluruhan anak harus diimunisasi, kalau ada anak yang tidak diimunisasi akan terlindungi dari anak yang di imunisasi di lingkungan nya yang ditarget dalam standar desa UCI (universal child immunization).

Jumlah bayi yang diimunisasi pada tahun 2014 adalah 5.020 bayi (92%) dari sasaran 5.484 bayi, Jumlah bayi yang diimunisasi pada tahun 2015 adalah 4.850 bayi (88%) dari sasaran 5.489 bayi, Jumlah bayi yang diimunisasi pada tahun 2016 adalah 5.290 bayi (82%) dari sasaran 6.445 bayi, mengalami penurunan persentase dari tahun ke tahun.

Sedangkan untuk desa UCI (Universal Child Immunization) yang bermakna suatu keadaan dimana suatu desa minimal bayi terimunisasi lengkap 80%, pada tahun 2014 ada 79 desa (88%), pada tahun 2015 ada 73 desa (81%) dan pada tahun 2016 ada 74 desa (82%) dari 90 desa di Kota Banda Aceh. Target yang paling baik untuk desa UCI adalah 100%, dimana angka tersebut masih jauh dari pencapaian untuk Kota Banda Aceh. Berbagai telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan desa UCI seperti, sosialisasi dari program imunisasi dan dari ulama, peningkatan kapasitas petugas, sweeping langsung ke masyarakat dan lain-lain, supaya cakupan desa UCI bisa menigkat lebih baik.

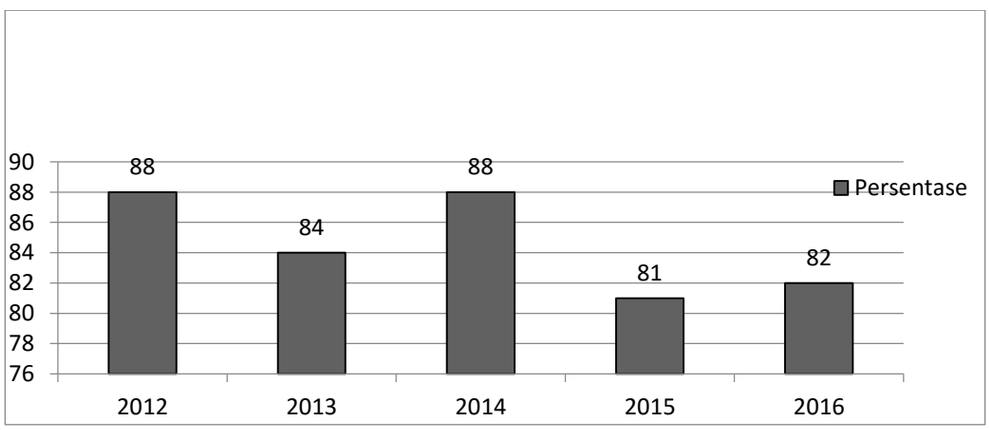

Gambar 2.34
Cakupan Desa/ Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)
Tahun 2012-2016 di Kota Banda Aceh

Dari hasil persentase cakupan desa UCI kita lihat angkanya cukup stabil tidak terlalu naik dan terlalu turun, yang sebenarnya masyarakat di Kota Banda Aceh cukup antusias dengan imunisasi, tetapi masih ada sebahagian kecil yang belum mau untuk di imunisasi.

2.3.2.2.13 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Gizi buruk atau malnutrisi adalah suatu bentuk terparah akibat kurang gizi menahun. Selain akibat kurang konsumsi jenis makanan bernutrisi seimbang, gizi buruk pada anak juga bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan gangguan pencernaan atau gangguan penyerapan zat makanan yang penting untuk tubuh. Perkembangan kasus balita gizi buruk di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan cukup tinggi di tahun 2013, namun kesemuanya mendapat perawatan sesuai standar kesehatan sehingga gizi buruk yang dialami tersebut dapat ditangani dengan baik. Grafik berikut memberikan gambaran perkembangan cakupan kasus gizi buruk dan yang mendapat perawatan dikota Banda Aceh tahun 2012 – 2016

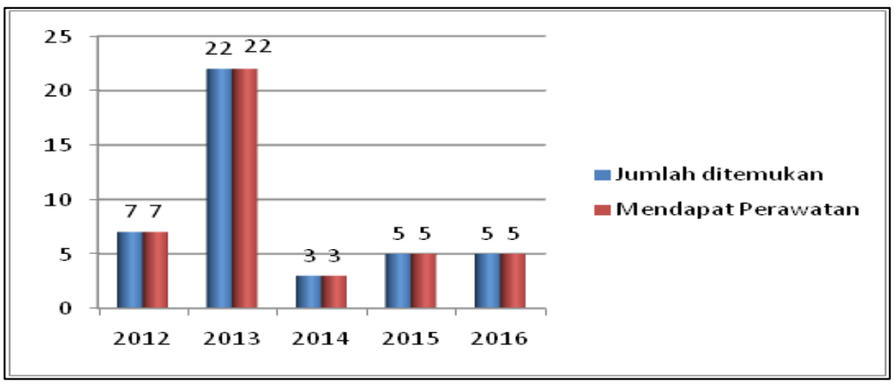

Sumber Profil Kesehatan Banda Aceh

Gambar 2.35
Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan

2.3.2.2.14 Cakupan Imunisasi Campak Bayi

Cakupan Imunisasi Campak Bayi pada tahun 2016 sejumlah 5.396 balita, atau 48,95%. hal ini dipengaruhi banyak faktor, diantaranya adalah keengganan mengimunisasikan karena alasan tertentu non medik.

2.3.2.2.15 Jumlah Kasus Campak

Jumlah kasus campak yang terpantau pada tahun 2016 sejumlah 373 kasus, 176 kasus penderita laki-laki, 206 kasus penderita perempuan. Semua kasus dapat ditangani sehingga tidak terdapat kasus yang menyebabkan pasien meninggal dunia.

2.3.2.2.16 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC

Tuberkulosis (*Tuberculosis*, disingkat TBC) merupakan penyakit menular yang umum, dan dalam banyak kasus bersifat mematikan. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai strain mikobakteria, umumnya Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis biasanya menyerang paru-paru, namun juga bisa berdampak pada bagian tubuh lainnya. Tuberkulosis menyebar melalui udara ketika seseorang dengan infeksi TB aktif batuk, bersin, atau menyebarkan butiran ludah mereka melalui udara. Bila Tuberkulosis tidak diobati maka lebih dari 50% orang yang terinfeksi bisa meninggal. Penemuan pasien bertujuan untuk mendapatkan pasien TB melalui serangkaian kegiatan dari mulai penjaringan terhadap terduga pasien TB, pemeriksaan fisik dan laboratoris, menentukan klasifikasi penyakit serta tipe pasien TB, sehingga dapat dilakukan pengobatan agar sembuh dan tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain.

Indikator Program TB

Dalam menilai kemajuan atau keberhasilan program pengendalian TB digunakan beberapa indikator. Indikator utama program pengendalian TB secara Nasional ada 2, yaitu:

1) Cakupan Penemuan Kasus TB (*Case Notification Rate* = CNR)
   Angka penemuan kasus TB (CNR) di Kota Banda Aceh dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami peningkatan, dari capaian 127 per 100.000 penduduk menjadi 238 per 100.000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa sistim penjaringan kasus TB di sarana pelayanan kesehatan dari sebelumnya dilakukan secara passif (sistim menunggu di layanan kesehatan)

menjadi aktif (sistim mencari langsung ke masyarakat) didukung juga dengan fasilitas dan sumber daya manusia di sarana pelayanan kesehatan.

2) Angka Keberhasilan Pengobatan TB (*Treatment Success Rate* = TSR).
Success Rate Kota Banda Aceh pada tahun 2012 sampai 2016 capaian penanganan keberhasilan pengobatan dari 95% menjadi 98%. Ini menunjukkan target kesembuhan pasien sudah melebihi target nasional yaitu & gt;80%. Tercapainya keberhasilan ini didukung oleh kepatuhan pengobatan pasien, selain itu penemuan pasien dilakukan dengan kegiatan aktif di puskesmas untuk memantau pasien melalui kegiatan BOK dan pemberian Makanan Tambahan pada pasien

2.3.2.2.17 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)

Tidak ditemukan kasus kematian dikarenakan penyakit tuberkulosis, hal ini terkait juga dengan tingginya angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) TB BTA+ yang mencapai 99,01%, selain karena ketersediaan obat pun ada dan mudah didapatkan, sisanya 0,9% belum menyelesaikan periode pengobatan atau belum dilaporkan.

2.3.2.2.18 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penyakit demam berdarah *dengue* (DBD) adalah penyakit infeksi virus yang ditularkan oleh nyamuk aedes aegypty. Penyakit DBD masih merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Banda Aceh bila dibandingkan pada tahun sebelumnya, sedikit mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 kasus DBD sebanyak 127 kasus sedangkan pada tahun 2016 terdapat 152 kasus yang terlaporkan. Hal ini bisa disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya tingginya curah hujan sehingga banyak terjadi genangan air pada wadah atau tempat yang dapat menampung air hujan sebagai tempat perindukan nyamuk DBD di lingkungan luar sekitar rumah, faktor yang lainnya juga dapat dilihat dari tingkat pengetahuan, pemahaman dan kepedulian serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat yang masih rendah, bisa dikarenakan tidak mengetahui ataupun tidak mempunyai kesempatan untuk memantau tempat-tempat perindukan nyamuk DBD yang ada di dalam rumah, seperti ditempat penampungan air dispenser, kulkas, bak mandi, vas bunga, talang air yang tersumbat dan lain lain. Hal ini menjadi salah satu faktor berkembang biaknya nyamuk DBD secara cepat.

Tabel 2.48
Data Sebaran Kasus DBD Tahun 2012-2016

Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
Kuta Alam	38	36	41	19	31
Lueng Bata	64	14	23	17	14
Meuraxa	32	13	13	4	5
Syiah Kuala	67	55	29	11	24
Ulee Kareng	35	21	32	24	15
Banda Raya	35	25	48	8	13
Jaya Baru	93	21	32	27	22
Kuta Raja	27	9	20	0	12
Baiturrahman	81	64	47	17	16
Total	**472**	**258**	**285**	**127**	**152**

Data Sebaran Kasus DBD tahun 2012 s/d 2016

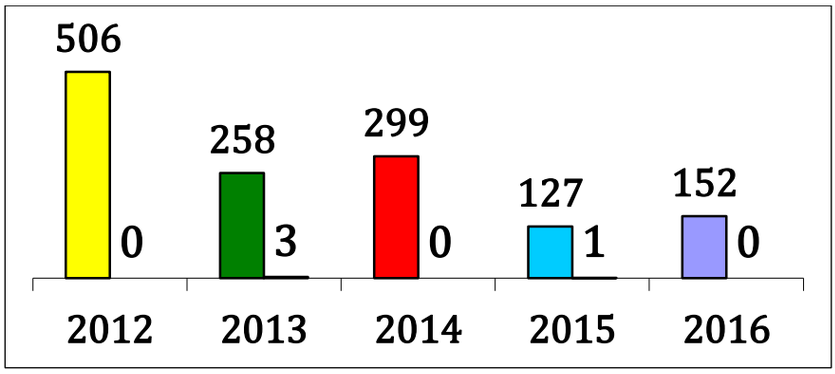

Data Kasus dan Kematian akibat DBD tahun 2012 s/d 2016

Gambar 2.36

Data Kasus Kematian Akihat DBD tahun 2012-2016

Penanganan

Penanggulangan DBD yang masih sangat efektif adalah dengan melakukan Gerakan 3M Plus, yaitu Menguras, Menutup dan Mengubur serta Menghindari Gigitan Nyamuk. Pengasapan atau *fogging* hanya membunuh nyamuk dewasa saja, sedangkan jentik nyamuk DBD masih tetap bertahan hidup dan menjadi nyamuk dewasa setelah beberapa hari kemudian. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan pemberantasan tempat-tempat perindukan nyamuk DBD dengan cara Pemberdayaan Masyarakat melalui Kader JUMANTIK = Juru Pemantau Jentik.

2.3.2.2.19 Penderita Diare yang Ditangani

Persentase Diare ditemukan dan ditangani selama tahun 2016 mencapai 34,87% dari 3.653 kasus, jumlah ini adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS. angka tersebut merupakan angka yang mendapatkan penanganan lanjutan, lainnya dikarenakan umumnya pendudukan melakukan pengobatan lanjutan di rumah, dan mengkonsumsi obat-obatan yang dijual bebas di apotik-apotik.

2.3.2.2.20 Angka Kesakitan Malaria *(Annual Parasit Incidence)*

Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasit Incidence) hanya didapatkan 0.04% per 1.000 penduduk berisiko, meski terdapat 735 suspek malaria pada tahun 2016, kepastian dilakukan dengan pemeriksaan darah. Namun demikian, diperkirakan terdapat 23.828 penduduk berisiko.

2.3.2.2.21 Jumlah Kasus Baru HIV

Pada tahun 2016, jumlah kasus baru positif HIV adalah 3 orang dan positif AIDS sebanyak 5 orang dengan proporsi kelompok umur pada usia 20-24 tahun dan terbanyak pada usia 25-49 tahun. Kasus ini sangat berkaitan dengan hubungan seksual yang berisiko atau bukan dengan pasangan yang sah, meski tidak tertutup kemungkinan penularan dengan cara-cara non seksual seperti penggunaan narkoba.

Tabel 2.49

Tabel Jumlah Kasus Baru HIV

No	Kelompok Umur	HIV				Aids			
		L	P	L+P	Proporsi Kelompok Umur	L	P	L+P	Proporsi Kelompok Umur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	≤ 4 Tahun	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2	5 - 14 Tahun	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
3	15 - 19 Tahun	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
4	20 - 24 Tahun	1	0	1	33.33	0	0	0	0.00
5	25 - 49 Tahun	2	0	2	66.67	3	2	5	100.00
6	≥ 50 Tahun	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
Jumlah		**3**	**0**	**3**		**3**	**2**	**5**	

Sumber: Bidang P2PL Dinkes Kota Banda Aceh Tahun 2016

2.3.2.2.22 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Ujung tombak pelayanan kesehatan dasar yang menyentuh masyarakat yaitu Puskesmas. Cakupan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien maskin disarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama & baru). Sarana kesehatan strata dua dan tiga adalah balai kesehatan mata masyarakat, balai pengobatan penyakit paru, balai kesehatan indera masyarakat, balai besar kesehatan paru masyarakat, rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta.

Tabel 2.50

Tabel Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Target	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Realisasi	100 %	100 %	76,62 %	13,57 %	8,96 %

Berdasarkan tabel diatas, terjadi peningkatan pelayanan di FKTP yang digambarkan dengan menurunnya persentase rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

2.3.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.2.3.1 Pekerjaan Umum

2.3.2.3.1.1 Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Pembangunan infrastruktur jalan di Kota Banda Aceh mutlak diperlukan, mengingat peran dan kontribusinya terhadap pertumbuhan Kota Banda Aceh. Dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, disebutkan bahwa jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, artinya infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian suatu wilayah, hal ini disebabkan perannya dalam menghubungkan serta meningkatkan pergerakan manusia, dan barang.

Tabel 2.51

Data Perbandingan Panjang Ruas Jalan Berdasarkan Status (Jalan Nasional, Provinsi dan Kota)

Status Jalan		
Nasional (Km)	Provinsi (Km)	Kota (Km)
18,083	40,24	707,343

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh tahun 2017

Tabel 2.52

Data Status Kondisi Jalan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	Panjang Jalan (km) (SK No. 221A Thn 2010)	Kondisi Ruas Jalan							
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
2012	707,343	705,221	99,70	-	0,00	2,122	0,30	-	0,00
2013	707,343	702,021	99,25	-	0,00	5,322	0,75	-	0,00
2014	707,343	664,073	93,88	15,828	2,24	15,642	2,21	11,801	1,67
2015	707,343	583,749	82,53	87,480	12,37	21,487	3,04	14,627	2,07
2016	707,343	590,773	83,52	90,894	12,850	17,542	2,48	8,134	1,15

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh tahun 2017

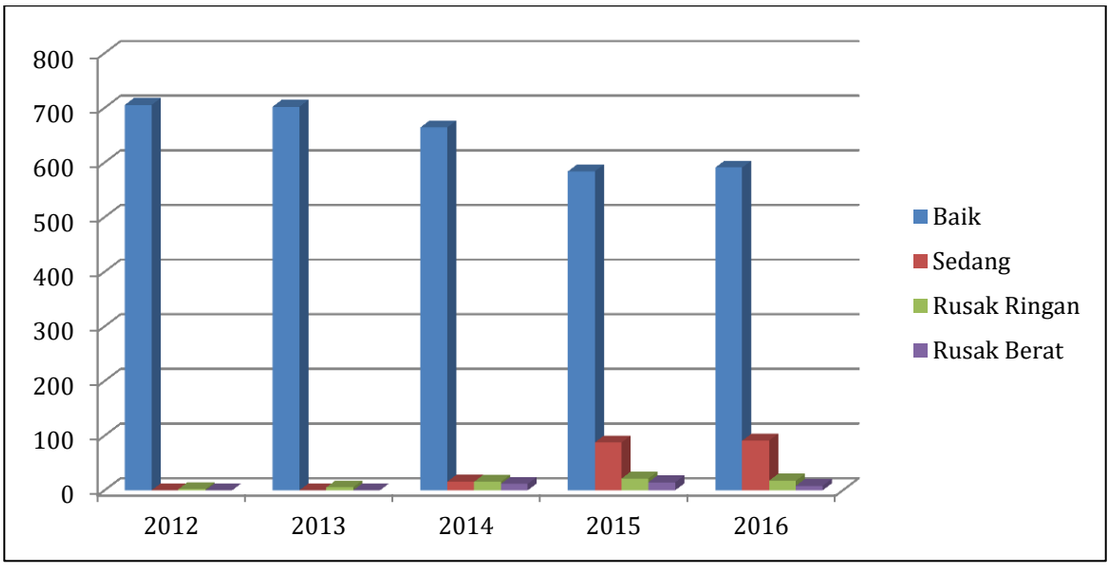

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKota Banda Aceh Tahun 2017

Gambar 2.37

Grafik Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun Anggaran 2012-2016

Pertumbuhan sosial, ekonomi, dan pembangunan di kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan infrastruktur jalan yang memperlancar, merangsang dan memacu aktifitas pembangunan. Hal ini terlihat dari pembangunan panjang jaringan jalan setiap tahunnya. Saat ini panjang jalan di Kota Banda Aceh ± 707,343 km dengan kondisi baik 83,52%. sebagaimana terlihat pada tabel 2.52 dan gambar 2.37.

2.3.2.3.1.2 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Sektor sanitasi yang mencakupi bidang air limbah, persampahan dan drainase merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Rendahnya kualitas sanitasi menjadi salah satu faktor bagi menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Strategi Sanitasi Kota (SSK) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi semua pihak dalam pengelolaan sanitasi secara komprehensif, berkelanjutandan partisipatif untuk mencapai target layanan sektor sanitasi yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sanitasi maupun peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Pusat maupun Daerah.

Pengembangan sanitasi Kota Banda Aceh bertujuan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur serta pelayanan sanitasi menyeluruh sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam rangka mencapai hal tersebut pemerintahan kota menyusun Struktur Organisasi Pemerintahan Kota (SOTK) dan ditetapkan dalam Qanun No.2 Tahun 2008. Pada tahun 2017 dilakukan revisi terhadap SOTK Tahun 2008 tersebut dan ditetapkan dalam Qanun Kota Banda Aceh No. 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Berdasarkan SOTK tersebut, kegiatan sanitasi tersebar di berbagai dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/badan. Koordinasi mendalam antar dinas/ SKPD perlu dilakukan untuk dapat melaksanakan pengembangan sanitasi secara terpadu dan berkesinambungan sebagai bentuk percepatan pembangunan sanitasi kota.

Sebagai gambaran terhadap jumlah rumah tinggal yang berakses sanitasi, bahwa pada tahun 2016 di Kota Banda Aceh terdapat sebanyak 57.687 unit atau sebesar 91.72%, jumlah rumah tinggal berakses sanitasi ini akan terus ditingkatkan sebanyak 0,03% per tahunnya, hingga mencapai 91,87% pada akhir tahun RPJM (Tahun 2016). lebih jelasnya rincian jumlah rumah tangga berakses sanitasi ini dapat dilihat pada tabel 2.53 dan gambar 2.39.

Tabel 2.53
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	52.314	49.872	52.036	55.031	57.576
2.	Jumlah rumah tinggal	57.754	58.957	61.443	61.641	62.774
3.	Persentase	90.58%	84.59%	84.69%	89.28%	91.72%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKota Banda Aceh

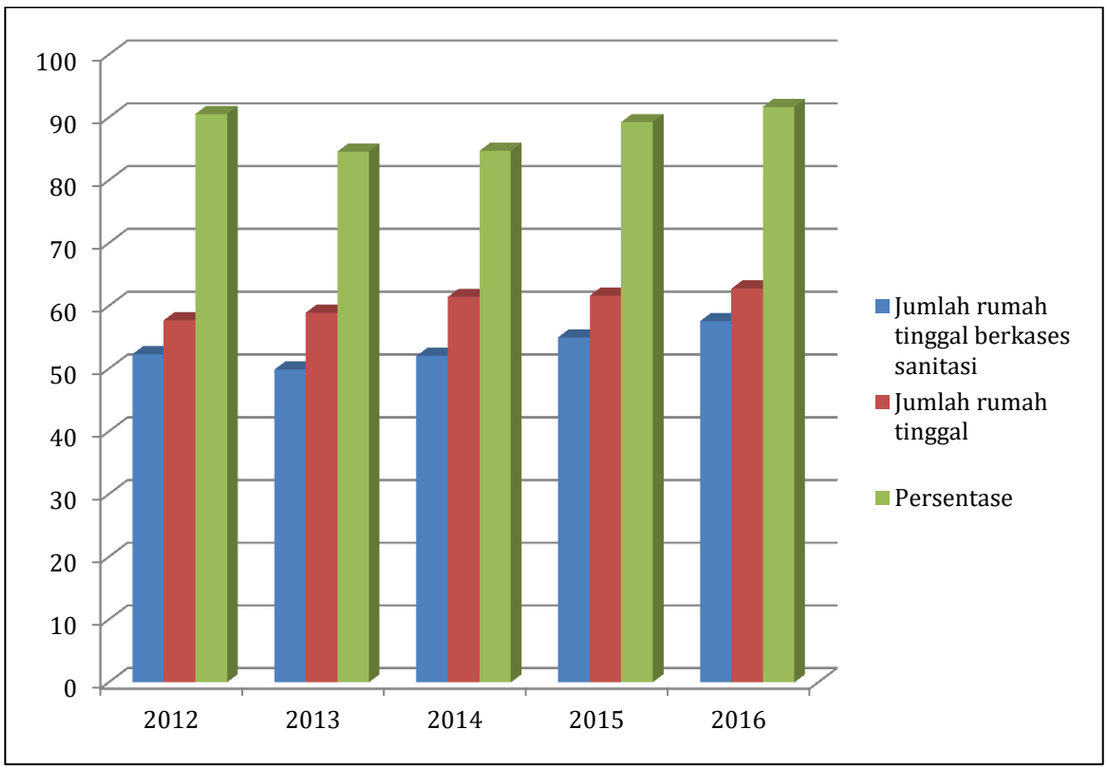

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh

Gambar 2.38
Grafik Jumlah Rumah Tangga yang Bersanitasi Tahun 2012 - 2016

Dari gambar di atas untuk indikator persentase rumah tinggal bersanitasi, peningkatannya menunjukkan hasil yang positif.

2.3.2.3.1.3 Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembangunan Aliran Air Tidak Tersumbat

Tabel 2.54
Data Kondisi Drainase Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016

Tahun	Panjang Total Drainase (km)		Kondisi Drainase							
			Baik (km)		Sedang (km)		Rusak Ringan (km)		Rusak Berat (km)	
	Makro	Mikro	Makro	Mikro	Makro	Mikro	Makro	Mikro	Makro	Mikro
2012	177.54	1348,94	149,64	1032,47	6,24	56,19	24,16	503,01	3,40	3,63
2013	179.33	1573,76	150,57	1204,32	6,14	54,58	23,82	495,89	3,36	3,68
2014	181.12	1798,59	151,80	1376,63	6,03	52,96	23,47	488,77	3,32	3,71
2015	182.93	2023,41	153,50	1548,71	5,90	50,52	23,29	481,75	3,29	3,82
2016	186,61	2248,24	154,59	1720,79	5,80	48,91	22,95	474,54	3,26	4,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh tahun 2017

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air disebutkan bahwa pemeliharaan jaringan drainase merupakan upaya menjaga dan mengamankan jaringan drainase kota agar dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. Pengertian pemeliharaan adalah semua pekerjaan rutin dan berulang yang diperlukan untuk memelihara suatu fasilitas sehingga fasilitas tersebut dapat berfungsi maksimal sesuai dengan perencanaan.

Kota Banda Aceh termasuk salah satu kota pantai, dengan topografi yang berada pada elevasi 0,80 meter di atas permukaan air laut. Secara hidrolis Kota Banda Aceh menerima banjir kiriman, banjir genangan dan banjir pasang air laut, berhubung kondisi topografi yang relative datar maka banjir ini tidak dapat dibuang dengan gravitasi.

Untuk itu dalam perencanaan drainase terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dan perlu pertimbangan seperti : pendangkalan saluran (sedimentasi), limbah, sampah dan pasang surut air laut, dan pada tempat-tempat tertentu seperti pada pertemuan drainase dengan badan air (receiving waters) khususnya di dekat pantai perlu direncanakan bangunan kolam pengumpul yang dilengkapi dengan pumping station karena aliran secara gravitasi sudah tidak mungkin dilakukan secara optimal.

Pada tahun 2005 melalui Satuan Kerja Sementara Pengendalian Banjir Kota Banda Aceh dan Pengaman Pantai Dinas Sumber Daya Air Provinsi Aceh melaksanakan SID Drainase Induk Kota Banda Aceh dan melakukan Review Master Plan Drainase Banda Aceh dengan membagi wilayah pengaliran air menjadi 8 zona drainase seluas 4.706 Ha, sebagaimana terlihat pada gambar 2.39.

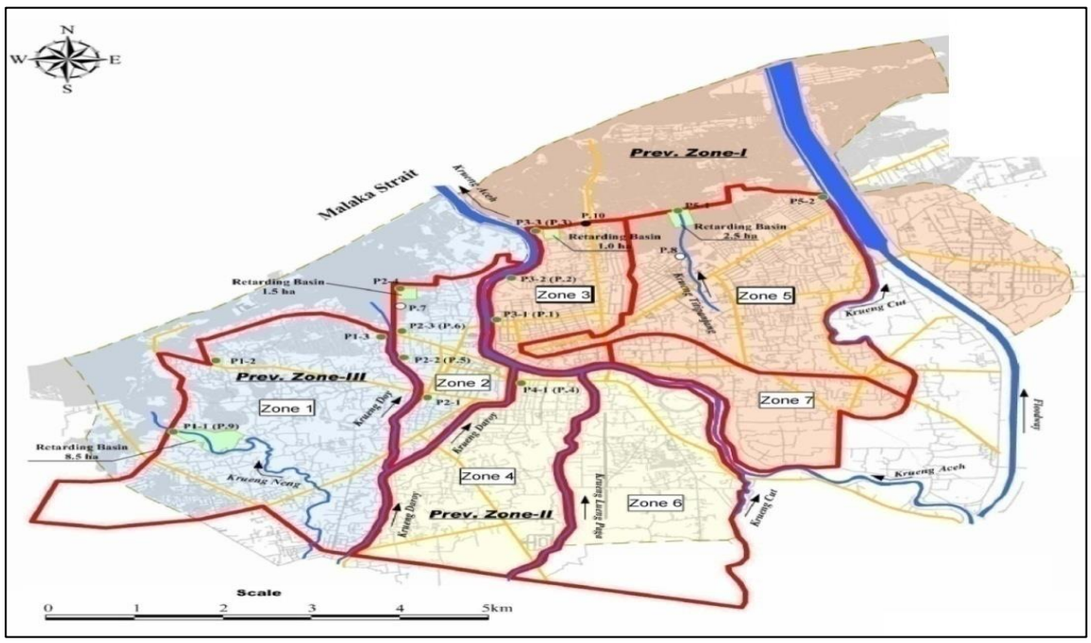

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh Tahun 2017

Gambar 2.39

Peta Pembagian Zona Drainase Kota Banda Aceh

Panjang saluran drainase khususnya drainase utama (main drain) di Kota Banda Aceh pada tahun 2016 adalah ± 186,61 km, dengan rincian kondisi baik sepanjang 183.35 km dan kondisi rusak sepanjang 3.26 km. Adapun rincian target pencapaian kondisi main drain dalam keadaan baik dari tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel 2.55 dan gambar 2.40.

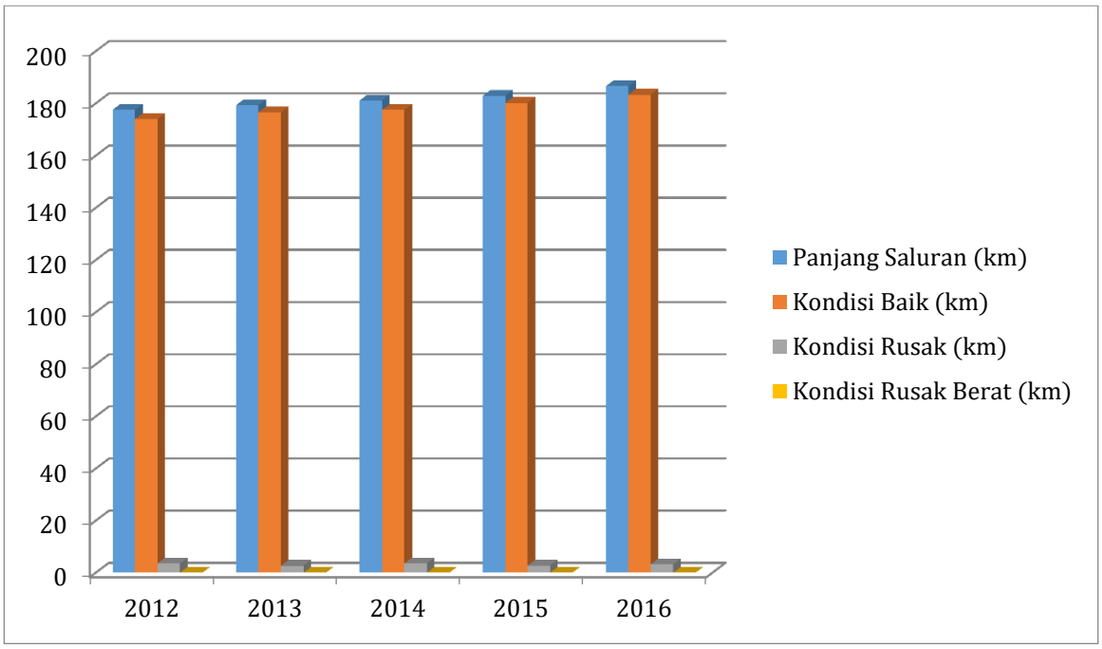

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh Tahun 2017

Gambar 2.40

Grafik Perkembangan Kondisi Main Drain Kota Banda Aceh 2012 – 2016

Tabel 2.55

Persentase Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (km)	23.073	23.473	23.473	23.473	23.473
Panjang seluruh jalan kota (km)	707,343	707,343	707,343	707,343	707,343
Persentase	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

2.3.2.3.1.4 Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Kebutuhan akan air bersih saat ini meningkat dengan tajam sejalan pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan kegiatan ekonomi dan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya air minum untuk hidup sehat. Dilain pihak kapasitas sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum yang ada saat ini sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan air minum masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas produksi dan jaringan pipa distribusi air minum.

Untuk memenuhi kebutuhan air baku, Kota Banda Aceh mempunyai potensi sumber air yang dapat dipergunakan,yaitu Sungai Krueng Aceh yang mempunyai debit minimal 10,38m^3/ detik atau 10.000 liter/detik pada musim kemarau panjang. Terdapat dua unit Instalasi Pengolahan Air Minum yang sampai saat ini beroperasi di Kota Banda Aceh, yaitu IPA Lambaro dengan kapasitas terpasang 435 liter/detik dan IPA Siron ber- kapasitas 60 liter/detik. Lokasi *intake* kedua IPA tersebut adalah di Sungai Krueng Aceh.

PDAM Tirta Daroy diharapkan telah mampu merehabilitasi dan membangun kembali seluruh sarana dan prasarana sistem penyediaan air bersih, berupa instalasi pengolahan, sistem distribusi dan sarana penunjangnya sampai dengan tahun 2029. Target pelayananan terhadap pelanggan PDAM Tirta Daroy sampai dengan tahun 2029 minimal mencapai 100%. Untuk mendukung terlaksananya dengan baik system penyediaan air minum Kota Banda Aceh, system pendistribusian dan pola pelayanan air minum Kota Banda Aceh pun harus mengikuti pertumbuhan kepadatan kota yang terus meningkat yaitu salah satunya dengan membentuk Zona Distribusi untuk membagi blok pelayanan secara teknis perpipaan. Tujuan pembentukan Zona Distribusi, antara lain :

1. Standar Pelayanan 4 K dapat tercapai dan terlaksanan dengan baik;
2. Memudahkan dalam manajemen pengelolaan;
3. Memudahkan dalam manajemen pemeliharaan;
4. Meminimalisir tingginya tingkat kehilangan air (NRW).

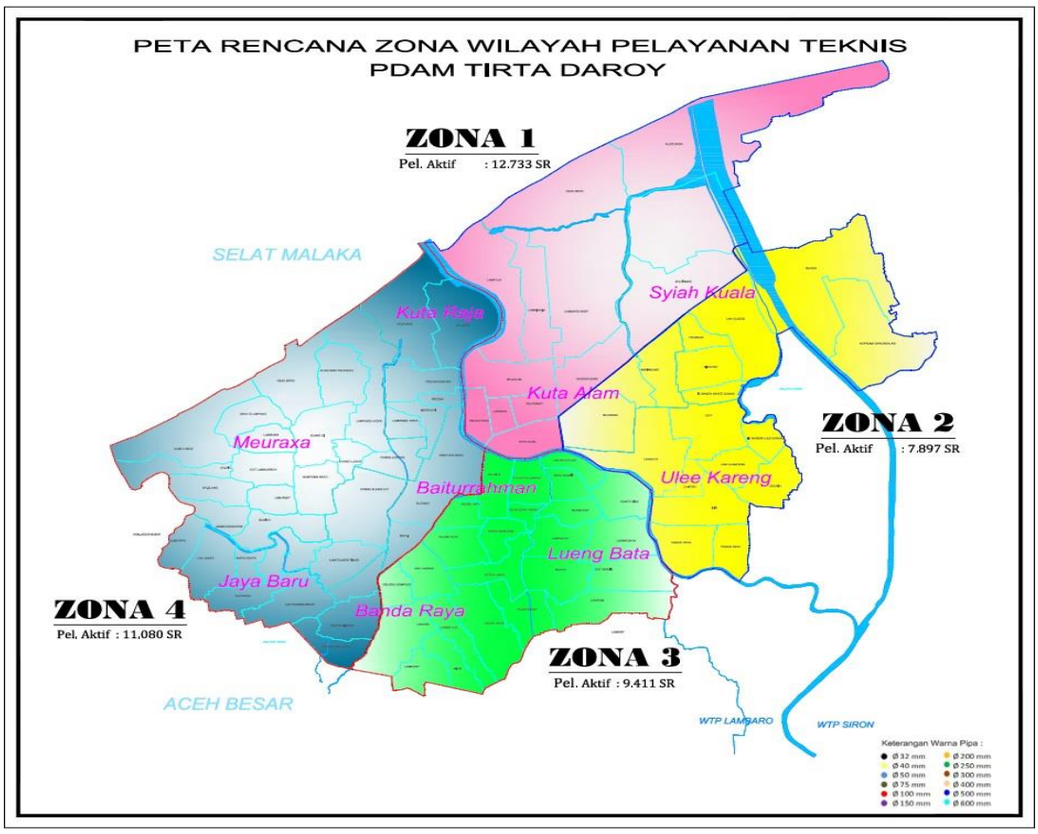

Sumber :PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahun 2017

Gambar 2.41

Peta Rencana Zona Wilayah Pelayanan Teknis PDAM Tirta Daroy

Sumber air yang digunakan oleh PDAM Tirta Daroy adalah dari Krueng Aceh, sungai terbesar yang membelah Kota Banda Aceh. Untuk menjaga adanya intrusi air laut kedalam sungai Krueng Aceh telah terpasang unit bendung karet. Namun demikian, kondisi bendung karet saat ini dalam keadaan rusak dan membutuhkan perbaikan atau pembangunan unit yang baru. Saat ini pemerintah Kota Banda Aceh tengah merencanakan pembangunan bendung karet baru sehingga kualitas air baku dapat terjaga dengan optimal.

Berdasarkan data tahun 2008, pada tahun 2007 debit Sungai Krueng Aceh 177,88m^3/detik atau dengan rata-rata per-bulan sebesar 14,82 m^3/detik, sehingga sungai Krueng Aceh sebagai sumber air baku yang potensial bagi penyediaan air bersih Kota Banda Aceh dan perlu dijaga dengan baik, karena air permukaan sangat rawan terhadap pengaruh pencemaran. Upaya-upaya untuk tetap menjaga kuantitas air dan kualitas air yang baik harus dilaksanakan dengan strategi yang jelas dan program kegiatan yang baik, antara lain dengan:(lihat Gambar.2.42)

- Menjaga kualitas air baku agar tetap memenuhi daya dukungnya dengan melakukan monitoring secara rutin,
- Menindak tegas tanpa ada tawar menawar pada semua industri dan atau lainnya yang membuang limbah cairnya kebadan air sehingga kualitas mengalami penurunan,
- Melakukan pengamanan terhadap kawasan daerah pengaliran sungai, agar tetap menjadi daerah tangkapan air yang baik bagi Sungai Krueng Aceh.

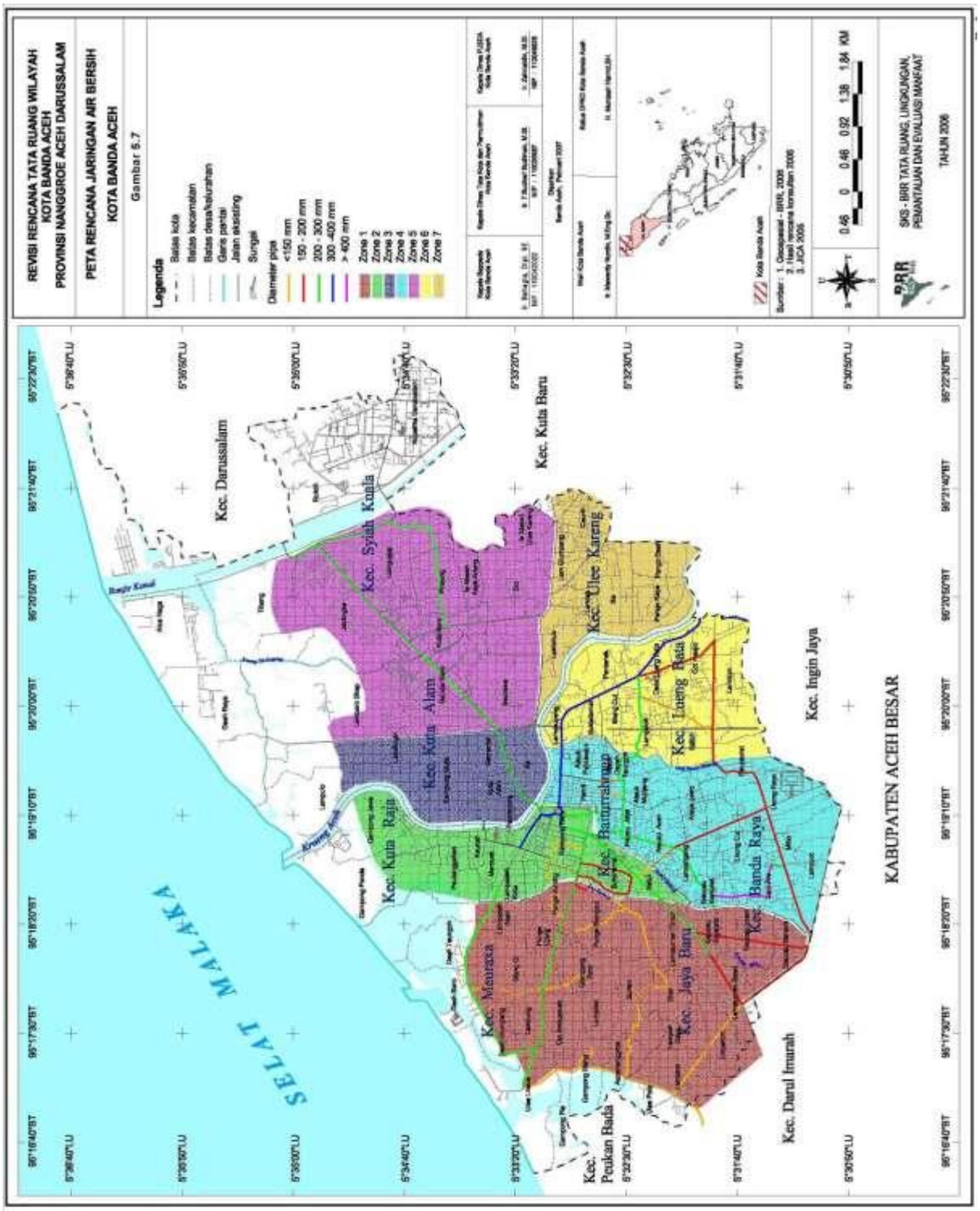

Gambar 2.42
Peta Rencana Jaringan Air Bersih Kota Banda Aceh Tahun 2029

Salah satu solusi yang bisa ditawarkan dalam masalah ini adalah pemanfaatan Sungai Sarah sebagai sumber air bersih untuk warga Kota Banda Aceh. Sungai Sarah lebih tepat untuk menjadi sumber air karena masih alami dan belum tercemar. Walau begitu pemerintah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar harus mengkomunikasikan hal ini dengan baik, karena sungai Sarah berada di wilayah Aceh Besar.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum disebutkan bahwa setiap pelanggan air minum berhak memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2.3.2.3.1.5 Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk

Tabel 2.56

Tabel Lokasi Tempat Pemakaman Umum di Kota Banda Aceh dibawah Pengelolaan DLHK3

No	Nama Pemakaman	Lokasi Gampong	Luas Lahan (M2)	Status Lahan
1	Kuburan Kota Baro	Kota Baru	6.650	Milik Gampong
2	Kuburan Keudah	Keudah	12.400	Milik Gampong
3	Kuburan Beurawe	Beurawe	1.400	Milik Gampong
4	Kuburan Beurawe Dalam	Beurawe	2.480	Milik Gampong
5	Kuburan Peulanggahan	Peulanggahan	4.600	Milik Gampong
6	Kuburan Mulia	Mulia	10.695	Milik Gampong
7	Kuburan Setui	Seutui	6.400	Milik Gampong
8	Kuburan/Makam Massal Kampung Pande	Pande	1.995	Milik Gampong
9	Kuburan Massal Ulee Lheu	Pie	7.300	Milik Pemko B. Aceh
10	Kuburan Taman Bahagia	Ateuk Pahlawan	8.700	Milik Gampong
11	Kuburan Lingke	Jeulingke	2.140	Milik Gampong
Jumlah Luas yang Dipelihara			**64.760**	

Meskipun jumlah lokasi yang dipelihara setiap tahunnya sama namun pencapaian pemeliharaannya relatif naik dan turun setiap tahun disebabkan karena adanya bertambahnya lokasi makam yang dipelihara sesaat karena ada kegiatan penimbunan tanah makam dan pemagaran melalui dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh pada lokasi makam yang berada diluar dari pengelolaan DLHK3 yang jumlahnya berbeda-beda setiap tahunnya.

2.3.2.3.2 Penataan Ruang

2.3.2.3.2.1 Rasio Ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/ HGB

Ruang Terbuka Hijau *(Green Openspaces)* adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/ kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, Ruang Terbuka Hijau *(Green Openspaces)* di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimiliki Pemerintah Kota Banda Aceh dari Tahun 2012-2016, dapat dilihat pada tabel 2.57 sebagai berikut.

Tabel 2.57

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	1.258,80	1.258,80	1.258,80	1.258,80	1.258,80
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB	726.1	769.74	804.67	809.6	809.67
3.	Luas wilayah	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136
4.	Rasio Ruang Terbuka Hijau (2:1)	11.83	12.54	13.10	13.20	13.20

Sumber: - RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029

Target capaian Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 30 persen dari luas wilayah, yaitu 10 persen RTH private dan 20 persen RTH Publik. Adapun luas RTH publik Tahun 2016 yang ada di Kota Banda Aceh saat ini baru mencapai 13,20 % persen dari luas kota.

2.3.2.3.2.2 Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan

Jumlah bangunan di Kota Banda Aceh Tahun 2016 sebanyak 68.590 unit. Bangunan di Kota Banda Aceh yang terbangun sebelum tahun 2004 (sebelum terjadinya bencana Tsunami) tidak memiliki akurasi yang lengkap terhadap dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mengingat banyak arsip IMB yang hilang pasca terjadinya tsunami. Pasca tsunami terjadinya pertumbuhan bangunan yang begitu pesat dari tahun ke tahun, bahkan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2005 sampai dengan 2009 adanya pertumbuhan bangunan antara 2.000 unit sampai dengan 3.000 unit bangunan setiap tahunnya. Data bangunan yang memiliki IMB di Kota Banda Aceh, untuk bangunan yang telah terbangun sebelum tahun 2004 diprediksikan 50% memiliki IMB, sedangkan pasca tsunami pada saat rehab dan rekon pembangunan bangunan yang memiliki IMB sebanyak ± 60% bangunan telah melakukan pengurusan IMB dari jumlah yang dibangun.

Analisis data bangunan yang memiliki IMB di Kota Banda Aceh, dikaji dengan perkiraan persentase pada bangunan yang terbangun sebelum tahun 2004 dan dikombinasikan dengan data bangunan yang mengurus IMB baik bangunan telah ada maupun bangunan yang dibangun baru dari tahun ke tahun. Rasio bangunan ber IMB di Kota Banda Aceh tersebut dapat dilihat pada tabel 2.58 dan gambar 2.43.

Tabel 2.58

Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	45.986	46.747	47.445	48.189	48.969
2.	Jumlah Bangunan	63.802	64.926	65.865	66.690	67.790
3.	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	72,08	72	72,03	72,26	72,24

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKota Banda Aceh

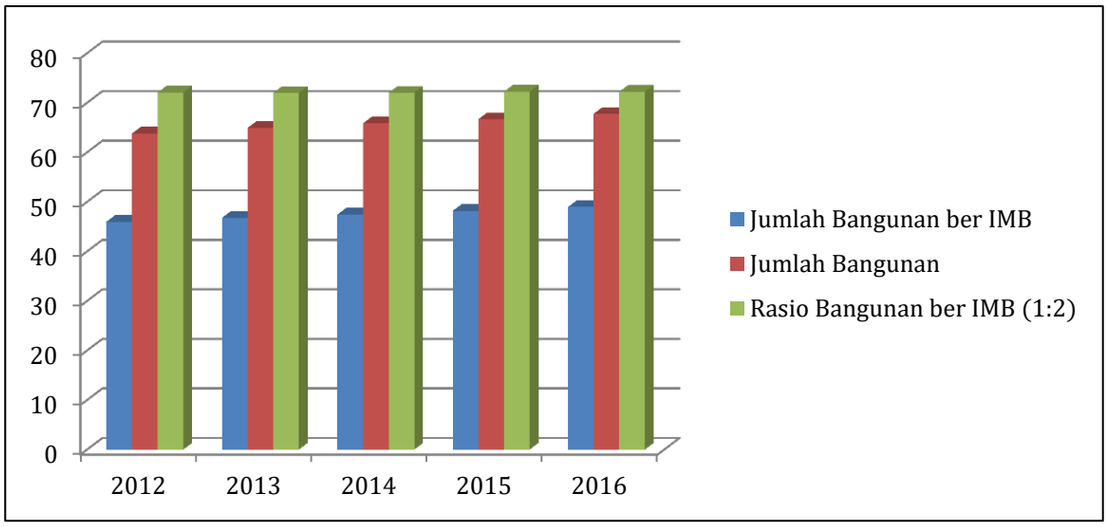

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh

Gambar 2.43

Grafik Jumlah Bangunan ber IMB Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

2.3.2.3.2.3 Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya

Tabel 2.59

Tabel Jumlah ruang Publik yang tersedia

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah ruang publik yang tersedia	1.258,80	1.258,80	1.258,80	1.258,80	1.258,80
2.	Ruang public yg berubah Fungsi (Ha)	0	0	0	0	0
3.	Ruang Publik yg berubah Peruntukannya (%)	0	0	0	0	0

Sumber: - RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029

2.3.2.3.2.4 Ketaatan Terhadap RTRW

Berdasarkan Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan Penataan Ruang yang berpijak pada kondisi dan potensi wilayah dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan dalam Qanun (Perda) Nomor 4 Tahun 2009 tentang RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

Pembangunan yang dilaksanakan dalam pengembangan Kota Banda Aceh yang mengacu pada Qanun tersebut seperti penyesuaian pemanfaatan lahan berdasarkan pola ruang dan struktur ruang yang ada dalam Qanun RTRW Kota Banda Aceh. Salah satu indikator ketaatan terhadap RTRW Kota adalah pelaksanaan pembangunan baik bangunan pemerintah, bangunan swasta, bangunan masyarakat yang dibangun sesuai dengan peruntukan kawasan yang ditetapkan dalam RTRW Kota Banda Aceh. Peningkatan pemahaman dalam implementasi penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan upaya-upaya sosialisasi penataan ruang kepada setiap stakeholder,

sehingga diprediksikan setiap tahunnya ditargetkan adanya peningkatan kesesuaian pembangunan dengan rencana pola ruang yang telah ditetapkan dan berimplikasi pada peningkatan rasio ketaatan terhadap RTRW.

Tabel 2.60

Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Realisasi RTRW	53,57	57,07	60,57	64,07	67,57
2	Rencana Peruntukan RTRW	100	100	100	100	100
3	Rasio (1/2)	0,54	0,57	0,61	0,64	0,68

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017

2.3.2.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.3.2.4.1 Rasio Rumah Layak Huni

Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memenuhi perumahan layak huni makin besar seiring dengan meningkatnya jumlah pembangunan perumahan yang merupakan dampak dari meningkatnya jumlah penduduk. Dalam lingkungan perumahan sendiri harus terdapat fasilitas-fasilitas yang menunjang berkegiatan sehari-hari hal ini bertujuan untuk menjamin kelayakan perumahan yang dihuni sehingga dapat memberikan rasa nyaman, aman, tentram dan sejahtera bagi penghuninya.. Peran tersebut telah sesuai dengan peran pemerintah sebagai stabilisator, inovator, dan katalisator. Dalam mewujudkan perumahan yang layak huni yang menjadi faktor pendukung antara lain adanya bantuan dari pemerintah berupa pembangunan secara fisik maupun pemberian penghargaan serta dukungan sumber daya manusia yang berkompeten

Tabel 2.61

Tabel Rumah Layak Huni Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Rumah	56.062	57.408	58.785	60.196	61.641
2	Jumlah Rumah Layak Huni	55.128	56.595	58.093	59.625	61.191
Persentase		**98,33**	**98,58**	**98,82**	**99,05**	**99,27**

Pembangunan rumah layak huni diselenggarakan dengan sumber dana Otsus lewat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan jumlah yang tertangani 288 unit dan Sumber dana ZIS lewat Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menangani 185 unit sampai dengan tahun 2017. Jumlah proposal permohonan rumah layak huni yang masuk dari masyarakat dari tahun 2013 sampai dengan 2016 sebanyak 1194 proposal. Kondisi di lapangan masyarakat banyak yang tidak mempunyai tanah sehingga pemerintah tidak dapat memberikan bantuan rumah. Membangun perumahan bersubsidi untuk MBR bisa menjadi pilihan pemerintah kota Banda Aceh untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat yang tidak mempunyai tanah.

2.3.2.4.2 Persentase Permukiman yang Tertata

Tabel 2.62

Persentase Luas Pemukiman Tertata

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Luas Area Permukiman tertata (Ha)	1953,58	1953,58	1709,08	2043,91	2043,91
2	Luas Area Permukiman Keseluruhan (Ha)	2.506,64	2.506,64	2.506,64	2.506,64	2.506,64
	Persentase	**77,94**	**77,94**	**68,18**	**81,53**	**81,53**

Sumber: Dinas Perkim, PUPR

2.3.2.4.3 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh

Berdasarkan hasil Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Banda Aceh (RKPKP) di Tahun Anggaran 2015, titik lokasi kumuh bertambah dari 20 lokasi menjadi 22 lokasi, meskipun begitu, luas area permukiman kumuh mengalami penurunan dari 797 Ha menjadi 463 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa selain penanganan yang telah dilakukan selama ini di berbagai wilayah permukiman kumuh, perlu juga dilakukan upaya pencegahan agar tidak ada penambahan lokasi kumuh di Kota Banda Aceh sehingga di tahun 2019, target Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menurunkan hingga 0% daerah kumuh dapat terwujud.

Tabel 2.63
Luas Kawasan Kumuh Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	553,06	553,06	797,56	462,73	462,73
2	Luas Wilayah (Ha)	6.136,00	6.136,00	6.136,00	6.136,00	6.136,00
Persentase		**9,01**	**9,01**	**12,99**	**7,54**	**7,54**

Pembangunan kawasan permukiman kumuh kita tekankan pada pembangunan sarana prasarana dasar permukiman seperti jalan, drainase, pengelolaan sampah dan lampu jalan. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena kebutuhan dasar dari sarana prasarana permukiman merupakan hal utama terkait dengan kegiatan sehari-hari masyarakat, yaitu meningkatnya akses masyarakat dari kawasan permukiman ke pusat aktifitas perekonomian berupa pertokoan dan pasar.

Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh yang memiliki populasi sekitar 250 juta jiwa juga tidak sepenuhnya terlepas dari permasalahan kantong-kantong kemiskinan ini. Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman masyarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan dan kesehatan yang dianggap sebagai bagian kota yang harus disingkirkan. Terbentuknya pemukiman kumuh, yang sering disebut sebagai *slump area* sering dilihat berpotensi menimbulkan banyak masalah perkotaan, karena bisa menjadi sumber timbulnya berbagai masalah lingkungan, kesehatan, dan perilaku menyimpang, seperti kejahatan, serta sumber penyakit sosial lainnya.

Adapun manfaat terhadap lingkungan
1. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan mengurangi kekumuhan
2. Mengurangi dampak pencemaran lingkungan
3. Mengurangi tingkat bahaya pada saat bencana
4. Mengurangi dampak banjir yang kerap terjadi karena tidak tersedianya drainase lingkungan yang layak

2.3.2.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

2.3.2.5.1 Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Tabel 2.64
Tabel Cakupan Patroli Personil Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh tahun 2013-2016

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Regu	8	8	8	10
2	Jumlah Wilayah	12	12	12	12
3	Cakupan Patroli	2	2	2	2,5

Patroli adalah kegiatan mengamati dan mengawasi serta memberi bantuan pada suatu wilayah. Patroli dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh dengan kenderaan dinas sehingga menciptakan rasa tentram dan kondisi yang tertib di dalam masyarakat. Patroli dilaksanakan pada lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, tempat hiburan/keramaian dalam wilayah kecamatan Kota Banda Aceh. Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

2.3.2.5.2 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Pelanggaran terhadap perda/ qanun yang mengandung unsur pidana, Satuan Polisi Pamong Praja dan

Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh melalui PPNS meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Persentase penyelesaian pelanggaran K3 Tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.65

Tabel Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3	223	690	550	1131	492
2.	Jumlah pelanggaran K3	312	1327	1226	1560	797
3.	**Persentase penyelesaian K3**	**71,47 %**	**52 %**	**44,86 %**	**72,50 %**	**61,73 %**

Pada Tahun 2012 terjadi 312 pelanggaran K3 dengan total penyelesaian kasus sebesar 223 kasus pelanggaran. Untuk 89 kasus pelanggaran K3 yang belum selesai dikarenakan terkendala belum adanya Qanun Trantibum untuk Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yang merupakan kerangka acuan penindakan, penyelesaiam, serta penyelidikan kasus pelanggaran sehingga masih dalam tahap pembinaan maupun koordinasi dengan pihak Satpol PP dan WH Provinsi Aceh. Tingkat penyelesaian kasus di Tahun 2012 sebesar 71,47 % dari total kasus selama tahun 2012.

2.3.2.5.3 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota

Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran yang membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran, selanjutnya disebut WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya. WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain : pemukiman, perindustrian/ pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pda kawasan tertentu pertambangan, depot bahan bakar minyak dan atau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

Rumus Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran yaitu:

$$\frac{\Sigma \text{ Luas WMK (luas lingkaran)}}{\Sigma \text{ luas potensi kebakaran}} \times 100\ \%$$

$$\frac{6 \text{ WMK } (7.5)}{61{,}36} \times 100\ \%$$

$$= 73{,}34\ \%$$

Oleh Karena itu Kota Banda Aceh harus membentuk 2 (dua) WMK lagi untuk Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran 100 %.

$$\frac{8 \text{ WMK } (7{,}5)}{61{,}36} \times 100\ \%$$

$$= 97{,}78\ \%$$

Tabel 2.66

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Banda Aceh

Tahun	Wilayah Manajemen Kebakaran (km^2)			Luas Kota Banda Aceh (km^2)	Persentase (%)
2012	7.5	3	Pos	61,36	36,66%
2013	7.5	4	Pos	61,36	48,89%
2014	7.5	4	Pos	61,36	48,89%
2015	7.5	5	Pos	61,36	61,11%
2016	7.5	6	Pos	61,36	73,34%

Sumber : DPKP Kota Banda Aceh

2.3.2.5.4 Tingkat Waktu Tanggap *(Renponse Time Rate)* Daerah Layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK)

Tingkat Waktu Tanggap *(Response Time Rate)* Daerah Layanan WMK adalah pelayanan Pemadam Kebakaran pada saat Tanggap Darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan risiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/ penduduk sampai tiba ditempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda. Tingkat Waktu Tanggap *(Response Time Rate)* daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/ industri yang tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Tabel 2.67

Tingkat Waktu Tanggap Darurat (Response Time) Layanan

Tahun	Kasus di WMK yang Tanggap 15 Menit	Kasus Kebakaran Dalam WMK	Persentase(%)
2012	84	84	100,00
2013	80	86	93,02
2014	70	89	78,65
2015	48	59	81,35
2016	58	67	86,56

Sumber : DPKP Kota Banda Aceh

Tabel 2.68

Jumlah Kasus Kebakaran Tahun 2012 – 2016

No	Jenis Kebakaran	2012	2013	2014	2015	2016	Ket
1	Bangunan Perkantoran Pemerintah/ Swasta	13	16	14	24	26	
2	Perumahan/pemukiman penduduk.	16	48	24	26	22	
3	Hutan/ ilalang/ semak bulukar	55	24	51	9	19	
	JUMLAH	**84**	**86**	**89**	**59**	**67**	

Sumber : DPKP Kota Banda Aceh

2.3.2.5.5 Persentase Penegakan Perda

Penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk menjamin dan memastikan perda/qanun dan peraturan walikota tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda/ qanun dan peraturan walikota, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya. Penegakkan Perda/ Qanun Daerah dari Tahun 2012 sampai Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.69

Tabel Persentase Penegakan Perda Tahun 2012-2016 Kabupaten Kota

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah penyelesaian penegakan perda	375	964	757	1351	625
2	Jumlah pelanggaran perda	464	1601	1435	1788	939
3	Persentase penegakan perda	**80,82%**	**60,21%**	**52,75%**	**75,56%**	**66,56%**

Persentase penegakan perda yang terbesar terjadi Tahun 2012 sebesr 80, 82% dan persentase terkecil terjadi tahun 2014 sebesar 52, 75% dimana dari 1435 jumlah pelanggaran perda yang dapat diselesaikan sebanyak 757 penegakan perda. Pada Dari tabel diatas selama Tahun 2012-2016, Tahun 2016 terjadi penurunan kasus pelanggaran secara drastis dikarenakan penambahan anggota Satpol PP dan WH pada tahun 2015, akan tetapi tingkat penyelesaian kasus masih sebesar 66,56 %.

2.3.2.6 Sosial

Sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, maka penyelenggaraan pembangunan Daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Dinas

Sosial Kota Banda Aceh. Pemisahan Dinas Sosial dengan Dinas Tenaga Kerja mengacu pada Qanun No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Stuktur Perangkat Daerah.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial meliputi kegiatan Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) dan Pembinaan Pengembangan Kesejahteraan Sosial yang meliputi : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, Jaminan Sosial Keluarga, Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kepahlawanan Restorasi Sosial dan Penataan Lingkungan.

Kondisi Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Kota Banda Aceh Hasil Pendataan Tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 2.70

Daftar Penyandang Masalah Sosial di Kota Banda Aceh

No	Jenis Permasalahan Sosial	Jumlah Penyandang	Keterangan
1	Fakir Miskin	26.807	
2	Anak Terlantar	29	
3	Lanjut Usia Terlantar	96	
4	Lanjut Usia	2390	
5	Penyandang Cacat	468	
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	57	
7	Penyakit Kronis	-	
8	Gelandangan dan Pengemis	49	
9	Wanita rawan Sosial Ekonomi	932	
10	Bekas Narapidana	30	
11	Keluarga Retan	1502	
12	Keluarga yang tinggal dirumah tidak layak Huni.	166	
13	Wanita Korban tindak Kekerasan	137	
14	Anak Korban Tindak Kekerasan	38	
15	Anak Cacat	155	

2.3.2.6.1 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Kategorisasi terhadap PMKS mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, yang didalamnya terdapat 26 jenis PMKS. Sedangkan sifat pelayanan sosial yang diberikan selain rehabilitasi, juga menyampaikan bantuan sosial baik dalam bentuk uang maupun barang.

Secara nasional terdapat dukungan bantuan yang diberikan oleh Kementrian Sosial dalam bentuk Bantuan Tunai Bersyarat atau Conditional Cash Transfer (CCT) melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan pendampingan program ini, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. Dalam jangka pendek bantuan sosial ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Artinya, PKH diharapkan sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Tabel 2.71

Jangkauan PKH Dan Jumlah Bantuan Tahun 2013-2016

No	Tahun	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kpm	Jumlah Bantuan	Keterangan
1	2013	5	49	1.149	760.325.000	Lokasi Lama
2	2014	8	61	1.463	2.104.455.500	Lokasi Lama
3	2015	9	67	1.568	3.128.760.000	Pengembangan/Saturasi Melalui Apbnp
4	2016	9	82	2.527	3.752.440.689	Perluasan Tahun 2016

2.3.2.6.2 Jumlah PMKS yang Mendapat Pembinaan Dalam dan Luar Panti

Salah satu prasarana yang tersedia untuk penanganan dan rehabilitasi PMKS di Kota Banda Aceh adalah Rumah Singgah, sampai dengan tahun ini penanganan PMKS dalam panti telah melayani sejumlah 100 orang, sedangkan penanganan di luar panti yang berbentuk bantuan, pendampingan dan pemulangan sejumlah 117 orang.

2.3.2.6.3 Persentase Bantuan Melalui Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) diarahkan kepada kelompok masyarakat miskin untuk meningkatkan gairah dan kemampuan mereka dalam membangun usaha bersama yang didasari tujuan dan tanggung jawab bersama, melalui program KUBE ini maka diharapkan terciptanya kemandirian masyarakat miskin dalam berusaha. Terkait program KUBE ini, maka jenis bantuan yang telah diberikan sebagai berikut :

Tabel 2.72

Tabel Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Program	Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Sumber Dana	Jumlah Pagu
Pemberdayaan FM, KAT dan PMKS lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin		APBK KOTA BANDA ACEH	Rp. 712.000.000,-
	Bantuan untuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama)	30 KUBE	APBA DINAS SOSIAL ACEH	Rp. 600.000.000,-
	Bantuan untuk KUBE Jasa (anggotanya merupakan khusus penerima PKH	10 E-WAROENG	APBN KEMENSOS RI DIRJEN Penanganan Fakir Miskin	Rp. 300.000.000,-

Sumber : Dinas Sosial Kota Banda Aceh

2.3.2.6.4 Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Untuk penanganan korban bencana, Dinas Sosial lebih berperan pada proses penyediaan logistik dan permakanan selama proses tanggap darurat dan proses pengungsian. Bantuan terhadap korban bencana dilakukan melalui kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa dengan penerima manfaat sebanyak 31 KK yang pendanaannya dicover melalui APBK sebesar RP. 92.210.000 (2017). Sebagian besar penerima adalah korban bencana kebakaran dan banjir, mengacu pada kondisi kota Banda Aceh yang rawan terhadap ancaman bencana kebakaran dan banjir. Hal ini juga tertuang dalam dokumen kebencanaan kota Banda Aceh.

2.3.2.6.5 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Data tahun terakhir terdapat sejumlah 623 orang Penyandang Disabilitas dengan berbagai jenis kecacatan, umumnya adalah netra dan kecacatan fisik. Dari jumlah tersebut, 284 jiwa atau 46% penyandang disabilitas telah mendapatkan bantuan secara reguler, dengan rincian 178 jiwa mendapatkan bantuan melalui APBK, 68 jiwa dari APBA dan 38 jiwa dari APBN.

2.3.3 Fokus layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.3.1 Bidang Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Dengan bekerja, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sesuai kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki, selain itu bekerja juga melibatkan aspek sosial seperti aktualisasi diri, melakukan kontak sosial, serta pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu yang bersangkutan.

2.3.3.1.1 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Perselisihan hubungan industrial merupakan perselisihan antara pekerja dengan pengusaha, dimana pekerja tidak mendapat hak-hak semestinya dari pengusaha. Jenis-jenis perselisihan hak ini antara lain terjadinya pemutusan hubunga kerja (PHK) secara sepihak. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di lakukan pada Dinas Tenaga Kerja melalui peran serta Mediator dan Konsiliator. Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh memiliki tenaga Mediator sebanyak 1 (satu) orang dan tenaga Konsiliator sebanyak 1 (satu) orang yang merupakan konsiliator Provinsi Aceh diperbantukan di Kota Banda Aceh.

Jumlah penyelesain perselisihan hubungn industrial periode 2012 – 2016 sebanyak 187 kasus dengan rincian diselesaikan oleh Mediator sebanyak 80 kasus, diselesaikan oleh Konsiliator sebanyak 79 kasus dan diteruskan ke Pengadilan sebagai Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja sebanyak 28 Kasus. Rincian nya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.73

Tabel Jumlah Penyelesaian Perselisihan Tahun 2012-2016

No	Jenis Kasus/Perkara Yang Masuk	Tahun																				Keterangan Jumlah			
		2012				2013				2014				2015				2016							
		J	M	K	P	J	M	K	P	J	M	K	P	J	M	K	P	J	M	K	P	J	M	K	P
1	Perselisihan Hubungan Kerja	22	12	7	3	34	13	15	6	38	12	23	3	32	19	1	12	61	24	33	4	187	80	79	28

Keterangan :
M : Mediator
K : Konsiliator
P : Pengadilan PHI

2.3.3.1.2 Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja terdaftar di Dinas Tanaga Kerja yang ditempatkan selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.74

Tabel Pencari Kerja yang Ditempatkan

No	Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Tenaga Kerja Terdaftar	503	124	213	366	85
2	Tenaga Kerja Ditempatkan	659	2004	1238	389	715
	Persentase	**76.33%**	**6.19%**	**17.21%**	**94%**	**11.89%**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase penempatan tenaga kerja sangat berfluktuasi, hal ini tergantung pada factor tenaga kerja yang terdaftar dan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Tenaga kerja terdaftar akan banyak bila ada penerimaan PNS yang mempersayaratkan Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu AK 1). Sedangkan lowongan kerja yang tersedia tergantung pada pihak swasta yang membutuhkan tenaga kerja dan berhasil disalurkan oleh petugas antar kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.

2.3.3.1.3 Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Selama kurun waktu 2012 – 2016, perselisihan antara Buruh dan Pengusaha dengan pemerintah di sebut dengan perselisihan kepentingan. Jumlah perselisihan kepentingan ini hanya terjadi pada tahun pada 2016 yang diselesaikan oleh Konsiliator. Perselisihan kepentingan ini meliputi ruang menyusui, dan safety keselamatan kerja. Perselisihan kepentingan ini timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian mengenai pembuatan, perubahan persyaratan kerja yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana setiap regulasi pemerintah harus diturunkan lebih detil dalam setiap perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dimana ketiga hal tersebut harus mendapat persetujuan Dinas Tenaga Kerja.

2.3.3.1.4 Rasio Lulusan S1/S2/S3

Berdasarkan profil perkembangan kependudukan Kota Banda Aceh Tahun 2015, Rasio lulusan S1, S2, dan S3 di Kota Banda Aceh adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.75

Tabel tingkat Pendidikan di Kota Banda Aceh

Tingkat Pendidikan	Tahun 2015	Rasio
S1	31.666	87.69%
S2	4.003	11.08%
S3	442	1.22%
Jumlah	**36.115**	**100%**

Sumber : Profil Perkembangan Kependudukan Kota Banda Aceh Tahun 2015

Dari tabel di atas, penduduk dengan tingkat pendidikan lulusan S1, S2, dan S3 di Banda Aceh Tahun adalah 36.115 orang. Mayoritas di antara mereka adalah lulusan S1 sebanyak 87.69%, sedangkan S2 11.08%, dan S3 hanya 1.22%.

2.3.3.2 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Banda Aceh secara resmi baru dimulai sejak dibentuknya Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Di bidang pemberdayaan perempuan, upaya-upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan adalah melalui kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian perempuan dalam perempuan, antara lain :

1) tersedianya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musrena;
2) pengajuan Draft Qanun Kota Ramah Gender;
3) memfasilitasi terbentuknya organisasi perempuan di tingkat masyarakat, yaitu Women Development Center (WDC) dan Balee Inong;
4) memfasilitasi terbentuknya Pokja PUG dan Tim Vocal Point;

Sementara itu, dibidang Keluarga Berencana (KB) lebih kepada bentuk pelayanan melalui pemberdayaan kader-kader KB dan penyelenggaraan pelayanan kepada keluarga dan program kontrasepsi , diantaranya :

1) pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KB dan Keluarga Sejahtera;
2) penyediaan alat-alat kontrasepsi

2.3.3.2.1 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%)

Tabel 2.76

Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Pegawai Negeri Sipil	6.111	6.077	5.922	5.798	4.418
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Laki-laki	2.047	2.048	1.986	1.939	559
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan	4.046	4.029	3.936	3.589	3.859
Persentase	**66,20**	**66,29**	**66,46**	**61,90**	**87,34**

Statistik Banda Aceh

Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan sudah sangat baik, di Kota Banda Aceh malah lebih dominan pegawai perempuan daripada pegawai laki-laki. Belum ada ukuran jumlah ideal yang ditetapkan, karena ini masih mengacu pada kebutuhan di bidang-bidang dan sector pemerintahan. Hal ini juga dipengaruhi dengan pembentukan SOTK baru di Pemerintah Kota Banda Aceh pada akhir tahun 2016, sehingga harus dikaji kembali berapa jumlah ideal rasio kebutuhan pegawai laki-laki dan perempuan di Kota Banda Aceh. Sejauh ini upaya diarahkan kepada memberikan kesempatan yang sama untuk pengisian jabatan dan peningkatan kualitas diri.

2.3.3.2.2 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tabel 2.77

Tabel Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Perempuan	0	0	0,74	0,67	0,75
Anak	0	0	0,28	0,32	0,32

Sumber : P2TP2A Madani Kota Banda Aceh,
**ctt : P2TP2A baru terbentuk resmi sejak tahun 2014, data 2012 dan 2013 tidak ada*

Penanganan yang terkoordinasi dan terinventarisir atas berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baru dilaksanakan pada tahun 2014, seiring dengan dibentuknya lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam perkembangannya, lembaga ini juga banyak terbantu dengan membangun system jejaring yang baik dengan lembaga Balee Inong yang hingga akhir tahun 2016 telah terbentuk sebanyak 19 (Sembilan belas) balee inong.

Layanan yang diberikan meliputi layanan pengaduan, konsultasi, pendampingan hukum dan perlindungan dengan menyediakan Rumah Aman bagi korban kekerasan (baik itu perempuan dan atau anak) selama proses mediasi atas kasus tersebut hingga dapat diselesaikan dengan baik. Ada beberapa kasus dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun banyak pula kasus yang harus di lanjutkan pendampingannya ke ranah hukum.

2.3.3.2.3 Kota Layak Anak

Tabel 2.78

Tabel indikator KLH yang dicapai tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Indikator KLH yang dicapai	0	0	0	26	27

**pencapaian indikator KLH baru dimulai sejak 2015, tahun2 sebelumnya baru sebatas sosialisasi*

Pencapaian indikator Kota Layak Anak (KLA) masih terus digiatkan, karena membutuhkan upaya yang panjang, berkesinambungan dan kerjasama berbagai pihak. Sejauh ini upaya yang dilakukan baru sebatas sosialisasi dan advokasi kepada stakeholders untuk mendapatkan dukungan dan pemahaman yang sama, masih perlu inventarisasi yang menyeluruh terhadap program kegiatan di SKPD yang sudah mendukung tercapainya 31 indikator KLA.

2.3.3.2.4 Perluasan Jaringan Khususnya Untuk Panti dan Pusat Rehabilitasi

Tahun 2016 jaringan kerja P2TP2A semakin luas karena sesuai kebutuhan korban /survivor yang memerlukan berbagai layanan. Kasus semakin beragam dan persoalan yang kompleks dituntut adanya pengembangan mitra. Saat ini P2TP2A mengembangkan kerjasama dengan Tabina, BNN Aceh, Panti Nirmala, Panti SOS, Panti Kinder Hut, dan lain-lain.

Tabel 2.79

Tabel Mitra P2TP2A

No	Nama Yayasan	Jumlah anak dampingan P2TP2A
1	Yayasan Tabina	3 orang
2	Panti SOS	1 orang
3	Panti Kinder Hut	2 orang
4	Pasantren Mahad Al Ikhlas	1 orang
5	PKBM Putri Gina	4 orang

2.3.3.2.5 Cakupan Penegakan Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Penyelesaian Kasus Melalui Litigasi dan Non Litigasi

Dalam menyelesaikan kasus Perdata, biasanya terdapat dua jalur yang dapat dilakukan bagi pihak yang bersengketa jalur litigasi dan non-litigasi. Yang dimaksud dengan Litigasi adalah bentuk penanganan kasus melalui jalur proses di peradilan baik kasus perdata maupun pidana, sedangkan Non-Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan.

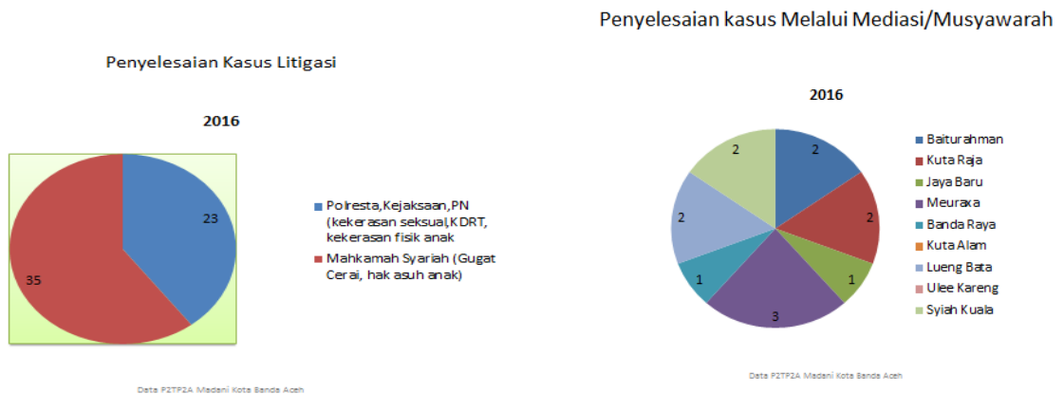

Gambar 2.44
Gambar Penyelesaian Kasus

Berdasarkan data diatas jumlah kasus yang diselesaikan secara litigasi baik di pengadilan negeri maupun mahkamah syariah sebanyak 58 atau 0.33% sedangkan non litigasi ada 13 atau 0.07% dari keseluruhan jumlah kasus. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua kasus diselesaikan melalui pengadilan. Upaya pengadilan biasanya ditempuh untuk jenis kasus gugat cerai, KDRT berat (fisik), kekerasan seksual serta eksploitasi orang tua atau dewasa terhadap anak. Selain itu penyelesaian non litigasi juga mendorong perangkat gampong, tuha peat, Baleinong, PKK untuk berpartisipasi aktif sehingga mekanisme perlindungan berbasis komunitas dapat berjalan efektif. Untuk itu P2TP2A Madani melakukan audiensi dan asistensi ke 19 Gampong melalui Baleinong di sembilan kecamatan Kota Banda Aceh.

2.3.3.3 Bidang Pangan

2.3.3.3.1 Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan Pangan Pokok di Kota Banda Aceh sangat terbatas, disebabkan karena jumlah lahan sangat sempit (71 Ha), ditambah dengan terjadinya konversi lahan menjadi peruntukan lain, disamping budidaya pertanian di kota hanya mengandal curah hujan, karena tidak tersedianya irigasi, dalam hal ini di kelompok masyarakat kita menyediakan pompa air untuk lahan pertanian tetapi belum maksimal. Produksi yang dihasilkan dari lahan yang tersedia sekarang diperkirakan hanya mampu hanya mampu untuk mencukupi konsumsi tiga hari makan. Untuk Mengatasi kebutuhan pangan pokok tersebut kita mengandalkan pasokan dari luar Kota Banda Aceh.

Untuk maksud tersebut kita menggalakan pola konsumsi melalui pengganekaragaman pangan (tidak mengandalkan beras). Upaya tersebut selama ini telah ditempuh melalui sosialisasi kepada masyarakat melalui Lomba Cipta Menu B2SA dan Lomba Masak serba Ikan. Tujuannya yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap keanekaragaman pangan. Dan untuk Mengurangi ketergantungan terhadap kebutuhan pangan (beras) saja, Disamping tujuan sosialisasi tersebut adalah dengan pemanfaatan pangan lokal dengan komposisi gizi, kalori yang seimbang.

Salah satu cara mengatasi keterbatasan lahan tersebut, upaya yang dapat ditempuh yaitu dengan memanfaatkan lahan perkarangan seperti menanam tanaman hortikultura dan budidaya ikan air tawar di kolam terpal di halaman rumah penduduk.

Dalam mendukung program wisata halal Kota Banda Aceh perlu digalakkan tanaman organik (bebas Pestisida) namun untuk proram ini masyarakat belum membudaya kegiatan ini, padahal aktiftas tersebut dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga.selama ini kegiatan DP2KP belum mendapat alokasi anggaran dari APBK yang memadai.

Terkait program keamanan pangan perlu diupayakan dilakukan pengawasan yang lebih intens terhadap kontaminasi atau pencemaran pangan segar. Agar Makanan yang dikonsumsi masyarakat layak dan sehat. Untuk mendukung program pangan khususnya terkait ketahanan dan keamanan pangan perlu ada keterpaduan lintas sektor (Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Banda Aceh). Dalam hal ini perlu kerja sama dan dukungan alokasi Anggaran yang memadai.

Tabel 2.80

Tabel Ketersediaan Pangan Utama

Urusan	Rumus	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Ketersediaan pangan utama	$\frac{\text{Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	159.363	162.550	165.801	169.118	172.822

2.3.3.4 Bidang Lingkungan hidup

2.3.3.4.1 Timbulan Sampah yang Ditangani

Pelayanan persampahan di Banda Aceh hinggga tahun 2016 terdiri dari 2 sistem yaitu sistem "*door to Door*" dan sistem kontainer. Pelayanan Sistem "*door to door*" mencakup wilayah komersil dan perumahan; sedangkan pelayanan sistem kontainer mencakup wilayah gampong yang diletakkan pada jalan umum. Berikut realisasi persentase cakupan pelayanan sampah periode 2012-2016:

Tabel 2.81

Tabel Realisasi Persentase Cakupan Pelayanan Sampah Periode 2012-2016

No	Persentase Penanganan Sampah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target dan Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017 hingga april	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	% Target	78	84	87	89	91	93	93
2	% Realisasi	78	84	85	86	88	88	88

Dari jumlah timbulan sampah yang dihasilkan sebanyak 188 Ton/hari ditahun 2016 hanya berkisar sebanyak 165 % Ton/hari atau 88% yang terangkut ke TPA Gampong Jawa, sisanya 21 ton/hari atau 11% sampah daur ulang, 4 Ton/hari atau 2,1% pengomposan sampah daun/ranting pohon di ITF dan 7 Ton/hari atau 3,7 % sampah yang tidak terangkut pada wilayah gampong. Ada 68 gampong Pelayanan penanganan sampah hinggga ke lorong-lorong dan ada 22 gampong yang masing dilayanani di jalan utama saja. Sejak tahun 2014, sulitnya meningkatkan cakupan penanganan sampahdari target yang ditetapkan karena keterbatasan armada dalam memenuhi sistem door to door sedangkan sistem kontainer banyak penolakan warga terhadap lokasi yang ditetapkan kontainer di dalam gampong. Kedua hal tersebut penyebab sulitnya mencakup pelayanan hinggga 93%. Namun jika dilita dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang maka Banda Aceh telah berhasil melampaui ketetapan SPM cakupan penanganan sampah yaitu 70%. Tingkat Keberhasilan Banda Aceh terhadap pencapaian SPM dalam penanganan sampah sebesar 126%.

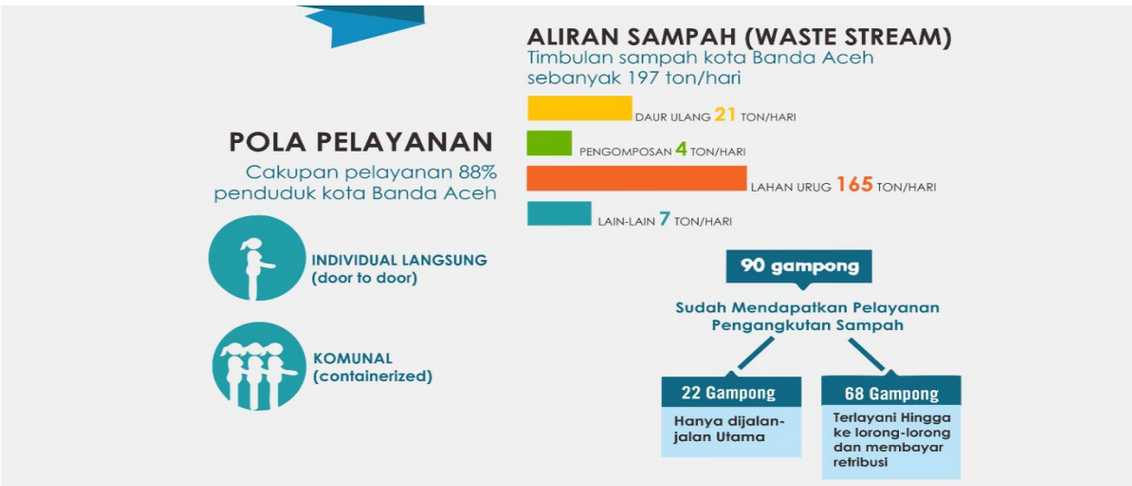

Gambar 2.45
Keadaan sampah di Kota Banda Aceh

2.3.3.4.2 Pencemaran Status Mutu Air

Pada tahun 2016, ada 176 sumber pencemaran air yang telah di pantau pengelolaannya. Sebagian besar terdiri dari hotel, rumah sakit, restauran, SPBU, bengkel/shoroom dan lain-lain.

Tabel 2.82
Data Sumber Pencemaran Air Tahun 2016

No	Jenis Sumber	Jumlah	Satuan
1	Hotel	41	Buah
2	Rumah sakit/Klinik	47	Buah
3	Restauran/Rumah makan	15	Buah
4	SPBU	12	Buah
5	Showroom/Bengkel	26	Buah
6	Laundry	2	Buah
7	Doorsmer	3	Buah
8	Apotek/Obat-obatan	9	Buah
9	Industri	8	Buah
10	DLL	13	Buah
Jumlah		**176**	**Buah**

Dari berbagai sumber pencemaran air yang telah dipantau, maka pada tahun 2016 pula dilakukan pengujian tingkat pencemaran air apada dua sungai yaitu sungai krueng aceh sebanyak 6 titik pantau dan sungai krung daroy sebanyak 6 titik pantau (Data penceamaran air 2016). Kedua sungai tersebut sudah disimpulkan cemar berat, sehingga perlu ke depan dilakukan upaya pencegahan pencemaran air dititik-titik sumber pencemaran.

1. Sungai Krueng Aceh

Tabel 2.83
Tingkat Pencemaran Air Sungai Krueng Aceh Tahun 2016

No	Titik Pantau Pencemaran Air	Skor	Tingkat Pencemaran
1	Mutu Air Sungai Krueng Aceh Segmen Lambaro	-17	Cemar Sedang
2	Mutu Air Sungai Krueng Aceh Segmen Pango	-17	Cemar Sedang
3	Mutu Air Sungai Krueng Aceh Segmen Pante pirak	-48	Cemar Berat
4	Mutu Air Sungai Krueng Aceh Segmen Jembatan Simpang Surabaya	-43	Cemar Berat
5	Mutu Air Sungai Krueng Aceh Segmen Jembatan Peunayong	-41	Cemar Berat
6	Mutu Air Sungai Krueng Aceh Segmen Gampong Jawa	-42	Cemar Berat
Total Rata2 Mutu Air di Sungai Krueng Aceh		**-31**	**CEMAR BERAT**

2. Sungai Krueng Daroy

Tabel 2.84

Tingkat Pencemaran Air Sungai Krueng Daroy Tahun 2016

No	Titik Pantau Pencemaran Air	Skor	Tingkat Pencemaran
1	Mutu Air Sungai Krueng Daroy Segmen Geuce Komplek	-15	Cemar Sedang
2	Mutu Air Sungai Krueng Daroy Segmen Lamlagang	-23	Cemar Berat
3	Mutu Air Sungai Krueng Daroy Segmen Putroe Phang	-18	Cemar Sedang
4	Mutu Air Sungai Krueng Daroy Segmen Pendopo	-36	Cemar Berat
5	Mutu Air Sungai Krueng Daroy Segmen Peuniti	-25	Cemar Berat
6	Mutu Air Sungai Krueng Daroy Segmen POM	-27	Cemar Berat
Total Rata2 Mutu Air di Sungai Krueng Daroy		**-36**	**Cemar Berat**

2.3.3.4.3 Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis Analisa Mengenai Dampak Lingkungan berupa rekomendasi UKL-UPL dilihat dari target selama periode 2012-2017 pelaku usaha yang harus melaksanakan pembuatan dokumen UKL-UPL. Pemerintah Kota Banda Aceh Periode 2012-2017, dari 150 Pelaku Usaha yang ditarget, hingga Bulan Mei 2017 mencapai 128,6% yaitu 193 unit usaha yang melaksanakan pembuatan dokumen UKL-UPL Peningkatan realisasi dari target yang dihasilkan disebabkan karena sudah mulai terintegrasinya dengan perizinan pelayanan terpadu satu pintu sehingga banyak pengusaha yang harus membuat dokumen UKL-UPL untuk mendapatkan rekomendasi izin lingkungan yang dikeluarkan oleh DLHK3.

Tabel 2.85

Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Kinerja	Perhitungan Indikator	Capaian dan Target	Kondisi Awal RPJMD	Capaian dan Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal (dokumen lingkungan/UKL-UPL)	Jumlah perusahaan wajib Amdal (dokumen lingkungan) yang diawasi dibagi jumlah perusahaan wajib Amdal (dokumen lingkungan) di kali 100	Target 80% dari 150 Usaha wajib UKL-UPL	3% (4)	15% (22)	16% (24)	33% (50)	7% (10)	7% (10)	**80% (120)**
		Capaian	3% (18)	15% (13)	16% (54)	33% (51)	7% (37)	7% (20) Hingga Mei 2017	**128,6% (193)**

2.3.3.4.4 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan penduduk

Tabel 2.86

Tabel Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan Penduduk

No	Indikator	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	Jumlah daya tampung TPS (m3) dibagi jumlah produksi sampah tiap penduduk (0,75 kg per orang/hari) dikali 100	46,88	46,89	46,90	46,91	46,92	46,93	46,93
			-	-	26,34	28,83	29,23	-	29,23

Note :Massa jenis sampah = 250 kg/m3

Daya Tampung TPS persatuan penduduk tergolong hanya mencapai 50% capaiannya dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena selain alokasi dana yang kecil untuk pembelian kontainer, juga sulitnya mendapatkan lokasi kontainer di dalam wilayah gampong. Target setiap

tahunnya 227 kontainer berukuran 660 Liter yang harus disediakan namun pemerintah Kota Banda Aceh (DLHK3) hanya mampu mampu mengalokasikan 30-50 kontainer untuk ditempatkan jalan utama saja, sedangkan di dalam wilayah gampong terjadi penolakan karena kekhawatiran masyarakat dapat menimbukan bau dilingkungan mereka tinggal.

Untuk kedepan, periode 2017-2022 pemerintah Kota Banda aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh menyusun strategi melalui kegiatan pengurangan sampah dari sumbernya dengan metode/sistem *Waste collecting Point (WCP)* . Sistem WCP ini bersifat pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan cara membentuk kelompok-kelompok warga untuk memilah berbagai jenis sampah dan mengumpulkannya pada satu titik. Sampah yang dapat didaur ulang akan mereka jual atau olah di gampong tersebut sedangkan sampah yang residu (tidak dapat di daur ulang) akan di buang ke TPA Blangbintang oleh Pemko Banda Aceh. Dengan sistem WCP mendapatkan pelayanan maksimal, lingkungan bersih dan nilai ekonomis dari hasil daur ulang sampah, sedangkan pemerintah juga berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah, target pengurangan sampah secara nasional terpenuhi, meningkatkan retribusi sampah, meningkatkan daya tampung TPS persatuan penduduk dan dapat mengurangi biaya beban pengangkutan sampah sebanyak 54% ke TPA Blangbintang.

2.3.3.4.5 IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) Gampong Jawa

DK3 saat ini mengelola 2 (dua) unit IPLT, instalasi yang pertama menggunakan teknologi kolam oksidasi (konvensional), hanya mengandalkan waktu tinggal dengan kapasitas 50 m3/hari. Saat bencana tsunami 2004, sempat hancur, namun sudah direhab kembali oleh JICA tahun 2005. Pada tahun pertama operasi, volume tinja yang dibuang mencapai 114 m3/hari sehingga melebihi kapasitas yang tersedia. Kondisi ini disebabkan pasca tsunami banyak sekali terdapat barak-barak pengungsian yang menampung ribuan pengungsi sehingga limbah tinja yang dihasilkan sangat banyak dan dibuang ke IPLT Gampong Jawa sehinga satu-satu IPLT yang ada di Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar pada waktu itu dan hingga saat kini. Kondisi ini sempat terjadi selama beberapa tahun dan mulai berkurang saat para pengungsi meninggalkan barak mereka.

Tahun 2007 dibangun instalasi kedua oleh UNICEF yang berlokasi berdampingan dengan IPLT JICA dengan kapasitas 85 m3/hari. IPLT ini menerapkan kombinasi pengolahan secara anaerobik dan aerobik. Beberapa teknologi anaerobik yang digunakan antara lain: digester, sludge stabilization, buffle reactor dan anaerobic filter. Sementara teknologi aerobik yang digunakan adalah planted gravel filter, kolam dan bak pengering lumpur tinja. Saat ini IPLT melayani truk tinja rata-rata 8-10 trip atau setara dengan 24-30 m3/ hari terdiri dari truk yang dikelola DK3 dan truk swasta.

Pengelolaan IPLT Kota Banda Aceh dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh. Sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh No.2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh bahwa pengelolaan IPLT berada di bawah Seksi Pengelolaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT), Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3, Dinas Ligkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh.

Jumlah personil baik kepala seksi, staf maupun pekerja yang terlibat dalam pengelolaan IPLT sebanyak 9 (sembilan) orang, terdiri:

a. Kepala Seksi : 1 orang
b. Staf (PNS) : 2 orang
c. Pekerja (Non PNS)
    - Supir truk tinja : 1 orang
    - Kernek truk tinja : 1 orang
    - Operator : 4 orang

Tabel 2.87
Tabel Volume Tinja dibuang ke IPLT

Tahun	Volume Tinja Dibuang ke IPLT					
	Truk DK3		Truk Swasta		Total	
	Trip	Volume	Trip	Volume	Trip	Volume
2012	1,172	2,594	450	1,761	1,622	4,355
2013	1,332	5,063	1,018	3,972	2,35	8,935
2014	1,055	4,22	505	2,02	1,56	6,24
2015	1,079	4,316	410	1,64	1,489	5,956
2016	1,121	4,484	203	812	1,324	5,296

2.3.3.4.6 Pemanfaatan Gas Metana dari TPA Gampong Jawa

TPA Kota Banda Aceh menerima sampah yang masuk setiap harinya sebesar 160 - 170 ton diperkirakan mampu menghasilkan gas metan dengan kapasitas 4.000 m3/hari bila pengumpulannya dilakukan secara optimal. Di tahun 2015 pemerintah kota Banda Aceh melalui DK3 telah melakukan upaya pengumpulan dan pemanfaatan gas metan di TPA dengan memasang 12 pipa pengumpul gas vertikal tambahan dimana sebelumnya sudah terpasang 6 pipa pengumpul, sehingga saat ini gas metan sudah dapat dikumpulkan dari 18 pipa pengumpul vertikal yang ada. Untuk tahap pertama DK3 telah mengumpulkas gas metan TPA dari 4 pipa pengumpul vertikal dan telah berhasil disalurkan melalui 2 unit compressor yang dihidupkan secara bergantian ke 23 rumah penduduk yang ada di sekitar TPA yaitu masyarakat Gampong Jawa. DK3 menargetkan pada tahun 2017 gas metan yang dihasilkan TPA Kota Banda Aceh dapat disalurkan ke 100 rumah warga Gp. Jawa sebagai salah satu bentuk kompensasi Pemerintah Kota Banda Aceh bagi masyarakat yang tinggal di dekat lokasi TPA.

Hal yang membedakan program pemulihan gas metan TPA yang dilakukan oleh Kota Banda Aceh dengan daerah lainnya adalah pengumpulan gas metan TPA Kota Banda Aceh dilakukan pada lahan TPA yang masih aktif dengan tetap memperhatikan faktor-faktor keamanan dan kemudahan operasional alat berat pada lahan urug. Masyarakat Gp. Jawa penerima gas methan gratis dari TPA Kota Banda Aceh sangat senang dan merasakan manfaat yang cukup besar dari gas methan yang mereka terima. Bahkan salah seorang masyarakat mengatakan bahwa sejak adanya gas methan dari TPA, penggunaan elpiji 3 kg di rumahnya dapat dihemat dari 3 tabung/bulan menjadi hanya 1 tabung /bulan. Pemakaian elpiji masih dilakukan untuk mengantisipasi keperluan memasak pada saat jadwal distribusi harian dihentikan. Selama ini jadwal penyaluran gas methan dari TPA mulai pukul 08.00 s/d 12.000 dan 15.00 s/d 17.30.

Pemerintah Kota saat ini sedang mendorong masyarakat penerima manfaat gas methan gratis ini untuk memanfaatkan gas methan tidak hanya untuk kebutuhan memasak sehari-hari, tetapi juga untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga melalui kegiatan usaha rumah tangga (home industry) berbasis bahan bakar gas seperti usaha membuat nasi bungkus, membuat keripik, kacang goreng, dsb untuk dititipkan di warung-warung.

2.3.3.4.7 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Tabel 2.88
Tabel Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

No	Jenis RTH Publik	Luas (Ha) 2012	Luas (Ha) 2013	Luas (Ha) 2014	Luas (Ha) 2015	Luas (Ha) 2016
1	RTH Taman dan Jalur Hijau	553.6	568.6	580.7	584.10.00	584.10.00
2	RTH Hutan kota	24.43.00	25.96	27.54.00	29.93	29.93
3	RTH Makam	25.89	26.56.00	27.58.00	27.57.00	27.57.00
4	RTH Lapangan dan Stadion	51.99	55.31.00	60.34.00	60.24.00	60.24.00
5	RTH Tepian Air	72.57.00	92.52.00	107.97	107.97	107.97
Jumlah luasan RTH Total		728.48.00	768.95	804.13.00	809.81	809.81
Luas Kota Banda Aceh		6136.00.00	6136.00.00	6136.00.00	6136.00.00	6136.00.00
Presentase luas RTH terhadap Luas Kota Banda Aceh		11,87	12.53	13.11	13.2	13.2

Bila dilihat capaian setiap tahunnya, maka penambahan luas RTH relatif mengalami peningkatan hanya pada. Peningkatan tersebut disertai dengan penambahan beberapa lokasi RTH seperti RTH Lambung, RTH Krueng Neng, RTH Ceurih, RTH Taman Hijau Lamjame dan RTH Gampong Pie. Selain pencapaian luas, dibawah Dinas Lingkungan Hidup juga memelihara dan menangani pemeliharaan RTH publik dengan pencapaian di tahun 2016 sebagai berikut

Tabel 2.89

Tabel Pemeliharaan dan Penanganan RTH

Sasaran	No	Indikator Kinerja			%
		Uraian	Target	Realisasi	
Bertambahnya areal Ruang terbuka hijau (RTH) yang hijau, bersih, indah dan nyaman di Kota Banda Aceh guna mendukung kepariwisataan	1	Jumlah pohon yang ditanam	1000 pohon/ batang	1.322 pohon/ batang	132,2
	2	Jumlah RTH yang terpelihara dengan baik	15 lokasi	22 lokasi	106,1

Penanaman Tanaman Hias dan Penghijauan tiap tahun dilakukan untuk meningkatkan keindahan dan meciptakan kota yang teduh. Tahun 2016, penanaman tanaman hias banyak ditanam di beberapa median jalan dan taman pulau jalan, sedangkan penanaman pohon banyak di lakukan di Hutan Kota BNI Tibang dan Gampong Beurawe (jenis pohon matoa) kerjasama dengan Geuchik Gampong Beurawe. Pemeliharaan taman dan RTH lainnya menjadi perioritas dalam menentukan keberhasilan untuk menciptakan RTH yang bersih, indah dan nyaman. Pada tahun 2016, meningkatnya jumlah pemeliharaan taman sebanyak 15 lokasi yaitu : Taman Krueng Neng, RTH Lambung, Taman Gampong pie, Median Jl. Sultan Alaidin Mansursyah, Taman median Jalan Chik Ditiro, Taman Median Daud Beure'euh, Taman Median Jl. P. Nyak Makam dan taman median lainnya.

Penanaman pohon di tahun 2016 telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan 1000 pohon, namun meningkat lebih dari dari target sebesar 322 pohon. Dari garfik di bawah ini menunjukkan perbandingan penanaman pohon 2015 dan 2016 mengalami penurunan aktivitas menanam disebabkan karena lahan tanam di RTH semakin berkurang. Tahun 2016, dapat memenuhi target karena ada inisiatif gampong untuk melakukan gerakan penanaman pohon sebanyak 1.000 batang.

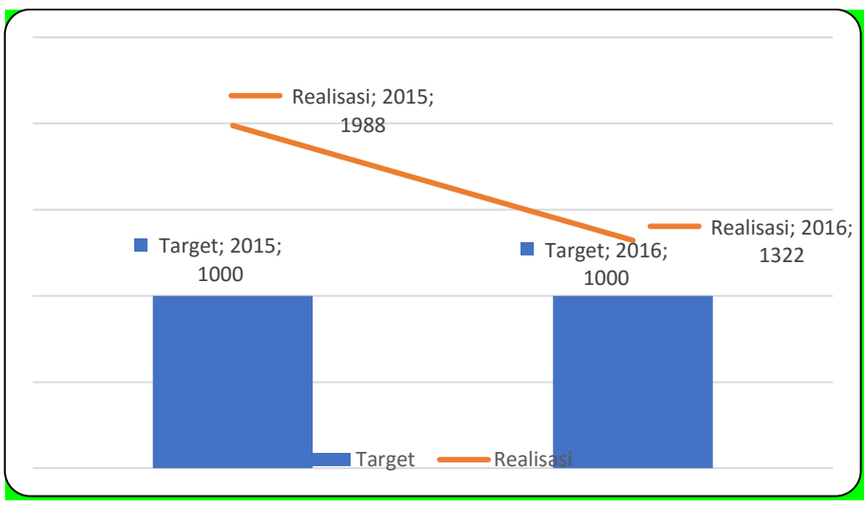

Gambar 2.46

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Penanaman Pohon Tahun 2015-2016

Lokasi Pemeliharaan Taman di Tahun 2016 meningkat 15 lokasi dari tahun sebelumnya (tahun 2015). Peningkatan itu disebabkan karena sebagian besar median jalan yang biasanya tidak dipelihara oleh Bidang Pertamanan dan Hutan, mulai 2016 telah dipelihara karena sudah dibangun taman median sebagai jalur hijau jalan yang telah ditanami tanaman hias.

Dari segi teknis, tingkat pemeliharaan setiap taman berbeda-beda kualitasnya karena jumlah pekerja masing-masing zona taman masih terbatas. Hal ini diprediksikan akan menjadi kendala

yang besar karena di satu sisi Kota Banda Aceh ingin memperindah kota melalui memperbanyak pembangunan taman di setiap segmen jalur dan titik wisata namun di sisi lain tidak belum maksimalnya jumlah pekerja untuk melaksanakan pemeliharaan optimal.

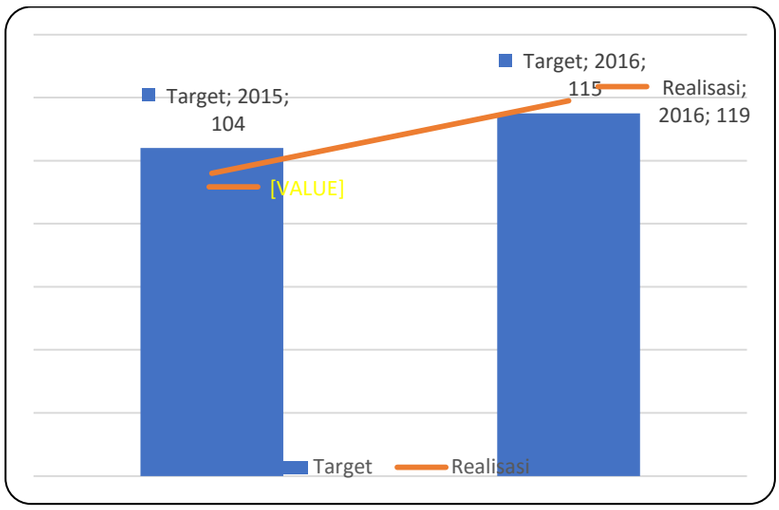

Gambar 2.47
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Lokasi Taman yang Dipelihara Pada Tahun 2015-2016

2.3.3.4.8 Pencemaran Tingkat Kebisingan

Tabel 2.90
Tabel Pencemaran Tingkat Kebisingan di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016

Indikator		Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Rpjm			Target Capaian			Kondisi Kinerja Pada Akhir Rpjm
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Pencemaran Tingkat Kebisingan	jumlah usaha/kegiatan dan/atau lokasi/kawasan yang dianalisa tingkat kebisingan dibagi jumlah lokasi/kawasan yang diukur tingkat kebisingan dikali 100	Target	0%	17%	18%	21%	18%	18%	91%
			Capaian	0%	17%	18%	21%	18%	Sedang dalam progress pelaksanaan	91%

Pada Tahun 2015, Tingkat Kebisingan di uji dari sumber pencemaran udara pada sumber yang bergerak melaui kendaraan pada umumnya semua lokasi melampaui batas baku mutu sedangkan tingkat kebisingan pada sumber yang tidak bergerak melalui genset/ pembangkit listrik semuanya kategori baik (di bawah baku mutu).

Tabel 2.91
Tabel Jenis dan Sumber Pencemaran Udara

No	Jenis dan Sumber Pencemaran Udara	Tingkat Pencemaran Udara	
		Parameter (CO, SO2, NO2, Pb, TSP)	Parameter Tingkat Kebisingan
1	Pencemaran sumber bergerak melalui kendaraaan		
	a. Kawasan Industri/Pusat Bisnis (5 Lokasi Uji)	Bawah Baku Mutu (Baik)	Melampui Baku Mutu (Tidak baik)
	b. Kawasan Perkantoran (5 Lokasi Uji)	Bawah Baku Mutu (Baik)	4 lokasi Melampui Baku Mutu (Tidak Baik) dan 1 Lokasi (Balaikota) di bawah baku mutu/ Baik
	c. Kawasan Permukiman (4 Lokasi Uji)	Bawah Baku Mutu (Baik)	Melampui Baku Mutu (Tidak baik)
	d. Kawasan Transportasi (6 Lokasi Uji)	Bawah Baku Mutu (Baik)	Melampui Baku Mutu (Tidak baik)
2	Pencemaran sumber tidak bergerak Melalui Genset /mesin pembangkit Listik		
	a. Rumah Sakit (5 Lokasi)	Bawah Baku Mutu (Baik)	Bawah Baku Mutu (Baik)
	b. Hotel (5 lokasi)	Bawah Baku Mutu (Baik)	Bawah Baku Mutu (Baik)
	c. Pusat Perbelanjaan/Mall (2 lokasi)	Bawah Baku Mutu (Baik)	Bawah Baku Mutu (Baik)
	d. SPBU (6 lokasi)	Bawah Baku Mutu (Baik)	Bawah Baku Mutu (Baik)
	e. Restaurant (1 lokasi)	Bawah Baku Mutu (Baik)	Bawah Baku Mutu (Baik)
	f. PLTD (1 lokasi)	Bawah Baku Mutu (Baik)	Bawah Baku Mutu (Baik)

2.3.3.4.9 Meraih Adipura

Keberhasilan Adipura tidak terlepas dari kerjasam dari berbagai pihak/stakeholder yang menciptakan lingkungan bersih dan indah pada titik pantau Adipura yang telah ditentukan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (KLHK). Pada Tahun 2016, ada 1259 indikator fisik penilaian yang mendapatkan nilai 75,9 (terlampir) dan kelengkapan non fisik 80,47 . Dari kedua penilaian tersebut sehingga didapatkan nilai adipura sebesar 76,13 dengan passing grade adipura yang telah ditetapkan sebesar 74. Selain lulus dari passing grade yang telah ditetapkan, penilaian TPA juga sangat menentukan berhasil atau tidaknya meraih adipura. Nilai TPA Rata-rata 76,11 yang di raih oleh Kota Banda Aceh mencukupi nilai grade kelulusan TPA 76 yang telah ditetapkan oleh KLHK.

Nama Kota	Banda Aceh
Kabupaten / Kota	Kota Banda Aceh
Propinsi	ACEH
P1	77,34
PV1	74,46
Nilai Fisik Rata-rata	75,9
Non Fisik	80,47
Nilai Adipura 2015-2016	76,13
Nilai TPA Rata-rata	76,11

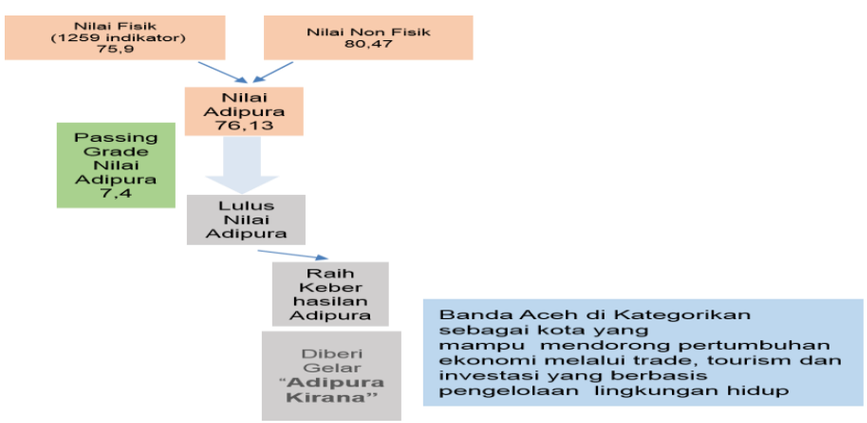

Gambar 2.48
Keadaan Adipura di Kota Banda Aceh

Pada periode 2012-2017 ada 4 kali Pemerintah Kota Banda Aceh mendapatkan Adipura.

Tabel 2.92
Total Penghargaan Adipura di Kota Banda Aceh

Kinerja	Perhitu ngan Indikator	Target/ capaian	Kondisi Awal Periode 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Kondisi Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meraih Adipura	Nilai Fisik dan Non Fisik Adipura	Target	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil	6 kali Berhasil
		Capaian	Berhasil	Berhasil	Berhasil	-	Berhasil (Raih Adipura Kirana)	Sudah dinilai, namun belum ada pengumum an dari KLHK	4 kali Berhasil

Dari data di atas menunjukkan keberhasilan dalam meraih adipura hampir setiap tahun di raih oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, hanya pada tahun 2015 tidak diraih karena di saat penilaianadipura lokasi TPA mendapatkan nilai rendah karena pembangunan akses/jalan dan pembangunan instalasi gas metana sehingga kondisi TPA sulit untuk dikondisikan.

2.3.3.4.10 Persentase Penerangan Jalan Umum

Tabel 2.93
Persentase Penerangan Jalan Umum di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2017

Kinerja	Perhitungan Indikator	Target/ capaian	Kondisi Awal Periode 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Kondisi Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase Penerangan Jalan Umum	Panjang Jalan yang diterangi dibagi panjang jalan yang membutuh kan penerangan dikali 100	Target	60,43	61,74	63,05	64,35	65,66	65,66	65,66
		Capaian	60,43	67,38	68,91	72	78,55	78,55	78,55

Kegiatan penyediaan jasa penerangan jalan umum yaitu melakukan pemeliharaan dan pemasangan lampu sesuai kebutuhan penerangan, baik untuk jalan utama maupun jalan lingkungan Gampong sesuai permintaan masyarakat. Kebutuhan penerangan jalan dihitung berdasarkan panjang jalan utama dan jalan lingkungan Gampong yaitu 707.734 meter. Dengan asumsi bahwa kemampuan penerangan maksimal satu unit lampu sepanjang 100 meter. Rata-rata penerangan penambahan penerangan jalan sebesar 20.940 meter dengan lampu sejumlah 209 unit pertahun untuk mewujudkan penerangan jalan umum di Kota Banda Aceh yang optimal. Penambahan penerangan jalan tertinggi pada tahun 2016 dengan jumlah lampu 463 unit dengan berbagai jenis. Pemasangan Lampu jalan jenis LED dari Distamben Aceh dan dari APBK 2016 menjadi faktor utama peningkatan penerangan jalan pada tahun 2016, untuk tahun 2017 menggunakan data akhir bulan Mei tahun 2017.

2.3.3.5 Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3.3.5.1 Kepemilikan KTP

Tabel 2.94
Rasio Kepemilikan KTP di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan	66.427	111.896	114.671	127.098	155.108
Jumlah Wajib KTP Elektronik	180.130	183.810	186.883	190.442	174.548
Rasio	**36,88**	**60,88**	**61,36**	**66,74**	**88,86**

Sumber Disdukcapil Kota Banda Aceh

Program KTP-el diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Program KTP-el di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009 pada empat kota sebagai proyek percontohan

nasional, namun secara resmi diluncurkan Kementerian Dalam Negeri pada bulan Februari 2011 yang pelaksanannya dibagi dalam dua tahap. Pelaksanaan tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan pada akhir 2012 ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki KTP-el dan dari awal sampai akhir tahun 2013 perekaman data penduduk tetap berlanjut sampai seluruh penduduk Indonesia wajib KTP terekam data pribadinya.

Untuk Kota Banda Aceh, rasio cakupan penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el baru mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2016, hal ini setelah banyak dilakukan upaya sosialisasi di tingkat gampong dan dengan menyediakan berbagai kemudahan pelayanan perekaman, antara lain dengan melakukan perekaman mobile yang bekerjasama dengan beberapa institusi pelayanan misalnya dengan pihak rumah sakit dan lembaga kesejahteraan sosial (khusus untuk perekaman bagi penduduk yang ada udzur semisal pasien sakit, lansia dan penyandang cacat). Upaya-upaya percepatan akan tetap dilakukan dengan target semua penduduk wajib KPT telah tercatat resmi pada system.

2.3.3.5.2 Rasio Bayi Berakta Kelahiran

Ratio Bayi berakta kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama

Tabel 2.95

Tabel Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakta kelahiran	2.682	2.723	3.226	3.225	3.367
Jumlah bayi lahir pada tahun yang sama	2.938	2.971	3.331	3.330	3.748
Rasio per-tahun(%)	91.28	91.65	96.84	96.84	89.83

Sumber Disdukcapil Kota Banda Aceh

2.3.3.5.3 Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk

Tabel 2.96

Tabel Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk yang memiliki Akta kelahiran	102.132	118.663	124.662	132.156	103.097
Jumlah Penduduk	256.147	262.224	267.340	273.951	252.342
Jumlah (%)	39.87	45,25	46,63	48,24	40,85

Sumber Disdukcapil Kota Banda Aceh

Akta Kelahiran menjadi isu global dan sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Disamping itu Akta Kelahiran merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akta Kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Selain itu jika seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan menghadapi berbagai masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif KHA, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak.

UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengatur lebih lanjut tentang pemberian akta kelahiran. Menurut UU tersebut setiap bayi yang lahir, 60 hari setelah itu harus dicatat dan diberikan akta kelahiran. Untuk mewujudkan ini, Pemerintah Kota Banda Aceh juga melakukan berbagai upaya percepatan dan perluasan cakupan pencatatan kelahiran, antara lain: sosialisasi, upaya proaftif dengan pelayanan yang menjangkau dan bekerjasama dengan klinik serta tenaga pembantu kelahiran, terakhir melakukan kemudahan pelayanan dengan meluncurkan

aplikasi online untuk pencatatan kelahiran yang menjangkau hingga tingkat gampong. Semua layanan yang disediakan tidak dipungut biaya (gratis).

2.3.3.6 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.3.3.6.1 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik diperoleh dari perbandingan antara jumlah kantor pemerintahan desa yang baik dengan jumlah seluruh pemerintahan desa dikali 100%. Selama tahun 2012 s/d 2016 data cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.97

Tabel Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik

No	Kecamatan	Jumlah gampong	2012		2013		2014		2015		2016	
			jumlah kantor pemerin-tahan desa yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	jumlah kantor pemerin-tahan desa yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	jumlah kantor pemerin-tahan desa yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	jumlah kantor pemerin-tahan desa yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	jumlah kantor pemerin-tahan desa yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)	(6)	(7=6/3*100)	(8)	(9=8/3*100)	(10)	(11=10/3*100)	(12)	(13=12/3*100)
1	Baiturrahman	10	3	30.00	3	30.00	6	60.00	10	100.00	10	100.00
2	Kuta Alam	11	4	36.36	4	36.36	6	54.55	10	90.91	10	90.91
3	Meuraxa	16	0	0.00	1	6.25	6	37.50	15	93.75	16	100.00
4	Syiah Kuala	10	2	20.00	3	30.00	5	50.00	8	80.00	9	90.00
5	Lueng Bata	9	1	11.11	2	22.22	7	77.78	9	100.00	9	100.00
6	Kutaraja	6	0	0.00	6	100.00	6	100.00	6	100.00	6	100.00
7	Banda Raya	10	2	20.00	6	60.00	8	80.00	9	90.00	10	100.00
8	Jaya Baru	9	1	11.11	2	22.22	5	55.56	7	77.78	8	88.89
9	Ulee Kareng	9	2	22.22	3	33.33	5	0.56	8	88.89	9	100.00
	Jumlah se-Kota Banda Aceh	**90**	**15**	**16.67**	**30**	**33.33**	**54**	**60.00**	**82**	**91.11**	**87**	**96.67**

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa terjadi peningkatan cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik dari tahun 2012 sampai 2016. Pada tahun 2016 cakupannya mencapai 96,67%.

2.3.3.6.2 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Mukim yang Baik

Di Kota Banda Aceh terdapat 17 kemukiman. Sarana dan prasarana mukim dalam kota Banda Aceh masih sangat kurang, bahkan ada yang belum memiliki kantor mukim. Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik diperoleh dari perbandingan antara jumlah kantor mukim yang baik dengan jumlah seluruh mukim dikali 100%. Selama tahun 2012 s/d 2016 data cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.98

Tabel Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Mukim yang Baik

No	Kecamatan	Jumlah mukim	2012		2013		2014		2015		2016	
			jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)	(6)	(7=6/3 *100)	(8)	(9=8/3*100)	(10)	(11=10/3 *100)	(12)	(13=12/3*100)
1	Baiturrahman	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	Kuta Alam	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00
3	Meuraxa	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00
4	Syiah Kuala	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	Lueng Bata	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00
6	Kutaraja	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	Banda Raya	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	Jaya Baru	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00
9	Ulee Kareng	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Jumlah se-Kota Banda Aceh	**17**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**2**	**11.76**	**4**	**23.53**

2.3.3.6.3 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga/ wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah gampong dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Sedangkan kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah gampong dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, misalnya kelompok pemuda/ karangtaruna, remaja mesjid dan lain-lain. Jumlah Kelompok binaan LPM dalam Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.99

Tabel Kelompok Binaan LPM Tahun 2012-2016 Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	2012			2013			2014			2015			2016		
		Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jum lah LPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11=10/9)	(12)	(13)	(14=13/12)	(15)	(16)	(17=16/15)
1	Baiturrahman	10	18	1.80	10	20	2.00	10	21	2.10	10	21	2.10	10	22	2.20
2	Kuta Alam	11	21	1.91	11	23	2.09	11	24	2.18	11	24	2.18	11	24	2.18
3	Meuraxa	16	22	1.38	16	25	1.56	16	27	1.69	16	28	1.75	16	30	1.88
4	Syiah Kuala	10	19	1.90	10	21	2.10	10	22	2.20	10	22	2.20	10	22	2.20
5	Lueng Bata	9	18	2.00	9	19	2.11	9	19	2.11	9	19	2.11	9	20	2.22
6	Kutaraja	6	10	1.67	6	11	1.83	6	12	2.00	6	13	2.17	6	13	2.17
7	Banda Raya	10	18	1.80	10	19	1.90	10	20	2.00	10	21	2.10	10	21	2.10
8	Jaya Baru	9	14	1.56	9	16	1.78	9	18	2.00	9	18	2.00	9	20	2.22
9	Ulee Kareng	9	15	1.67	9	17	1.89	9	19	2.11	9	19	2.11	9	19	2.11
	Jumlah se-Kota Banda Aceh	**90**	**155**	**1.72**	**90**	**171**	**1.90**	**90**	**182**	**2.02**	**90**	**185**	**2.06**	**90**	**191**	**2.12**

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh Tahun 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah kelompok binaan LPM di Kota Banda Aceh dari tahun 2012 sebesar 1,72 kelompok per gampong, terus meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 2,12 kelompok per gampong.

2.3.3.6.4 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kota Banda Aceh melaksanakan pembinaan secara berjenjang dari TP. PKK Kecamatan sampai TP. PKK Gampong. Selanjutnya TP. PKK Gampong membina kelompok PKK Dusun dan Kelompok Dasa Wisma. Kelompok binaan PKK merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Gampong yang terdiri dari Kelompok PKK Dusun,Kelompok Dasa Wisma, Kelompok UP2K dan lain-lain. Jumlah Kelompok PKK Dusun dan Dasawisma adalah sesuai dengan jumlah dusun dan dasawisma yang ada di gampong.

Tabel 2.100

Kelompok Binaan PKK Tahun 2012-2016 Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	2012			2013			2014			2015			2016		
		Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11=10/9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17=16/15)
1	Baiturrahman	11	417	37.91	11	418	38.00	11	419	38.09	11	417	37.91	11	417	37.91
2	Kuta Alam	12	308	25.67	12	308	25.67	12	309	25.75	12	245	20.42	12	245	20.42
3	Meuraxa	17	160	9.41	17	160	9.41	17	162	9.53	17	161	9.47	17	165	9.71
4	Syiah Kuala	11	347	31.55	11	347	31.55	11	348	31.64	11	347	31.55	11	347	31.55
5	Lueng Bata	10	145	14.50	10	145	14.50	10	146	14.60	10	170	17.00	10	170	17.00
6	Kutaraja	7	108	15.43	7	108	15.43	7	109	15.57	7	123	17.57	7	123	17.57
7	Banda Raya	11	229	20.82	11	230	20.91	11	231	21.00	11	210	19.09	11	210	19.09
8	Jaya Baru	10	210	21.00	10	210	21.00	10	211	21.10	10	210	21.00	10	210	21.00
9	Ulee Kareng	10	262	26.20	10	262	26.20	10	263	26.30	10	244	24.40	10	244	24.40
	Jumlah se-Kota Banda Aceh	99	2,186	22.08	99	2,188	22.10	99	#####	22.20	99	2,127	21.48	99	2,131	21.53

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh Tahun 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah kelompok binaan PKK mengalami peningkatan dan penurunan yang berfluktuatif, pada tahun 2012 sebanyak 2.186 kelompok binaan PKK Kota Banda Aceh dan pada Tahun 2015 terjadi penurunan jumlah kelompok dasawisma yang aktif.

2.3.3.6.5 Persentase PKK aktif

Berdasarkan pembinaan, jumlah PKK aktif meningkat setiap tahun, karena dukungan dari pemerintah gampong melalui Dana ADG dan Dana Desa. Tahun 2012 persentase PKK aktif hanya 80%, sejak tahun 2014 s/d 2016 persentase PKK aktif sebesar 100%. Jumlah PKK Aktif dari tahun 2012 s/d 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.101

PKK Aktif Tahun 2012-2016 Kota Banda Aceh

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah TP. PKK	100	100	100	100	100
2	Jumlah TP. PKK tidak aktif	20	10	-	-	-
3	Jumlah TP. PKK aktif (1-2)	80	90	100	100	100
4	Persentase	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh Tahun 2017

2.3.3.6.6 Persentase Posyandu aktif

Jumlah Posyandu dalam Kota Banda Aceh pada tahun 2016 berjumlah 114 buah dan posyandu aktif berjumlah 113 buah, ada satu posyandu yang tidak aktif yaitu Posyandu Lembah Hijau di Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.102

Tabel Jumlah Posyandu dalam Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016

No	Kecamatan	Jumlah Posyandu Aktif				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Baiturrahman	18	18	18	18	18
2	Kuta Alam	15	15	15	15	15
3	Meuraxa	18	18	18	18	18
4	Syiah Kuala	11	11	12	12	12
5	Lueng Bata	10	10	10	9	9
6	Kutaraja	6	6	6	6	6
7	Banda Raya	10	10	10	10	10
8	Jaya Baru	16	16	16	16	16
9	Ulee Kareng	9	9	9	9	9
	Jumlah se-Kota Banda Aceh	113	113	114	113	113

Posyandu dalam Kota Banda Aceh memiliki strata yang berbeda-beda, tergantung pada pencapaian indikator tingkat perkembangan posyandu. Pada tahun 2016 strata posyandu dalam

Kota Banda Aceh adalah 3 pratama, 87 madya dan 24 purnama. Strata Posyandu dalam Kota Banda Aceh selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.103
Strata Posyandu Tahun 2012 – 2016 di Kota Banda Aceh

No	Strata Posyandu	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pratama	2	2	3	3	3
2	Madya	87	87	87	87	87
3	Purnama	24	24	24	24	24
4	Mandiri	0	0	0	0	0
	Jumlah	113	113	114	114	114

2.3.3.6.7 Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)

Fasilitasi pemilihan kepala desa di Kota Banda Aceh dilaksanakan melalui kegiatan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung). Selama tahun 2012 s/d 2016 data kegiatan Pilchiksung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.104
Data Partisipasi Masyarakat dalam Pilchiksung di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Desa Pelaksana Pilchiksung	Gampong	19	23	2	24	14
2	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Orang	24.332	33.845	1.854	38.782	22.844
3	Jumlah Pemilih	Orang	14.483	19.979	1.067	22.336	13.627
4	Partisipasi Masyarakat	%	59,52	59,03	57,55	57,59	59,65

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh Tahun 2017

Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan keuchik langsung (pilchiksung) dihitung dengan jumlah masyarakat yang ikut pemilihan pada pilchiksung dibagi jumlah masyarakat yang telah memiliki hak pilih (DPT) dikali 100 %. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat pada tahun 2012 sebesar 59,52%, semakin meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2015 sebesar 59,65%, sementara rata-rata partisipasi masyarakat dalam pilchiksung selama 5 tahun (2012-2016) adalah 58,67 %.

2.3.3.6.8 Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kota

Pemerintah Kota Banda Aceh telah memiliki gedung pemerintahan yang unik dan megah. Kemegahan tersebut diiringi dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang bersih dan berwibawa serta pelayanan yang optimal bagi warga kota. Sampai tahun 2017, sesuai dengan SOTK Baru Pemerintah Kota Banda Aceh telah memiliki 44 satuan kerja (termasuk 9 kecamatan).

Secara administratif Kota Banda Aceh terdiri atas 9 kecamatan, 90 gampong, dan 17 mukim, dari 90 gampong di Kota Banda Aceh, 16 gampong atau sekitar 17,78 persen terdapat di Kecamatan Meuraxa. Selanjutnya disusul Kecamatan Kuta Alam sebanyak 11 gampong (12,22 persen). Kemudian, tiga kecamatan masing-masing memiliki 10 gampong, meliputi Banda Raya, Baiturrahman, dan Syiah Kuala. Tiga kecamatan lainnya, seperti Jaya Baru, Lueng Bata, dan Ulee Kareng, masing-masing memiliki 9 gampong. Adapun Kuta Raja hanya memiliki 6 gampong (6,67 persen).

Sebagaimana halnya kabupaten/ kota lainnya di Aceh, di Kota Banda Aceh terdapat pula mukim yang fungsinya dinilai penting dalam mendorong perkembangan aktivitas sosial-kemasyarakatan di gampong dan kecamatan. Dari 17 mukim yang ada di Banda Aceh, 3 mukim terdapat di Kecamatan Syiah Kuala. Di Kecamatan Lueng Bata dan Kuta Raja masing-masing memiliki 1 mukim dan kecamatan lainnya memiliki masing-masing 2 mukim. Secara lebih rinci, jumlah gampong dan mukim menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.105
Data Mukim Dalam Kota

No	Kecamatan		Nama Mukim	Jumlah Gampong
1	2		3	4
1	Baiturrahman	1	Baiturrahman	5
		2	Putro Phang	5
2	Kuta Alam	3	Kuta Alam	5
		4	Lam Kuta	6
3	Meuraxa	5	Meuraxa	8
		6	Tgk. Chik Lamjabat	8
4	Syiah Kuala	7	Tgk. Syeh Abdurrauf	4
		8	Tgk.Chik di Lamnyong	2
		9	Kayee Adang	4
5	Lueng Bata	10	Lueng Bata	9
6	Kutaraja	11	Tgk. Dianjong	6
7	Banda Raya	12	Banda Jaya	4
		13	Lam Ara	6
8	Jaya Baru	14	Pos Blang	5
		15	Lambaro Banda	4
9	Ulee Kareng	16	Simpang Tujoh	4

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh Tahun 2017

2.3.3.6.9 Presentase Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang baik

Pemerintah Kota Banda Aceh setiap tahun telah memfasilitasi dana pembangunan untuk gampong. Pemerataan kemampuan keuangan antar Gampong dilaksanakan dari APBK melalui ADG (Alokasi Dana Gampong) untuk mendanai kebutuhan Gampong dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Sejak tahun 2015 mulai diluncurkan Dana Desa dari Pusat, dan sejak Tahun 2016 Dana pembangunan untuk gampong juga mendapat bagian dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah. Untuk lebih jelasnya besaran Dana pembangunan untuk gampong Tahun 2012 s/d tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.106
Tabel Fasilitasi Dana Pembangunan Untuk Gampong di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Alokasi Dana Gampong (ADG)	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	38,407,220,440
2	Dana Desa	0	0	0	24,890,569,000	55,864,119,000
3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah	0	0	0	0	2,800,000,000
	Jumlah	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	33,890,569,000	58,664,119,000

Dari tabel di atas dapat dilihat terjadi peningkatan yang cukup besar terhadap dana pembangunan yang diterima gampong, yang pada tahun 2012 hanya Rp.9.000.000.000,- menjadi Rp.58.664.119.000,- pada tahun 2016.

Tabel 2.107
Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang Baik Tahun 2012-2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang baik	15%	15%	15%	15%	20%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian pengelolaan keuangan gampong yang baik masih rendah. Untuk itu perlu upaya peningkatan kapasitas aparatur gampong di bidang pengelolaan keuangan gampong perlu dilaksanakan secara berkesinambungan.

2.3.3.6.10 Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dilaksanakan melalui fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dengan pemberian dana revolving. Pemerintah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan BPRS Baiturrahman sejak tahun 2009 telah melaksanakan program PUEM dengan tingkat suku bunga 6% per tahun. Pada Tahun 2013 Program PUEM ini dihentikan dan digantikan dengan PUEM Al Qardhul Hasan (pinjaman tanpa bunga) sejak tahun 2015. Untuk lebih jelasnya Jumlah

Penyaluran Dana Bergulir dan jumlah penerima permodalan melalui program PUEM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.108
Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Melalui Program PUEM
di Kota Banda Aceh Tahun 2012 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyaluran Dana Bergulir (Rp)	1,137,500,000	75,000,000	0	502,500,000	1,251,500,000
2	Jumlah Penerima (orang)	363	22	0	123	302

2.3.3.6.11 Presentase Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang Baik

Aset gampong sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari dan kekayaan gampong sebagai barang milik gampong yang berasal dari kekayaan asli gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang sah, perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat membutuhkan data yang akurat, sehingga aset gampong dapat dikelola dengan baik. Prosentase Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.109
Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang baik Tahun 2012-2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang baik	15%	15%	15%	15%	20%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian pengelolaan aset gampong yang baik masih rendah. Untuk itu perlu upaya peningkatan kapasitas aparatur gampong di bidang pengelolaan aset gampong perlu dilaksanakan secara berkesinambungan.

2.3.3.6.12 Presentase Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/ Gampong yang baik

Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan mukim/gampong. Penyusunan perencanaan gampong, pengelolaan keuangan dan aset gampong, penyusunan profil gampong, pembuatan produk hukum gampong dan pelaksanaan administrasi pemerintahan mukim/gampong akan dapat berjalan baik bila gampong memiliki SDM yang baik. Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/ Gampong yang baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.110
Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong yang baik Tahun 2012-2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong yang baik	15%	15%	15%	15%	20%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian penataan administrasi pemerintahan mukim/ gampong yang baik masih rendah. Untuk itu perlu upaya peningkatan kapasitas aparatur mukim/ gampong dalam penataan administrasi pemerintahan perlu dilaksanakan secara berkesinambungan.

2.3.3.7 Bidang Kependudukan Dan Keluarga Berencana

2.3.3.7.1 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Program Keluarga Berencana sudah berjalan cukup baik di Kota Banda Aceh, hal ini karena dalam pelaksanaan program dan kegiatan didukung pendanaan yang lumayan yakni dari Dana Alokasi Khusus (DAK) KB. Saat ini secara prasarana telah tersedia 5 (lima) pos KB yang dibangun dari dana tersebut, secara sarana telah sangat baik yakni tersedianya berbagai kelengkapan operasional yang mendukung kader dalam pelayanan KB hingga ke tingkat gampong.

Tabel 2.111

Tabel Jumlah Anak Per Keluarga

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Rata-rata Jumlah Anak Per-Keluarga	3,91	3,81	3,83	4,02	3,05

2.3.3.7.2 Ratio Akseptor KB

Tabel 2.112

Tabel Ratio Akseptor KB

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Persentase PUS/Rasio Akseptor KB	65.00	64.48	68.37	45.43	74.54

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk, data akseptor KB di Kota Banda Aceh mengalami trend yang fluktuatif namun kecenderungan meningkat meski mengalami penurunan tajam pada tahun 2015. Data rasio akseptor KB merupakan jumlah akseptor KB yang tediri dari akseptor KB laki-laki dan akseptor KB perempuan.

2.3.3.8 Bidang Perhubungan

2.3.3.8.1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Tabel 2.113

Tabel Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah penumpang Bis	941.921	1.007.855	799.785	1.125.428	826.426
2.	Jumlah penumpang ASDP	223.466	213.719	279.306	323.310	363.722
3.	Total Jumlah Penumpang	1.165.387	1.221.574	1.079.091	1.448.738	1.190.148

Dari Tabel 2.113 terlihat bahwa pertumbuhan jumlah penumpang angkutan umum di kota Banda Aceh tidak konsisten dari Tahun 2012 hingga Tahun 2017, peningkatan tertinggi terlihat pada Tahun 2015 hal ini disebabkan adanya lonjakan penumpang Bis yaitu sebesar 1.125.428 dari Tahun 2014 yang hanya berjumlah 799.785 orang. lonjakan ini dipicu adanya minat masyarakat untuk menggunakan alternatif transportasi bus untuk keluar daerah seperti Medan, dikarenakan adanya armada bus yang baru dengan fasilitas yang ekslusif. Jumlah penumpang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) relatif lebih stabil dan tidak terjadi lonjakan yang signifikan. Berikut ini adalah jumlah penumpang dan angkutan darat Tahun 2012 – 2016.

Tabel 2.114

Tabel jumlah Penumpang dan Angkutan Umum Darat Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
		Jml Ang	Jml Pen	Jml Ang	Jml Pen	Jml Ang	Jml Pen	Jml Ang	Jml Pen	Jml Ang	Jml Pen
1	AKDP	456	605.324	456	655.106	456	752.823	456	788.224	789	564.373
2	AKAP	286	336.597	286	352.749	286	457.777	286	458.982	157	262.053
Jumlah		742	941.921	742	1.007.855	742	1.210.600	742	1.247.206	946	826.426
Jumlah ang/ pen X 100%		0,08%		0,08%		0,08%		0,08%		0,06%	

Dari tabel 2.114 terlihat bahwa jumlah penumpang pada Tahun 2016 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah penumpang Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) yaitu 564.373 orang dan jumlah penumpang Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP) yaitu 262.053 orang, namun pada Tahun 2016 terjadi peningkatan pada jumlah

angkutan (AKDP) yaitu 789 angkutan dibandingkan pada Tahun 2012 sampai Tahun 2015 yang hanya berjumlah 456 angkutan, sebaliknya terjadi penurunan jumlah angkutan (AKAP) di Tahun 2016 yaitu 157 angkutan dibandingkan pada Tahun 2012 sampai Tahun 2015 yang angkanya naik yaitu 157 angkutan.

2.3.3.8.2 Rasio Ijin Trayek

Tabel 2.115

Tabel Rasio Izin Trayek Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Izin Trayek perkotaan	358	358	243	243	243
2.	Izin Trayek perdesaan	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Izin Trayek	654	114	42	39	41
4.	Jumlah penduduk	234.971	234.971	249.499	250.303	254.904
5.	Rasio Izin Trayek	0.15	0.15	0.097	0,097	0,095

Pada Tabel 2.115 terlihat Izin Trayek Perkotaan pada Tahun 2012 dan 2013 pertumbuhannya konstan yaitu 358 trayek, namun terjadi penurunan yang cukup jauh di tahun 2017 sampai dengan Tahun 2016 yaitu 42; 39 dan 41, hal ini disebabkan adanya penurunan minat masyarakat terhadap penggunaan sarana transportasi umum, meningkatnya jumlah kendaraan pribadi juga dipicu oleh kemudahan yang ditawarkan oleh perusaahan otomotif untuk membeli kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Solusinya adalah dengan menghadirkan sarana transportasi umum seperti bus Trans Koetardja dengan rute yang lebih luas serta ditunjang oleh bus kecil sebagai *feeder* atau bus transisi sehingga mampu menjangkau wilayah yang terdalam/ jauh dari jalan raya utama. Solusi lainnya adalah dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi (seperti kendaraan bermotor roda dua) bagi pelajar.

2.3.3.8.3 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Tabel 2.116

Tabel Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

No	Angkutan Umum	2012			2013			2014			2015			2016		
		Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%
1	Mobil penumpang umum	572	264	46,15	545	273	50,09	121	257	106,2	80	91	56,88	95	71	37,37
2	Mobil bus	1,455	798	54,84	1,991	1022	51,33	1,046	1.740	83,17	1.050	1.651	78,62	1,187	1.756	73,97
3	Mobil barang	5,338	2868	53,72	6,781	3793	55,93	3,728	6.174	82,81	3.491	5.949	85,20	4.180	6.370	76,20
4	Kereta gandengan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kereta tempelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**7365**	**3930**	**53,36**	**9317**	**5088**	**54,61**	**4895**	**8171**	**83,46**	**4621**	**7691**	**83,22**	**5462**	**8197**	**75,04**

Pada Tabel 2.116 terlihat persentase penurunan jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Banda Aceh terjadi di Tahun 2016 yaitu 37,237% dibandingkan dengan Tahun sebelumnya yang persentasenya diatas 50%. Permasalahan yang muncul disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji KIR pada kendaraan bermotor serta banyaknya pemilik kendaraan yang melakukan uji KIR pada daerah lain. Strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan melakukan sosialisai kepada masyarakat terhadap pentingnya melakukan uji KIR sesuai waktu yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kecelakaan, strategi lainnya adalah melakukan operasi ketertiban angkutan umum/ razia bekerja sama dengan pihak kepolisian. Berdasarkan SOP Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, lamanya pelaksanaan Uji KIR adalah 60 menit untuk tiap kendaraan, namun pada di lapangan lamanya pengujian kelayakan KIR sangat bervariasi, dalam kondisi kendaraan yang normal, baik dan layak pengujian dapat dilakukan lebih cepat yaitu selama 15 menit, dengan perincian 5 menit pada saat pendaftaran dan 15 menit saat pemeriksaan kendaraan oleh alat pemeriksa.

Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Berdasarkan SOP Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh , lamanya pengujian KIR adalah 60 menit untuk setiap kendaraan denagn biaya sebesar Rp 52.000

2.3.3.8.4 Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis

Pada Tahun 2012 sampai Tahun 2016 jumlah pelabuhan ASDP berjumlah 1 (satu) unit yaitu berada di Kecamatan Meuraxa bernama Pelabuhan Ulee Lheue. Pelabuhan ini juga sebagai pelabuhan penyeberangan yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran. Jumlah terminal bis adalah 3 (tiga) unit yaitu:

1. Terminal Penumpang Type A (Batoh)
2. Terminal Penumpang Type B (Lueng Bata)
3. Terminal Penumpang Type C (APK Keudah)

Tabel 2.117

Tabel Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah pelabuhan ASDP	1	1	1	1	1
2.	Jumlah pelabuhan udara	-	-	-	-	-
3.	Jumlah terminal bis	3	3	3	3	3
	Jumlah	4	4	4	4	4

2.3.3.8.5 Persentase Layanan Angkutan Darat

Tabel 2.118

Tabel Persentase Angkutan Darat tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Angkutan darat	742	742	742	742	946
2	Jumlah penumpang Angkutan Darat	941.921	1.007.855	1.210.600	1.247.206	826.426
3	Persentase (%)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06

Dari tabel diatas terlihat jumlah angkutan darat Tahun 2012 - 2016 pertumbuhannya konstan hal ini bertolak belakang dengan pertumbuhan jumlah penumpang yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2016, jumlah angkutan darat telah meningkat menjadi 946 unit, namun justru jumlah penumpang angkutan darat menurun menjadi 826.426 orang, hal ini disebabkan adanya penurunan minat masyarakat terhadap penggunaan sarana transportasi umum serta adanya kemudahan untuk membeli kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat.

2.3.3.8.6 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Tabel 2.119

Tabel Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah angkutan umum yg memiliki KIR	3930	5088	4085	3845	4097
2	Jumlah angkutan umum	7365	9317	4895	4621	5462
Persentase (%)		**53,36**	**54,61**	**83,46**	**83,22**	**75,04**

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Nomor 640/3529/2009 tanggal 17 September 2009 tentang Penetapan Prosedur Operasional Standar Pelayanan Publik pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh ditetapkan dalam pelaksanaan Uji Kir kendaraan bermotor selama 60 menit, untuk biaya Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan.

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum dihitung berdasarkan jumlah angkutan umum yang memiliki KIR dibagi dengan jumlah angkutan umum dikali 100%. Setiap angkutan umum wajib melakukan uji KIR sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, namun tidak semua angkutan umum di Kota Banda Aceh yang melakukan uji KIR sebanyak 2 (dua) kali, hal ini disebabkan karena:

1. Angkutan Kota sebagian besar sudah tidak beroperasi lagi
2. Kendaraan dalam keadaan rusak/tidak jalan lagi
3. Kendaraan melakukan numpang uji pada daerah lain
4. Kendaraan yang telah di mutasi tidak mencabut berkas uji
5. Kendaraan yang beroperasi dijalan tidak melakukan pengujian tepat waktu dan perpanjangan uji bagi yang telah mati KIR nya.

Maka solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas yaitu:
1. Melakukan Pengawasan/razia terhadap kendaraan wajib uji
2. Menyurati kepada setiap perusahaan angkutan umum untuk melakukan pengujian kendaraan tepat waktu dan perpanjangan uji bagi yang telah mati KIR nya.
3. Mensosialisasikan persyaratan mutasi dan numpang uji.

2.3.3.8.7 Pemasangan Rambu-rambu

Tabel 2.120
Persentase Pemasangan Rambu Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah pemasangan Rambu	1468 Unit	1848 Unit	1948 Unit	2016 Unit	2058 Unit
2.	Jumlah Rambu yang seharusnya tersedia	1848 Unit	1948 Unit	2048 Unit	2116 Unit	2058 Unit
Persentase (%)		**79,4**	**95**	**95**	**95**	**100**

Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan dihitung berdasarkan Jumlah fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) yang sudah ada dibagi dengan Jumlah kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) dikali dengan 100%.Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa fasilitas perlengkapan jalan bertambah dari tahun ke tahun, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Dalam mempertahankan kondisi ini maka diperlukan perawatan/pemeliharaan, peremajaan dan pergantian fasilitas perlengkapan jalan secara berkesinambungan. Permasalahannya adalah keterbatasan dana, solusi nya adalah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat maupun Propinsi.

2.3.3.8.8 Perparkiran

Tabel 2.121
Kondisi Perparkiran Di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016

No	Kegiatan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Penambahan lokasi baru	37 Titik	19 Titik	67 Titik	13 Titik	40 Titik
2	Pengendalian parkir	249 Titik	268 Titik	335 Titik	348 Titik	388 Titik
3	Kontrak juru parkir	249 Org	268 Org	335 Org	348 Org	388 Org
4	Bad nama parkir	275 Bad	295 Bad	350 Bad	370 Bad	400 Bad
5	Penertiban juru parkir	208 Org	252 Org	200 Org	300 Org	350 Org
6	Surat teguran juru parkir	45 Surat	60 Surat	63 Surat	51 Surat	65 Surat

Beberapa faktor yang menjadi permasalahan di Bidang Perparkiran adalah:
1. Keterbatasan ruang parkir;
2. Cuaca hujan akan mengurangi jumlah parkir kendaraan;
3. Adanya pembangunan penggalian disisi badan jalan;
4. Adanya campur tangan pihak lain terhadap pengelolaan perparkiran.
5. Keberadaan Pedagang kaki lima Mengurangi ruang parkir.
6. Hari libur dan hari-hari besar mempengaruhi pendapatan.

Maka solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas yaitu:
1. Menambah jumlah titik baru sebagai potensi parkir, dengan adanya penambahan titik potensi parkir tersebut dapat meningkatkan jumlah PAD;
2. Melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik dengan pihak lain terhadap pengelolaan parkir.
3. Menciptakan sistem perpakiran yang inovatif (e-*ticketing*, parkir berlangganan, gedung parkir, *basement* parkir dan sistem *barielgate*/ parkir kawasan). Dengan adanya inovasi di bidang perparkiran ini maka diharapkan PAD akan meningkat karena dikelola dengan manajemen perparkiran yang profesional.

Tabel 2.122
Perparkiran Kendaraan Bermotor Di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016

No	Kegiatan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Lokasi Parkir Kendaraan (Roda 2, 3 dan 4)	249 Titik	268 Titik	335 Titik	348 Titik	388 Titik
2	Jumlah Juru Parkir (Berdasarkan kontrak)	249 Org	268 Org	335 Org	348 Org	388 Org
3	Tarif Parkir - Kend. R 2 - Kend. R 4	 Rp.500 Rp1.000	 Rp.1.000 Rp.2.000	 Rp.1.000 Rp.2.000	 Rp.1.000 Rp.2.000	 Rp.1.000 Rp.2.000
4	PAD Retribusi Perparkiran	2.523.498.000	2.857.569.000	3.468.891.000	3.418.456.000	3.481.944.000

Dari tabel diatas terihat adanya peningkatan titik lokasi parkir kendaraan serta jumlah juru parkir (berdasarkan kontrak) setiap tahunnya, yaitu sebanyak 249 titik lokasi parkir di Tahun 2012 menjadi 388 titik di Tahun 2016, begitu pula dengan jumlah juru parkir yang hanya 249 orang di Tahun 2012 menjadi 388 orang di Tahun 2016.

Tabel 2.123
Tabel terminal angkutan penumpang/barang di Kota Banda Aceh yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek kota Banda Aceh 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Terminal Penumpang Type-A	1	1	1	1	1
2	Terminal Penumpang AKDP Type-B	1	1	1	1	1
3	Terminal Penumpang Type-C	1	1	1	1	1
4	Terminal Barang (Mobar)	1	1	1	1	1
	Jumlah	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**

Dari tabel diatas terlihat jumlah terminal angkutan penumpang/ barang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek kota Banda Aceh pada Tahun 2012-2016 adalah berjumlah 4 (empat) terminal, yaitu Terminal Penumpang Type-A; AKDP Type-B; Type-C dan Terminal Barang (Mobar). Permasalahan yang muncul pada terminal adalah kurangnya fasilitas bangunan dan sarana serta prasarana di terminal seperti ruang pengelola/ operasional kantor akibat kurangnya dana/ anggaran pada Pemerintah Kota Banda Aceh, solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Propinsi). Jumlah pelabuhan penyeberangan yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran Kota Banda Aceh sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016 adalah sebanyak 1 buah yaitu Pelabuhan ASDP Ulee Lheue.

Tabel 2.124
Tabel angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota Banda Aceh 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	AKDP	456	456	456	456	789
2	AKAP	286	286	286	286	157
	Jumlah	**742**	**742**	**742**	**742**	**946**

Dari tabel diatas terlihat jumlah angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota Banda Aceh untuk AKDP dan AKAP Pada Tahun 2012-2015 jumlahnya relatif konstan yaitu berjumlah 742 unit. Kenaikan yang signifikan terjadi di Tahun 2016 yaitu 946 unit dengan jumlah AKDP adalah 798 unit dan AKAP turun menjadi 157 unit dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan adanya perusahaan-perusahaan bus yang melakukan peremajaan pada armadanya, sehingga banyak bermunculan bus dengan fasilitas yang lebih ekslusif.

2.3.3.9 Bidang Komunikasi dan Informatika

2.3.3.9.1 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong di Tingkat kecamatan

Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) ditargetkan di dalam SPM yaitu sebesar 50%, dihitung berdasarkan Jumlah KIG dibagi dengan Jumlah kecamatan yang ada pada kabupaten/ kota dikali 100%. Capaian indikator SPM pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.125
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG)
di Tingkat Kecamatan

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah KIG	9	9	9	9	9
2	Jumlah Kecamatan	9	9	9	9	9
3	Rasio KIG	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bidang PIP Diskominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2017

Terget ditetapkan masing-masing kecamatan adalah satu kelompok Informasi Gampong (KIG) sementara yang telah terbentuk dalam Wilayah Kota Banda Aceh sebanyak 20 (dua puluh) kelompok dari sembilan Kecamatan, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di tingkat Kecamatan sebesar 100% berada diatas nilai SPM yang telah ditetapkan. Selain itu penerapan kebijakan yang disampaikan dalam KIG perlu didukung oleh semua stakeholder. Kebutuhan pengembangan website-website gampong dan tenaga IT di gampong sudah selakyaknya di dukung oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Saran dari permasalahan yang timbul yaitu harus adanya alokasi dana untuk kebijakan yang disampaikan dalam KIG salah satunya seperti perlu adanya web site gampong dimana butuh dana untuk sarana dan prasarana pendukung web tersebut.

2.3.3.10 Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

2.3.3.10.1 Persentase Koperasi Aktif

Keberadaan koperasi di kota Banda Aceh telah berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, ini terlihat dengan terjadinya peningkatan jumlah koperasi turut meningkatkan jumlah anggota koperasi, simpanan wajib dan sukarela koperasi di dalam menambah permodalan koperasi. Perkembangan koperasi selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 458 jumlah koperasi aktif pada tahun 2012 menjadi 488 koperasi aktif pada tahun 2016 (lihat table 2.126 berikut).

Tabel 2.126
Persentase Koperasi Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Koperasi Aktif	458	458	466	472	488
2	Jumlah Koperasi	814	814	818	746	745
3	Persentase Koperasi Aktif	56,27%	56,27%	56,97%	63,27%	64,72%

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh 2017

Persentase koperasi aktif di kota Banda Aceh mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 63,27%, hal ini disebabkan pada tahun 2015 dilakukan pembubaran koperasi oleh pemerintah karena koperasi yang dibubarkan tersebut tidak dapat diaktifkan lagi dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 1,45 persen, hal ini disebabkan karena adanya pembentukan koperasi baru (grafik 2.49 di bawah ini)

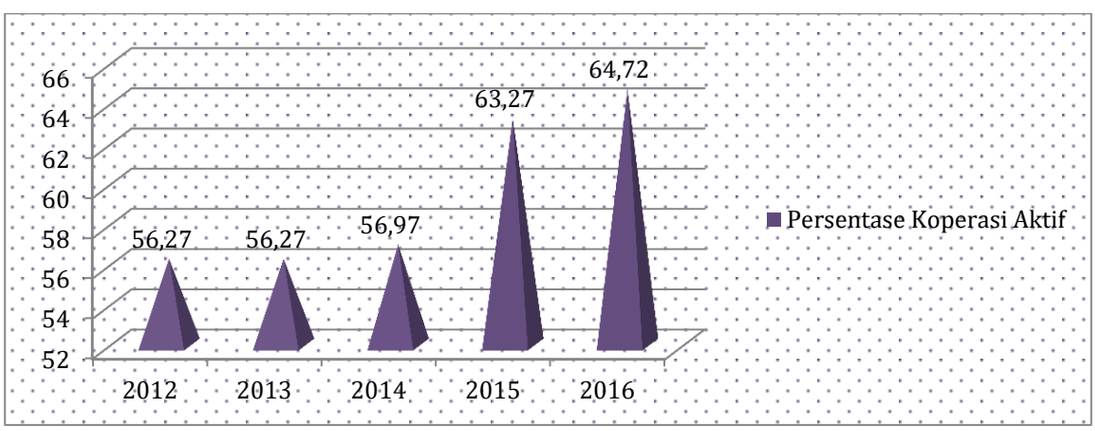

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh 2017

Gambar 2.49
Persentase Koperasi Aktif di Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

2.3.3.10.2 Jumlah BPR/ LKM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai sebuah lembaga keuangan telah mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi kota Banda Aceh bagi para pelaku ekonomi lemah, dimana pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada masyarakat tanpa peraturan yang ketat, yang menjadi permasalahan sekarang permodalan lembaga keuangan mikro sangat terbatas sementara masih banyak UMKM yang membutuhkan modal dari LKM. Perkembangan jumlah BPR/ LKM dari Tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.127

Perkembangan jumlah BPR/ LKM di Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah seluruh UKM	5801	5346	5372	6518	9429
2	Jumlah BPR/LKM	27	30	33	36	39

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh 2017

2.3.3.11 Bidang Penanaman Modal

2.3.3.11.1 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA)

Jumlah investor berskala nasional dihitung berdasarkan Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal, SIUP Menengah dan Besar. Pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah investor dikarenakan tidak banyak investor yang membuat izin baru tapi hanya sebatas perpanjangan saja. Permasalahan yang mempengaruhi jumlah investasi ini adalah belum selesainya Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Banda Aceh. RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal daerah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan RUPM Provinsi dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota yang bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2025. Berikut disajikan Tabel realisasi investasi dari Izin Prinsip dan SIUP (Menengah dan Besar) dari Tahun 2012 s.d 2016

Tabel 2.128

Tabel realisasi investasi dari Izin Prinsip dan SIUP (Menengah dan Besar) dari Tahun 2012 s.d 2016

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
2012	Jumlah IP dan SIUP	310	-	1.689.594.230.332
2013	Jumlah IP dan SIUP	301	-	994.311.478.030
2014	Jumlah IP dan SIUP	302	-	1.013.229.776.060
2015	Jumlah IP dan SIUP	273	3	1.060.740.730.819
2016	Jumlah IP dan SIUP	316	1	1.684.888.502.744

2.3.3.11.2 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi dari tahun ketahun mengalami kenaikan jumlah nilai investasi berskala nasional. Tetapi jumlah tertinggi dicapai pada tahun 2012 dan mengalami penurunan di tahun 2013 kemudian terjadi peningkatan kembali dari tahun ke tahun.

Tabel 2.129

Tabel Jumlah Nilai Investasi Tahun 2012-2017

No	Indikator	Realisasi / Capaian Tahun Ke -					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017* (data s.d Juni)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	1.689.594.230.332	994.561.478.030	1.013.229.776.060	1.060.740.730.819	1.684.888.502.744	435.098.768.611

2.3.3.11.3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan/ ketersediaan pekerjaaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja), dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Angkatan kerja merupakan bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif (Soemitro Djojohadikusumo). Pada tahun 2012 di kota Banda Aceh 92,82% dari angkatan kerja yang ada memperoleh kesempatan kerja(Rasio penduduk yang bekerja) sedangkan 7,18% masih mencari kerja atau pengangguran dan pada tahun 2015 menurun menjadi 87,99% dari angkatan kerja yang ada memperoleh kesempatan kerja(Rasio penduduk yang bekerja) sedangkan12,01% masih mencari kerja atau pengangguran. Kesempatan

Kerja (Rasio Penduduk yang Bekerja) Kota Banda Aceh tahun 2012 – 2015 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

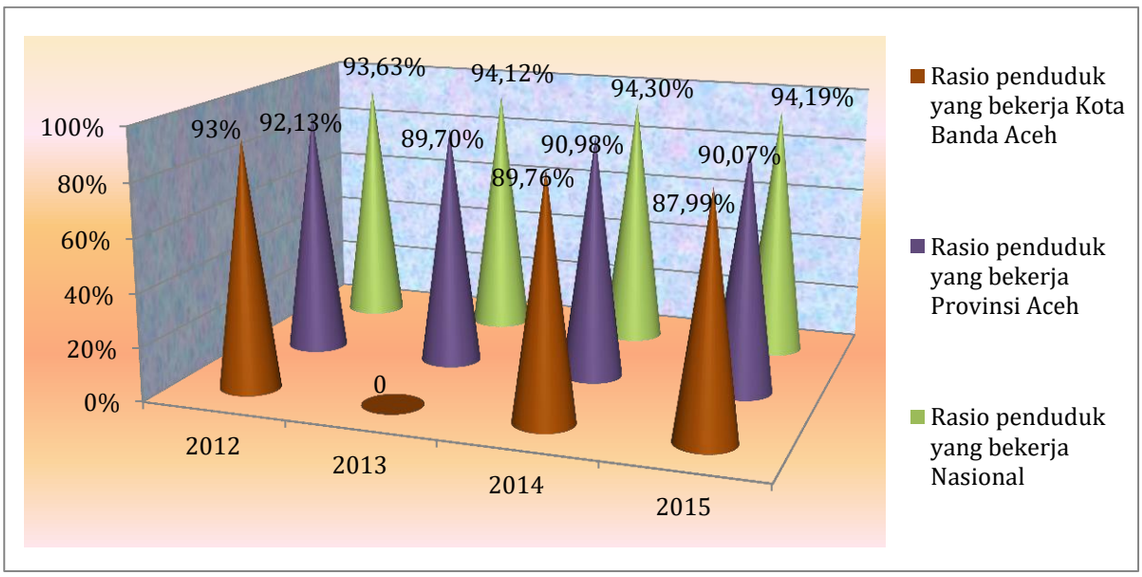

**Keterangan : Data Kota Banda Aceh tahun 2013 tidak tersedia (np:not published)*
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional 2013-2016

Gambar 2.50
Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang Bekerja) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional tahun 2012 – 2015

2.3.3.11.4 Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Tabel 2.130
Tabel Nilai Realisasi PMDN di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2015

Tahun	Kenaikan/Penurunan Nilai Investasi PMDN (Millyard Rupiah)
2012	1.689.594.230.332
2013	994.311.478.030
2014	1.013.229.776.060
2015	1.060.740.730.819

Sumber : DPMPTSP

Nilai investasi berskala Nasional (PMDN) Kota Banda Aceh pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.689.594.230.332 Trilyun, pada tahun 2013 terjadi penurunan dengan jumlah realisasi nilai investasi PMDN sebesar Rp. 994.311.478.030 milyar, pada tahun 2014 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya dengan nilai realisasi sebesar 1.013.229.776.060 trilyun dan pada tahun 2015 juga terjadi peningkatan realisasi dari tahun 2014 yaitu sebesar 1.060.740.730.819 trilyun.

2.3.3.12 Bidang Kepemudaan dan Olahraga

2.3.3.12.1 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Pemuda merupakan asset bangsa yang paling bernilai dalam menopang pembangunan dan kemajuan bangsa. Dengan pengaruhnya yang cukup besar dalam pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian pada peran-peran pemuda melalui Undang-Undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan di mana keberadaan pemuda memiliki tiga peran; Sebagai Kekuatan Moral, Sebagai Kontrol Sosial, dan Sebagai Agen Perubahan. Sejalan dengan semangat desentralisasi, dengan pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah, membuka kesempatan bagi setiap masyarakat mengisi pembangunan daerah. Pemuda sebagai elemen penting masyarakat dalam pembangunan daerah. Sudah sepatutnya memaknai dan mewarnai setiap kebijakan pembangunan daerah. Di sini, pentingnya pemuda memposisikan diri dan mengambil peran-peran strategis dalam pembangunan daerah.

Potensi pemuda yang begitu besar harus dapat dibina dan dikembangkan kea rah yang lebih baik, agar dapat melanjutkan dan mengisi pembangunan yang kini telah berlangsung. Untuk

mengarahkan potensi pemuda tersebut diperlukan suatu wadah untuk menyatukan dan menyalurkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Aktif dalam organisasi merupakan cara yang banyak digunakan oleh para pemuda untuk menyalurkan potensi mereka dalam partisipasi pembangunan.

Di Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 2012 – 2016 memiliki 69 organisasi kepemudaan yang aktif kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan. Para pemuda tersebut berhimpun dalam bermacam-macam organisasi baik ormas maupun OKP. Tabel berikut menggambarkan jumlah organisasi pemuda di kota Banda Aceh.

Tabel 2.131
Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

No	Tahun	Jumlah Organisasi Pemuda
1	2012	69
2	2013	69
3	2014	69
4	2015	69
5	2016	69

Sumber Statistik Banda Aceh

2.3.3.12.2 Persentase Wirausaha Muda

Wirausahawan mengandung arti secara harfah, wira berarti berani dan usaha berarti daya upaya atau dengan kata lain wirausaha adalah kemampuan atau keberanian yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih kesuksesan. Wirausahawan muda di Kota Banda Aceh mencapai 41% dari keselurahan jumlah wirausahawan yang terdaftar di Kota Banda Aceh. Sehingga menjadi potensi yang luar biasa untuk kemajuan ekonomi Kota Banda Aceh

2.3.3.12.3 Pembinaan Atlet dan Pelatih

Pembinaan olahraga adalah sistem pembibitan yang melibatkan individu atlet dalam pembangun keprofesionalan diri melalui sistem yang telah ditetapkan dengan tujuan prestasi. Pembinaan Atlet sudah dimulai dari usia muda, ini terlihat dari pembinaan atlet usia muda yang mencapai 29% dari keseluruhan atlet yang dibina dalam wilayah Kota Banda Aceh. Sedangkan untuk cabang olahraga (cabor) yang dibina dalam wilayah Kota Banda Aceh mencapai 82% dari seluruh cabor yang terdaftar di Kota Banda Aceh. Sedangkan pelatih-pelatih yang telah mendapat sertifikat sudah mencapai 60% dari kesulurah pelatih yang telah terdaftar di Banda Aceh. Hal ini berimplikasi positif pada prestasi yang telah diraih oleh 25 atlet-atlet Banda Aceh yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun. Serta jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam tahun 2017 sebanyak 7 cabor.

2.3.3.12.4 Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Pemuda

Organisasi Kepemudaan (OKP) adalah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik. Organisasi kepemudaan ini berdiri bersama dengan visi dan stgruktur kepemimpinan, budaya dan model aktualisasi ide dan gagasanya. Dari data pada tahun 2017 terdapat 68 OKP di Kota Banda Aceh yang terdaftar di Dispora Banda Aceh dengan persentase organisasi pemuda yang aktif mencapai 87% dengan jumlah pemuda yang dibina mencapai 47% dari jumlah populasi pemuda.

Sedangkan OKP yang mengikuti Pembinaan Kepemudaan sebagai modal utama dalam pencapaian Peningkatan Pembangunan mencapai 21 OKP yang berperan dalam peningkatan Pembangunan Kota Banda Aceh

2.3.4 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.4.1 Pariwisata

2.3.4.1.1 Kunjungan Wisata

Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Kota Banda Aceh sesuai dengan data hunian hotel, wisma, penginapan dalam wilayah Kota Banda Aceh mulai dari Tahun 2012-2016 adalah sebanyak 1.201.345 orang dari target capaian 2012-2016 sebanyak 999.703 orang (120,17%). Sesuai dengan data dibawah dapat dilihat bahwa Kunjungan Wisatawan ke Kota Banda Aceh pada tahun 2012-2016 terus terjadi kenaikan dari Tahun ke Tahun sesuai dengan data pada tabel dan Grafik dibawah, Namun dari data dibawah dapat juga kita lihat bahwa untuk Kunjungan wisatawan mancanegara terjadi trend kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada Tahun 2014-2016 dimana pada Tahun 2014 terjadi kenaikan sebanyak 11.103 orang wisatawan mancanegara dengan target sebanyak 5234 orang (212%), Tahun 2015 sebanyak 11.139 orang target 5.496 orang dengan persentase 262 % dan untuk Tahun 2016 jumlah kunjungan sebanyak 11.740 orang target 6.221 orang (188.71%). Ini juga tidak terlepas dari banyaknya event wisata baik yang bertaraf national dan international yang dilaksanakan oleh Pemko Banda Aceh, kegiatan-kegiatan promosi diluar daerah, keikutsertaan pada kegiatan pameran baik tingkat national maupun international serta tak lepas dari semakin baiknya tata kelola Pemerintahan Kota Banda Aceh.

Untuk kunjungan wisatawan nusantara juga terjadi peningkatan mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 jumlah kunjungan sebanyak 1.148.885 orang dengan target sebanyak 973.113 orang (118.06%) sesuai dengan data yang tertera pada tabel dibawah, sehingga selama Tahun 2012 – 2016 terjadi pertumbuhan dan peningkatan rata-rata sebesar 23,61%. Terjadinya peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Banda Aceh khususnya wisatawan mancanegara yang didominasi oleh wisatawan dari negara tetangga Malaysia diurutan pertama, disusul Australia, Jepang, Korea, Eropa dan Afrika. Tingginya minat Wisatawan malaysia berkunjung di Kota Banda Aceh pertama disebabkan karena persamaan budaya antara Malaysia dan Aceh, faktor keamanan yang sudah lebih baik, banyaknya situs sejarah, tersedianya Destinasi yang bernuansa islami, kuliner yang halal dan masih banyak faktor-faktor lain yang sangat berpengaruh yang tak kalah pentingnya adalah masyarakat Kota Banda aceh yang punya semboyan "peumulia jame adat geutanyoe "muliakan tamu adalah yang paling utama.

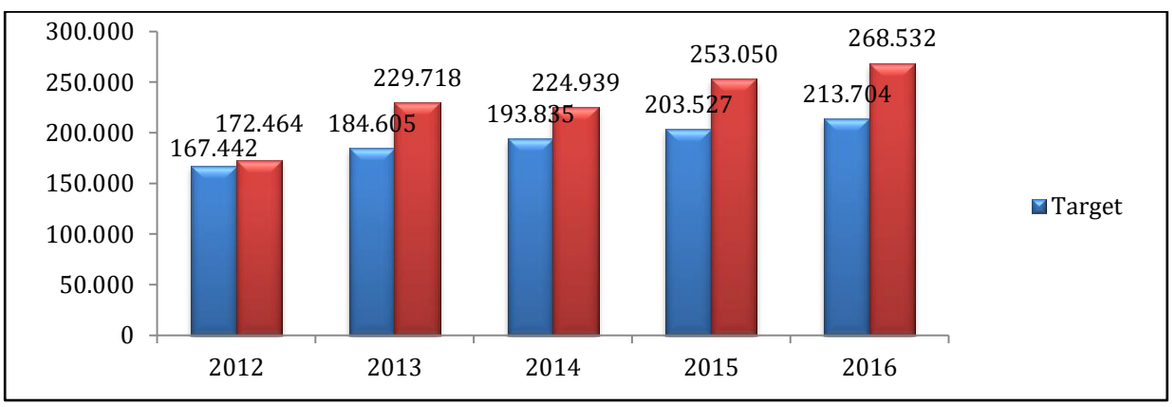

Gambar 2.51
Grafik Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara

Tabel 2.132
Tabel Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Tahun 2012-2016
Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh

No	Wisatawan	2012			2013			2014			2015			2016		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Nusantara	167.442	172.646		184.605	229.718		193.835	224.939		203.527	253.05		213.704	268.532	
2	Mancanegara	4.702	4.324		4.937	5.317		5.234	11.105		5.496	13.139		6.221	18.577	
	Total	172.144	176.970	102,8	199.542	235.035	117,83	199.069	236.042	118,57	209.023	266.189	127,3	219.925	287.109	130,54

2.3.4.2 Pertanian

2.3.4.2.1 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Berdasarkan data Statistik Banda Aceh dalam Angka luas Kota Banda Aceh adalah 61,3 Km^2 (61.300 Ha), sedangkan luas lahan pertanian (sawah) adalah 71 Ha (lahan produktif) yang tersebar di lima kecamatan yaitu Kecamatan Ulee Kareng, Syiah Kuala, Lueng Bata, Banda Raya dan Jaya Baru. Data luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas padi di Kota Banda Aceh dalam lima tahun terakhir (Tahun 2012-2016) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.133

Tabel Luas Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Kota Banda Aceh

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Luas Tanam (Ha)	120	114	118	107	77,1
2	Luas Panen (Ha)	69	86	16	92	72,1
3	Produksi (Ton)	285	439	76	507	309
4	Produktivitas (Kw)	41,36	41,80	47,46	55,11	42,90

Luas tanam padi di Kota Banda Aceh dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 terjadi fluktuasi hal ini terjadi karena tidak semua lahan melakukan penanaman 2 (dua) kali dalam setahun akibat tidak adanya aliran air irigasi. Lahan sawah di Kota Banda Aceh adalah tadah hujan. Luas panen padi pada Tahun 2014 terjadi penurunan dibandingkan pada Tahun lainnya karena pada tahun tersebut terjadi kekeringan, sehingga hal ini berpengaruh terhadap hasil produksi yang dihasilkan. Sedangkan angka Produktivitas di dapatkan dari pembagian produksi dengan luas panen padi.

Berdasarkan fakta di lapangan lahan pertanian (sawah) semakin berkurang. Hal ini diakibatkan pesatnya pembangunan sehingga menyebabkan konversi lahan pertanian ke peruntukan lainnya (Bangunan, Jalan dan lain-lain). Untuk mengatasi hal tersebut perlu terus dilakukan penyuluhan kepada masyarakat supaya mempertahankan lahan pertanian yang ada. Disamping hal itu petani di Kota Banda Aceh adalah petani penggarap dimana kepemilikan lahan milik orang lain. Untuk ini apabila Pemerintah Kota tersedia anggaran untuk membebaskan lahan masyarakat tersebut guna diperuntukkan bagi masyakat petani. Faktor lain yang menyebabkan kurang tertarik masyarakat (petani) menggunakan lahan yang ada yaitu tidak adanya irigasi guna mengairi sawah.

Untuk mengembangkan potensi pertanian yang ada di Kota Banda Aceh, salah satu upaya perlu terus dilakukan pembinaan/pelatihan bagi aparatur dan petani. Selain itu perlu juga mengoptimalkan lahan pekarangan masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai lahan budidaya tanaman pangan (jagung, ubi dan lain-lain), Hortikultura (sayur, buah dan lain-lain) dan Biofarmaka (tanaman obat-obatan)

2.3.4.2.2 Cakupan Bina Kelompok Petani

Perkembangan kelompok binaan pertanian/peternakan dari tahun 2012 sampai 2016 terjadi fluktuasi karena pembinaan terhadap kelompok pertanian/ peternakan dipengaruhi oleh permintaan masyarakat pada tingkat Musrenbang dan juga ketersediaan lahan pertanian/ peternakan semakin berkurang serta ketersediaan dana terbatas. Permasalahan dalam pembinaan kelompok pertanian/peternakan yaitu kurangnya sarana dan prasarana.

Tabel 2.134

Tabel Rumus Cakupan Bina Kelompok Pertanian

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	RUMUS	2012	2013	2014	2015	2016	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
Cakupan Bina Kelompok Pertanian/ Peternakan	$\frac{\text{Jumlah Kelompok petani yang mendapatkan Bantuan pemda tahun n}}{\text{Jumlah kelompok tani}} \times 100\%$	1,1%	6,7%	11,1%	16,7%	33,3%	DKPP

2.3.4.2.3 Peternakan

Kawasan peternakan di Kota Banda Aceh lebih luas terutama di Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Lueng Bata dan Kecamatan Syiah Kuala. Pengembangan peternakan di Kota Banda

Aceh sangat tergantung pada lahan yang tersedia, sedangkan lahan peternak di Kota Banda Aceh semakin menurun karena telah terjadi konversi lahan atau telah diperuntukkan untuk pembangunan lain.

Tabel 2.135
Tabel Data Potensi Ternak Tahun 2012-2017

No.	Tahun	Jenis Ternak		
		Sapi/ Kerbau	Kambing/ Domba	Unggas
1.	2012	2.014	5.470	47.040
2.	2013	1.744	5.071	47.712
3.	2014	2.023	5.684	44.240
4.	2015	2.060	5.401	58.014
5.	2016	2.532	6.155	80.221
6.	2017	40	106	500

Dilihat dari tabel diatas bahwa populasi ternak semakin meningkat sedangkan kondisi lahan sangat terbatas. Umunya pola peternakan di Kota Banda Aceh dikandangkan terutama terletak di kawasan Ulee Kareng, hal ini terbanu dengan adanya bantuan ternak dari pemerintah, angka kelahiran meningkat dan adanya program Upsus SIWAB dari pemerintah.

- Permasalahan
  Kita ketahui bahwa Kota Banda Aceh bukan kawasan produsen ternak, lahan-lahan di Kota Banda Aceh sudah berubah fungsi sehingga lahan semakin lama semakin berkurang dan apabila populasi ternak di Kota Banda Aceh semakin meningkat maka akan terjadi pencemaran lingkungan, konflik sosial dan ternak-ternak berkeliaran dimana-dimana.
  Hasil pengamatan kami sesuai dengan jumlah polulasi dan kondisi lahan yang tersedia saat ini bantuan ternak kepada masyarakat perlu dipertimbangkan/ dikurangi.
- Tingginya harga daging
  Masalah tingginya harga daging bukan terjadi di Kota Banda Aceh saja akan tetapi telah meluas bahkan seluruh Indonesia. Salah satu tingginya harga daging karena permintaan sangat meningkat apalagi di Provinsi Aceh pada hari-hari besar Islam.
- Solusi
  Salah satu solusi yang perlu dicari pemerintah adalah dicari kawasan-kawasan peternakan diluar Kota Banda Aceh, peningkatan upsus siwab dengan peningkatan angka kelahiran.
- Pengendalian kesmavet
  Dari populasi yang ada pemerintah perlu melakukan pengendalian kesehatan masyarakat veteriner sehingga ternak-ternak yang ada di Kota Banda Aceh tidak terinfeksi dengan berbagai ancaman penyakit terutama penyakit zoonosis dan penyakit-penyakit ternak lainnya.
  Program pemerintah perlu memberi bantuan yang bersifat alat-alat kesehatan hewan dan penambahan petugas kesehatan hewan yang profesional.
  Lebih lanjut pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya untuk membangun destinasi makanan halal untuk menjamin ketenangan masyarakat Kota Banda Aceh. Dan kendala yang dihadapi saat ini belum tersedianya RPH dan RPU yang representatif di Kota Banda Aceh yang menyebabkan meningkatnya pencemaran lingkungan.
- Saran
  Dalam hal ini pemerintah perlu membangun Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) yang presentatif sesuai ketentuan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) di Kota Banda Aceh menuju destinasi makanan yang ASUH.

2.3.4.3 Energi dan Sumber Daya Mineral

2.3.4.3.1 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Energi listrik di Kota Banda Aceh disediakan oleh PLN melalui pembangkit listrik yang terkoneksi ke system transmisi dan pembangkit listrik yang tidak terkoneksi ke system transmisi. Pembangkit listrik yang terkoneksi merupakan sambungan koneksi jaringan listrik dari Sumatera Utara. Sedangkan pembangkit listrik yang tidak terkoneksi terdapat dikecamatan Lueng Bata di kota Banda Aceh yang menggunakan energi diesel (PLTD).

Tabel 2.136
Tabel Penggunaan Energi Listrik

No	Jenis Pelanggan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Bisnis	6.902.691	6.860.089	7.955.041	8.880.630	8.909.586
2	Industri	561.728	491.740	492.661	574.496	556.851
3	Publik	3.289.409	3.250.253	3.460.887	4.631.603	3.430.270
4	Perumahan	16.501.961	16.251.289	16.156.566	18.081.471	17.803.612
5	Sosial	2.643.388	3.009.349	2.818.199	3.408.934	3.245.264
6	Layanan Khusus	632.158	1.340.574	81.358	10.974	20.582
	Total	**30.531.335**	**31.203.291**	**30.964.712**	**35.588.108**	**33.966.165**

Sumber : Dokumen PLN (Pemakaian KWH)

Sesuai dengan table diatas pada tahun 2012 sampai dengan 2016 total pemakaian KWH cenderung fluktuatif. Pemakaian tertinggi terjadi pada tahun 2015, hal ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan Kota Banda Aceh tertinggi pada tahun 2015 sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya relatif rendah.

2.3.4.3.2 Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Tabel 2.137
Rasio Ketersediaan Daya Listrik

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Daya Listrik Terpasang	200.183.150	211.690.775	222.947.500	233.780.145	252.158.668
2	Jumlah Kebutuhan	200.183.150	211.690.775	222.947.500	233.780.145	252.158.668
3	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	100	100	100	100	100

Sumber : PLN

2.3.4.4 Perindustrian

2.3.4.4.1 Jumlah IKM yang Mendapatkan Bantuan Perbankan

Perkembangan industri kecil dan menengah di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan penambahan penduduk dan terbukanya informasi dari berbagai penjuru daerah. Berikut data Perkembangan Industri Kecil Kota Banda Aceh tahun 2012 – 2017.

Tabel 2.138
Tabel Data Perkembangan Industri Kecil Kota Banda Aceh

Tahun	Unit Usaha	Tenaga Kerja (Org)	Nilai Investasi (Rp)	Nilai Produksi (Rp)	Nilai Tambah
2012	1.898	7088	53.280.480.000	234.760.960.000	181.480.760.000
2013	1.930	7.190	54.380.485.000	230.770.965.000	188.490.860.000
2014	2.020	7.450	54.360.885.000	227.350.000.000	189.570.000.000
2015	2.127	7.830	55.480.775.000	237.780.000.000	190.370.000.000
2016	2.248	8.100	57.630.385.000	239.580.000.000	194.470.000.000
2017	2.376	8.300	58.570.000.000	248.570.000.000	195.580.000.000

Sementara Perkembangan industri kecil dan menengah di Kota Banda Aceh jika dilihat dari setiap sektor adalah sebagai berikut :

Tabel 2.139
Tabel Perkembangan Industri Kecil dan Menengah

No	Sektor	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Sektor Pangan	580	585	595	645	669	695
2	Sektor Sandang	343	350	365	345	320	355
3	Sektor Kimia	423	430	446	492	495	527
4	Sektor Logam	239	245	265	291	394	413
5	Sektor Kerajinan Umum	313	320	349	354	370	386
	Jumlah	**1.898**	**1.930**	**2.020**	**2.127**	**2.248**	**2.376**

Pada tahun 2016, saat bidang Industri masih bergabung dalam Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh, terdapat kegiatan sosialisasi kepada pelaksana IKM dan UKM untuk mendapatkan akses perbankan, namun sampai saat ini Pihak Bank maupun dari pelaksana IKM sendiri tidak pernah memberikan laporan mengenai IKM yang mendapatkan bantuan perbankan kepada Dinas Tenaga Kerja, dan hal ini akan menjadi perhatian dari Pemerintah sendiri

untuk melakukan koordinasi dengan pihak Bank dalam rangka sama-sama melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2.3.4.4.2 Jumlah IKM yang Mampu Melakukan Pemasaran Komoditi

Industri di Kota Banda Aceh sangat bervariasi dan terdiri dari berbagai macam komoditas. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan pemasaran komoditi yang disebabkan keaktifan para IKM dalam menjalin kerjasama dan membuka jaringan usaha sesama IKM. Peningkatan pemasaran yang paling tinggi dan efektif adalah secara online melalui sosial media, Peningkatan wawasan IKM dalan menemukan pasar yang cocok dan membangun kreatifitas untuk variasi produk, sehingga produk dan komoditas IKM semakin diterima ditengah tengah masyarakat, selain adanya peran pemerintah dalam memasarkan produk perajin baik melalui event pameran, pelatihan maupun media massa (grafik di bawah ini menunjukkan perkembangan Jumlah IKM yang mampu melakukan pemasaran komoditi)

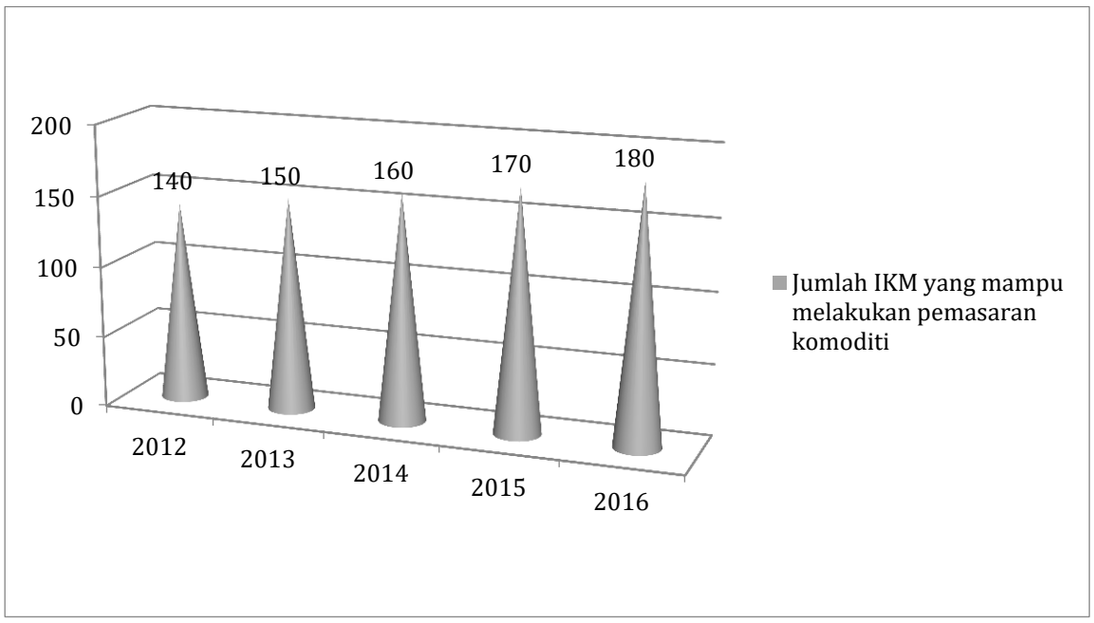

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2017

Gambar 2.52
Grafik Jumlah IKM yang Mampu Melakukan Pemasaran Komoditi Tahun 2012-2016

2.3.4.4.3 Jumlah Produk yang Menunjang Program One Village One Product

Kota Banda Aceh adalah daerah yang mempunyai produk unggulan yang menjadi ciri khas daerah. Salah satu cara untuk peningkatan dan pengembangan produk unggulan adalah melalui penetapan produk One Village One Product (OVOP). Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Banda Aceh secara konsisten dan fokus dalam pembinaan produk OVOP dengan melakukan kerjasama dengan pihak Akademisi dari Universitas Syiah Kuala melalui Pusat Ekonomi Kreatif Unsyiah, dari survey yang telah dilakukan di 90 Gampong di Kota Banda Aceh maka ditetapkan 36 Produk yang menjadi prioritas produk OVOP setelah dilakukan verifikasi dan pemetaan produk dari 435 produk hasil survey, berikut adalah grafik perkembangan jumlah produk yang menunjang OVOP di Kota Banda Aceh

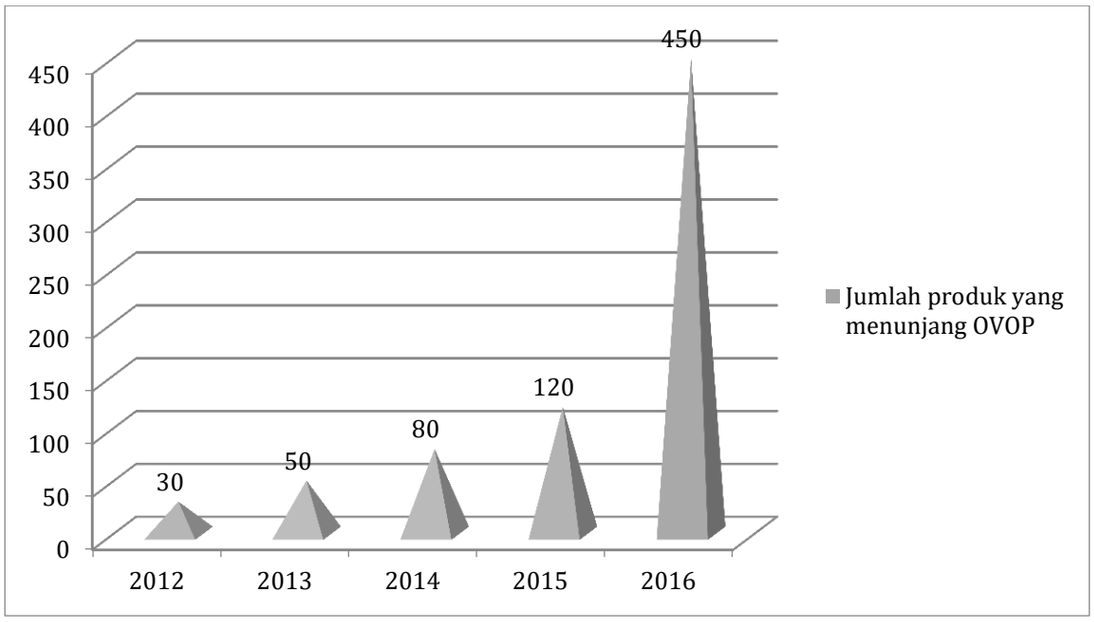

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2017

Gambar 2.53
Jumlah Produk yang menunjang OVOP di Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

2.3.4.4.4 Jumlah Pasar yang Sudah Berfungsi Sccara Optimal

Jumlah pasar di kota Banda Aceh sampai dengan tahun 2017 sebanyak 16 pasar, jumlah pasar yang sudah berfungsi secara optimal 14 pasar, sementara ada 2 pasar yang belum berfungsi optimal yaitu pasar Lamgapang Ulee Kareng dan pasar terpadu Lampulo yang dibangun pada tahun 2016 dengan sumber dana APBN (tabel di bawah ini)

Pasar Kuliner Ulee Lheue yang dibangun dengan sumber dana APBN, sejak tahun 2010 sudah difungsikan sebagai wisata kuliner. Pasar Newton terdiri dari 2 bangunan gedung, gedung A dibangun atas bantuan dari dana Otsus, sudah difungsikan sebagai tempat wisata kuliner dan gedung B dibangun atas bantuan dana hibah Pertamina, khusus lantai 2 sudah dimanfaatkan menjadi kantor PDAM Kota Banda Aceh. Pasar pusat kuliner dan souvenir di Pango dibangun atas bantuan dana Otsus sudah dimanfaatkan menjadi wisata kuliner dan souvenir pada tahun 2017.

Tabel 2.140
Nama Pasar di Kota Banda Aceh

No	Nama Pasar	Pasar yang sudah berfungsi optimal						Pasar yang belum berfungsi					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pasar Aceh	V	V	V	V	V	V						
2	Pasar Gp. Baru	V	V	V	V	V	V						
3	Pasar Seutui	V	V	V	V	V	V						
4	Pasar Peuniti	V	V	V	V	V	V						
5	Pasar Kartini	V	V	V	V	V	V						
6	Pasar Ikan	V	V	V	V	V	V						
7	Pasar Daging	V	V	V	V	V	V						
8	Pasar Bumbu	V	V	V	V	V	V						
9	Pasar Unggas	V	V	V	V	V	V						
10	Pasar Nasabe	V	V	V	V	V	V						
11	Pasar Rex	V	V	V	V	V	V						
12	Pasar Ulee Kareng							V	V	V	V	V	V
13	Pasar Newton					V	V			V	V		
14	Pasar Pusat Kuliner dan Souvenir						V				V	V	
15	Pasar Kuliner Uleelheu	V	V	V	V	V	V						
16	Pasar Terpadu Lampulo											V	V

Sumber :Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2017

2.3.4.5 Kelautan dan Perikanan

2.3.4.5.1 Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Pada tahun 2016 telah terjadi peningkatan pertumbuhan kelompok perikanan, salah satu factor keberhasilan disebabkan oleh optimalisasi pendampingan yang dilaksanakan oleh petugas teknis dalam meningkatkan kelembagaan dan produktifitas usaha kepada pelaku usaha perikanan, keberhasilan tersebut telah memicu terjadinya perubahan pola pikir pelaku usaha perikanan yang selama ini berusaha secara individual beralih berusaha secara kelompok.

Tabel 2.141

Tabel Rumus Cakupan Binaan Kelompok Nelayan

Bidang Urusan/ Indikator	Rumus	2012	2013	2014	2015	2016	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan Bantuan pemda tahun n / Jumlah Kelompok Nelayan X100%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	DKPP

2.3.4.5.2 Produksi Perikanan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya

Kota Banda Aceh merupakan Sentra terbesar pendaratan ikan yang terdapat di Provinsi Aceh. Hampir seluruh armada dengan berbagai jenis komoditi perikanan didaratkan, produksi perikanan dari tahun ketahun telah terjadi peningkatan, hal ini sangat didukung oleh armada dan teknik penangkapan ikan yang diterapkan oleh nelayan diKota Banda Aceh, selain itu dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam memberantas *Illegal Fishing* telah berdampak positif bagi usaha perikanan tangkap, meningkatnya ketersedian sumber daya ikan di perairan laut Aceh. Penerapan tegnologi usaha penangkapan ikan telah berhasi lmeningkatkan produksi perikanan di Kota Banda Aceh sehingga membantu nelayan dalam meningkatnya taraf hidup mereka.

Tabel 2.142

Tabel Rumus Produksi Ikan

Bidang Urusan/ Indikator	Rumus	2012	2013	2014	2015	2016	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
Produksi Ikan	Jumlah Produksi Ikan (Ton) / Target Daerah (Ton) x 100%	88%	92%	93%	95%	98%	DKPP

2.3.5 Fokus Penunjang Urusan

2.3.5.1 Perencanaan Pembangunan

2.3.5.1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJP, RPJM, dan RKPK Kota Banda Aceh

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan aspiratif dimaksudkan bahwa RPJM Daerah disusun dengan memperhatikan kepada RPJM Nasional dan mengacu kepada RPJP Daerah yang telah menyerap aspirasi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan serta merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banda Aceh.

RPJM Kota Banda Aceh juga menjadi pedoman bagi SKPD di dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), serta Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK), yang selanjutnya, keduanya akan mengacu untuk menyusun Rencana Kinerja SKPD. Selama periode 2012-2017 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Perwal). Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Kota Banda Aceh dalam periode tersebut sudah terakomodasi secara optimal.

2.3.5.2 Keuangan

2.3.5.2.1 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Tabel 2.143

Tabel Opini BPK Tahun 2012 - 2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
OPINI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 Banda Aceh memperoleh opini wajar tanpa pengecualian terhadap pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK. Opini dari BPK-RI merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu; (1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) Kecukupan Pengungkapan, (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern.

Hal ini menunjukkan bahwa *UNQUALIFIED OPINION* (WAJAR TANPA PENGECUALIAN/ WTP), yang diberikan oleh BPK-RI, dimana Auditor BPK-RI telah meyakini secara material bahwa, (a) penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh telah sesuai SAP(PP 24/2005), tidak ada salah saji material dan telah diuangkapkan secara memadai, (b). Sistem pengendalian intern yang dibangun/diterapkan telah cukup memadai, sehingga dapat mengamankan harta dan kebijakan manajemen, (c). Semua transaksi yang dilakukan telah sesuai ketentuan yang berlaku (tidak ada temuan yang material yang mempengaruhi opini auditor).

2.3.5.2.2 Persentase SILPA

Tabel 2.144

Tabel Persentase SILPA Kota Banda Aceh

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Persentase SILPA	3 %	4 %	5 %	8 %	%

SiLPA Pemerintah Kota Banda Aceh setiap tahunnya terdiri atas sisa dana yang bersumber dari sisa kas pada BLUD, sisa kas dana Jaminan Pelayanan Kesehatan yang berada pada masing-masing puskesmas, sisa penerimaan zakat tidak seluruhnya disalurkan pada tahun anggaran berjalan, karena penyaluran zakat secara komsumtif disalurkan pada setiap bulan ramadhan, sisanya bahagian dari SiLPA tahun berjalan yang akan digunakan/ disalurkan pada tahun anggaran berikutnya, dan sisa Dana transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat untuk pembayaran tambahan penghasilan guru PNSD tidak seluruhnya dapat direalisasikan, pembayaran hanya diberikan kepada guru-guru yang telah mendapatkan dan memiliki sertifikasi sesuai denga nKeputusan Kemetrian Pendidikan RI.

2.3.5.2.3 Persentase SILPA Terhadap APBD

Tabel 2.145

Tabel Persentase SILPA Terhadap APBD

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Persentase SILPA Terhadap APBD	5 %	6 %	8 %	10 %	5 %

Rasio SiLPA Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap total belanja mengalami penurunan bila dibandingkan Rasio SiLPA dari lima tahun anggaran terhitung sejak Tahun Anggaran 2012 – 2016. Dimana rasio SiLPA Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap total belanja tidak mengalami kecendrungan peningkatan, seperti untuk Tahun Anggaran 2016 rasionya sebesar 4,78 % mengalami penurunan sebesar 4,93 % dari Rasio Tahun Anggaran 2015 sebesar 9,71 %.

2.3.5.2.4 Persentase Belanja Pendidikan

Tabel 2.146

Tabel Persentase Belanja Pendidikan

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Persentase belanja pendidikan (20%)	42%	42%	39%	38%	35%

Persentase belanja pendidikan dari tahun 2012-2016 di kota Banda Aceh telah dialokasikan melebihi ketentuan minimal yaitu 20%, tetapi di tahun-tahun 2014-2016 alokasi anggaran pendidikan mengalami penuruna dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan turunnya alokasi tambahan penghasilan guru dan tunjangan profesi guru dari pemerintah pusat dan juga disebabkan oleh banyaknya guru yang pensiun.

2.3.5.2.5 Persentase Belanja Kesehatan

Tabel 2.147

Tabel Persentase Belanja Kesehatan

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Persentase belanja kesehatan (10%)	10%	9%	11%	12%	13%

Belanja untuk bidang kesehatan pada APBD Pemko Banda Aceh dilakoasikan di Dinas Kesehatan dan RSU Meuraxa. Peningkatan yang terjadi pada kurun waktu tahun 2014-2016 disebabkan oleh adanya penambahan pendapatan pada BLUD RSU Meuraxa yang diiringi belanja pada BLUD tersebut juga menjadi meningkat.

2.3.5.2.6 Persentase Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Tabel 2.148

Tabel Persentase Belanja Langsung

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Persentase belanja langsung	36%	42%	48%	48%	46%

Alokasi belanja langsung yang diperuntukkan untuk belanja rutin dan juga untuk pembiayaan pembangunan kota dan untuk kepentingan masyarakat sebanyak 36-48% di tahun 2012 s/d 2016. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik terus meningkat juga menjadi penyebab dari kenaikan persentase alokasi belanja langsung.

Tabel 2.149

Tabel Persentase Belanja Tidak Langsung

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Persentase belanja tidak langsung	64%	58%	52%	52%	54%

Persentase belanja tidak langsung memiliki porsi yang besar dibandingkan belanja langsung di kota Banda Aceh, hal ini disebabkan oleh Belanja Tidak Langsung yang melingkupi Belanja pegawai yang cukup besar dan juga dialokasikan untuk kebutuhan Belanja Bunga, Belanja Hibah, Bansos, Belanja Bantuan Keuangan dan belanja tidak terduga.

2.3.5.2.7 Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa

Tabel 2.150

Tabel Persentase Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Persentase Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	2%	1%	1%	3%	7%

Persentase bagi hasil Kota Banda Aceh ke desa /gampong meliputi Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBN, Alokasi Dana Gampong yang berasal dari APBK Kota Banda Aceh, Bagi Hasil Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Banda Aceh. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari 3% menjadi 7%, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada **pasal** 72, yang memuat tentang pendapatan Desa yang berasal dari Alokasi APBN (ADD), Bagian Hasil pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah juga Alokasi Dana Desa (ADG) dengan ketentuan 10 % dari dana perimbangan yang diterima Kota Banda Aceh dalam APBD setelah dikurangi DAK. Pada PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN memuat bahwa ADD merupakan dana yang dialokasikan Pemerintah untuk Desa yang dihitung berdasarkan jumlah desa dan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

2.3.5.2.8 Penetapan APBD

Tabel 2.151

Tabel Penetapan APBD

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Penetapan APBD	Tepat waktu (26 Desember 2011)	Tepat waktu (21 Desember 2012)	Tepat waktu (23 Desember 2013)	Tepat waktu (30 Desember 2014)	Tepat waktu (29 Desember 2015)

Kota Banda Aceh setiap tahunnya dari 2012 s/d 2016 selalu berhasil untuk menetapkan APBD tepat waktu, hal ini menunjukkan singkronisasi dan harmonisasi antara eksekutif dan yudikatif dalam proses perencanaan sampai dengan penetapan APBD.

2.3.5.3 Pengawasan

2.3.5.2.1 Persentase Tindak Lanjut Temuan

Penyelesaian Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dari Pengawas Eksternal, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) dan Inspektorat Aceh, maupun Pengawas internal (Inspektorat Kota Banda Aceh) sangat tergantung pada keseriusan SKPK dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan. Tahun 2012, 2013, 2014 dan 2016 Inspektorat Aceh tidak melakukan pemeriksaan pada Pemerintah Kota Banda Aceh, pemeriksaan yang dilakukan tahun 2015 menghasilkan 23 rekomendasi, 21 penyelesian dengan rasio 91%. Rekomendasi, penyelesaian dan rasio temuan BPK, Inspektorat Aceh dan Inspektorat Kota Banda Aceh serta Penyelesaian TLHP Tahun 2012 – 2016 selengkapnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.152

Jumlah Temuan BPK, Inspektorat Aceh dan Inspektorat Kota Banda Aceh Serta Penyelesaian TLHP Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah rekomendasi BPKRI	29	58	47	55	48
2	Jumlah penyelesaian	29	46	38	46	43
3	Ratio penyelesaian (%)	100	79	81	84	89
4	Jumlah rekomendasi Inspektorat Aceh	-	-	-	23	-
5	Jumlah penyelesaian	-	-	-	21	-
6	Ratio penyelesaian (%)	-	-	-	91	-
7	Jumlah rekomendasi Inspektorat kota	733	1210	803	714	864
8	Jumlah penyelesaian	672	1210	748	656	656
9	Ratio penyelesaian (%)	92	100	93	92	76

Sumber : Inspektorat Kota Banda Aceh

2.3.6 Fokus Otonomi Daerah

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.3.6.1 Pemerintahan Umum

2.3.6.1.1 Nilai SAKIP Pemerintah Kota

Evaluasi Sistem Akuntabilitas KInerja (SAKIP) dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, memberi saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan melalui tahapan survey pendahuluan dan evaluasi atas implementasi SAKIP. Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.153

Tabel hasil Evaluasi SAKIP

No	Nilai Sakip	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %
1	AA	15,38	20,51	0	0	0
2	A	7,69	15,38	5,13	7,69	10,25
3	BB	0	0	0	15,38	15,38
4	B	28,20	17,94	51,28	5,12	15,38
5	CC	20,51	15,38	30,77	23,07	15,38
6	C	17,94	20,51	10,26	41,02	38,46
7	D	2,56	2,56	2,56	7,69	2,56

Pencapaian nilai SAKIP SKPD dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 masih harus ditinggatkan untuk memberikan manfaat sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong SKPD untuk melakukan inovasi dalam mendesain program dan kegiatan dan sebagai dasar dalam memberikan reward dan punishment yang bisa dikaitkan dengan kinerja individu, SAKIP tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian.

2.3.6.1.2 Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas merupakan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan Pemerintah yang Transparan, Bersih dan Bebas dari Korupsi (KKN) serta tercapainya pelayanan publik yang prima. Kondisi tahun 2016 hasil penilaian mandiri oleh Tim penilai internal, SKPD yang telah mencanangkan zona integritas dan meraih predikat wilayah Bebas dari korupsi (WBK) sebanyak 3 (tiga) SKPD atau (1,17%) dari 39 SKPD yaitu RSUD Meuraxsa, Disduk Capil dan KPPTSP. SKPD yang telah mendapatkan predikat WBK dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.154

Tabel SKPD yang mendapat predikat WBK

No	Uraian	2012 SKPD	2013 SKPD	2014 SKPD	2015 SKPD	2016 SKPD
1	2	3	4	5	6	7
1	SKPD yang mendapat predikat WBK	0	5	4	1	3

Dalam hai ini harus lebih di tingkatkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk unit kerja/ SKPD lainnya, yang didahului dengan pernyataan komitmen bersama untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penandatanganan dokumen pakta integritas.

2.3.6.1.3 Kapabilitas APIP

Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Model Peningkatan Kapabilitas APIP mengacu pada *Internal Audit Capability Model* (IA-CM), Level IA-CM Level 1 sampai dengan Level 5, Kota Banda Aceh tahun 2016 masih berada pada level 2 (dua) penuh (*Infrastructure) yaitu* APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi. Kondisi ini mengambarkan bahwa kondisi APIP Kota Banda Aceh harus lebih ditingkatkan sehinga mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan

konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Hasil penilaian dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.155
Level Kapabilitas APIP

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Level Kapabilitas APIP	1	1	2 (dengan catatan)	2	2

2.3.6.1.4 Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Rasio jumlah pegawai dibandingkan dengan Jumlah Auditor dan P2UPD (Pejabat Pemeriksa Urusan Pemerintahan Daerah) mulai tahun 2012 sampai dengan 2016 berfluktuasi, pada tahun 2012 jumlah auditor 11 orang dan P2UPD 11 orang, tahun 2013 jumlah auditor tetap (11 orang) sementara P2UPD berkurang 1 orang. Pada tahun 2014 auditor bertambah 1 orang (kembali dari tugas belajar) sementara P2UPD juga berkurang 1 orang, pada tahun 2015 jumlah auditor berkurang 3 orang (9 orang) karena tugas belajar, P2UPD tetap 8 orang, pada tahun 2016 jumlah auditor menjadi 15 orang (3 orang kembali dari tugas belajar), sementara P2UPD masih tetap 8 orang.

Kebutuhan Auditor/ P2UPD sampai tahun 2019 sesuai Instruksi Presiden dan dalam rangka mencapai level 3 kapabilitas APIP 40 orang (harus ditambah 17 orang). Jumlah pegawai dan tingkat kompetensi aparatur pengawasan Tahun 2012 s.d. 2016 selengkapnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.156
Jumlah Pegawai dan Tingkat Kompetensi Aparatur Pengawasan dari Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah pegawai	41	38	47	43	46
2	Jumlah Aditor dan P2UPD	Auditor : 11 P2UPD : 11	Auditor : 11 P2UPD : 10	Auditor : 12 P2UPD : 8	Auditor : 9 P2UPD : 8	Auditor : 15 P2UPD : 8
3	Ratio per-Tahun (%)	53	55	42.5	39.5	50

Sumber : Inspektorat Kota Banda Aceh

2.3.6.1.5 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Polisi Pamong Praja merupakan aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas untuk menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan perda. Kondisi personil polisi Pamong Praja dari Tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.157
Tabel Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2012-2016 Kabupaten/ Kota

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah polisi pamong praja	139	155	215	204	206
2.	Jumlah penduduk	238.784	249.282	249.499	250.303	254.904
3.	Rasio Jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	5,84	6,22	8,62	8,15	8,08

Pada tahun 2013 jumlah Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh berjumlah 155 orang, dengan jumlah penduduk pada saat itu sebanyak 249.282 jiwa maka rasio jumlah personil Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah per 10.000 penduduk adalah 6,22 dengan kata lain 6 personil Satpol PP dan WH untuk 10.000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah personil Satpol PP dan WH berjumlah 215 orang, dengan jumlah penduduk 249.499 jiwa dan rasio jumlah personil Satpol PP dan WH per 10.000 penduduk adalah 8,62. Pada tahun 2014 personil Satpol PP dan WH meningkat sehubungan dengan adanya penerimaan tenaga kontrak baru yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH dengan jumlah penduduk saat itu adalah 249.499 jiwa maka rasio jumlah personil Satpol PP dan WH per 10.000 penduduk adalah 8,62 dengan kata lain 9 personil Satpol PP dan WH untuk 10.000 Penduduk.

2.3.6.1.6 Jumlah Linmas Per Jumlah Penduduk

Kota Banda Aceh sebagai ibukota propinsi memilki masyarakat dengan kultur budaya berbeda yang dipengaruhi oleh banyaknya pendatang dari luar daerah. Umumnya hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi dimana ibukota propinsi dianggap lebih memberikan kesempatan dan lapangan

kerja yang lebih besar. Selain faktor mencari kerja, terdapat sebagian orang yang memanfaatkan situasi dengan mengambil kesempatan melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tingkat kesenjangan sosial menjadi faktor dominan yang menyebabkan terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan di Kota Banda Aceh.

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya mengantisipasi dan menjaga lingkungan dari gangguan ketertiban dan keamanan, merekrut Satuan Perlindungan Masyarakat dari setiap gampong yang bertugas membantu kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Selain itu di setiap gampong dibangun pos Siskamling yang merupakan salah satu usaha dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat setempat. Sistem keamanan lingkungan atau Siskamling melibatkan unsur masyarakat, untuk melakukan pengawasan, terhadap keamanan dilingkungannya dengan mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan Kamtibmas.

Pemerataan anggota satuan linmas merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan ketrentraman masyarakat. Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satuan linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Adapun Rasio Jumlah Linmas sesuai tabel berikut.

Tabel 2.158

Rasio Jumlah Linmas Kota Banda Aceh Per 10.000 Penduduk Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Linmas	1,300	1,320	1400	0	0
2	Jumlah penduduk	238.784	249.282	249.499	250.303	254.904
3	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	54	57	52	0	0

Sumber: Kesbangpolinmas Kota Banda Aceh

2.3.6.1.7 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Gampong

Rasio jumlah siskambling merupakan perbandingan antara jumlah siskambling dengan jumlah gampong/ desa. Data rasio siskambling Kota Banda Aceh Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.159

Rasio Jumlah Siskamling Per Kecamatan Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten/ Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	2012			2013			2014			2015			2016		
		Jumlah Siskamling	Jumlah desa	Rasio	Jumlah Siskamling	Jumlah desa	Rasio	Jumlah Siskamling	Jumlah desa	Rasio	Jumlah Siskamling	Jumlah desa	Rasio	Jumlah Siskamling	Jumlah desa	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)	9	10	(11=9/10)	12	13	(14=12/13)	15	16	(17=15/16)
1	Meu raxa	29	16	1,8	28	16	1,7	29	16	1,8	29	16	1,8	29	16	1,8
2	Jaya Baru	23	9	2,5	21	9	2,3	23	9	2,5	23	9	2,5	23	9	2,5
3	Banda Raya	20	10	2,0	20	10	2,2	20	10	2,0	20	10	2,0	20	10	2,0
4	Baitur rahman	35	10	3,5	33	10	3,3	35	10	3,5	35	10	3,5	35	10	3,5
5	Lueng Bata	18	9	2,0	16	9	1,8	18	9	2,0	18	9	2,0	18	9	2,0
6	Kuta Alam	43	11	3,9	42	11	3,8	43	11	3,9	43	11	3,9	43	11	3,9
7	Kuta Raja	15	6	2,5	15	6	2,5	15	6	2,5	15	6	2,5	15	6	2,5
8	Syiah Kuala	32	10	3,2	30	10	3,0	32	10	3,2	32	10	3,2	32	10	3,2
9	Ulee Kareng	12	9	1,3	12	9	1,3	12	9	1,3	12	9	1,3	12	9	1,3
	Jumlah	227	90	2,5	217	90	2,2	227	90	2,5	227	90	2,5	227	90	2,5

Berdasarkan tabel tersebut rasio jumlah siskambling per desa/gampong berdasarkan kecamatan terbesar 3,9 di Kecamatan Kuta Alam dan yang paling kecil sebesar 1,3 di Kecamatan Ulee Kareng.

2.3.6.2 Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri

2.3.6.2.1 LSM, Ormas dan OKP Terdaftar

Organisasi lembaga swadaya masyarakat diatur berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 tahun 2013. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk beperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi Kemasyarakat dapat berbentuk LSM, Yayasan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan lainnya. Adapun LSM yang terdaftar dan aktif di Kota Banda Aceh sesuai dengan tabel berikut ini.

Tabel 2.160

Jumlah LSM Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah LSM terdaftar	23	24	5	1	4
2	Jumlah LSM tidak aktif	-	-	-	-	-
3	**Jumlah LSM aktif (1-2)**	**23**	**24**	**5**	**1**	**4**

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Tabel 2.161

Jumlah Ormas, OKP Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Ormas	71	48	30	21	18
2	OKP	10	10	3	2	1
3	Yayasan	14	10	7	-	-
4	NGO Asing	-	-	-	-	-
	Jumlah	**95**	**68**	**40**	**23**	**19**

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

2.3.6.2.2 Kegiatan Pembinaan Politik daerah

Dalam berpolitik orientasinya bukan kekuasaan, akan tetapi politik adalah bidang yang mengurus hak dan kewajiban masyarakat, kita bukan hanya mengedepankan bagaimana masyarakat sadar akan haknya tetapi juga memahami dan melaksanakan kewajibannya. Dalam rangka peningkatan pemahaman hak dan kewajiban masyarakat ditengah perkembangan situasi politik saat ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan masyarakat dengan sasaran generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa dan merupakan pelopor perkembangan politik kedepan kegiatan ini didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Kegiatan ini bertujuan membangun karakter anak bangsa yang memiliki rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, serta terciptanya kesatuan dan persatuan. Berkenaan dengan pembinaan politik secara langsung baik kepada masyarakat maupun partai politik dilaksanakan oleh KPU/KIP sebagai lembaga independen pelaksana Pemilu

Tabel 2.162

Realisasi Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat Tahun 2012-2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Sosial dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	220	220	210	220	220	140

Tabel 2.163
Target Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Sosial dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	220	220	220	220	220

2.3.6.2.3 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

Narkotikan merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Hak ini akan lebih merugikan lagi jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai=nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Dalam kenyataan tinda pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukan kecendrungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya

Menanggapi hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkotika kesekolah-sekolah dalam wilayah Kota Banda Aceh.

Tabel 2.164
Realisasi Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
Tahun 2012-2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Pewredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	10	10	10	15	15	15

Sumber: Kesbangpolinmas Kota Banda Aceh

Tabel 2.165
Target Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Pewredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	10	10	10	10	10

Sumber: Kesbangpolinmas Kota Banda Aceh

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

PDRB penggunaan atau pengeluaran merupakan nilai pengeluaran atas penggunaan barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh berbagai golongan dalam masyarakat baik untuk memenuhi modal, stok, maupun ekspor dan impor. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal

dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rum ah tangga tersebut.

Rata-rata pengeluaran perkapita atau belanja rumah tangga selama sebulan di Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan, tahun 2012 Rp. 1.297.418,- dan tahun 2016 Rp 1.682.040,-. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat Kota Banda Aceh semakin meningkat, bahkan melampaui rata-rata Provinsi Aceh (Tahun 2016 : Rp 1.108.347,-) dan Nasional (Rata-rata pengeluaran perkapita di daerah Perkotaan Tahun 2016 : Rp 1.168.131,-), juga mengindikasikan perekonomian di Kota Banda Aceh menjadi semakin baik. Pengeluaran perkapita per bulan kota Banda Aceh tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada grafik berikut

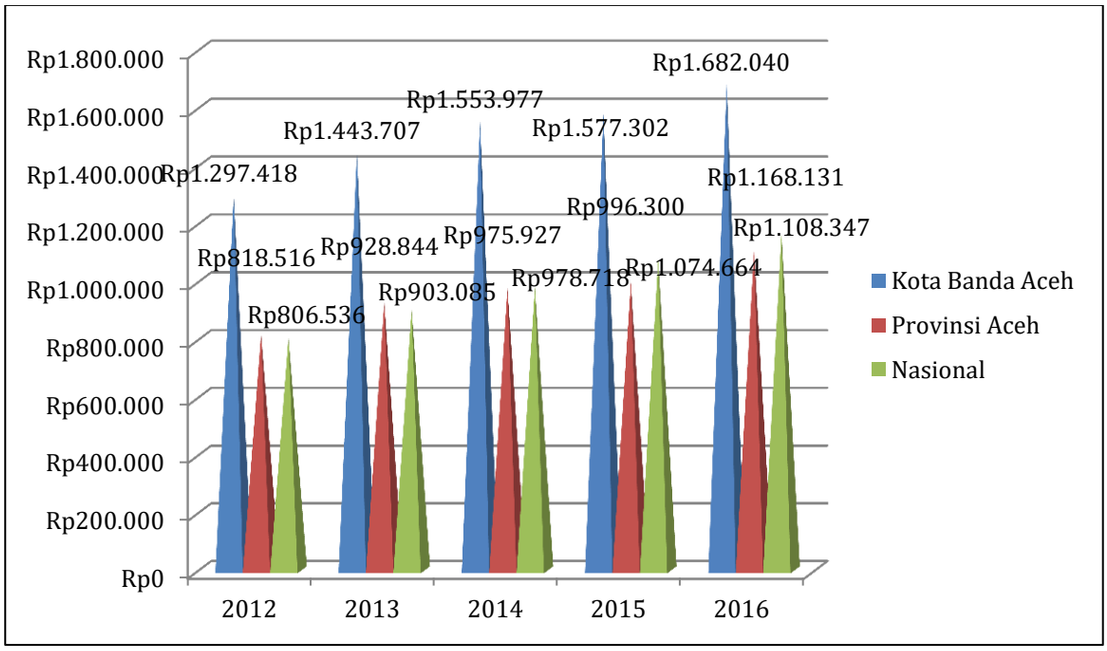

Sumber : Badan Pusat Statistik Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional 2012 -2016

Gambar 2.54

Pengeluaran Perkapita per bulan di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional pada Tahun 2012-2016

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Tabel 2.166

Rasio panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Banda Aceh Tahun 2012– 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Panjang Jalan (KM)	765,66	765,66	765,66	765,66	765,66
2.	Jumlah Kendaraan	7365	9317	4895	5752	11001
3.	Rasio	0,104	0,082	0,156	0,133	0,070

Rasio pelayanan angkutan jalan dihitung berdasarkan Panjang Jalan Kabupaten/Kota dibagi dengan Jumlah Kendaraan. Masih sangat rendahnya persentase pelayanan disebabkan oleh sedikitnya jaringan jalan kota yang dilayani angkutan umum dibandingkan dengan total jaringan jalan Nasional/ Propinsi/ Kota yang ada. Hal ini disebabkan antara lain oleh keterbatasan armada dan kurangnya potensi penumpang pada rute tertentu, sehingga mengakibatkan perusahaan pengelola angkutan umum hanya mengambil rute yang dinilai banyak potensi penumpangnya. Disamping itu, masyarakat lebih cenderung untuk menggunakan kendaraan pribadi untuk berpergian, sehingga pengelola angkutan umum banyak mengalami kerugian akibat biaya operasional yang tidak sebanding, sehingga mengurangi/menutup usahanya.

2.4.2.2 Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Tabel 2.167

Tabel Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
		Jlh Ang	Jlh pnp	Jlh Ang	Jlh pnp	Jlh Ang	Jlh pnp	Jlh Ang	Jlh pnp	Jlh Ang	Jlh pnp
1	AKDP	456	605.324	456	655.106	456	752.823	456	788.224	789	564.373
2	AKAP	286	336.597	286	352.749	286	457.777	286	458.982	157	262.053
	Jumlah	742	941.921	742	1.007.855	742	1.210.600	742	1.247.206	946	826.426
	Jumlah ang/pep X 100%	**0,08%**		**0,08%**		**0,08%**		**0,08%**		**0,06%**	

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penumpang AKDP lebih tinggi dibandingkan denga jumlah penumpang AKAP, hal ini karena jumlah angkutan AKDP lebih banyak dibandingkan dengan jumlah angkutan AKAP. Kenaikan jumlah penumpang ini disebabkan karena adanya peremajaan pada armada angkutan AKDP yang muncul setiap tahun dengan armada yang baru dan eksklusif. Sedangkan untuk AKAP masyarakat lebih memilih untuk menggunakan *alternative* alat transportasi yang lain seperti pesawat terbang.

2.4.2.3 Jumlah Orang/ Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal per Tahun

Tabel 2.168

Jumlah orang/ barang melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Per Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penumpang Bis (Terminal)	526.623	941.921	1.007.855	799.785	1.125.428
2	Jumlah Penumpang ASDP (Dermaga)	223.466	213.719	279.306	323.310	363.722
3	Total Jumlah Penumpang	724.857	1.165.387	1.221.574	1.079.091	1.448.738

Jumlah penumpang angkutan secara umum meningkat dari tahun 2012 – 2016, peningkatan terjadi karena masih ada kegiatan rehab rekon yang menjadi daya tarik bagi masyarakat luar untuk datang ke Banda Aceh terutama para pekerja yang terlibat langsung dengan proses rehab rekon. Sedangkan tahun 2015 terjadi penurunan penumpang pada terminal Bis karena menurunnya aktivitas rehab rekon dan masyarakat sudah banyak memiliki kendaraan pribadi untuk berpergian. Pada Tahun 2016 jumlah penumpang Bis kembali meningkat karena banyaknya perusahaan angkutan yang melakukan peremajaan armadanya (bis), sehingga menarik minat masyarakat untuk kembali menggunakan angkutan umum (bis) untuk bepergian keluar kota. Jumlah penumpang ASDP (Dermaga) pertumbuhannya relatif konstan.

2.4.2.4 Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang

Tabel 2.169

Jumlah Perusahaan Asuransi

Tahun	Jumlah Perusahaan Asuransi
2012	
2013	
2014	14
2015	8
2016	11
2017	*6

* S.d April 2017

Jumlah perusahaan yang bergerak dibidang usaha asuransi tahun 2014 yang terdaftar sebanyak 14 perusahaan, tahun 2015 sebanyak 8 perusahaan, tahun 2016 sebanyak 11 perusahaan dan tahun 2017 yang terdaftar untuk bulan Januari s.d bulan April sebanyak 6 perusahaan pada DPMPTSP Kota Banda Aceh.

2.4.2.5 Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran

Pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 4% pada Pendapatan Asli Daerah. Usaha sektor restoran mnegalami perkembangan kenaikan jumlah yaitu pada tahun 2012 terdapat 405

restoran/rumah makan/cafe dan meningkat setiap tahunnya sehingga pada tahun 2017 terdapat 551 restoran/rumah makan/cafe.

Tabel 2.170

Tabel Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

No	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi
1	Restoran	26	2600	26	2600	23	2300	23	2300	25	2500	26	2600
2	Rumah Makan	107	5350	112	5600	147	7350	163	8150	166	8300	161	8050
3	Café	272	13600	276	13800	333	16650	345	17250	354	17500	364	18200
Jumlah		405	21550	414	22000	503	26300	531	27700	545	28300	551	28850

2.4.2.6 Jenis Kelas dan Jumlah Hotel dan Penginapan

Pajak hotel juga berkontribusi sebesar 4% pada Pendapatan Asli Daerah, dengan perkembangan usaha sektor hotel dan restoran di Kota Banda Aceh juga berimbas pada peningkatan pendapatan asli daerah. PAD Banda Aceh mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dengan kenaikan rata-rata sebesar 27, 21% pertahun. Di tahun 2012 pendapatan asli daerah kota Banda Aceh sebesar Rp. 99.022.050.233 dan menjadi Rp. 129.170.160.562 di tahun 2013, Rp 171.777.275.448 di tahun 2014, Rp. 209.914.107.301 di tahun 2015 dan di tahun 2016 menjadi Rp. 258.591.409.670.

Pada tahun 2012 terdapat 42 hotel dan pada tahun 2017 jumlahnya bertambah menjadi 59 hotel. Dari segi jumlah usaha tidak terdapat kenaikan yang menonjol, namun para pengusaha hotel/penginapan lebih cenderung mengembangkan usaha dengan menambah fasilitas hotel/penginapan yaitu kamar dan tempat tidur serta fasilitas lainnya.

Tabel 2.171

kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kota Banda Aceh

No	Uraian	2012			2013			2014			2015			2016			2017		
		Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur	Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur	Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur	Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur	Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur	Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur
1	Bintang 4	1	159	270	1	159	270	1	159	270	1	159	270	1	156	270	1	159	270
2	Bintang 3	3	302	513	3	302	513	3	302	513	3	302	513	3	513	513	3	302	513
3	Bintang 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bintang 1	7	280	476	8	320	544	9	360	612	11	440	748	11	440	748	11	440	748
5	Melati 3	8	200	240	9	225	270	9	225	270	10	250	300	11	275	330	14	350	420
6	Melati 2	5	175	315	5	175	315	5	175	315	5	175	315	5	175	315	5	175	315
7	Melati 1	6	240	432	6	240	432	7	280	540	8	320	576	8	320	576	8	320	576
8	Penginapan	12	240	480	14	280	560	15	300	600	16	320	640	17	340	680	17	340	680
Jumlah		**42**	**1596**	**2726**	**46**	**1701**	**2904**	**49**	**1801**	**3120**	**54**	**1966**	**3362**	**56**	**2219**	**3432**	**59**	**2086**	**3522**

2.4.2.7 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Tabel 2.172

Proporsi Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih dan Jumlah Rumah Tangga Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses air Bersih	39.836	40.695	42.062	42.912	42.998
2	Jumlah rumah tangga	57.754	58.957	61.443	61.641	62.774
3	Persentase rumah tangga berakses air bersih (%)	68.98%	69.02%	68.46%	69.62%	68.50%

Jumlah rumah tangga Kota Banda Aceh pada tahun 2016 yang mendapat akses air bersih adalah sebanyak 42.998 rumah tangga jiwa atau sebesar 68.50%. Seiring dengan pengembangan jaringan dan peningkatan sistem pelanggan PDAM setiap tahunnya, maka diharapkan capaian target jumlah penduduk yang mendapatkan air bersih sesuai dengan tahun penetapan RPJM tahun 2012-2016 sebesar 80%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.172 dan gambar 2.55

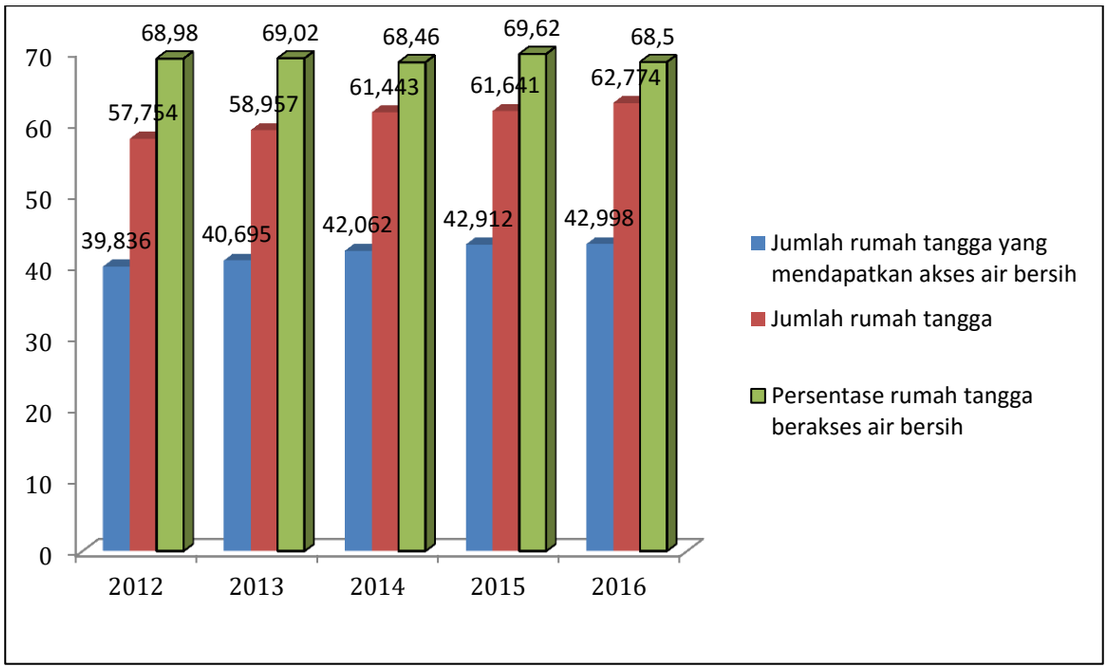

Gambar 2.55
Grafik Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2012 – 2016

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa rumah tangga pengguna air bersih di Banda Aceh setiap tahun mengalami peningkatan. Ini berarti bahwa kesadaran masyarakat untuk menggunakan air bersih meningkat.

2.4.2.8 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Tabel 2.173
Rasio Ketersediaan Daya Listrik

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Daya Listrik Terpasang	200.183.150	211.690.775	222.947.500	233.780.145	252.158.668
2	Jumlah Kebutuhan	200.183.150	211.690.775	222.947.500	233.780.145	252.158.668
3	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	100	100	100	100	100

Sumber : PLN

Saat ini semua rumah tangga di Kota Banda Aceh sudah di aliri oleh listrik dan jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik dari tahun ke tahun menggalami peningkatan.

Tabel 2.174
Persentase Jumlah Rumah tangga yang menggunakan listrik

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan Listrik				43.029	43.029
2	Jumlah rumah tangga				43.029	43.029
3	Persentase rumah tangga yang menggunakan Listrik (%)	100	100	100	100	100

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Tabel 2.175

Tabel Angka Kriminalitas di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2016

No	Jenis Kriminal	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Kasus Narkoba	116	112	96	0
2	Jumlah kasus pembunuhan	0	1	0	1
3	Jumlah Kejahatan seksual	3	5	2	80
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	129	241	200	80
5	Jumlah Kasus pencurian	50	282	250	140
6	Jumlah Kasus Penipuan	75	155	100	141
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	0	0	2
	Total	369	796	648	444
	Jumlah Penduduk	249.282	249.499	250.303	254.904
	Angka Kriminalitas	14	31	25	17
	Jumlah demonstrasi	80	124	130	75

Sumber Badan Kesbangpol

Dilihat dari perubahan angka kriminalitas maka terjadi penurunan yang akan berpengaruh pada kepercayaan investor untuk menginvestasikan modalnya di Kota Banda Aceh karena salah satu faktor yang mempengaruhi iklim investasi adalah tingkat kriminalitas.

Tabel 2.176

Kasus Narkoba di Kota Banda Aceh

Tahun	Ganja	Sabu	Ekstasi	Jumlah Kasus
2012	51	59	1	111
2013	36	74	0	110
2014	38	62	0	102
2015	24	72	0	96
2016	21	77	0	98
2018	23	44	0	67

Upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan kegiatan Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba yang berupa :

1. Sosialisasi kepada Masyarakat
2. Penyuluhan Kesekolah-sekolah pada upacara bendera Senin pagi
3. Razia kesekolah-sekolah dan tempat-tempat yang dicurigai

Kegiatan tersebut melibatkan unsur-unsur **:**

a. Pomdan Iskandar Muda
b. Polresta Banda Aceh
c. Kajari Banda Aceh
d. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
e. Dinas Kesehatan
f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
g. Kantor Satpol PP dan WH
h. Badan Kesbang Pol dan Linmas
i. BNNP Aceh

2.4.3.2 Jumlah Demonstrasi

Tabel 2.177

Tabel Jumlah Demonstrasi

Uraian	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5
Jumlah demonstrasi	80	124	130	75

2.4.3.3 Lama Proses Perizinan

Berdasarkan Perwal No. 27 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Banda Aceh, lama proses perizinan beberapa izin pada kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 2.178
Lama Proses Perizinan Kota Banda Aceh

No	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Resmi (Rata-Rata Maks Rph)
1	SIUP	3 Jam s.d 1 hari kerja	12	-
2	TDP	3 Jam s.d 1 hari kerja	11	-
3	Izin Daftar Industri	3 Jam s.d 1 hari kerja	12	-
4	TDI	3 Jam s.d 1 hari kerja	12	-
5	IMB	6 Hari Kerja	15	Rp.2.250-Rp. 22.875,-
6	HO	1 s.d 7 hari kerja	14	Dibawah 1000m = 2.500/m 1000-2000 m= Rp. 2.000/m 2001-4000 m= Rp. 1.500/m Diatas 4000 m= 2.500/m

Sumber: DPMPTSP

Pelayanan perizinan berdasarkan SOP ini merupakan salah satu indikator yang akan dapat meningkatkan iklim investasi di Kota Banda Aceh. Dan kinerja pelayanan ini telah dilaksanakan dengan baik yang ditunjukkan dengan perolehan penghargaan-penghargaan yan berskala provinsi dan nasional di bidang pelayanan antara lainPelayanan Terpadu Satu Pintu Terbaik dari Pemerintah Aceh sejak tahun Tahun 2009 s.d 2012, Piala Citra Pelayanan Prima diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Tahun 2010, Investment Award bagi Nominasi Penyelenggara PTSP Bidang Penanaman Modal Kota Terbaik Tahun 2012, penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "A" (berdasarkan hasil evaluasi terhadap 59 Kabupaten-Kota Role Model sesuai dengan KepMenPAN Nomor 191 Tahun 2016 tentang Penetapan 59 Kabupaten/Kota sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik).

2.4.3.4 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Tabel 2.179
Jumlah Perda yang mendukung Iklim Investasi

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Perda Terkait Perizinan	17	0	0	1	1

Pada kondisi awal di tahun 2012 terdapat 21 perda yang mendukung iklim investasi untuk Banda Aceh. Penambahan perda baru hanya terdapat di tahun 2015 dan di tahun 2016 masing-masing sebanyak 1 perda.

2.4.3.5 Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah)

Tabel 2.180
Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang mendukung Iklim Investasi

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Pelayanan Perizinan	52	52	57	57	59
2	Layanan Perizinan melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (SIMSATU)	31	31	31	31	31
3	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal	9	9	9	9	9
4	Jumlah Jenis Pelayanan Bidang Penanaman Modal yang Diimplementasikan dalam SPIPISE	8	8	8	8	8
5	Layanan Perizinan melalui aplikasi Sistem Perizinan Online	-	-	10	10	10
6	Jumlah Pajak yang dikeluarkan	1	1	1	1	1
7	Julah Retribusi yang dikeluarkan	8	8	8	8	8

Sumber: DPMPTSP

Jumlah pelayanan perizinan yang dijalankan di DPMPTSP dari 2012 sampai dengan 2017 meningkat dari 52 jenis menjadi 57 jenis, untuk jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal sebanyak 9 perizinan dan non perizinan (7 perizinan dan 2 non perizinan). Untuk pajak daerah terdiri atas 1 jenis izin yaitu izin reklame dan untuk retribusi daerah DPMPTSP menangani 8 perizinan yaitu Izin Gangguan, Izin Trayek, Izin usaha Angkutan Umum, Izin Usaha Angkutan Barang, IMB, Izin Galian Jalan, Kartu Pengawasan, Kartu Pengawasan Operasional, izin Insidentil

2.4.3.6 Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan internal bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan lancar, efektif dan efisien. Jumlah objek pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan setiap tahun anggaran sangat tergantung pada kemampuan keuangan Pemerintah Kota Banda aceh. Jumlah pembinaan dan pengawasan serta jumlah objek pemeriksaan dan rasio pembinaan/ obrik Tahun 2012 s.d. 2016 selengkapnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.181

Jumlah Pembinaan dan Pengawasan serta Jumlah Objek Pemeriksaan dan Ratio Pembinaan/Obrik dari Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah pembinaan dan pengawasan	119	239	182	183	131
2	Jumlah anggaran pembinaan dan pengawasan	398.576.000	779.200.000	690.375.000	673.600.000	788.640.000
3	Jumlah objek pemeriksaan	257	257	257	257	257
4	Ratio pembinaan/ obrik (%)	46,30	92,99	70,81	71,20	50,97

Sumber : Inspektorat Kota Banda Aceh

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun di tambah jumlah penduduk usia di atas 64 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun. Berdasarkan data BPS yang direkap oleh Dinas Tenaga Kerja seperti dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.182

Tabel Tingkat Ketergantungan

Tahun	0 – 15 Tahun	Di atas 64 Tahun	Jumlah Ketergantungan	Penduduk Usia 15-64 th	Persentase Ketergantungan
2014	61.674	5.916	67.590	188.081	35.94%
2015	61.436	6.138	67.574	189.512	35.65%

Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk Kota Banda Aceh Tengah dari tahun 2012 sampai tahun 2015 menunjukkan angka perkembangan yang menggembirakan, angka ketergantungan yang terjadi selama 5 tahun terakhir semakin mengecil sehingga pada tahun 2015 angka ketergantungan sebesar 35,65 persen artinya setiap 100 orang penduduk harus menanggung biaya hidup orang lain yang tidak produktif sebanyak 35,65 orang atau 36 orang.

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban tersebut mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur tentang dana perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dapat menjalankan fungsinya secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah dijabarkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya. Pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017 memberikan gambaran mengenai arah kebijakan keuangan dengan melihat potensi keuangan yang dimiliki dan kebutuhan terhadap pendanaan pembangunan. Dalam penjabarannya gambaran pengelolaan keuangan daerah akan dituangkan dalam APBD sebagai instrumen operasional pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. APBD merupakan komitmen politik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mendanai program pembangunan selama kurun waktu 5 tahun. Hubungan antara dokumen perencanaan strategi dengan anggaran, dapat dilihat dalam Gambar 3.1

Gambar 3.1
Kerangka Hubungan Antara Kebijakan Keuangan Daerah/APBD
dengan RKPD dan Visi, Misi, Strategi RPJMD

Arah kebijakan keuangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh mengandung makna bahwa:

1) Arah belanja APBD Kota Banda Aceh digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah, 5 tahunan.
2) Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai.

Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBD berbeda maka kebijakan keuangan daerah juga dirinci pada masing-masing komponen tersebut, meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Adapun, hubungan strategi dengan (arah kebijakan) komponen APBD dapat dilihat dalam Gambar 3.2.

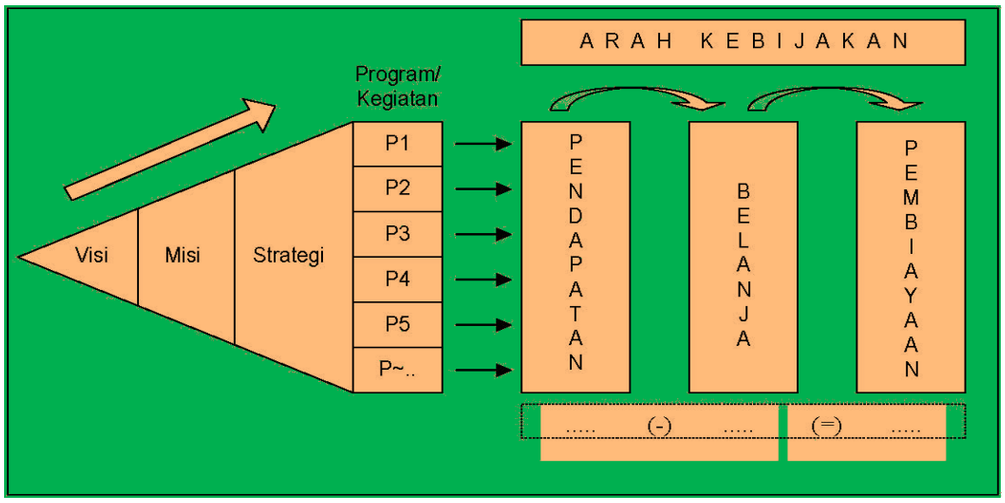

Gambar 3.2
Kerangka Hubungan Antara Strategi dan Komponen APBD

Gambar 3.2 menunjukkan hubungan antara proses perencanaan kegiatan dengan keuangan. Satuan terkecil dari perencanaan strategik adalah program dan kegiatan. Melalui analisis belanja, standar pelayanan dan standar harga atas komponen belanja tiap kegiatan, dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Kota Banda Aceh, pada prinsipnya agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan.

Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBD harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD selama ini harus diidentifikasi dengan baik.

Mengingat bahwa komponen anggaran menggunakan struktur surplus/defisit maka atas selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal suatu APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih maka atas surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012-2016 memberikan gambaran trend yang positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 11,96%. Kota Banda Aceh pada kurun waktu diatas

mengalami perubahan ekonomi yang besar dengan banyaknya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada masa Rehabilitasi-Rekonstruksi terutama infrastruktur. Hal ini berdampak pada pergerakan perekonomian dari sektor bangunan/konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Hal ini membawa dampak signifikan pada perkembangan ekonomi makro karena struktur pendukung ekonomi daerah Kota Banda Aceh yang berbasis pada sektor swasta.

Pendapatan daerah merupakan tolok ukur kemampuan keuangan daerah sebagai pijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu perencanaan pendapatan daerah merupakan proses yang paling krusial dalam penentuan besarnya alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program dan kegiatan. Sehingga setiap pengeluaran pembangunan akan mampu diimbangi dengan kemampuan keuangan daerah.

Perkiraan pendapatan daerah yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya akan sangat membantu proses perencanaan secara maksimal dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan.

Era otonomi daerah menuntut pemerintah daerah agar secara bertahap mampu melepaskan ketergantungannya kepada pemerintah pusat dengan cara memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah sebagai modal utama pembangunan daerah. Daerah yang tidak mampu mencapai nilai PAD-nya minimal 10 persen dari nilai APBD-nya akan sulit berkembang, bahkan diindikasikan akan mengalami kebangkrutan. Pada kenyataannya angka minimal tersebut sangat sulit diwujudkan karena minimnya potensi PAD masing-masing daerah. Untuk menutup semua kebutuhan belanja Pemerintah Kota harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya, semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup semua kebutuhan belanja.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sejak tahun 2012 sampai 2016 Pemerintah Kota Banda Aceh telah berhasil meningkatkan PAD-nya dari sebesar Rp. 99 miliar menjadi Rp. 258,6 miliar. Hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi Pemerintah Kota Banda Aceh yang dinilai telah mampu mengelola potensi PAD dengan baik walaupun potensi PAD tersebut belum dapat digali sepenuhnya. Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat memperbesar ruang fiskal daerah sehingga besaran dana daerah yang bisa digunakan secara bebas sesuai dengan kebutuhan daerah dalam satu tahun anggaran akan semakin besar, sehingga kebutuhan dasar masyarakat yang terkait dengan program prioritas akan dapat dipenuhi.

Selama ini sebagian besar pendapatan daerah dipergunakan untuk belanja tidak langsung (belanja aparatur pemerintah/gaji PNS), dan belanja langsung yang bertujuan untuk mendanai urusan publik. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Banda Aceh akan terus berusaha untuk meningkatkan PAD dengan menggali potensi-potensi yang ada melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PAD. Sehingga dengan adanya peningkatan PAD, maka akan semakin memperbesar ruang fiskal daerah yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan belanja publik.

Dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil dari penerimaan pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Pada Tahun 2012 realisasi dana perimbangan Pemerintah Kota Banda Aceh sebesar Rp. 560,4 miliar lebih dan pada tahun 2016 sebesar Rp.801,8 miliar lebih, mengalami kenaikan rata-rata sebesar 9.59 persen dalam kurun waktu lima tahun. Pada tahun 2016, sekitar 60 persen dari total realisasi penerimaan pendapatan daerah masih bersumber dari dana perimbangan. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh juga masih sangat tergantung kepada anggaran dari pemerintah pusat.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang sumber pendapatannya bersumber dari Pendapatan Hibah, Bagi Hasil Pajak Provinsi, Dana Penyesuaian Otonomi khusus dan Pendapatan Yang Sah Lainnya dari tahun 2012 sampai dengan 2016 menunjukkan trend terus meningkat secara signifikan. Pada tahun 2012 realisasi pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 128,1 miliar dan pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 143,7 miliar mengalami kenaikan rata-rata sebesar 6.31 persen.

Selama kurun waktu 2012 – 2016, target dan realisasi belanja APBK Banda Aceh menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016 realisasi belanja daerah meningkat dari tahun 2012 dengan pertumbuhan sebesar 11,96 persen. Selama kurun waktu lima tahun tersebut rata-rata proporsi belanja tidak langsung terhadap belanja daerah sebesar 56,16 persen dan proporsi belanja langsung terhadap belanja daerah rata-rata sebesar 43,84 persen. Anggaran belanja tidak langsung, dipergunakan untuk belanja pegawai, bunga, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan anggaran belanja langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing–masing SKPD sesuai dengan fungsi dan urusan Pemerintah Kota Banda Aceh yang harus dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya perkembangan realisasi Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012 (Rp.)	2013 (Rp.)	2014 (Rp.)	2015 (Rp.)	2016 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	**PENDAPATAN**	**787.575.101.978**	**928.240.738.967**	**1.021.282.887.230**	**1.100.456.132.976**	**1.204.120.337.772**	**11,26%**
1.1	Pendapatan Asli Daerah	99.022.803.954	129.170.160.562	171.777.275.448	209.914.107.301	258.591.409.670	27,21%
1.1.1	Pajak Daerah	38.662.932.308	46.726.398.187	51.801.124.535	55.812.362.254	68.332.671.869	15,47%
1.1.2	Retribusi Daerah	14.652.334.236	17.893.186.595	17.513.331.930	19.494.630.582	21.567.480.773	10,49%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	557.943.438	738.714.323	807.146.467	1.054.070.428	1.047.405.108	17,91%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33.726.359.101	49.354.778.394	86.919.972.924	115.814.569.009	148.044.256.918	15,27%
1.1.5	Zakat	11.423.234.871	14.457.083.063	14.735.699.592	17.738.475.028	19.599.595.002	14.84%
1.2	Dana Perimbangan	560.412.198.867	631.733.133.105	685.952.795.848	680.301.756.050	801.801.081.470	9,59%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	41.925.074.867	33.101.195.105	36.564.945.848	25.039.648.050	30.872.881.523	-4,70%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	491.593.554.000	567.628.828.000	610.554.730.000	612.503.568.000	602.292.108.000	5,42%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	26.893.570.000	31.003.110.000	38.833.120.000	42.758.540.000	168.636.091.947	16,88%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	128.140.099.157	167.337.445.300	163.552.815.934	210.240.269.625	143.727.846.632	6,31%
1.3.1	Hibah	0	2079458600	0	0	49.226.200.582	0,41%
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0,00%

1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	10.729.822.596	10.953.343.985	10.668.385.178	11.754.463.666	33.016.474.899	3,22%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	97.095.580.000	114.931.514.000	130.426.906.000	60.864.119.000	19,63%
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau pemerintah Daerah Lainnya	0	15.000.000.000	0	0	0	0,00%
1.3.6	Pendapatan Yang Sah Lainnya	117.410.276.561	42.209.062.715	37.952.916.756	68.058.899.959	621.052.151	-23,47%
2	**Belanja**	**765.405.648.843**	**905.808.995.719**	**1.096.156.567.907**	**1.189.391.758.858**	**1.331.611.774.489**	**11,96%**
2.1	Belanja Tidak Langsung	498.197.766.121	519.630.716.001	568.921.838.228	594.805.300.737	693.936.591.720	8,75%
2.1.1	Belanja Pegawai	468.821.383.471	496.674.962.520	542.071.853.187	550.905.924.064	564.033.037.058	4,77%
2.1.2	Belanja Bunga	1.009.699.894	2.851.953.580	3.470.451.583	3.406.718.237	3.460.965.297	7,15%
2.1.4	Belanja Hibah	12.045.454.968	6.558.514.141	8.796.347.701	4.135.908.390	27.793.273.935	-5,72%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.051.642.000	444.000.000	1.561.350.000	1.656.380.000	1.705.020.000	4,51%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	12.486.476.388	12.936.785.760	12.992.741.203	34.564.370.046	96.851.795.430	56,69%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	783.109.400	164.500.000	29.094.554	136.000.000	92.500.000	-27,74%
2.2	Belanja Langsung	267.207.882.722	386.178.279.718	527.234.729.679	594.586.458.121	637.675.182.769	20,21%
2.2.1	Belanja Pegawai	63.592.938.891	83.127.003.925	76.458.079.691	88.589.929.623	85.350.372.340	8,73%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	138.837.865.750	179.676.476.383	243.212.451.992	284.886.595.504	292.727.468.782	21,17%
2.2.3	Belanja Modal	64.777.078.081	123.374.799.410	207.564.197.996	221.109.932.994	259.597.341.647	18,43%
3	**Pembiayaan**	**24.386.329.168**	**40.555.782.303**	**62.987.795.452**	**100.935.470.499**	**183.348.341.138**	**52,70%**

3.1	Penerimaan Pembiayaan	21.386.329.168	40.555.782.303	62.987.795.452	100.935.470.499	131.322.140.556	29,13%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000	-	-	-	52.026.200.582	-25,00%

Sumber : BPKK Kota Banda Aceh 2017

Dari Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Banda Aceh selama kurun waktu tahun 2012 s/d 2016 mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 11,26 persen. Di tahun mendatang, Pemerintah Kota Banda Aceh akan terus lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang lebih khusus diupayakan pada sumber PAD, mengingat *controllability*-nya yang tinggi dibanding sumber-sumber pendapatan yang lain. Kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah antara lain :

a. Meningkatkan penyuluhan pajak/restribusi kepada masyarakat.
b. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak/wajib retribusi.
c. Meningkatkan penagihan dengan mendatangi ke lokasi Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
d. Menyusun Qanun baru dan merevisi Qanun pajak/retribusi yang tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini.
e. Mencari sumber-sumber penerimaan baru yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
f. Meningkatkan penegakan hukum (law enforcement) terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang tidak taat pajak.
g. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi PAD secara rutin dengan instansi terkait.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah disusun dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui rasio likuiditas, rasio solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana Pemerintah Daerah. Neraca daerah ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Rata-rata pertumbuhan neraca daerah Pemerintah Kota Banda Aceh selama kurun waktu 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Rata-rata Pertumbuhan Nerca Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016

URAIAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
ASET						
ASET LANCAR	**58.913.710.718,00**	**89.150.256.275,00**	**124.632.707.181,00**	**181.723.568.169,76**	**143.768.885.659,36**	29,01
Kas	40.623.338.058,00	63.646.132.824,00	100.976.778.198,00	129.110.140.556,23	69.389.088.565,60	24,23
Piutang	11.431.402.244,00	19.167.113.972,00	17.455.932.112,00	45.444.990.194,00	66.071.417.661,12	66,12
Persediaan	6.567.773.477,00	5.872.687.588,00	5.997.114.620,00	6.990.242.160,89	8.144.208.481,00	6,15
Belanja Dibayar Dimuka	291.196.939,00	464.321.891,00	202.882.251,00	178.195.258,64	164.170.951,64	(4,22)
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**58.184.449.096,00**	**54.973.640.471,00**	**58.287.354.698,00**	**56.913.272.791,33**	**97.086.484.240,70**	17,18
ASET TETAP	**3.347.700.786.956,00**	**4.337.019.852.624,00**	**3.702.281.169.602,00**	**3.835.536.437.980,77**	**3.509.538.380.658,81**	2,50
Tanah	1.980.694.577.048,00	2.011.004.874.558,00	2.011.633.392.740,00	2.069.305.229.578,00	1.891.833.055.619,00	(1,04)
Peralatan dan mesin	261.873.312.687,00	296.513.797.097,00	310.441.784.993,00	379.112.702.442,00	366.713.768.807,00	9,19
Gedung dan Bangunan	619.935.072.843,00	828.061.105.671,00	778.605.642.312,00	863.407.999.379,00	780.304.411.081,96	7,22
Jalan,irigasi, dan jaringan	406.623.951.863,00	1.125.660.170.641,00	1.268.562.101.550,00	1.321.876.512.450,00	1.405.133.277.269,08	50,01
Aset tetap lainnya	25.443.410.938,00	27.229.433.979,00	28.981.338.475,00	36.283.488.739,00	19.112.025.958,00	(2,17)
Konstruksi dalam pengerjaan	53.130.461.577,00	48.550.470.678,00	79.040.965.558,00	117.848.527.338,00	158.618.067.954,00	34,47
Akumulasi Penyusutan			(774.984.056.026,00)	(952.298.021.945,23)	(1.112.176.226.030,23)	(15,08)
ASET LAINNYA	**16.489.532.138,00**	**50.931.889.369,00**	**96.325.912.886,00**	**95.218.484.755,00**	**402.310.886.133,40**	154,84
Tagihan penjualan angsuran						-
Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah			89.500.000,00	89.500.000,00	89.500.000,00	25,00
Kemitraan dengan pihak kedua						-
Kemitraan dengan pihak ketiga			58.555.771.800,00	94.319.979.386,00	93.787.760.636,00	40,13
Aset tak berwujud			1.263.883.500,00	809.005.369,00	523.058.961,40	7,17

Aset lain-lain	16.489.532.138,00	50.931.889.369,00			307.910.566.536,00	52,22
Tagihan Kemitraan			35.916.157.586,00			-
Tagihan Sewa			500.600.000,00			-
JUMLAH ASET DAERAH	**3.481.288.478.908,00**	**4.532.075.638.739,00**	**3.981.527.144.367,00**	**4.169.391.763.696,86**	**4.152.704.636.692,27**	5,59
KEWAJIBAN	**26.264.196.899,00**	**43.360.038.646,00**	**47.428.993.753,00**	**66.233.632.780,01**	**96.400.809.446,01**	39,92
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**1.360.038.646,00**	**5.428.993.753,00**	**24.233.632.780,01**	**57.200.809.446,01**	220,40
Utang Perhitungan pihak ketiga			4.329.962.051,00	22.744.513.980,00	50.479.298.654,00	161,81
Utang muka dari kas Daerah		437.371.980,00	437.371.980,00	431.468.800,19	4.413.221.840,99	255,37
Pendapatan diterima dimuka		922.666.666,00	661.659.722,00	1.057.649.999,82	1.547.917.092,02	44,48
Dst……					760.371.859,00	25,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**26.264.196.899,00**	**42.000.000.000,00**	**42.000.000.000,00**	**42.000.000.000,00**	**39.200.000.000,00**	13,31
EKUITAS DANA						
Ekuitas			**3.934.098.150.555,00**	**4.103.158.130.916,85**	**4.060.303.827.246,26**	1,63
EKUITAS DANA LANCAR	**58.913.710.718,00**	**87.790.217.629,00**	**119.203.713.429,00**			42,40
SILPA	40.555.782.303,00	62.987.795.452,00	100.935.470.499,00			57,78
Cadangan piutang	11.431.402.244,00	19.167.113.972,00	17.455.932.112,00			29,37
Cadangan persediaan	6.567.773.477,00	5.872.687.588,00	5.997.114.620,00			(4,23)
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek		(1.360.038.646,00)	(5.428.993.753,00)			99,59
Pendapatan yang ditangguhkan	67.555.755,00	658.337.372,00	41.307.700,00			390,39
Cadangan Belanja Dibayar Dimuka	291.196.939,00	464.321.891,00	202.882.251,00			1,57
EKUITAS DANA INVESTASI	**3.396.110.571.291,00**	**4.400.925.382.464,00**	**3.814.894.437.126,00**			8,14
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	58.184.449.096,00	54.973.640.471,00	58.287.354.698,00			0,25
Diinvestasikan dalam asset tetap	3.347.700.786.956,00	4.337.019.852.624,00	3.702.281.169.542,00			7,46
Diinvestasikan dalam asset lainnya (tidak termasuk dana cadangan)	16.489.532.138,00	50.931.889.369,00	96.325.912.886,00			149,00

Dst……	(26.264.196.899,00)	(42.000.000.000,00)	(42.000.000.000,00)			29,96
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**3.481.288.478.908,00**	**4.532.075.638.739,00**	**3.981.527.144.308,00**	**4.169.391.763.696,86**	**4.156.704.636.692,27**	5,61

Sumber : BPKK Kota Banda Aceh 2017

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan pendapatan daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012-2016 diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan zakat. Dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk mendukung pembelanjaan daerah dalam rangka pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategik, berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah Kota Banda Aceh tahun anggaran 2012-2016 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu : dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan aparatur daerah maka kebijakan umum belanja daerah yang telah ditempuh adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung adalah untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan PNS di jajaran Pemko Banda Aceh melalui Peningkatan Tunjangan Prestasi Kerja, disamping gaji yang diterima setiap bulannya.
b. Peningkatan Belanja Langsung ditujukan pada peningkatan pelayanan publik, peningkatan SDM, peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kapasitas pemerintahan serta peningkatan pengamalan Syariat Islam.
c. Melakukan penghematan dan efisiensi yang tinggi dengan mengurangi jumlah kepanitiaan suatu kegiatan, menghemat belanja pengadaan barang/jasa, perjalanan dinas, belanja modal aparatur dan belanja–belanja lain yang kurang prioritas, dengan menghitung secara cermat biaya satuan dan volume yang dibutuhkan.
d. Anggaran belanja dialokasikan untuk melaksanakan urusan wajib dan pilihan, yang diprioritaskan pada program/kegiatan, dengan terlebih dahulu melihat dan mempertajam indikator kinerja yang terukur dan pencapaian program yang jelas.

Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Selama periode tahun 2012-2016, rata-rata proporsi belanja langsung terhadap jumlah belanja daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah adalah sebesar 43,84 persen. Belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan rata-rata belanja tidak langsung periode tahun 2012-2016 adalah 56,16 persen, yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Berikut penjelasan Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Banda Aceh pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Banda Aceh

No	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp.)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan pengeluaran) (Rp.)	Persentase
	1	2	3	4 = 2 / 3 x 100%
1	Tahun 2012	549.174.041.128	768.405.648.843	71,47%
2	Tahun 2013	616.744.305.772	905.808.995.719	68,09%
3	Tahun 2014	677.031.427.834	1.096.156.567.907	61,76%
4	Tahun 2015	726.496.532.537	1.189.391.758.858	61,08%
5	Tahun 2016	732.980.521.775	1.383.637.975.071	52,97%

Sumber : BPKK Kota Banda Aceh 2017

Dari Tabel 3.3 dapat kita lihat bahwa belanja aparatur selama kurun waktu lima tahun terjadi penurunan, hal ini disebabkan Pemerintah Kota Banda Aceh telah berhasil melaksanakan Moratorium Pegawai Negeri Sipil yang dimulai sejak Tahun 2009.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBK. Surplus APBK terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah. Sementara defisit APBK terjadi bila anggaran pendapatan diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja.

Dalam hal APBK diperkirakan surplus, maka diutamakan untuk membiayai pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah pemberian pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya, atau pendanaan jaminan sosial. Sementara dalam hal APBK diperkirakan defisit, maka pembiayaan diutamakan untuk menutup defisit yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan baik penerimaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Penetapan angka pembiayaan sangat mempengaruhi jumlah alokasi belanja yang dianggarkan dalam APBK, sehingga dari penerimaan SiLPA dapat digunakan atau dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran berjalan. Namun karena anggaran pendapatan Kota Banda Aceh dalam setiap tahunnya selalu defisit, maka kita tidak pernah dapat menyisihkan dana untuk saving (transfer ke dana cadangan), sehingga sumber dana yang dapat diperoleh dari pembiayaan hanya bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya. Kondisi pembiayaan daerah dalam kurun waktu Tahun 2012-2016 dapat digambarkan seperti terlihat pada Tabel 3.4 sedangkan untuk menutupi defisit riil anggaran pada kurun waktu yang sama dapat digambarkan komposisinya pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Defisit Riil Anggaran Kota Banda Aceh

No	Uraian	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	787.575.101.978	928.240.738.967	1.134.104.242.953	1.217.566.428.916	1.321.704.923.081
2	Belanja Daerah	765.405.648.843	905.808.995.719	1.096.156.567.907	1.189.391.758.858	1.331.611.774.489
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.000.000.000	0	0	0	52.026.200.582
	Defisit Riil	**19.169.453.135**	**22.431.743.248**	**37.947.675.046**	**28.174.670.058**	**-61.933.051.990**

Sumber :BPKK Kota Banda Aceh 2017

Tabel 3.5
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Banda Aceh

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	2,79%	4,48%	5,75%	8,49%	9,70%
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
5	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0

Sumber : BPKK Kota Banda Aceh 2017

Untuk realisasi sisa lebih perhitungan anggaran pemerintah daerah, dengan kurun waktu yang sama pada tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Banda Aceh

No	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016		Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	
	Jumlah SILPA	21.386.329.168	100,00%	40.555.782.303	100,00%	62.987.795.452	100,00%	100.935.470.499	100,00%	129.110.140.556	100,00%	58,28%
1	Pelampauan Penerimaan PAD	7.833.236.154	36,63%	21.344.353.305	52,63%	15.803.241.525	25,09%	13.413.111.030	13,29%	24.686.520.556	19,12%	53,86%
2	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	724.674.867	3,39%	-6.099.204.895	-15,04%	-2.662.454.152	-4,23%	-12.658.917.950	-12,54%	-71.113.274.530	-55,08%	-40,19%
3	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-32.331.193.640	-151,18%	-35.924.312.658	-88,58%	-14.057.487.290	-22,32%	-12.819.193.226	-12,70%	-10.234.367.180	-7,93%	-19,68%
4	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	22.169.453.134	103,66%	22.431.743.148	55,31%	37.920.675.047	60,20%	28.174.670.057	27,91%	-9.906.851.409	-7,67%	-22,66%
5	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai Akhir Tahun belum terselesaikan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
6	Kegiatan Lanjutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Sumber : BPKK Kota Banda Aceh 2017

Merujuk pada ketentuan Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, belum terselesaikannya kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

3.3 Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan pengeluaran keuangan yang harus dilakukan pemerintah daerah, baik terkait dengan pembelanjaan pada katagori kewajiban maupun pengeluaraan pembiayaan. Pengeluaran keuangan pemerintah daerah sepenuhnya mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan daerah. Kinerja keuangan masa lalu sebagaimana tersebut diatas, pada analisis pendapatan dan belanja daerah masih terdapat dana Otonomi Khusus (Otsus) yang masih dikelola oleh Kabupaten/Kota sepanjang tahun anggaran 2012 s.d 2017 yang mekanismenya melalui transfer dana Bantuan Keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Aceh ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengelolaan dana Otsus pada tahun anggaran 2018 akan dikelola kembali oleh Pemerintah Provinsi Aceh sehingga akan mempengaruhi proyeksi pertumbuhan rata-rata pendapatan dan belanja daerah serta kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh untuk 5 tahun kedepan.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2022, direncanakan berdasarkan realisasi pertumbuhan pendapatan 5 tahun yang lalu dan potensi-potensi untuk tahun yang akan datang. Selain itu Pemerintah Kota Banda Aceh akan terus melakukan upaya-upaya untuk peningkatan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka peningkatan pendapatan daerah adalah antara lain :

a. Meningkatkan penyuluhan pajak/restribusi kepada masyarakat.
b. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak/wajib retribusi.
c. Meningkatkan penagihan dengan mendatangi ke lokasi Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
d. Merevisi Qanun pajak/retribusi yang tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini.
e. Mencari sumber-sumber penerimaan baru yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
f. Meningkatkan penegakan hukum (law enforcement) terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang lalai.
g. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi PAD secara rutin.

Proyeksi Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2022, direncanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan aparatur daerah maka kebijakan umum belanja daerah untuk tahun yang akan datang adalah:

a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung :
   Mengupayakan peningkatan kesejahteraan PNS di jajaran Pemko Banda Aceh melalui Peningkatan Tunjangan Tambahan Penghasilan, disamping gaji yang diterima setiap bulannya.
b. Kebijakan Belanja Langsung :
   - Mengupayakan peningkatan pelayanan publik, peningkatan SDM, peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kapasitas pemerintahan serta peningkatan pengamalan Syariat Islam.
   - Melakukan penghematan dan efisiensi yang tinggi dengan mengurangi jumlah kepanitiaan suatu kegiatan, menghemat belanja pengadaan barang/jasa, perjalanan dinas, belanja modal aparatur dan belanja–belanja lain yang kurang prioritas, dengan menghitung secara cermat biaya satuan dan volume yang dibutuhkan.

- Anggaran belanja dialokasikan untuk melaksanakan urusan wajib dan atan, dengan terlebih dahulu melihat dan mempertajam indikator kinerja yang terukur dan pencapaian program yang jelas.

Proyeksi Pembiyaan Kota Banda Aceh Aceh Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2022, diupayakan untuk menutupi defisit anggaran melalui alokasi belanja berdasarkan skala prioritas dan estimasi jumlah pendapatan daerah yang akurat. Jika tidak dapat diusahakan surplus, hendaknya tidak menimbulkan besarnya defisit anggaran akibat alokasi belanja yang tidak efisien.

Selanjutnya Dalam bagian ini akan diuraikan mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data sesuai dengan Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7

Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 s/d 2022 Kota Banda Aceh

No	Uraian	Pertumbuhan (%)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)
1	**PENDAPATAN**	**11,26%**	**1.210.549.597.835**	**1.357.348.165.016**	**1.522.293.982.854**	**1.707.679.428.100**	**1.916.093.279.766**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**27,21%**	**294.413.666.761**	**338.055.328.103**	**388.228.772.505**	**445.918.475.065**	**512.258.043.420**
1.1.1	Pajak Daerah	15,47%	70.409.835.927	81.304.475.320	93.884.861.681	108.411.833.644	125.186.589.868
1.1.2	Retribusi Daerah	10,49%	29.331.430.000	32.406.936.803	35.804.921.647	39.559.197.525	43.707.122.843
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17,91%	1.100.000.000	1.296.963.396	1.529.194.592	1.803.008.556	2.125.851.000
1.1.4	Zakat	14,84%	18.604.500.000	21.365.190.216	24.535.534.574	28.176.320.957	32.357.357.459
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15,27%	174.967.900.834	201.681.762.368	232.474.260.010	267.968.114.384	308.881.122.250
1.2	**Dana Perimbangan**	**11,26%**	**771.483.628.000**	**858.352.684.513**	**955.003.196.789**	**1.062.536.556.747**	**1.182.178.173.037**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	11,26%	49.810.056.000	55.418.668.306	61.658.810.357	68.601.592.403	76.326.131.708
1.2.2	Dana Alokasi Umum	11,26%	591.711.772.000	658.338.517.527	732.467.434.601	814.943.267.737	906.705.879.684
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	11,26%	129.961.800.000	144.595.498.680	160.876.951.831	178.991.696.608	199.146.161.646
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**11,26%**	**144.652.303.074**	**160.940.152.400**	**179.062.013.560**	**199.224.396.287**	**221.657.063.309**
1.3.1	Hibah	11,26%	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	11,26%	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	11,26%	29.192.637.074	32.479.728.009	36.136.945.382	40.205.965.432	44.733.157.140
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	11,26%	99.964.666.000	111.220.687.392	123.744.136.792	137.677.726.595	153.180.238.609
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau pemerintah Daerah Lainnya	11,26%	-	-	-	-	-

1.3.6	Pendapatan Yang Sah Lainnya	11,26%	15.495.000.000	17.239.737.000	19.180.931.386	21.340.704.260	23.743.667.560
2	**Belanja**	**11,96%**	**1.213.749.597.835**	**1.360.548.165.016**	**1.525.493.982.854**	**1.710.879.428.100**	**1.919.293.279.766**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**11,96%**	**619.335.677.156**	**695.774.581.029**	**778.989.220.920**	**872.156.331.742**	**976.466.229.018**
2.1.1	Belanja Pegawai	11,96%	466.062.996.703	525.833.093.994	588.722.732.035	659.133.970.787	737.966.393.693
2.1.2	Belanja Bunga	11,96%	3.400.000.000	3.806.640.000	4.261.914.144	4.771.639.076	5.342.327.109
2.1.4	Belanja Hibah	11,96%	10.440.000.000	9.858.078.000	11.037.104.129	12.357.141.783	13.835.055.940
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11,96%	2.618.000.000	3.099.052.800	3.469.699.515	3.884.675.577	4.349.282.776
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	11,96%	131.814.680.453	147.579.716.235	165.230.250.297	184.991.788.232	207.116.806.105
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	11,96%	5.000.000.000	5.598.000.000	6.267.520.800	7.017.116.288	7.856.363.396
2.2	**Belanja Langsung**	**11,96%**	**594.413.920.679**	**664.773.583.987**	**746.504.761.934**	**838.723.096.358**	**942.827.050.748**
2.2.1	Belanja Pegawai	11,96%	98.721.144.825	109.664.290.569	122.780.139.721	137.464.644.432	153.905.415.906
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,96%	412.378.345.285	463.535.546.551	521.198.655.221	586.470.379.282	660.404.908.709
2.2.3	Belanja Modal	11,96%	83.314.430.569	91.573.746.867	102.525.966.992	114.788.072.644	128.516.726.133
	Surplus / (Defisit)		**(3.200.000.000)**	**(3.200.000.000)**	**(3.200.000.000)**	**(3.200.000.000)**	**(3.200.000.000)**
3	**Pembiayaan**	**0,00%**	**3.200.000.000**	**3.200.000.000**	**3.200.000.000**	**3.200.000.000**	**3.200.000.000**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00%	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00%	11.800.000.000	11.800.000.000	11.800.000.000	11.800.000.000	11.800.000.000
	Pembiayaan Netto		**(0)**	**0**	**0**	**(0)**	**0**

Sumber : BPKK Kota Banda Aceh

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Setelah menggambarkan proyeksi APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 sebagai kerangka keuangan Kota Banda Aceh untuk masa yang akan datang, selanjutnya akan digambarkan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah selama lima tahun mendatang.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian diatas dan pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasikas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiyaan yang wajib dan mengikat serta merupakan prioritas utama.

Sebelum dialokasikan berbagai pos belanja dan pengeluaran besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan antara lain :

a. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan pelayanan dimana retribusi tersebut dipungut.
b. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk menghasilkan tingkat pengembalian investasi.
c. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintah daerah.
d. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
e. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Selanjutnya untuk menentukan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh

No	Uraian	Data Tahun Dasar 2017	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
1	Pendapatan	1.247.693.437.876	11,26%	1.210.549.597.835	1.357.348.165.016	1.522.293.982.854	1.707.679.428.100	1.916.093.279.766
2	Pencairan Dana Cadangan	0		-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	0		15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
	Total Penerimaan	1.247.693.437.876	11,26%	1.225.549.597.835	1.372.348.165.016	1.537.293.982.854	1.722.679.428.100	1.931.093.279.766
	Dikurangi :							
4	Pengeluaran Pembiayaan	14.300.000.000		11.800.000.000	11.800.000.000	11.800.000.000	11.800.000.000	11.800.000.000
	Kapasitas Riil kemampuan Keuangan	**1.233.393.437.876**		**1.213.749.597.835**	**1.360.548.165.016**	**1.525.493.982.854**	**1.710.879.428.100**	**1.919.293.279.766**

Sumber : BPKK Kota Banda Aceh 2017

Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai :

a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti : belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, dan belanja tidak terduga.
b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (dedicate) kepala daerah seperti meningkatkan pelaksanaan syariat islam dalam bidang aqidah, syariah, dan akhlak, meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dan meningkatkan dan memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
c. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan.

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pendanaan alokasi kapasitas riil keuangan Daerah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9

Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Banda Aceh

No	Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019		Proyeksi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
	Kapasitas rill kemampuan keuangan	**100,00%**	**1.213.749.597.835**	**100,00%**	**1.360.548.165.016**	**100,00%**	**1.525.493.982.854**	**100,00%**	**1.710.879.428.100**	**100,00%**	**1.919.293.279.766**
1	Prioritas I	51.03%	619.335.677.156	51.14%	695.774.581.029	51.06%	778.989.220.920	50.98%	872.156.331.742	50.88%	976.466.229.018
2	Prioritas II	37.68 %	457,344,510,760	37.05 %	504,068,335,971	38.03 %	580,174,104,494	38.28 %	654,867,404,861	38.90 %	746,658,348,382
3	Prioritas III	11.29 %	137,069,409,919	11.81 %	160,705,248,016	10.90 %	166,330,657,440	10.75 %	183,855,691,497	10.22 %	196,168,702,366

Sumber : BPKK Kota Banda Aceh 2017

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan. Namun demikian, masih ada permasalahan baik eksternal maupun internal yang dihadapi Kota Banda Aceh. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Banda Aceh meliputi infrastruktur wilayah, daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional, dan daya saing ekonomi daerah.

Permasalahan pembangunan daerah ini merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan. Permasalahan timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Pada bagian ini akan disampaikan berbagai permasalahan yang berguna untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terkait lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan stakeholder lainnya.

Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Pengidentifikasian yang demikian bertujuan untuk memudahkan pemetaan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya berguna untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah

Dengan tujuan-tujuan sebagaimana disebutkan di atas maka dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi permasalahan dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Adapun kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat antara lain: (1) Cakupan masalah yang terjadi di beberapa wilayah; (2) Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang akan datang dan akan berdampak negatif; dan (3 Permasalahan itu memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergisitas berbagai pihak.

Dalam dokumen RPJPD Kota Banda Aceh 2007-2027 telah diamanatkan target capaian pembangunan daerah Kota Banda Aceh setiap 5 (lima) tahun selama 4 (empat) priode RPJMD. Dalam dokumen RPJPD secara teknis telah menetapkan indikator berikut target yang harus dipenuhi pada setiap periode/tahapan. Dengan adanya indikator dan target yang ditetapkan tersebut, maka menjadi sangat penting untuk mengetahui kondisi capaian sebagai data dasar bagi perencanaan menengah tahun 2017-2022.

4.1.1 Penegakan Syariat Islam

Syiar dan dakwah merupakan sebuah upaya yang harus ada dalam penegakkan Syariat Islam. Penegakan Syariat Islam tidak akan dapat terwujud tanpa adanya usaha dan gerakan dakwah. Dakwah yang di bangun secara holistik harus melibatkan semua unsur terkait dan dakwah dimaksud tidak hanya terbatas pada kegiatan keagamaan di masjid/ meunasah saja akan tetapi di semua aspek kehidupan masyarakat.

Gerakan dakwah yang saat ini sedang banyak dilakukan di Kota Banda Aceh juga harus mempunyai sinergisitas dan regulasi yang dapat mendukung tercapainya pelaksanaan dakwah Islamiyah ke

tengah-tengah masyarakat. Tujuan dari gerakan ini adalah agar terwujud peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Syariat Islam.

Semestinya Syariat Islam dikuatkan oleh lembaga keagamaan yang mendukung syiar dan dakwah, namun kontribusi lembaga seperti masjid dan meunasah (surau) dalam pembinaan masyarakat dianggap belum maksimal. Selama ini, lembaga keagamaan ini belum memiliki manajemen yang memadai sehingga belum dirasakan kenyamanan dan ketenteraman bagi masyarakat.

Dalam aspek pelaksanaan ibadah praktis, penerapan Syariat Islam dihadapkan pada hal-hal yang mengganggu ketenteraman. Asas Ahlussunnah Wal Jama'ah yang menjadi konsensus selama ini sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 2 Qanun no. 8 tahun 2014 telah menyebabkan terjadinya gesekan yang tidak diharapkan. Di samping itu, tidak memadainya sarana prasarana ibadah di perkantoran, sekolah, pasar, dan sarana publik lainnya menjadi faktor yang mengganggu kenyamanan dalam melaksanakan ibadah.

Kesuksesan pelaksanaan Syariat Islam diukur dengan berkurangnya pelanggaran. Sementara pelanggaran Syariat Islam di Banda Aceh cenderung meningkat. Pelanggaran ini terjadi dalam berbagai bentuk atau kasus seperti mesum, khalwat, judi dan lain-lain. Ini menandakan bahwa penanganan secara preventif dan kuratif belum optimal. Penanganan secara preventif yang dimaksud di sini adalah dalam bentuk kegiatan yang menguatkan pemahaman dan sosialisasi pelaksanaan Syariat Islam, sedangkan penanganan secara kuratif dilakukan dengan pelaksanaan hukum jinayat secara baik dan intens.

Aceh memiliki tiga keistimewaan yaitu keagamaan, adat istiadat dan pendidikan. Dayah sebagai basis pendidikan Islami dan sudah mengakar sejak masa penjajahan Belanda semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Namun seiring perjalanan waktu, modernisasi sarana dan prasana dayah terasa belum optimal untuk mendukung daya saing dalam kancah pendidikan global. Pembinaan sistem dan kurikulum belum dibenahi secara optimal. Saat ini, Pemerintah memang telah membantu fasilitas IT (komputer, fasilitas jaringan internet, dan lain-lain), tetapi kurikulum belum sepenuhnya terintegrasi dengan kurikulum formal. Hal ini antara lain disebabkan belum adanya sistem akreditasi penilaian yang memadai terhadap dayah–dayah tersebut. Namun keistimewaan tersebut untuk menjalankan Syariat Islam di Kota Banda Aceh belum dapat dilaksanakan secara optimal karena tidak semua memiliki peraturan pelaksanaannya.

Dasar hukum penerapan Syariat Islam di Kota Banda Aceh sudah sah secara legal, formal, sehingga masyarakat memiliki peluang dan kesempatan yang luas dalam melaksanakan Hukum Syariah di Kota Banda Aceh.

Namun hingga saat ini masih dirasakan Kurangnya kaderisasi Imam Hafizh 30 Juz, Belum adanya standarisasi tentang kebersihan dan kesucian sarana dan prasarana ibadah serta belum maksimalnya manajemen pembinaan LPTQ secara berjenjang dan berkelanjutan serta beberapa hal lainnya seperti:

1. Kurangnya pemahaman pendidikan berbasis Islami
2. Belum optimalnya lembaga keistimewaan dalam pelaksanaan Syariat Islam.

Dalam aspek ekonomi, banyak praktek rentenir dan riba yang jelas berlawanan dengan prinsip syariah sebagaimana diamanahkan dalam Qanun Pasal 21 Qanun 8 Tahun 2014. Kondisi simpan pinjam dan perkreditan masih banyak menggunakan sistem bunga ribawi. Demikian pula potensi harta agama di Banda Aceh sangat besar. Banyak tanah Wakaf yang ada belum dikelola dengan manajemen yang baik dan produktif sehingga tidak dirasakan bernilai guna bagi kemaslahatan umat.

Potensi lain yang dapat membangkitkan ekonomi umat adalah zakat. Saat ini manajemen pengumpulan zakat belum maksimal. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat membayar zakat melalui Baitul Mal, rendahnya pengawasan dalam penyaluran zakat, dan belum optimalnya sosialisasi terhadap pemanfaatan dana yang terkumpul melalui zakat adalah bagian dari permasalahan yang harus diselesaikan. Saat ini zakat yang terkumpul didominasi dari bidang tertentu seperti zakat profesi dan perdagangan, padahal ada potensi lain yang lebih besar seperti penyimpanan (deposito) dan zakat investasi.

Beberapa tahun belakangan ini, penduduk Kota Banda Aceh diresahkan dengan muncul fenomena sosial di antaranya masalah komunitas punk dan LGBT (Lesbian, Gay, Biseks dan Transjender) dan wanita tuna susila. Permasalahan ini terus menggejala di Banda Aceh, hal ini merupakan pertanda adanya permasalahan penegakan peraturan terhadap kasus-kasus yang meresahkan tersebut.

4.1.2 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Gampong

Penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat gampong merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia di masing-masing gampong. Saat ini kualitas sumberdaya manusia yang menjalankan pemerintahan gampong masih relatif rendah dan membutuhkan penguatan, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan gampong. Penguatan terhadap sumberdaya manusia gampong diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Seiring dengan perubahan sistem pengelolaan gampong dari sistem kekeluargaan dan tradisional menjadi sistem demokrasi, partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga mengalami perubahan. Pendekatan pembangunan gampong dengan konsep gotong royong perlahan berubah menjadi individualis dan strukturalis mengikuti aturan hukum formal dalam pemerintahan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk kembali mendorong dan menjadi contoh bagi gampong dalam menumbuhkan kembali semangat gotong royong dalam pembangunan gampong.

Pendekatan partisipatif dapat diterapkan dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaran fungsi-fungsi pemerintahan gampong. Musyawarah gampong menjadi landasan dalam perumusan setiap kebijakan pembangunan gampong, ternasuk dalam pengelolaan keuangan dan manajemen aset gampong, penyusunan profil gampong, pembuatan produk hukum gampong, dan pelaksanaan administrasi pemerintahan gampong.

Pelibatan masyarakat termasuk perempuan dalam seluruh kegiatan gampong diharapkan mampu memetakan kebutuhan masyarakat dengan tepat dan mampu menghasilkan solusi yang terbaik terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga pemberdayaan gampong dan Tuha Peut menjadi pelopor untuk pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelembagaan-kelembagaan yang dibutuhkan oleh masyarakat gampong.

Pemanfaatan aset gampong sebagai sumber ekonomi diharapkan akan memberikan manfaat yang besar dimana manfaat yang didapat masyarakat dapat diukur dengan satuan yang jelas. Aset gampong harus dikelola dengan baik. Pengelolaan aset merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik gampong.

Pemerintah Kota Banda Aceh seharusnya melakukan berbagai pendekatan baik secara langsung maupun tidak langsung agar setiap gampong mampu mengelola aset dengan baik dan memberi nilai tambah optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pemanfaatan aset gampong

adalah pembentukan badan usaha milik gampong (BUMG). Oleh karena itu, Kota Banda Aceh perlu menata kembali pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap BUMG ini.

4.1.3 Ekonomi dan Kesejahteraan

Permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Banda Aceh dapat diklasifikasi dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu: pertama, pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pendistribusian manfaat pertumbuhan ekonomi yang belum merata; kedua, pembangunan ekonomi yang berlandaskan syariat Islam, dan; ketiga, penuntasan masalah pembangunan ekonomi, seperti keterbatasan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar, kemiskinan, pengangguran, serta ketersediaan lapangan kerja

Hal yang dihadapi saat ini adalah rendahnya investasi, tingginya angka pengangguran, pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang masih belum sepenuhnya mengangkat perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sebanding dengan potensi yang ada.

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut diatas adalah dengan cara melaksanakan pendampingan kepada masyarakat khususnya petani, peternak dan pelaku usaha perikanan untuk memanfaatkan potensi yang ada seperti pemanfaatan lahan pekarangan dan pengembangan wilayah pesisir dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Seiring perkembangan zaman para pelaku usaha mikro saat ini semakin termajinalkan oleh kehadiran pasar moderen dan para pengusaha *executive* yang mapan yang mengembangkan usaha di kota Banda Aceh. Kurangnya akses pemberian modal usaha yang cepat dan mudah serta *margin*/bunga yang tinggi juga membuat para pelaku usaha ekonomi mikro sulit berkembang dan semakin terpuruk.

Pembangunan ekonomi syariah belum berjalan dengan baik karena masih bersandar pada sumber pembiayaan perbankan konvensional. Pada sisi lain, jangkauan layanan perbankan syariah relatif terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah masih memiliki modal yang relatif kecil, sehingga daya saing kedua lembaga tersebut relatif lemah terhadap perbankan konvensional. Hal ini semakin mempersempit dan menjadi faktor penghambat dalam pengembangan ekonomi berbasis syariat Islam.

Selain itu rendahnya pendekatan pembangunan ekonomi yang dimulai dari gampong juga sangat berpengaruh kepada peningkatan ekonomi masyarakat, lemahnya pendampingan dalam pengelolaan dana gampong, sehingga pengelolaan keuangan belum bisa digunakan secara profesional dan tepat sasaran. Sehingga perlu dilakukan suatu pendekatan yang sesuai dengan program pembangunan ekonomi gampong.

Rendahnya rasa tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman yang bisa menyebabkan kredit macetnya dana untuk pengembangan program pengembanan ekonomi kerakyatan.

Kurangnya pengetahuan kewirausahawan dan kurangnya kreatifitas, kemampuan teknologi, inovasi, sistem produksi dan penguatan sentra industri yang kurang mendukung untuk tumbuh kembangnya pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan.

Masih terbatasnya pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi juga merupakan permasalahan disamping rendahnya sumberdaya pengelola koperasi/UKM serta kurangnya penerapan tekhnologi modern yang diserta dengan kurangnya jiwa kewirausahaan dari warga kota.

Dalam rangka penataan pasar dan toko/ swalayan serta penertiban pedagang kaki lima, pemerintah Kota Banda Aceh akan menerbitkan Peraturan Walikota untuk mengatur keberadaan

pasar, toko/ swalayan serta PKL yang ada di kota Banda Aceh. Selain itu juga pemerintah akan terus berupaya memfungsikan pasar yang belum optimal diantaranya dengan melengkapi sarana dan prasarana pasar untuk menunjang operasional pasar yang juga dapat meningkatkan akses bagi UMKM

4.1.4 Kesehatan

Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga masyarakat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan akan sangat mendukung peningkatan mutu dan daya saing sumberdaya manusia masyarakat Kota Banda Aceh dan akan menjadi investasi sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akses informasi dan mutu pelayanan kesehatan saat ini belum dibarengi dengan Sistem Informasi Managemen Rumah Sakit (SIMRS) yang maksimal. Dalam hal menajemen pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Banda Aceh, beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu manajemen data informasi kesehatan yang akurat, administrasi kesehatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan pembangunan kesehatan, pengembangan dan penyesuaian sumberdaya manusia kesehatan untuk memenuhi kebutuhan serta penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan kesehatan yang *paper less.*

Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular, penyakit *local spesifik* seperti masih adanya kasus *Demam Berdarah Dengue* (DBD) dan *Tuberculosis* (TB) di masyarakat. Hal ini diakibatkan pola hidup sehat dalam keseharian masyarakat masih sangat rendah, seperti kebiasaan cuci tangan yang masih rendah, juga masih tingginya jumlah keluarga yang anggota keluarganya mengkonsumsi rokok.

Penanganan pada limbah dan sampah keluarga serta industri juga masih sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Saluran dan drainase yang masih sering tersumbat dan tergenang di musim hujan juga menjadi masalah tersendiri yang bisa membawa penyakit. Hal ini secara umum dapat disimpulkan bahwa PHBS dan sanitasi dilingkungan kota Banda Aceh belum cukup baik. Oleh karena itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan posyandu dan rumah tangga sehat yang harus terus ditingkatkan.

Untuk kasus HIV terjadi karena masih adanya perilaku masyarakat yang menyimpang. Untuk tenaga medis pada fasilitas kesehatan tingkat pertama masih dirasa kurang, terutama untuk tenaga medis tertentu seperti, apoteker dan asisten apoteker.

Secara umum pembangunan kesehatan di kota Banda Aceh telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, namun demikian masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu penyelesaian dan mendapat perhatian semua pemangku kepentingan antara lain: masih adanya angka kematian ibu dan anak, serta pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan. Masih adanya kasus kematian pada bayi serta tingginya prevalensi gizi kurang pada balita masih menjadi masalah. Kondisi status gizi buruk dan anak stunting di Banda Aceh dalam 3 tahun terakhir bersifat *fluktuatif*, hal ini berkorelasi dengan kondisi iklim, tingkat daya beli masyarakat dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan konsumsi gizi seimbang. Selain itu, pola asuh anak yang kurang baik dan kondisi kemiskinan telah membuat kemampuan kognitif anak tidak berkembang secara maksimal, mudah sakit dan berdaya saing rendah. Upaya gizi buruk dan stunting ini harus bisa di intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan.

Demikian juga terkait regulasi yang berlaku, banyak petunjuk teknis penggunaan dana untuk kesehatan yang dibatasi oleh aturan dari pusat, sehingga dana besar dari pusat namun pemanfaatannya menjadi terbatas di daerah akibat Juknis yang terlalu mengikat.

Anggaran kesehatan harus mampu digeser dari pengutamaan pembiayaan pada sektor kuratif dan rehabilitatif kepada pemihakan anggaran sektor promotif dan preventif. Semangat pergeseran paradigma pembiayaan ini membutuhkan pemihakan kebijakan dan kesadaran dari semua stakeholder kesehatan di Kota Banda Aceh. Kemampuan pemerintah yang masih terbatas dalam pembiayaan kesehatan masyarakat memerlukan inovasi dan kreatifitas pemerintah untuk mampu melibatkan sektor swasta bersedia membiayai kesehatan masyarakat.

Kondisi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap gangguan kesehatan dan terpapar penyakit. Masyarakat miskin masih memiliki jarak dan akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan meski sudah digratiskan oleh pemerintah. Usaha menuju kondisi yang baik untuk kesehatan keluarga miskin saat ini terus diupayakan dengan berbagai upaya, antara lain perbaikan lingkungan melalui pembangunan sarana dasar.

Terkait dengan penyediaan infrastruktur pada fasilitas kesehatan tingkat pertama masih sangat terbatas, hal ini dikarenakan masih terbatasnya lahan yang tersedia dalam rangka perluasan dan peningkatan status sarana dan pelayanan kesehatan sehingga sarana dan prasaranapun masih kurang, seperti ruang inap pasien dan lain lain. Dalam hal ini sangat diperlukan keterlibatan pihak swasta untuk ikut serta berkonstribusi terhadap bidang Kesehatan di kota ini.

Demikian juga dengan pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) yang sampai saat ini masih terjadi dan harus terus dikendalikan adalah pencemaran air (air tanah dan air permukaan), limbah industri dan limbah keluarga serta pencemaran udara dan kebisingan. Untuk itu diperlukan usaha pencegahan berupa penerapan kajian terhadap dampak lingkungan pada tahap perencanaan pembangunan.

4.1.5 Pendidikan

Seiring dengan masuknya priode kepemimpinan Walikota baru 2017 – 2022, peningkatan kualitas pendidikan diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia yang berkarakter Islami pada jenjang Pendidikan Dasar PAUD/TK dan SD, serta daya saing lulusan pada jenjang Pendidikan SMP. Saat ini ada beberapa masalah di sektor pendidikan yang harus menjadi perhatian di masa mendatang seperti masih lemahnya kompetensi guru, meliputi bidang pedagogik, penguasaan materi, dan penguasaan metodologi Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan (PAIKEM).

Selain itu masih ada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang belum terpenuhi, terutama Standar Proses, Standar Pengelolaan, dan Standar Penilaian. Penyebabnya antara lain karena lemahnya sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan serta tidak optimalnya penggunaan sumber belajar yang tersedia di laboratorium IPA dan laboratorium bahasa. Standar lain yang belum terpenuhi adaah “Standar Pengelolaan” yang masih mengacu pada keberadaan sekolah-sekolah unggul dan favorit yang didominasi oleh peserta didik pilihan dengan nilai tertinggi yang umumnya berasal dari keluarga mampu dengan fasilitas penunjang pembelajaran yang sangat memadai yang berakibat kepada pengabaian eksistensi sekolah reguler yang berada di pinggiran kota yang didominasi oleh peserta didik berkemampuan ekonomi rendah. Terkait dengan “Standar Penilaian” didapati guru-guru di sekolah-sekolah pinggiran yang memberi nilai kapada murid yang tidak sepenuhnya berdasarkan format standar penilaian melainkan lebih karena faktor personal.

Sebagai dampak moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil, kini guru PNS pada jenjang pendidikan SD/SMP sangat terbatas jumlahnya. Data dari Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh menunjukkan total kekurangan guru PNS sebanyak 230 orang (SD 168 orang yang terdiri dari

guru kelas sebanyak 129 orang, guru PJOK sebanyak 37 orang dan guru PAI sebanyak 2 orang; SMP sebanyak 62 orang yang terdiri dari guru mata pelajaran Penjaskes sebanyak 12 orang, guru mata pelajaran seni buda sebanyak 10 orang, guru Bimbingan Konseling (BK) sebanyak 29 orang, dan guru mata pelajaran prakarya sebanyak 11 orang. Selama ini banyak sekolah mengandalkan pada tenaga guru honorer.

Selain itu belum efektifnya implementasi penerapan kurikulum 2013, padahal Kota Banda Aceh termasuk daerah yang sejak awal menyatakan komitmen memberlakukan K-13 namun masih ada guru yang menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006. Para guru masih menggunakan metode konvensional dan tidak inovatif kreatif serta menyenangkan meskipun 90% guru Kota Banda Aceh sudah mengikuti pelatihan K-13.

4.1.6 Pariwisata

Kota Banda Aceh merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Beberapa *landmark* wisata yang ada di kota Banda Aceh seperti, Mesjid Raya Baiturrahman, Museum tsunami, lokasi pemakaman massal korban tsunami, PLTD apung, boat diatas rumah, pantai cermin Ulee Lheu, Pintoe Khop, dan lokasi lainnya menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Namun saat ini ada beberapa hal yang menjadi permasalahan kepariwisataan seperti: belum adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pariwisata Kota Banda Aceh, konstribusi pariwisata dalam PAD Kota Banda Aceh yang belum terukur padahal terus terjadi peningkatan. Selain itu masih kurangya promosi dan pemasaran kepariwisataan, rendahnya kualitas infrastruktur kepariwisataan, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kepariwisataan serta belum adanya Blueprint pariwisata Kota Banda Aceh juga mengakibatkan perencanaan pembangunan di bidang kepariwisataan tidak berkembang dengan maksimal.

Disamping itu, Kota Banda Aceh saat ini juga belum memiliki sarana dan prasarana hiburan perkotaan yang memadai dalam rangka menciptakan suasana yang lebih menggairahkan bagi warga kota untuk menikmati suasana rekreasi di tengah kota sehingga banyak warga kota yang ingin menikmati hiburan dan liburan harus ke luar kota.

4.1.7 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan konsep dengan ruang lingkup yang luas, mencakup pembenahan struktural, prosedural, kultural, dan etika birokrasi. Birokrasi diharapkan menjadi pelayan masyarakat, abdi negara dan teladan bagi masyarakat. Pemerintah Kota Banda Aceh sudah melakukan berbagai program dalam rangka reformasi birokrasi. Program-program tersebut antara lain dalam bentuk penataan struktur birokrasi, penataan distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan promosi PNS secara terbuka, penyederhanaan sistem perizinan dan nonperizinan dan pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-Government),

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan tata kelola pemerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh antara lain; belum optimalnya pelayanan publik, belum optimalnya penegakan peraturan perundang-undangan, terbatasnya jumlah pegawai akibat adanya kebijakan moratorium penerimaan pegawai sejak Tahun 2007, terbatasnya jumlah auditor dan pejabat pengawas pemerintah yang cukup sesuai dengan standar jumlah dan kualifikasi yang dipersyaratkan, serta belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan juga belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan seleksi terbuka bagi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama yang lowong. Selain hal tersebut, juga masih terbatasnya sarana dan prasarana pemerintahan, terbatasnya jumlah aparatur perpajakan. Disamping itu masih adanya aparatur yang belum memahami terhadap tugas pokok dan fungsi sehingga masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Untuk itu upaya peningkatan kompetensi serta tanggung jawab aparatur dalam rangka peningkatan kinerja yang berorientasi melayani akan terus ditingkatkan, diiringi dengan peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara yang lebih layak dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

4.1.8 Pengembangan Sistem Transportasi dan TIK

Permasalahan yang dihadapi dibidang transportasi adalah belum seimbangnya panjang jalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan, sehingga arus lalu lintas tidak lancar dan menimbulkan kesemrautan dan kemacetan lalu lintas. untuk itu dibutuhkan sistem transportasi massal dalam kota yang nyaman, aman, serta fasiltas pendukung sarana dan prasarana transportasi seperti fasiltas keselamatan jalan, terminal, pelabuhan dan fasilitas untuk orang berkebutuhan khusus.

Masalah perparkiran dalam Kota Banda Aceh diakibatkan karena jumlah kendaraan terus meningkat namun ketersediaan lahan/kawasan parkir masih sangat terbatas. untuk itu dibutuhkan penataan kawasan parkir pada kawasan pusat perdagangan.

Transkoetaradja adalah salah satu solusi, namun secara kuantitas belum mencukupi dan masih ada ruas-ruas jalan yang belum dilalui oleh moda tersebut. Sebelum ada Transkoetaradja, transportasi umum berbentuk angkot Labi-Labi mulai tidak lagi banyak terlihat di Banda Aceh, yang semestinya mereka tetap bisa diberdayakan dengan mengalihkan ke rute-rute yang belum terlayani oleh Transkoetaradja.

Di samping transportasi publik yang memerlukan penataan, sistem perparkiran di Kota Banda Aceh juga menjadi permasalahan yang harus ditinjau diakibatkan terus meningkatnya volume kendaraan. Dengan ketersediaan lahan ataupun kantong parkir yang masih sangat terbatas penataan kawasan parkir di pusat perdagangan dan Central Business District (CBD) akan membantu dalam mengoptimalkan kapasitas ruang parkir. Pemerintah Kota menyadari bahwa transportasi dan parkir menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Dalam mendukung pelaksanaan sistem transportasi yang optimal.

Kota Banda Aceh telah membangun 1 (satu) unit Media Center berbasis IT (Information Technology) namun dengan kapasitas yang sangat terbatas. Tetapi belum tersedianya Sarana dan prasarana TIK yang terpadu beserta dokumen perencanaan yang representatif sampai dengan saat ini mengakibatkan tersendatnya aplikasi IT sebagai penunjang di dalam optmalisasi sistem transportasi, khususnya pada pengumpulan data perencanaan dan pembangunan kota. Interkoneksi data antar SKPK, serta Instansi Pemerintahan terkait juga belum berjalan baik padahal interkoneksi ini merupakan suatu keharusan dalam menunjang implementasi kegiatan.

Ketersediaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi seperti sarana komunikasi untuk penyebar luasan informasi pembangunan kota terutama unit siaran informasi seperti radio dan televisi, baliho pemko, dan surat kabar atau bulletin, sehingga penyampaian informasi tentang kebijakan pemerintah dan pengembangan pembangunan masih sangat terbatas dalam implementasi.

4.1.9 Perumahan dan Pemukiman

Kebutuhan perumahan yang terus meningkat disebabkan oleh pertambahan penduduk yang tinggi mengakibatkan semakin berkurangnya lahan yang dapat digunakan sebagai permukiman. Hal ini berbanding lurus dengan Infrastruktur permukiman Kota Banda Aceh yang belum terbangun secara optimal. Penyebaran perumahan baru dan renovasi/peningkatan kapasitas rumah belum

diimbangi dengan penyediaan pelayanan infrastruktur yang memadai, seperti jalan gampong/ kecamatan dan drainase yang masih belum memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SDM).

Degradasi lingkungan perkotaan juga menjadi isu utama menuju Banda Aceh sebagai Kota Bebas Kumuh. Beberapa tahun belakangan ini di Kota Banda Aceh masih terdapat permukiman kumuh dan rumah tidak layak. Permasalahan lain adalah adanya permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sanitasi yang buruk serta tidak tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di wilayah padat penduduk.

Infrastruktur permukiman dalam Kota Banda Aceh yang layak dan memadai belum terbangun secara optimal. Kebutuhan rumah yang terus meningkat karena pertambahan penduduk yang tinggi akibat terjadinya migrasi seiring dengan pertumbuhan Kota Banda Aceh menyebabkan lahan kota semakin berkurang dan harga lahan perumahan semakin tinggi,

Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota yang disyaratkan paling sedikit 20% dari luas wilayah kota juga belum dapat dipenuhi hingga saat ini. Untuk kota Banda Aceh luas rencana RTH publik direncanakan mencapai 20% pada tahun 2029 seluas 1.180,26 Ha dari luas wilayah kota 5.903 Ha (Luas Kota Banda Aceh berdasarkan digitasi pada citra satelit). Kondisi luas RTH publik Kota Banda Aceh saat ini 13,2% dan direncanakan akan mencapai 16% pada akhir RPJM Tahun 2022.

4.1.10 Kemiskinan

Posisi Banda Aceh sebagai dari berbagai aktivitas di Aceh membuat tantangan yang dihadapi oleh Banda Aceh relatif berbeda dengan daerah lain di Aceh. Keberadaan Banda Aceh sebagai pusat pendidikan, sekaligus pusat pemerintah dan pusat perekonomian menjadi daya tarik yang besar bagi para pendatang. Hal ini membuat tingkat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di Banda Aceh menjadi sangat ketat. Pertumbuhan tenaga kerja baik tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik lebih tinggi dari kemampuan ekonomi daerah dalam menyediakan lapangan kerja di sektor formal. Akibatnya persaingan tenaga kerja di sektor informal juga semakin ketat. Pada akhirnya Banda Aceh akan menghadapi masalah pengangguran dan kemiskinan pada kelompok tenaga kerja usia produktif.

Dengan bertambahnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin maka kontribusi masing-masing penduduk dalam pembangunan akan menurun sementara pada saat yang bersamaan beban yang ditanggung oleh pemerintah akan semakin tinggi. Hal ini berimplikasi pada semakin besarnya beban ekonomi yang harus ditanggung daerah. Pemerintah harus menyediakan berbagai sarana pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga yang tidak mampu, juga harus mendorong perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap pengangguran.

Pada saat yang sama Pemerintah masih menghadapi beberapa permasalahan internal dalam penanggulangan kemiskinan. Masalah internal di pemerintah Kota Banda Aceh muncul akibat belum terintegrasinya program-program penanggulangan kemiskinan di setiap SKPD. Beberapa isu kemiskinan yang masih terjadi di Kota Banda Aceh antara lain: tumpang tindih bantuan terhadap fakir miskin, bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, kaum disabilitas dan rawan tidak memiliki akses terhadap bantuan, dan kemiskinan kultural yang muncul akibat budaya yang tidak produktif seperti kebiasaan merokok, kebiasaan menghabiskan waktu, narkoba dan lain-lain.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. Namun hingga kini, pengembangan unit usaha berskala UMKM mengalami berbagai kendala, seperti kekurangan modal usaha, ketersedian rantai pemasaran produk, minim teknologi terbaru, serta ketersedian bahan baku dengan harga bersaing. Keberadaan dana desa (DD) dan alokasi dana gampong (ADG) memungkinkan untuk memberikan alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi oleh UMKM.

Pemerintah Kota Banda Aceh belum sepenuhnya mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah yang seharusnya menjadi contoh dan panduan kegiatan pembiayaan secara syariah, di samping belum tersedianya sistem pemberian bantuan usaha disertai pendampingan usaha. Di masa mendatang, kegiatan pelayanan LKMS harus memerhatikan waktu usaha masyarakat. Beberapa pasar di Banda Aceh beroperasi di luar jam kerja kantor, sehingga waktu kerja bagi operasional LKMS ini juga tidak harus mengikuti jam kerja kantor yang formal. Hal ini diharapkan sebagai salah satu strategi untuk menghilangkan praktir rentenir yang selama ini menjerat para pedagang di pasar tradisional.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. Banyak unit usaha mikro kecil dan Menengah (UMKM) di gampong masih kekurangan modal usaha. Fasilitasi permodalan bagi UMKM digampong akan menjembatani masyarakat untuk memperoleh modal usaha. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh saat ini dengan pemberian modal melalui PUEM, dan Al Qardhul Hasan masih perlu terus dilanjutkan.

Salah satu program yang bergerak untuk memberi akses permodalan yang Islami dan mudah adalah program PUEM *Al Qardhul Hasan* (Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat) dengan pengembalian tanpa bunga/margin. Program dana bergulir ini diharapkan dapat membantu para usaha ekonomi mikro, guna menghindari para rentenir dan bunga yang tinggi dari lembaga keuangan yang lain. Selain itu untuk mengembangkan lembaga ekonomi Syariah disetiap gampong akan diaktifkan dan dihidupkan BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) yang akan dikelola oleh masyarakat gampong untuk menghidupkan perekonomian berbasis kerakyatan di gampong.

Guna mewujudkan gampong yang mandiri baik dalam pengelolaan keuangan gampong dan dalam penggunaan dana gampong secara efektif dan efisien maka perlu dibina aparatur gampong untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG), sehingga dana yang digunakan tepat sasaran, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan

4.1.11 RTH dan Pencemaran Lingkungan

Permasalahan yang dihadapi hingga saat ini masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya lahan serta biaya untuk pembebasan lahan tersebut. Juga masih ada kasus-kasus pencemaran lingkungan, penanganan sanitasi masih belum optimal, seperti perlu adanya daur ulang sampah, pemisahan sampah, dan pengolahan air limbah belum maksimal.

Industri rumah tangga dan industri lainnya juga mempunyai peranan dalam meningkatkan pencemaran lingkungan. Usaha-usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan seperti usaha doorsmeer, laundry, bengkel, rumah potong hewan. Kurangnya Instalasi Pengolahan Limbah di sekitar industri tersebut menjadi permasalahan tahunan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan di Banda Aceh.

Laju pertumbuhan penduduk kota Banda Aceh saat ini yang relatif tinggi mengakibatkan peningkatan volume sampah, konsumsi energi dan pencemaran lingkungan semakin meningkat pula. Sementara saat ini data tingkat pencemaran lingkungan belum tersedia dengan sempurna, sehingga upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan belum dapat dengan mudah dicegah.

4.1.12 Pengelolaan Air Bersih

Penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kota Banda Aceh adalah hal yang terus menerus mendapat keluhan masyarakat dalam lima tahun belakangan ini. PDAM belum mampu menyediakan air dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan, cakupan pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan belum dapat mengimbangi tingginya aktivitas perkotaan dan jumlah penduduk, dan di beberapa kawasan air hanya mengalir lancar para tengah malam, dan air yang mengalir ke rumah warga ada yang berwarna keruh yang menandakan bahwa PDAM. Belum optimalnya sistim

penyediaan air minum yang memenuhi standar 4K (kualitas, kuantitas, kuntinuitas dan keterjangkauan) akibat kondisi pipa yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini.

Masalah lain adalah rusaknya sistim jaringan perpipaan akibat pembangun infrastruktur perkotaan seperti pelebaran jalan, pembangunan drainase, penanaman kabel listrik dan kabel telekomunikasi, kerusakan mana tidak segera ditanggulangi. Ada juga keluhan warga terhadap pelayanan dalam pemasangan jaringan baru, termasuk sikap kontraktor yang terlambat menutupi ruas jalan yang baru dibongkar untuk pemasangan instalasi, atau penutupan kembali dengan kualitas yang buruk.

Di pihak lain PDAM juga berhadapan dengan sikap warga yang main terabas dalam kaitannya dengan akses terhadap air bersih. Ditemukan kasus-kasus di mana warga memperoleh air dengan cara illegal, hal ini menyumbang kepada tingkat kehilangan air yang sangat tinggi. di samping banyak kasus keterlambatan pembayaran iuran yang akhirnya juga mengganggu pelayanan secara keseluruhan.

Dengan gambaran sebagaimana disebutkan di atas maka diperlukan kebijakan yang menyeluruh mulai dari hulu sampai ke hilir dalam rangka menyediakan air bersih yang cukup dan berkualitas serta kontinyu kepada warga Banda Aceh termasuk edukasi kepada warga kota

4.1.13 Mitigasi Bencana

Beberapa permasalahan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan penanggulangan bencana adalah belum adanya Standard Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan bencana, sebagai acuan para pihak dan finalisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Selain itu penyusunan dan simulasi Rencana Kontijensi Banjir dan tsunami juga sangat dibutuhkan untuk memastikan tanggap darurat yang efektif.

Pemerintah perlu menginisiasikan dan memperkuat organisasi atau forum PRB di tingkat komunitas misalnya melakukan mekanisme perencanaan dan penganggaran program komunitas/Desa Tangguh Bencana mulai dari forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dengan mendorong penggunaan Dana desa untuk membangun ketangguhan masyarakat, terutama untuk risiko bencana..

4.1.14 Iklim Investasi

Kota Banda Aceh saat ini sudah sangat kondusif untuk menerima para investor untuk berinvestasi. Banyak kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh seperti telah tersedianya peluang investasi, infrastruktur yang mendukung, suasana yang kondusif, meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan kemudahan perizinan dan nonperizinan serta kemudahan perizinan dan nonperizinan investasi.

Promosi investasi merupakan hal yang penting agar investasi di Kota Banda Aceh dilirik dan diminati oleh Para Investor Asing maupun Dalam Negeri. Tujuan dilakukannya promosi antara lain untuk memperkenalkan potensi investasi yang ada di Kota Banda Aceh serta mencari dan membawa investor ke Kota Banda Aceh.

4.1.15 Kerjasama Regional

Kota Banda Aceh berbatasan dengan yakni Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Besar. Untuk kerjasama regional, pada Tahun 2008, dua kota dan kabupaten telah tersebut membentuk Badan Kerjasama Regional BASAJAN (akronim Banda Aceh – Sabang – Jantho Aceh Besar) yang diinisiasi oleh pihak GTZ-SLGSR yang merupakan salah satu lembaga kemanusiaan dari Jerman yang ikut membantu proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh pascabencana gempa dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004. Pembentukan Kerjasama Regional BASAJAN itu didasarkan pada pandangan bahwa jika potensi ke tiga daerah itu disatupadukan, terutama dalam bidang Pariwisata,

Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM), maka akan diperoleh hasil yang lebih baik di sektor pembangunan daerah.

Badan Kerjasama Regional (BKR) BASAJAN diformalkan dalam bentuk Nota Kesepahaman Nomor 17/MOU/2008, dan Nomor 134.4/2531/2008 dan Nomor 119/7424/2008" tertanggal 6 Agustus 2008, dan Peraturan Bersama (Perma) No. 18 th 2009 (Banda Aceh), No. 25 th 2009 (Sabang) dan No. 25 th 2009 (Aceh Besar).

Dalam koordinasinya, BKR BASAJAN melibatkan berbagai instansi, misal BAPPEDA, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, dan beberapa dinas teknis lainnya dari daerah BASAJAN. Selain itu, BASAJAN juga melibatkan BAPPEDA Propinsi Aceh, Dinas Perhubungan Aceh, BPKS dan lain-lain. Tim teknis Basajan juga didukung oleh tim Returning Expert dari CIM (Center for International Migration and Development). Returning expert CIM adalah program pemerintah Jerman untuk mengintegrasikan alumni Jerman yang pulang ke negara asalnya ke dalam pembangunan.

4.1.16 Energi Listrik

Kota Banda Aceh bukan hanya ibukota provinsi melainkan juga kota di mana aktifitas bisnis perdagangan atau industri tumbuh pesat. Status dan perkembangan tersebut di atas antara lain memerlukan energi listrik yang relatif besar dibanding kota-kota lain di Provinsi Aceh. Namun, dalam beberapa tahun belakangan ini energi listrik itu belum mampu disediakan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

Data PLN Aceh menyebutkan bahwa pasakon daya listrik untuk Kota Banda Aceh belum mencukupi kebutuhan warganya. Hal itu telah menyebabkan terjadinya pemadaman secara bergilir yang kemudian menimbulkan keluhan dari warga Kota Banda Aceh.

Bahwa penyediaan listrik untuk Kota Banda Aceh merupakan koneksi dari unit yang berada di Aceh Barat dan Nagan Raya, dan juga dari Belawan, Medan, Sumatra Utara, juga berimbas negatif. Saat ada masalah koneksi dari area-area tersebut di atas, maka pemadaman di Kota Banda Aceh tidak dapat dihindari, atau warga Banda Aceh harus menunggu terlebih dahulu penyelesaian masalah teknis di area-area tersebut.

Hal yang juga menjadi permasalahan adalah adanya warga kota yang menggunakan sambungan illegal untuk memasuk kebutuhan daya listrik ke rumah atau tempat usahanya. Keadaan ini tidak hanya merugikan masyarakat secara keseluruhan, melainkan juga mengakibatkan negara kehilangan pendapatan dan juga rentan terhadap kebakaran.

4.1.17 Kependudukan, Perempuan dan Anak

Selama periode 2012-2017 persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, masih kurang secara kuantitas, di samping partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik juga belum optimal. Pemenuhan hak dasar mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya juga masih rendah.

Pemahaman pemangku kebijakan maupun masyarakat tentang konsep gender (Pengarusutamaan Gender/PUG) belum sepenuhnya menggembirakan. Ini terlihat misalnya pada belum meratanya penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender baik di tingkat kota dan kecamatan maupun gampong. Sehingga penerapan PPRG belum maksimal. Di samping itu pemberian layanan bagi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan juga belum maksimal akibat minimnya anggaran yang tersedia. Pada saat yang sama partisipasi dunia usaha untuk program pemberdayaan dan perlindungan anak juga belum maksimal.

Perempuan dan anak juga menghadapi masalah pada kurangnya perlindungan dari dampak negatif perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi yang semestinya memberikan dampak yang baik, namun dalam berbagai kasus terjadi sebaliknya; kemajuan teknologi membuat perempuan dan anak tetap menjadi kelompok rentan, misalnya dalam kejahatan pornografi dan sebagainya. Teknologi informasi yang demikian mudah diakses juga memberi dampak buruk kepada tumbuh kembang anak.

Problem lain yang dihadapi oleh anak adalah belum optimalnya mekanisme yang ada untuk penanganan anak yang menjadi pelaku dan anak sebagai korban (anak bermasalah hukum-ABH). Selain itu masih terlihat belum optimalnya pemenuhan hak anak (PUHA) baik di ruang domestik maupun publik, perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

Pelayanan terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak juga masih sangat rendah mutunya, untuk mengantisipasinya diperlukan aplikasi untuk pelaporan dan pengaduan kasus perempuan dan anak secara online.

Masih rendahnya proporsi keterwakilan kaum perempuan di lembaga Legislatif, masih kurangnya tingkat partisipasi angkatan kerja wanita dan perlindungan anak yang belum optimal merupakan permasalahan yang masih dihadapi Pemerintah Kota Banda Aceh.

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100, Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.

Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan, munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.

Program Pengendalian Penduduk untuk mendukung ketahanan keluarga merupakan program yang digalakkan secara nasional. Namun perkembangan masih dirasakan kurang optimal, hal ini terlihat dari rendahnya pembinaan terhadap kelompok kegiatan bina keluarga (termasuk bina keluarga remaja, bina keluarga balita, bina keluarga lansia).

Masih dalam bidang kependudukan, kesadaran masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data administrasi kependudukan masih sangat rendah, hal terlihat dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam meng*update* informasi kependudukan ke dalam Kartu Keluarga tentang kejadian vital (lahir, mati, datang dan pindah) masih rendah, di samping masih adanya masyarakat yang memiliki surat keterangan nikah (Nikah Siri) yang berimplikasi negatif kepada hak perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan siri.

4.1.18 Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja dan keterampilan pencari kerja masih terbatas serta kurangnya perlindungan kerja adalah permasalahan yang masih dihadapi saat ini. Selain itu tidak berkembangnya sektor bisnis berbasis inovasi menjadi salah satu penyebab berkurangnya lapangan pekerjaan yang bisa mengakomodasi tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus. Adanya migrasi tenaga kerja dari luar daerah terutama tenaga kerja dengan keahlian rendah dan belum optimalnya pemberdayaan bagi kelompok pekerja berpendapatan rendah, seperti pemulung, pedagang kaki lima, nelayan dan lain-lain juga merupakan permasalahan yang belum tertanggulangi.

Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan, dan meningkatnya kasus perselisihan adalah juga permasalahan yang dihadapi bidang ketenagakerjaan saaat ini, disamping tidak adanya kesadaran perusahaan ataupun HRD. Selain itu, rendahnya konsistensi kerjasama kemitraaan industri kecil,

menengah dan BUMN/swasta dan nasioanal merupakan salah satu penyebabnya rendahnya penyerapan tenaga kerja.

Lapangan pekerjaan di Banda Aceh saat ini masih didominasi oleh sektor-sektor yang lebih mengedepankan pendekatan kapital dibanding pendekatan tenaga kerja. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi di masa depan Banda Aceh hanya akan menyerap sedikit tenaga kerja. Selain itu, keberadaan Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi dan pusat pendidikan di Aceh menjadi daya tarik bagi pendatang untuk bekerja di Banda Aceh. Akibatnya, persaingan tenaga kerja akan semakin ketat. Pada saat yang sama, selama ini, pemerintah Kota Banda Aceh belum optimal dalam menumbuhkembangkan sektor ekonomi lainnya terutama pada sektor-sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Ketatnya persaingan kerja dan terbatasnya ketrampilan pencari kerja membuat isu perlindungan tenaga kerja menjadi penting. Tenga kerja cenderung menjadi pihak yang dirugikan karena potensi pelanggaran norma ketenagakerjaan, perselisihan antara pekerja dan pemilik modal berjalan seiring dengan semakin ketatnya persaingan usaha. Penyediaan lapangan kerja sebenarnya juga dapat dilakukan melalui kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar. Tetapi kemitraan itu selama ini belum maksimal dan belum diarahkan pada peningkatan kapasitas UMKM mulai dari hulu hingga hilir.

Perkembagan ketenagakerjaan saat ini ditandai dengan tingginya jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan lowongan kerja yang tersedia sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Hal ini disebabkan karena Kota Banda Aceh selama ini belum merupakan kota industri, melainkan sebagai kota pendidikan dan jasa. Oleh karena itu sangat dibutuhkan arah dan kebijakan pembangunan sumber daya manusia agar dapat menciptakan sumberdaya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian hidup serta dapat menyediakan lapangan kerja baru yang dapat menampung angkatan kerja yang ada, seiring dengan mulai tumbuhnya investasi di Kota Banda Aceh

4.1.19 Pembangunan Kependudukan

Perencanaan pembangunan di Indonesia harus mengacu dan mengakomodir perubahan dari berbagai isu-isu kependudukan. Hal ini telah menjadi amanat dari Peraturan Presiden No. 153/2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.

Isu-isu kependudukan harus diintegrasikan dan diimplementasikan ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan sektoral. Harapannya perencanaan ini dilakukan pada lingkup nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan waktu penyusunan perencanaan kependudukan selambat-lambatnya bersamaan dengan waktu perencanaan pembangunan jangka panjang menengah dan/atau jangka panjang.

Perencanaan pembangunan kependudukan merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan tentang perubahan kondisi kependudukan yang diinginkan pada masa yang akan datang yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, mobilitas. Perencanaan ini dilakukan dengan menetapkan sasaran kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk beserta langkah pengelolaan perkembangan penduduk di suatu daerah pada masa yang akan datang. Tujuannya adalah menjadi acuan kedepan atau minimal menjadi acuan jangka menengah dalam menyusun program dan kegiatan serta langkah-langkah pengelolaan kependudukan.

Pengintegrasian variabel kependudukan dalam pembangunan meliputi variabel pelayanan masyarakat berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, pertambahan pendudukan yang tercermin

dari tingkat kelahiran, kematian dan migrasi penduduk, serta pertambahan penduduk kelompok usia lanjut. Pengintegrasian variabel kependudukan harus dilakukan agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat dirasakan secara optimal pada masing-masing kelompok variabel. Pengintegrasian harus dilakukan pada setiap tahapan pembangunan seperti perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh adalah kehadiran bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari jumlah penduduk usia tidak produktif. Diperkirakan Indonesia akan mengalami bonus demografi pada periode 2025-2035, namun beberapa provinsi termasuk Aceh akan menghadapi bonus demografi lebih cepat dari daerah lain. BKKBN Indonesia menduga Aceh akan mengalami *bonus demografi* sejak tahun 2020. Berbagai kajian menunjukkan bahwa sebuah daerah yang tidak siap menghadapi bonus demografi maka berpeluang untuk mendapatkan "musibah" demografi. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk usia produktif tidak diikuti dengan pertumbuhan kemampuan daerah dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif. Berbagai masalah pembangunan yang akan muncul dan membesar adalah peningkatan jumlah penduduk miskin, pengangguran meningkat, tingkat kesejahteraan masyarakat menurun dan pada akhirnya berpotensi menciptakan ketergantungan daerah kepada daerah lain dan kepada SDM asing.

Dalam menyikapi berbagai isu yang terkait dengan kehadiran bonus demografi adalah bagaimana proses pembangunan yang berjalan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat hingga menjadi masyarakat yang sejahtera, mengurangi angka pengangguran yang tinggi, persaingan antara tenaga kerja lokal dan pendatang, optimalisasi pemberdayaan kelompok marjinal dan difabel serta optimalisasi peran perempuan dalam setiap sektor pembangunan. Oleh sebab itu, perhatian pemerintah sebaiknya diarahkan pada upaya penyediaan pasar bagi produk lokal, pemenuhan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan mewujudkan zona ekonomi kreatif.

Keberadaan Kota Banda Aceh tidak hanya sebagai pusat dari ekonomi Aceh, tetapi juga sebagi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi Aceh menjadi daya tarik kuat bagi para penduduk luar Banda Aceh untuk bermigrasi ke Banda Aceh. Hal ini membuat pertumbuhan penduduk Banda Aceh akan meningkat tajam. Hal ini membuat pelayanan publik dan ketersediaan lahan menjadi isu penting yang harus disikapi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Selain lahan untuk mendukung kegiatan pembangunan, pemerintah Banda Aceh juga menghadapi keterbatasan lahan kuburan bagi warganya. Pengadministrasian peristiwa kematian hingga saat ini belum cukup optimal sehingga membuat pendugaan terhadap kebutuhan lahan perkuburan menjadi bias.

4.1.20 Pengembangan Budaya

Pengembangan kebudayaan dilakukan untuk melestarikan kebudayaan agar dapat meningkatkan pendapatan Kota Banda Aceh dari sektor pariwisata. Pengembangan kebudayaan dapat dilakukan dengan meningkatkan internalisasi nilai-nilai budaya ke dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Aceh dan untuk menarik minat wisatawan baik lokal (Aceh/Indonesia) dan mancanegara.

Kesenian tradisional Aceh merupakan bagian dari ragam kebudayaan nasional yang perlu dijaga kelestariannya. Akan tetapi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, masyarakat Kota Banda Aceh saat ini disuguhi banyak alternatif hiburan dan informasi dari berbagai belahan dunia dengan budaya yang berbeda-beda. Hal ini dirasakan lambat laun menyebabkan terpinggirkannya seni budaya asli Aceh, oleh karena itu perlu digiatkan kembali berbagai penyelenggaraan festival seni budaya tradisional secara untuk menarik minat masyarakat terutama generasi muda untuk melestarikan budaya Aceh.

Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang diprogramkan sebagai Kota Pusaka Indonesia dan menuju ke Kota Pusaka Dunia, hal ini didukung fakta bahwa dalam Kota Banda Aceh banyak terdapat berbagai peninggalan bersejarah dari beberapa periode sejarah, sejak zaman kesultanan, periode kolonial sampai dengan periode pasca bencana gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004. Namun kondisi benda, situs dan kawasan cagar budaya tersebut masih terbatas pada mempertahankan eksistensinya, belum dikelola secara maksimal sehingga dapat menjadi ikon kota yang menarik bagi wisatawan, yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang tinggal disekitaran situs dan atau kawasan tersebut. Belum maksimalnya pengelolaan ini dikarenakan belum terkoordinasinya pihak-pihak yang terlibat dalam pelestarian situs cagar budaya, sehingga belum mendukung secara penuh program-program kepariwisataan. Juga masih rendahnya perhatian masyarakat terhadap peninggalan budaya, yang ditunjukkan dengan perilaku yang kurang menjaga lingkungan sekitar seperti membuang sampah. Penempatan petugas yang tepat yang dapat memberikan pelayanan yang baik dan penguasaan pengetahuan tentang kebudayaan Aceh perlu mendapatkan perhatian. Penyampaian pengetahuan tentang benda/kawasan cagar budaya yang komprehensif dapat meningkatkan rasa cinta terhadap kebudayaan daerah.

Pelestarian karya budaya yang ada di Kota Banda Aceh dapat juga dilakukan dengan melakukan inventarisasi dan revitalisasi karya budaya seperti situs/benda cagar budaya. Revitalisasi ini bertujuan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting dari cagar budaya dengan penyesuaian yang baru dengan tidak mengesampingkan pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Namun demikian, pelestarian dan pengembangan kebudayaan akan terwujud apabila selutuh stakeholder yang berkepentingan terhadap pengembangan kebudayaan dapat melakukan pengelolaan secara terpadu, baik dalam penelitian, pelestarian maupun pemanfaatannya. Disamping itu dibutuhkan kesamaan visi dan misi dari stakeholder/instansi yang terlibat.

.

4.1.21 Pemuda dan Olahraga

Pembangunan olahraga dimaknai sebagai strategi yang sistematis untuk meningkatkan komitmen semua pihak untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia sebagai manusia bugar, sehat, dan berprestasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan unsur kebutuhan olahraga ke dalam kebijakan dan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Kebijakan olahraga ditujukan untuk membangkitkan prestasi olahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, budaya masyarakat dan wahana memposisikan kemartabatan dan keberadaban bangsa Indonesia dalam berbagai ajang olahraga internasional.

Kebijakan pengembangan pemuda dan olahraga ini menjadi strategis dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Kota Banda Aceh dengan harapan dapat diraihnya tujuan pembangunan kepemudaan yaitu pembentukan karakter, pembentukan kapasitas, dan daya saing pemuda serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang bugar, sehat, dan berprestasi di bidang olahraga.

Ada beberapa permasalahan yang muncul menjadi referensi akselarasi peningkatan bidang kepemudaan dan olahraga di Kota Banda Aceh di antaranya: (1) belum tertatanya sistem pembinaan olahraga menuju kelas nasional dan internasional, (2) rendahnya presentase angka partisipasi masyarakat dalam olahraga (3) Kurangnya program olahraga pendidikan, seperti: rendahnya kualitas penyelenggaraan pendidikan jasmani dan olahraga pada setiap jenjang satuan pendidikan, belum banyaknya unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga, belum ada pengembangan sekolah khusus/keberbakatan olahraga di daerah-daerah, belum adanya program olahraga khusus, (4) masalah sosial di kalangan pemuda seperti kriminalitas, premanisme, narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA) dan HIV masih cukup tinggi; (5) sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olah raga belum mencukupi; (6) Jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda masih rendah.

4.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi derah dengan karakteristik: bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Isu-isu strategis pembangunan Kota Banda Aceh dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan. Adapun isu-isu tersebut adalah:

4.2.1 Syariat Islam

Syiar dan Dakwah merupakan sebuah upaya yang harus ada dalam penegakkan Syariat Islam. Penegakkan Syariat Islam secara kaffah tidak akan dapat terwujud tanpa adanya usaha dan gerakan dakwah. Sampai saat ini penerapan syariat islam masih menghadapi berbagai permasalahan. Terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan Syariat Islam menunjukkan belum optimalnya upaya amar ma'ruf nahi munkar.

Permasalahan yang dihadapi terkait hat tersebut diatas, maka isu strategis terkait bidang syariat islam adalah sebagai berikut :

a. Masih adanya pelanggaran terhadap Qanun Syariat Islam (Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah)
b. Belum optimalnya pelaksanaan syiar Islam.
c. Masih rendahnya variasi kegiatan remaja mesjid dan balai pengajian sehinga akhirnya membuat kevakuman.

4.2.2 Stabilitas Ekonomi

Stabilitas ekonomi merupakan faktor fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan *(sustainable economic growth).* Perkembangan situasi stabilitas ekonomi saat ini tidak terlepas peran dari indikator makro ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan nilai tukar mata uang asing. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh secara sektoral memperlihatkan sektor-sektor unggulan seperti: sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan yang relatif stabil. Kemudian untuk laju inflasi di Kota Banda Aceh hampir selalu berada di bawah Provinsi Aceh dan Nasional.

Pemberdayaan UMKM sebagai ujung tombak pemerataan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja masih rendah dan juga Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai upaya penegakan ekonomi syariah dan pengurangan praktik riba di Kota Banda Aceh sehingga perlu upaya mendorong tumbuhnya kegiatan produksi produk unggulan disetiap gampong.

Salah satu yang sangat diperlukan saat ini untuk menunjang pelayanan perizinan dan nonperizinan investasi adalah Data Potensi dan peluang investasi daerah, namun ini belum tersedia dan belum adanya kegiatan promosi investasi.

4.2.3 Sistem transportasi dan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK)

Sebagai ibu kota Provinsi, Kota Banda Aceh menghadapi berbagai permasalahan transportasi akibat meningkatnya aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu, perlu pengembangan sistem transportasi terpadu untuk memperlancar kegiatan produksi, distribusi barang dan jasa serta peningkatan aksesibilitas bagi manusia ataupun barang dan jasa.

Saat ini kualitas pelayanan transportasi umum tradisional masih belum maksimal, disisi lain transportasi Trans Koetaradja belum maksimal karena belum beroperasinya dengan sistem Full BRT sehingga waktu perjalanan masih panjang.

Akibat dari buruknya pelayanan transportasi umum, terbatasnya area pelayanan atau daya jangkau dan didorong oleh meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kemudahan untuk kepemilikan kendaran bermotor, jumlah kendaraan pribadi di kota Banda Aceh cenderung meningkat setiap tahun. Hal ini diperparah oleh masuknya kendaraan dari area disekitar Kota Banda Aceh terutama Wilayah Kabupaten Aceh Besar. Akibatnya terjadi kemacetan di beberapa titik pada jam puncak. Untuk itu diperlukan

Untuk itu diperlukan pengembangan sistem transportasi yang mengutamakan pada sistem angkutan umum massal yang bersinergi dengan angkutan darat (penyediaan *feeder*), penataan manajemen parkir berbasis teknologi informasi Selain itu, diperlukan adanya integrasi sistem transportasi antara Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar serta diperlukan system yang dapat mengontrol dan mengendalikan lalu lintas di persimpangan melalui pengembangan ATCS *(Area Traffic Control System)* yang berfungsi untuk mengatur waktu sinyal di persimpangan secara responsif dan terkoordinasi yang bertujuan untuk meminimalkan waktu tundaan dan antrian agar diperoleh pergerakan arus lalu lintas yang optimal, memberikan prioritas lampu hijau bagi Trans Koetaradja, dalam keadaan tertentu dapat memberikan waktu hijau bagi kendaraan prioritas seperti pemadam kebakaran, ambulance, VVIP, konvoi dll serta menyampaikan informasi kondisi lalu lintas dan alternatif lintasan dan menyediakan rekaman data lalu lintas, kejadian kecelakaan dan kejadian lainnya di persimpangan.

Selain pembenahan dalam manajemen transportasi perlu juga dilakukan kajian kembali terhadap pengembangan jaringan jalan dalam kota sebagai salah satu penguraian transportasi Kota. Struktur eksisting jaringan jalan kota Banda Aceh berbentuk radial sehingga menimbulkan pemusatan konsentrasi arus kendaraan pada kawasan CBD *(Central Business District)* yang berdampak peningkatan kemacetan pada kawasan CBD.

Pertumbuhan kendaraan yang tinggi tidak dibarengi dengan jumlah kawasan parkir yang harus disediakan, sehingga pengelolaan perparkiran belum maksimal yang berefek pada penerimaan PAD dari sektor perparkiran sehingga perlu penataan kawasan parkir dan inovasi dalam sistem pengelolaan perparkiran.

Di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih sangat kurangnya jumlah jaringan intrakoneksi yang belum komprehensif, Pengembangan SDM TIK, pemeringkatan e-government, konsistensi open data, serta kurangnya jumlah jaringan intrakoneksi guna penunjang kelancaran hubungan antar SKPD merupakan hal yang harus segera ditindaklanjuti, diikuti oleh prasarana dan fasilitas komunikasinya, seperti penambahan aplikasi, peintegrasian aplikasi, pembangunan jaringan telekomunikasi, kamera pemantau keramaian, perencanaan TIK secara terpadu dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pertumbuhan pengguna teknologi informasi terus meningkat, begitu juga dengan kebutuhan data yang sudah mulai bergeser dari pola yang manual ke pola yang berbasis elektronik, oleh sebab itu perlu penyempurnaan dan peningkatan media penyampaian informasi dan peran semua pihak baik SKPD maupun Gampong untuk penyebarluasan informasi.

Kota Banda Aceh telah membangun 1 (satu) unit Media Center berbasis IT *(Information Technology)* dengan kapasitas yang sangat terbatas bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Aceh, sarana dan prasarana TIK yang terpadu dan dokumen perencanaan yang representatif sampai dengan saat ini belum tersedia. Penyebarluasan informasi pembangunan dan kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan, menyampaikan informasi yang tepat dan akurat kepada masyarakat agar dapat diketahui dengan jelas dan transparan tentang arah dan tujuan pembangunan yang akan ditempuh serta hasil yang akan dicapai sangat diperlukan berbagai media untuk penyampaian informasi tersebut seperti media luar ruang (baliho/billboard, spanduk, videotron, poster dll), media cetak (surat kabar, majalah, tabloid dan buletin), media tradisional,

media interpersional dan media elektronik (televisi dan radio) sehubungan dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah Daerah harus mengikuti dengan membangun berbagai aplikasi untuk penyebarluasan informasi melalui media internet.

Dalam Penyebarluasan informasi pemerintah daerah juga memiliki media sosial diantaranya Facebook, twitter, instagram serta youtube dengan tujuan adanya keberagaman media sosial ini, masyarakat dapat memperoleh informasi dan ikut berpartisipasi serta sebagai alat kontrol dalam perkembangan dan pembangunan kota.

Untuk penyebarluasan informasi pembangunan kota perlu kiranya menyediakan sarana komunikasi terutama unit siaran informasi seperti kendaraan roda empat untuk informasi keliling, baliho pemerintah daerah, informasi daerah dengan aplikasi dan fasilitas siaran lainnya, sehingga penyampaian informasi tentang kebijakan pemerintah dan pengembangan pembangunan kota lebih maksimal.

4.2.4 Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota

Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota perlu dilakukan penataan secara bersama antar sector terkait dan harus dilakukan secara sistematis dengan menerapkan prinsip-prinsip revitalisasi dalam bentuk perbaikan lingkungan maupun pembangunan kembali. Dalam memenuhi kebutuhan akan rumah perlu diupayakan pembangunan rumah secara vertikal baik pada kawasan baru maupun pada kawasan kumuh ringan/ sedang yang penanganan kawasan kumuh ringan/sedang dilaksanakan dan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan setempat.

Masih kurangnya tempat tinggal yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat terutama masyarakat golongan menengah kebawah. Kurangnya pembinaan penyuluhan tentang rumah sehat sehingga masih adanya kawasan-kawasan kumuh. Masih banyak rumah tangga yang menggunakan jenis septictank tidak kedap sehingga merusak air tanah dan belum tegasnya sanksi terhadap bangunan tanpa IMB, belum semua masyarakat memahami tentang Qanun RTRW dan kurangnya ketaatan dalam mengurus IMB.

Selain itu, masih belum maksimalnya fungsi saluran karena pengaruh sedimentasi, sampah, dinding saluran yang colaps dan menutup saluran, penyempitan dimensi saluran dan gorong-gorong, hambatan akibat bangunan lain seperti pipa PDAM, tiang listrik, tiang telepon, sisa-sisa dan sebagainya serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Hal ini menyebabkan air tergenang di sepanjang saluran dan menjadi tempat berkembangnya nyamuk serta menimbulkan bau yang tidak sedap, yang berakibat terhadap gangguan kesehatan dan lingkungan perlu diatasi segera serta pelaksanaan pembangunan Water Front City yang masih terus terkendala hingga saaat ini baik dari segi infrastruktur, sosialisasi, payung hukum serta kelembagaan.

4.2.5 Bidang Kepariwisataan dan Budaya

Sejak di dilaksanakan program visit Banda Aceh 2011 geliat pariwisata di Kota Banda Aceh mulai tumbuh dan berkembang dan hingga saat ini telah menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat pendidikan. Pada masa lalu, kota ini dikenal sebagai kota kerajaan Aceh yang termasuk ke dalam 5 besar kerajaan di dunia. Bahwa tingkat kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 terus mengalami kenaikan. Sebagai salah satu kota yang tergabung dalam Jaringan Kota Pusaka Indonesia memiliki beberapa landmark wisata kota Banda Aceh seperti, Mesjid Raya Baiturrahman, Museum tsunami, lokasi pemakaman massal korban tsunami, PLTD apung, boat diatas rumah, pantai cermin Ulee Lheu, Pintoe Khop, dan lokasi lainnya menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Namun saat ini ada beberapa hal yang menjadi isu strategik kepariwisataan seperti: belum adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pariwisata halal Kota Banda Aceh, tidak terukur kontribusi pariwisata dalam PAD Kota Banda Aceh, kurangnya promosi dan pemasaran kepariwisataan, tumpang tindih pengelolaan objek wisata, rendahnya kualitas infrastruktur kepariwisataan, masih rendahnya koordinasi antar pelaku usaha pariwisata dalam rangka mensinerjikan promosi produk dan pelayanan pariwisata, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kepariwisataan serta belum adanya Blueprint pariwisata Kota Banda Aceh yang mengakibatkan perencanaan pembangunan di bidang kepariwisataan belum berkembang dengan maksimal dan belum adanya pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap pentingnya pariwisata dilaksanakan secara bersama-sama sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri dan belum optimalnya pelaksanaan wisata halal di Kota Banda Aceh. Disamping itu, Kota Banda Aceh saat ini juga belum banyak memiliki sarana dan prasarana hiburan perkotaan yang memadai dalam rangka menciptakan suasana yang lebih menggairahkan bagi warga kota untuk menikmati suasana rekreasi di tengah kota sehingga banyak warga kota yang ingin menikmati hiburan dan liburan harus ke luar daerah.

Banda Aceh merupakan salah satu kota yang masuk ke dalam jaringan kota pusaka Indonesia dikarenakan sebagai salah satu kota tertua di nusantara bahkan di Asia Tenggara, yang memiliki beragam situs cagar budaya peninggalan sejarah Kerajaan Aceh. Namun demikian, akibat dari proses pembangunan kota menimbulkan dampak negatif terhadap keberadaan situs-situs cagar budaya.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka yang menjadi issue strategis dalam bidang kebudayaan adalah belum tertatanya dan terpeliharanya situs cagar budaya dalam wilayah kota Banda Aceh, masih rendahnya karakter dan jati diri warga Kota Banda Aceh sebagai warga bangsa yang multikultural serta belum optimalnya aspek ekonomi dan kesejahteraan warga Kota Banda Aceh dalam pengembangan kebudayaan.

4.2.6 Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing Kota Banda Aceh. Penyelenggaraan pendidikan menjadi perhatian semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Kota Banda Aceh maka pendidikan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas proses belajar mengajar agar menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dalam hal ini perlu juga ditingkatkan kualitas sumber daya manusia agar metode dan proses pendidikan dapat diterima oleh peserta didik, sehingga proses pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Penyelenggaraan pendidikan di Kota Banda Aceh dikembangkan untuk mendorong peningkatan daya saing melalui penyediaan sistem penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengajaran yang handal, kualitas sumber daya manusia pendidikan yang baik, sistem pendidikan yang mencakup pendidikan formal dan nonformal, serta mendorong pengembangan pendidikan inklusif dan penerapan sistem rayonisasi dalam penerimaan peserta didik baru.

Perkembangan teknologi harus dikuasai oleh guru untuk memudahkan proses belajar mengajar. Hal ini juga akan berhadapan dengan kompetensi menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) Disamping itu sistim pendidikan berbasis Islami harus terus dioptimalkan dengan mendorong peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat menjadi pelajar yang islami, menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun dan meningkatkan mutu pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), peningkatan kompetensi guru, optimalisasi penggunaan K-13 sehingga tercipta sistem pengajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Selain itu penguatan pendidikan dengan

karakter Islami di jenjang PAUD sampai dengan SMP, dan peningkatan minat baca siswa (literasi), serta optimalisasi fungsi manajerial sekolah.

Minat dan budaya membaca di kalangan siswa harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan siswa di Banda Aceh. Hal ini dapat dilakukan dengan memotivasi siswa untuk menumbuhkan minat baca yang tinggi. Selain itu guru dan orang tua berperan penting dalam meningkatkan minat baca siswa. Kegiatan yang bersifat rekreatif dan edukatif diharapkan dapat membangun minat baca di kalangan siswa sekolah, disamping memberikan pemahaman akan pentingnya membaca. Perlu ditanamkan kepada siswa bahwa membaca adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas diri sehingga dapat memotivasi siswa untuk membaca.

Strategi lain yang sangat penting untuk mengatasi permasalahan rendahnya minat dan budaya membaca di kalangan siswa adalah peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan. Perpustakaan perlu ditata sedemikian rupa sehingga menimbulkan kenyamanan bagi siswa untuk membaca di perpustakaan. Disamping itu koleksi perpustakaan juga harus ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sudah saatnya perpustakaan juga disi dengan buku-buku bacaan yang mampu menarik minat siswa untuk membacanya. Perpustakaan juga sebaiknya dilengkapi dengan audiovisual sehingga tidak memberikan kesan layanan yang monoton.

4.2.7 Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Promosi kesehatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan peroranganan masih sangat kurang. Demikian juga dengan peningkatan kerja sama penanganan penyakit lintas sektor dan lintas daerah dan optimalisasi sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi warga khususnya keluarga miskin. Hal lain yang masih harus dilakukan adalah penerapan ISO pada beberapa puskesmas, penyempurnaan sistem rujukan, optimalisasi layanan kegawat-daruratan serta peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana kesehatan.

Berkurangnya subsidi dari pemerintah daerah terhadap anggaran kegiatan tahunan telah menambah beban biaya kegiatan dari sumber anggaran BLUD. Belum mencukupinya tenaga dokter spesialis dan perawat di Rumah Sakit, dan belum memadainya peralatan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dokter spesialis.

Disamping itu tuntutan masyarakat terhadap transparansi sistem informasi kesehatan yang semakin tinggi akan kemudahan, layanan cepat dan tepat sasaran harus segera dijawab dengan sistem pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan yang terstandarisasi dengan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan disertai dengan upaya peningkatan peran serta masyarakat di dalam mendukung program kesehatan serta Penerapan regulasi kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas dan mencukupi.

4.2.8 RTH dan Pencemaran Lingkungan

Untuk mendukung kebijakan strategis nasional tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional Kota Banda Aceh dan berdasarkan rencana RTH Publik pasal 29 ayat 3 undang-undang no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang "Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota". Isu yang dihadapi saat ini masih kurangnya ruang terbuka hijau, dalam hal pemenuhan RTH masih terkendala dengan keterbatasan lahan yang dimiliki pemerintah Kota Banda Aceh, serta keterbatasan biaya untuk pembebasan perluasan RTH.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Banda Aceh saat ini yang relatif tinggi mengakibatkan peningkatan volume sampah, konsumsi energi dan pencemaran lingkungan semakin meningkat, dalam hal pencemaran lingkungan, isu yang berkembang saat ini perlu penambahan tempat pembuangan sampah kedepan, perlu adanya daur ulang sampah, pemisahan sampah, pengolahan air limbah belum maksimal, asih adanya industri kecil yang membuang limabh ke saluran air dan

sungai dan untuk itu perlu penanganan yang lebih spesifik terhadap pengelolaan air limbah baik domestik, pasar dan industri kecil di Kota Banda Aceh.

4.2.9 Pengelolaan Air Bersih

Air bersih salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, mutlak harus tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas kota maka kebutuhan air bersih juga terus meningkat. Saat ini akses warga terhadap air bersih sudah cukup baik namun masih ada permasalahan berupa i) Cakupan pelayanan air minum belum 100 % (persen); ii) Perlunya sumber air bersih PDAM yang baru ; iii) Belum optimalnya jaringan pelayanan air minum kawasan tertentu. lV) Kualitas pelayanan air minum perpipaan masih perlu ditingkatkan V) Masih adanya Kebocoran pada jaringan air minum PDAM.

Pengembangan pengelolaan air bersih dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan PDAM serta meningkatkan kualitas jaringan perpipaan dan manajemen pengelolaan serta memperluas cakupan pelayanan PDAM

4.2.10 Mitigasi Bencana

Kota Banda Aceh sebagai kota rawan bencana saat ini sudah memiliki beberapa dokumen antara lain Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, Dokumen Rencana kontijensi bahaya banjir, Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, Rencana kontijensi bahaya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Mers-Cov).

Rendahnya kapasitas kelembagaan dan Koordinasi penanggulangan bencana, sehingga dibutuhkan penguatan lembaga atau intansi bencana yang dapat menjadi Leading Actor lintas sektor dan organisasi serta dapat menjalankan 3 fungsi yang meliputi fungsi koordinasi, fungsi komando dan fungsi pelaksana penanggulangan bencana di Kota Banda Aceh dengan menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan bencana.

Saat ini Kota Banda Aceh telah memiliki sistem peringatan dini dan Manajemen tanggap bencana namun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan seperti tidak berbunyinya atau terlambat berbunyi sirene ketika terjadi gempa yang berpotensi tsunami menyebabkan masyarakat menjadi panic dan petugas yang menangani penanggulangan bencana tidak dapat menenangkan masyarakat maupun mengarahkan masyarakat ketempat yang lebih baik/ aman.

4.2.11 Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Gender

Perencanaan pembangunan kependudukan harus diintegrasikan dan diimplementasikan ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan sektoral. Saat ini Kota Banda Aceh belum memiliki dokumen Grand Design Kependudukan sebagai acauan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, sehingga pembangunan berbasis kependudukan belum optimal. Harapannya perencanaan ini dilakukan pada lingkup nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan waktu penyusunan perencanaan kependudukan selambat-lambatnya bersamaan dengan waktu perencanaan pembangunan jangka panjang menengah dan/atau jangka panjang.

Perencanaan pembangunan kependudukan merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan tentang perubahan kondisi kependudukan yang diinginkan pada masa yang akan datang yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, mobilitas. Perencanaan ini dilakukan dengan menetapkan sasaran kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk beserta langkah pengelolaan perkembangan penduduk di suatu daerah pada masa yang akan datang. Tujuannya adalah menjadi acuan kedepan atau minimal menjadi acuan jangka menengah dalam menyusun program dan kegiatan serta langkah-langkah pengelolaan kependudukan.

Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan melalui penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) perlu terus ditingkatkan demikian juga halnya dengan partisipasi perempuan. Selain itu peningkatan pelayanan dasar yang berkualitas dalam rangka tumbuh kembang anak termasuk layanan dasar yang inklusif untuk anak rentan (berkebutuhan khusus) juga masih sangat rendah.

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. Hal ini tergambar dalam beberapa issue strategis saat ini, yaitu masih rendahnya kualitas partisipasi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan baik dilegislatif maupun eksekutif sehingga masih perlu mendapat pembinaan dan peningkatan kapasitas untuk menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan. Belum optimalnya peran kelembagaan dan penerapan regualasi untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, dan masih rendahnya penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) yang didukung dengan data terpilah baik ditingkat kota, kecamatan dan gampong.

Peran lembaga legislatif dalam memproduksi instrumen hukum yang melindungi perempuan dan anak juga masih kurang. Penguatan peran tokoh agama dalam upaya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memberikan penekanan posisi agama sebagai cara *fixing the problem* perlu digalakkan karena peran ulama menjadi elemen penting dalam upaya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga pencapaian seluruh indikator Kota Layak Anak (KLA) akan cepat terwujud.

Selainnya itu munculnya berbagai tindakan kekerasan di media online, menyebabkan kerentanan perempuan dan anak mengalami kekerasan, yang biasanya dalam bentuk eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual serta *bullying verbal.* Kekerasan melalui media sosial merupakan pola kekerasan *trend* di era teknologi informasi, yang juga berdampak buruk terhadap kondisi perempuan dan anak.

Issu permberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bukan hanya menjadi target lokal dan nasional, tapi juga tertuang secara global berupa indikator gender dalam suistanable developments (SDGs) sehingga harus menjadi fokus pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

4.2.12 Pengembangan Reformasi Birokrasi

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai Kota ramah birokrasi adalah melakukan reformasi di bidang pelayanan publik khususnya etika pelayanan. Etika pelayanan dalam kinerja pelayanan publik diperlukan sebagai bentuk adanya sikap tanggap dari aparat birokrasi terhadap kepentingan masyarakat pengguna jasa. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan e-government dalam optimalisasi pelayanan public, optimalisasi penegakan peraturan perundang-undangan, peningkatan SDM aparatur yang berintegritas, professional dan sejahtera serta memiliki budaya melayani. Kepentingan pengguna jasa merupakan tujuan utama, dengan prinsip tidak ada diskriminasi dan bersikap ramah dalam memberi pelayanan, sehingga pengguna jasa merasa memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya.

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan menjadi suatu ukuran keberhasilan birokrasi, selain melalui peningkatan nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan (SAKIP) dan indeks reformasi birokrasi Kota Banda Aceh.

4.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda memiliki peran penting mendorong proses pembangunan Kota Banda Aceh dengan porsi jumlah penduduk berusia muda yang mencapai 37,17 persen. Hal ini merupakan potensi besar dalam mendukung kesuksesan pembangunan daerah. Namun demikian, peran pemuda di Kota Banda Aceh dalam proses pembangunan belum terlibat secara maksimal. Kondisi ini dikarenakan belum optimalnya program /kegiatan dalam menggali potensi kepemudaan di kota Banda Aceh.

Selain dari itu dukungan keberlanjutan terhadap organisasi kepemudaan masih rendah serta masih kurangnya program yang mendukung kearah profesionalisasi tenaga kerja muda yang handal.

Kemajuan pembangunan keolahragaan tidak hanya diukur dari pencapaian prestasi dan seberapa banyak perolehan medali, melainkan juga seberapa besar akses masyarakat dalam melakukan aktivitas fisik serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, baik menyangkut fisik, mental spiritual, dan sosial secara menyeluruh. Dalam konteks ini, tentunya pembangunan keolahragaan terkait erat dengan upaya pembentukan manusia yang berkualitas, perlu adanya sekolah khusus olahraga disertai pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar, regulasi terkait dengan keolahragaan dan kepemudaan serta peningkatan kemitraan dengan lembaga pedidikan formal dan perusahaan/ CSR (Corporate Social Responsibility) dengan pola kerjasama untuk pengembangan pemuda

Upaya pembentukan manusia yang berkualitas masih belum berjalan optimal. Kondisi ini dikarenakan upaya pemerintah kota dalam mengembangkan potensi olahraga di kota Banda Aceh belum bersinergi dengan baik.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VISI

Visi merupakan suatu pandangan jauh tentang tujuan-tujuan dan tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Sebuah visi harus berorientasi ke depan, tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini, mengekpresikan kreatifitas, dan mengandung nilai penghargaan kepada masyarakat. Visi juga harus memperhatikan sejarah dan kultur, ideal, memiliki standar yang tinggi, serta bersifat ideal, tetapi juga memberikan semangat kepada berbagai komponen untuk mencapai tujuan-tujuan dari visi tersebut.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembaangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah, Visi kepala daerah terpilih dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)dan berlaku selama 5 (lima tahun). Untuk menyusun visi tersebut, antara lain kepala daerah terpilih harus berpedoman kepada dokumen perencanaan makro (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dalam rangka sinkronisasi sasaran pokok dan arah kebijakannya.

Atas dasar itu, dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Provinsi Aceh, maka Visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 adalah:

Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah

Visi Pemerintah Kota Banda Aceh ini mencerminkan arah pembangunan Kota Banda Aceh dalam masa lima tahun ke depan. Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banda Aceh yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.

Dalam visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 terdapat 2 (dua) kata penting yaitu “GEMILANG” dan “BINGKAI SYARI’AH.” Agar tidak multi tafsir, maka berikut ini dijabarkan arti kata-kata tersebut.

Gemilang adalah Menjadikan Kota Banda Aceh yang termasyhur dan terpandang dalam 3 pilar utama yaitu agama, ekonomi, dan pendidikan, menuju kejayaan dengan memperhatikan keadilan gender. Sedangkan Bingkai Syariah adalah Mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan sesuai Syariat Islam.

5.2 MISI

Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan penguraian secara ringkas upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan pemahaman dan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam penyusunannya, perumusan misi memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi juga disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut.

1. **Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah, dan akhlak.**
   Misi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan benar-benar berada dalam bingkai pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.
2. **Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.**
   Misi ini dimaksudkan untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan, memajukan seni dan budaya Aceh, melakukan pembinaan kepemudaan, dan membudayakan olahraga sehat dan rekreasi, serta memajukan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan pada tingkat regional dan nasional.
3. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.**
   Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi perbaikan pendapatan masyarakat yang dalam lima tahun ke depan yang berdampak kepada peningkatan PAD dengan kebijakan dan strategi yang efektif sehingga pada gilirannya akan meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah.
4. **Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat**
   Misi ini ditujukan untuk menghasilkan kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik melalui upaya penguatan pemberdayaan kesehatan masyarakat yang dicapai dengan kerjasama dan kemitraan, penguatan pembiayaan dan sumber daya kesehatan serta kebijakan penguatan manajemen, regulasi, system informasi kesehatan,penelitian dan pengembangan kesehatan.
5. **Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.**
   Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landaasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dengan birokrasi yang tidak hanya kuat dari sisi legalitas, melainkan juga professional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari Kolusi Korupsi Nepotisme, netral, mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
6. **Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.**
   Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mengoptimalkan sumber daya tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan di masa sekarang dan masa yang akan datang.
7. **Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.**
   Misi ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian kelompok perempuan dalam mengejar kemajuannya dan meningkatkan rasa aman dan nyaman kelompok ibu dalam kehidupannya serta tumbuh kembang anak yang baik.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan *(policy planning)* yang memiliki kritikal *point* dalam penyusunan RPJMD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

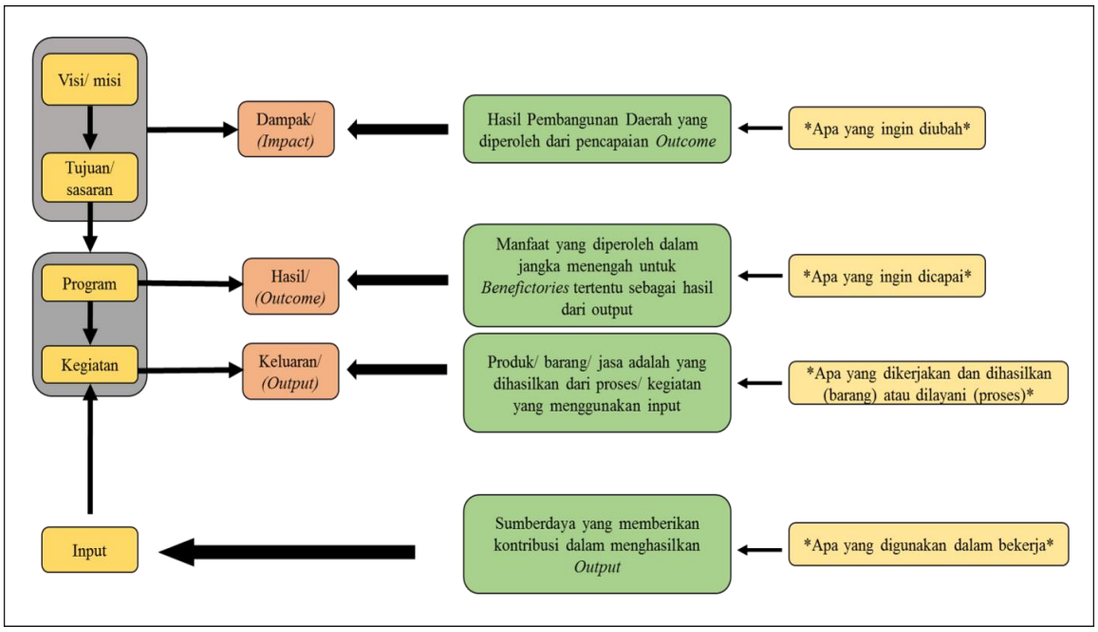

Gambar 5.1
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

Dari gambar di atas, jelas bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerahpun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi walikota dan wakil walikota menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan SKPD dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini:

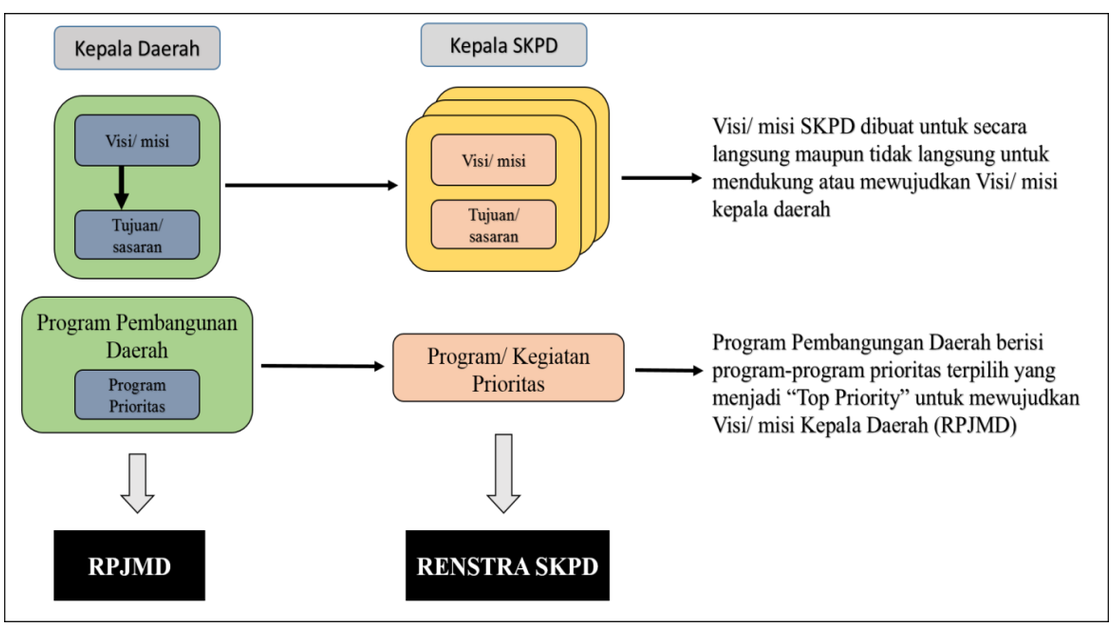

Gambar 5.2
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi; melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Adapun Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang Aqidah, Syariah dan Akhlak
Tujuan : Terwujudnya nilai-nilai Islami dalam seluruh aspek kehidupan warga Kota Banda Aceh, dengan sasaran yaitu Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam.

Pelaksanaan Syariat Islam merupakan bagian integral dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan di Banda Aceh. Untuk itu perencanaan pembangunan di Kota Banda Aceh harus memperhatikan aspek Syariat Islam sebagai prioritas pembangunan. Sehubungan dengan ditetapkannya Qanun Nomor 1 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh selain Dinas Syariat Islam kini kota Banda Aceh juga mempunyai OPD baru yang fokus pada aqidah dan syariah yaitu Dinas Pendidikan Dayah (DPD) Kota Banda Aceh. Selain itu OPD lain yang mendukung adalah DSI, Satpol PP, MPU, Disdikday, MAA.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
Tujuan : Mewujudkan pendidikan kota Banda Aceh yang bermutu, berdaya saing, dan berkarakter Islami dan berprestasi, dengan sasaran yaitu Terpenuhinya standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan.

Pembangunan sektor pendidikan memiliki banyak variabel dan masing-masing variabel sangat kompleks dan rumit sifatnya. Oleh sebab itu, pembangunan sektor pendidikan memerlukan perencanaan yang tepat.

Dalam jangka waktu 20 tahun ke depan Kota Banda Aceh diharapkan menjadi kota yang penduduknya mempunyai peradaban yang tinggi, menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat yang dilandasi oleh kearifan lokal dan nilai-nilai Islam.

Untuk itu, seyogyanya semua komponen pelaku pembangunan diharapkan dapat berkiprah menurut perannya masing-masing dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan. Dalam hal ini, semua pihak perlu membangun dan menyatukan komitmen, bahwa pengembangan SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai sangat diperlukan sebagai pendukung pembangunan Kota Banda Aceh pada masa yang akan datang. Pembangunan pendidikan merupakan sarana utama dalam mengimplementasikan komitmen tersebut. Oleh karena itu, semua komponen (pemerintah, masyarakat, alim-ulama, dan usahawan) mau bekerja sama secara sinergis dan mau mendukung tercapainya tujuan sebagaimana yang diharapkan. Selain itu SKPD lain yang mendukung adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pustaka Arsip, Dinas Pemuda dan Olahraga.

Misi 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat
Tujuan 1 : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusive dan kesejahteraan merata, dengan sasaran yaitu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Misi ketiga Walikota Banda Aceh yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pariwisata dan kesejahteraan masyarakat, mencakup berbagai aspek yang terkait dengan upaya peningkatan aktivitas perekonomian yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya tersebut dikaitkan pula dengan berbagai peluang dan potensi yang dimiliki Kota Banda Aceh seperti peningkatan investasi, pengembangan pariwisata, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, serta pengembangan ekonomi kreatif.

Peluang investasi Kota Banda Aceh pada kondisi kinerja awal RPJMD adalah:
1. Perdagangan, Jasa dan Koperasi;
2. Industri;
3. Infrastruktur;
4. Energi;
5. Pariwisata; dan
6. Perikanan dan Kelautan.

Peluang Investasi ini telah tertuang pada Rancangan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Banda Aceh Tahun 2017 s/d 2025. Peluang investasi yang telah tersedia di dalam RUPM harus disertai dengan lahan yang tersedia dan telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, sehingga memudahkan para investor yang datang untuk berinvestasi di Kota Banda Aceh.

Saat ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga telah menyediakan aplikasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID). SIPID merupakan sistem informasi berbasis web yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai potensi investasi suatu daerah, sehingga Penanam Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat melihat peluang investasi yang ada didaerah melalui aplikasi ini dan tidak harus datang ke daerah dimana para investor ingin menanamkan modalnya. Nantinya jika RUPM Kota Banda Aceh telah selesai, semua peluang investasi yang telah tersedia dapat dimasukkan datanya kedalam aplikasi ini yang merupakan pintu gerbang bagi calon investor untuk memperoleh informasi terhadap potensi investasi.

Terkait dengan ketenagakerjaan, jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Tahun 2016 tercatat sebanyak 740 orang. Dari jumlah tersebut yang terdata ditempatkan /bekerja adalah 110 orang (14.86%). Dengan mengefektifkan fungsi staf pengantar kerja, ditargetkan akan ada peningkatan jumlah penempatan setiap tahun nya sehingga pada akhir RPJM Tahun 2022 dapat mencapai 30%.

Sedangkan untuk pencari kerja terdaftar yang mendapat pelatihan sangat tergantung kepada ketersediaan anggaran. Di awal RPJM Tahun 2017 ada anggaran untuk pelatihan bagi 135 orang dari 740 orang yang terdaftar (18%). Anggaran untuk pelatihan ini akan terus diusulkan peningkatan setiap tahunnya sehingga pada Tahun 2022 tenaga kerja terdaftar yang mendapat pelatihan keterampilan diprediksi mencapai 30%.

Untuk memajukan hasil kerajinan Industri Kecil dan Menengah (IKM), dibutuhkan even-even pameran, baik yang dilaksanakan di dalam daerah maupun di luar daerah atau di luar negeri. Di awal RPJM diupayakan terlaksana pameran produk IKM ini sebanyak 10 *even* baik dilaksanakan oleh dinas tenaga kerja maupun oleh Dekranas Kota Banda Aceh. Untuk memperbanyak even pameran yang bias diikuti dibutuhkan anggaran yang besar, karena itu even pameran produk IKM ini hanya ditargetkan 12 kali even pada akhir RPJM Tahun 2022.

Penyelesaian kasus hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang diselesaikan oleh mediator maupun fasilitator Dinas Tenaga Kerja setiap tahun nya mencapai 70 kasus. Tahun 2016 ada 66 kasus yang berhasil diselesaikan atau sekitar 94.29%, sisanya dilimpahkan ke pengadilan.

Dengan asumsi jumlah kasus tetap setiap tahun maka pada akhir masa RPJM Tahun 2022 ditargetkan 98.57% kasus hubungan industrial dapat diselesaikan oleh mediator dan fasilitator Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.

Dalam rangka pencapaian misi 3, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan akan dilaksanakan peningkatan pertumbuhan sector unggulan perekonomian berdasarkan Perwal/Qanun penataan Pedagang Kaki Lima dan asongan. Selain itu perlu juga ditingkatkan sarana dan prasarana ekonomi daerah melalui penciptaan pasar yang representative, mengupdate informasi harga pasar dan menstabilkan harga kebutuhan masyarakat. Selain itu SKPD yang mendukung adalah Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Dinas Pertanian Perkebunan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengelola Keuangan Kota, Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu, Dinas pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Baitul Mal, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Ekonomi.

Misi 4 : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
Tujuan : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dengan sasaran yaitu Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Tantangan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh karena itu pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, serta globalisasi dengan kemitraan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat. OPD yang mendukung adalah Dinas Kesehatan, BLUD Rumah Sakit Umum Meuraxa.

Misi 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran yaitu

- Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi
- Meningkatnya Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintahan yang adil, bersih dan transparan (*Good Governance*), penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah salah satu penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 yang merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, terutama terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Selain itu dibutuhkan pula strategi peningkatan kapasitas birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel melalui peningkatan efektivitas pengawasan Aparatur Pemerintah. Strategi pengawasan tersebut dalam implementasinya diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh diharapkan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara optimal, serta penyelenggaraan pemerintahan dapat diselenggarakan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan bagi generasi mendatang adalah merupakan kegiatan yang membutuhkan landasan yang kuat. Untuk itu kegiatan strategi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu mendapat dukungan semua pihak. Selain itu OPD yang mendukung adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Badan Kepegawaian Peningkatan SDM, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, Dinas

Kesbangpol, Inspektorat, Bag. Organisasi, Badan Pengelola Keuangan Kota, Bappeda dan Kecamatan.

Dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan professional di era global dibutuhkan pula dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Banda Aceh sangat *concern* terhadap pemanfaatan TIK di dalam mendukung pelaksanaan layanan pemerintahan. Pentingnya pemanfaatan TIK dalam mendukung kegiatan pelayanan pemerintahan di daerah ditunjukkan dengan dilakukannya Pemeringkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik/E-Government oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kementerian PAN-RB. Dimensi yang dinilai adalah dimensi Tata Kelola, Layanan dan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penilaian ini dilakukan oleh asesor (Tim Penilai) yang berasal dari lintas sektor yang sudah tersertifikasi terkait penilaian dimensi tersebut. Hasil penilaian tersebut merupakan evaluasi tingkat pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) di suatu daerah/ Lembaga.

Misi 6 : Membangun Infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana kota yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan, dengan sasaran sebagai berikut :

- Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Kota Layak Huni.
- Mitigasi kebencanaan yang tangguh.
- Pemenuhan kebutuhan energi listrik dari sumber energi terbarukan.

Misi VI disusun untuk mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Kota Banda Aceh yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk menjadikan kualitas lingkungan hidup Kota Banda Aceh lebih baik dengan pembangunan infrastruktur yang menganut prinsip berkelanjutan, yaitu memperhatikan daya dukung lingkungan guna menunjang keberlangsungan aktivitas produktif masyarakat. Dengan terbangunnya seluruh infrastruktur pendukung di berbagai sektor pembangunan diharapkan Banda Aceh menjadi salah satu Kota Layak Huni di Indonesia.

Dalam mencapai sasaran tersebut, prinsip tata ruang yang dikembangkan adalah terintegrasinya pembangunan dengan ekosistem. Segala kebijakan kota terkait tata ruang diharapkan tidak bertentangan dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan yang akan berakibat pada penurunan kualitas hidup masyarakat secara umum.

Pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak, ketersediaan ruang terbuka hijau, akses air minum yang merata, kelestarian lingkungan, penanganan sampah dan pembenahan sanitasi, peningkatan pelayanan serta pengembangan sistem transportasi merupakan elemen penting infrastruktur kota yang perlu dikelola pemerintah kota dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terwujudnya Kota Banda Aceh dengan infrastruktur Kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan merupakan harapan dan dambaan seluruh warga masyarakat kota Banda Aceh.

Untuk mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kota serta implementasi perencanan tata ruang yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan, maka dilakukan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten. Hal ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mewujudkan rencana tata ruang sebagai basis pembangunan.

Salah satu isu di Kota Banda Aceh adalah masih adanya jalan yang rusak, ketersediaan prasarana jalan yang kurang selaras dengan sebaran fungsi kegiatan, keberadaan beberapa titik wilayah yang masih tergenang air di waktu hujan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan optimal bagi aksesibilitas dan mobilitas antar pusat dan subpusat kegiatan kota, pemerintah kota terus berupaya meningkatkan mobilitas masyarakat kota, melalui penyediaan trotoar dan drainase jalan kota, meningkatkan kualitas bahu jalan, akses hijau dan estetis serta menjamin keselamatan pengguna

jalan. Dalam rangka mewujudkan sungai sebagai sistem drainase alami yang mampu mengakomodasi kebutuhan pengaliran air untuk meminimalkan potensi banjir, juga dalam rangka mewujudkan sungai sebagai bagian muka pembangunan kota (*River-front City Development*) serta bangunan pelengkapnya yang fungsional dan menunjang estetika kota; serta mewujudkan sistem penerangan jalan umum kota yang andal, merata, berkeadilan, hemat energi, berestetika serta ramah lingkungan dengan pengelolaan terpadu, maka diharapkan hal itu dapat direalisasikan melalui penyediaan infrastruktur, permukiman, dan sanitasi perkotaan yang ramah dan nyaman.

Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata diukur melalui naiknya persentase rasio luas jalan dalam kondisi baik dengan target 95,52% jalan Tahun 2022 sudah berada dalam kondisi baik. Indikator yang lain adalah peningkatan skala Indeks Aksesibilitas Jalan, target kinerja 95,52% pada akhir periode RPJMD mengalami kenaikan sebesar 12% dari kondisi awal RPJMD sebesar 83,52%.

Terselesaikannya permasalahan banjir dengan indikator kinerja tercapainya panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik sebesar 90% pada Tahun 2022 dan terselesaikannya titik banjir sejumlah 5 titik di seluruh wilayah Kota Banda Aceh pada tahun 2022;

Terkait dengan integrasi data, pada tahun 2017 ini belum ada data yang terintegrasi dengan data lainnya di Pemerintah Kota Banda Aceh, hal tersebut tentu akan mempengaruhi kinerja pemerintah Kota dalam meningkatkan pelayanan publik melalui sarana dan prasarana Kota yang berkesinambungan. Untuk itu perlu dilakukan pengintegrasian berbagai data di Kota Banda Aceh di mulai dari data kependudukan, perencanaan pembangunan, keuangan, pendidikan, kesehatan dan sektor pelayanan publik lainnya, sehingga pada tahun 2022 akan tercapai minimal 10 data di Pemerintah Kota Banda Aceh akan terintegrasi satu dengan lainnya.

Keterbaruan (*update*) informasi untuk di konsumsi oleh masyarakat, *web site* bisa menjadi salah satu sarana tercepat untuk penyebarannya.Sampai dengan akhir tahun 2016 diperkirakan hanya 8 SKPD yang terus memperbarui informasinya. Untuk meningkatkan jumlah informasi yang terbarukan di SKPD dibutuhkan pelatihan dan pendampingan sehingga jumlah SKPD yang memperbarui informasi akan meningkat menjadi 45 SKPD pada tahun 2022 dan itu merupakan jumlah total dari SKPD yang ada di Pemerintah Kota Banda Aceh.

Terkait dengan sektor transportasi, salah satu penyelesaian kemacetan lalu lintas dan pengurangan polusi udara dan kebisingan dengan menyediakan transportasi publik yang ramah lingkungan, efisien, efektif, terjangkau serta memberikan kenyamanan bagi pengguna. Langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka menggerakkan masyarakat menggunakan trasportasi publik yaitu dengan meningkatkan jumlah armada penghubung angkutan (*feeder*) Trans Koetaradja. Diharapkan dengan adanya *feeder* akan meningkatkan cakupan layanan transportasi *public* dan mengintegrasikan transportasi kewilayah permukiman sehingga jumlah pengguna transportasi publik akan meningkat. Tahun 2017 cakupan pelayanan sebesar 23 persen dan ditargetkan tahun 2022 dapat melayani 94 persen gampong diwilayah Kota Banda Aceh.

Untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna Trans Koetaradja maka diperlukan fasilitas pendukung dan kelengkapan jalan (rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, *traffic light*) halte, serta pengendalian lalu lintas di persimpangan melalui teknologi informasi ATCS (*Area Traffic Control System*). Sampai dengan awal tahun 2017 telah ada 3 persimpangan yang dapat menggunakan teknologi ATCS dan ditargetkan akan bertambah menjadi 20 persimpangan sampai tahun 2022. Dengan berfungsinya ATCS maka akan dapat mengatur waktu sinyal di persimpangan secara responsif dan terkoordinasi yang bertujuan untuk meminimalkan waktu tundaan dan antrian agar diperoleh pergerakan arus lalu lintas yang optimal, memberikan prioritas lampu hijau bagi Trans Koetaradja, dalam keadaan tertentu dapat memberikan waktu hijau bagi kendaraan prioritas seperti pemadam kebakaran, ambulance, VVIP, konvoi dll serta menyampaikan informasi kondisi

lalu lintas dan alternatif lintasan dan menyediakan rekaman data lalu lintas, kejadian kecelakaan dan kejadian lainnya di persimpangan.

Seiring dengan pertambahan jumlah kendaraan, maka untuk meningkatkan keselamatan bagi pengguna jalan dibutuhkan penambahan fasilitas keselamatan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, paku marka, papan nama jalan, *rubber speed bump*, cermin tikungan dan lain-lain sehingga terciptanya keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan.

Dalam rangka mitigasi bencana secara dini dan komprehensif khususnya bencana kebakaran, adalah melalui peningkatan cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 73,34% dan tingkat waktu tanggap (*respon time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) 82,85%. Upaya yang akan dilakukan adalah melalui penambahan pos wilayah ke setiap bagian wilayah Kota Banda Aceh sehingga upaya penanggulangan terhadap bahaya kebakaran dapat ditingkatkan.

Dalam mencapai terwujudnya mitigasi kebencanaan yang tangguh dan handal akan dilakukan dengan menambah sarana dan prasarana mitigasi bencana, peningkatan pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap kebencanaan, dan penguatan regulasi kebencanaan.

Penanganan sampah menjadi hal krusial dan juga fokus pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan infrastruktur sanitasi yang berkualitas dan merata. Peningkatan cakupan pelayanan persampahan kota ditargetkan sebesar 93% pada tahun 2022, dengan menurunkan volume sampah yang dikelola di TPA *landfill*. Pengolahan sampah dengan cara *landfill* diproyeksikan terus menurun prosentasenya dan digantikan dengan pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan konsep 3-R atau pengurangan sampah dari sumbernya.

Dalam mewujudkan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau kota dan kelestarian lingkungan hidup digunakan beberapa indikator kinerja sasaran. Indikator tersebut antara lain penataan RTH hutan kota, taman kota dan jalur hijau lainnya) sebesar 80,11%, penataan bangunan yang berwawasan lingkungan dan penerapan RDTR sesuai dengan peruntukannya.

Upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan dilakukan dengan meningkatkan akses terhadap infrastruktur pelayanan dasar kawasan kumuh, meningkatkan penyediaan rumah layak huni, rusunawa dan rumah khusus.

Dalam penanganan kawasan kumuh difokuskan juga untuk mencegah timbulnya kawasan kumuh baru. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah kota akan membuat regulasi tentang pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Dalam pelayanan air minum di kota Banda Aceh saat ini belum tercapainya pelayanan secara maksimal baik terhadap cakupan pelayanan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Hal ini disebabkan oleh karena terus terjadinya penambahan jumlah penduduk dan pembangunan perumahan dan industri yang terus berkembang di Kota Banda Aceh. Pemasangan jalur perpipaan terus ditingkatkan untuk dapat mengejar cakupan pelayanan dan peningkatan kapasitas pelayanan air minum 100 % diwilayah administrasi Kota Banda Aceh yang telah mencapai 83 % saat ini.

Upaya-upaya yang terus dilakukan untuk peningkatan cakupan pelayanan yaitu menargetkan cakupan pelayanan di tahun 2018 adalah 93% untuk pencapaian target 100% pelayanan tahun 2019 nantinya. Untuk pencapaian 4K dalam Sistem Penyediaaan Air Minum, PDAM Tirta Daroy Banda Aceh melakukan program pembentukan zona pelayanan menjadi 4 wilayah. Hal ini diharapkan nantinya penyaluran air minum dengan metode pendistribusian berdasarkan kebutuhan (*management supply and demand*). Dengan terbentuknya zona di wilayah pelayanan air minum diharapkan dapat menurunkan angka tingkat kehilangan air yang masih diatas 40% dan managemen tekanan air di sistem perpipaan yang selama ini masih bermasalah serta dapat

dibentuknya Daerah Meter Area (DMA) sebagai solusi pelayanan terhadap kualitas pelayanan dan penurunan tingkat kehilangan air oleh PDAM Tirta Daroy saat ini.

Permasalahan yang masih menjadi kendala dalam sistem penyediaan air minum di Kota Banda Aceh adalah sumber air baku yang sampai saat ini hanya menggunakan air dari Krueng Aceh dimana debitnya yang terus berkurang sementara kebutuhan terus meningkat dan kualitaa air baku yang makin lama makin buruk terutama saat musim penghujan akibat rusaknya daerah aliran sungai (DAS) sungai Krueng Aceh yang menjadi sumber utama air baku untuk pengolahan air minum untuk kota Banda Aceh. Selain itu SKPD yang mendukung adalah Dinas PUPR, Dinas LHK3, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Informatika , Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MISI 7 : Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta pengendalian penduduk, dengan sasaran yaitu Pemerataan pembangunan berbasis gender dan ramah anak serta persentase laju pertumbuhan penduduk

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kota Banda Aceh pada tingkat provinsi masih berada dibawah rata-rata nasional dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan melambat, bahkan turun di tahun 2015. Penurunan ini antara lain akibat masih sempitnya akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang rendah. Beberapa kabupaten kota yang mendukung indeks ini juga mengalami hal yang sama.

Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja di Kota Banda Aceh walau masih di bawah rata-rata provinsi, namun mengalami kenaikan perlahan di setiap tahunnya. Ini menunjukkan semakin meningkatnya kontribusi perempuan dalam menambah sumbangan pendapatan kerja

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Untuk bidang perlindungan perempuan dan anak, berdasarkan data yang tahun 2015, tercatat 133 kasus dan ini menunjukkan semakin meningkat lebih dari 100% dari tahun sebelumnya (tahun 2014, sebanyak 59 kasus), Dan kembali meningkat pada tahun 2016 sebanyak 176 kasus). Dari laporan pengaduan yang masuk rata-rata dengan jenis kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual pada anak dan perlakuan diskriminasi lainnya. Dari keseluruhan jumlah pengaduan, 99% ditangani baik proses hukum, layanan psikologis, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan 0,02% lainnya ditarik kembali dan diselesaikan ditingkat gampong.

Data base kasus kekerasan terhadap perempuan mencatat bahwa pelaku terbanyak adalah laki-laki yang mempunyai relasi perkawinan dengan perempuan yang menjadi korbannya, diantaranya suami, mantan suami, orang tua, anak, bahkan saudara/kerabat. *Database* juga menunjukkan

bahwa profil pelaku dan korban kekerasan terhadap perempuan terutama KDRT, sangat beragam latar belakang status sosial, ekonomi, pendidikan, usia, etnis & agamanya.

Peningkatan jumlah kasus yang hingga saat ini masih merupakan fenomena gunung es, antara lain disebabkan karena meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan, terbangunnya mekanisme penanganan lintas sektor terhadap penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Untuk masa yang akan datang juga akan terus dikembangkan mekanisme perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk itu dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak-hak anak yang seutuhnya, juga dlakukan dengan melakukan sosialisasi Banda Aceh menuju Kota Layak Anak ini di 9 Kecamatan dan diikuti dengan terbentuknya kelompok forum anak kecamatan.

Sebagai upaya membuka ruang partisipasi bagi anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memfasilitasi Pembentukan forum anak. Forum anak diharapkan mampu menjadi wadah bagi peningkatan partisipasi dan kapasitas serta menyalurkan aspirasi dan suara anak. Anggota forum anak ini merupakan perwakilan dari berbagai kelompok anak, kelompok anak disabilitas, perwakilan forum anak kecamatan, kelompok anak korban kekerasan, kelompok anak jalanan serta kelompok anak yang bermasalah dengan sosial lainnya.

Forum anak ini diharapkan menjadi media bagi intansi terkait, lembaga maupun individu agar memperoleh informasi yang benar dalam mewujudkan pembagunan berdasarkan perspektif anak.

Komitmen untuk mewujudkan Banda Aceh menuju kota layak anak, juga tergambar dari sudah terpenuhinya 26 dari 31 indikator (80%) Kota Layak Anak yang dicanangkan oleh Pemerintah. Meningkatkan kerjasama lintas sektor menjadi langkah awal yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai instansi kesektrariatan untuk merangkum dan mengkompilasi data pemenuhan indikator kota layak anak ini. Tanpa adanya dukungan intansi terkait, maka tidak mungkin 26 indikator ini bisa terpenuhi.

Strategi lain yang ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah terus mendorong pelibatan pihak swasta dan media untuk melakukan upaya-upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, Meningkatkan partisipasi anak, Meningkatnya keperdulian orang tua terhadap proses tumbuh kembang anak.

Kota Layak Anak menjadi dambaan setiap elemen, baik masyarakat, pemerintah daerah maupun masyarakat. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengharapkan meningkatnya dukungan dan partisipasi yang maksimal dari berbagai *stake holders* agar Banda Aceh mampu menjadi Kota Layak Anak seutuhnya seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Selain itu OPD yang mendukung adalah DP3AP2KB

Tabel 5.1
VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Target Kinerja Sasaran					Target Kinerja Pada Akhir RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
				Satuan	Volume	2018	2019	2020	2021	2022		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Visi : Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah											
	Misi 1 :Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Bidang Aqidah, Syariah, dan Akhlak											
1.1		Tujuan : Terwujudnya nilai-nilai Islami dalam seluruh aspek kehidupan warga Kota Banda Aceh	Nilai Survey Pelaksanaan Syariat Islam Banda Aceh	Nilai	0*	65	70	75	80	85	85	DSI, Satpol PP & WH, Disdikday, Sekretariat MPU, Sekretariat MAA
1.1.1		Sasaran 1 : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam	Nilai Survey Pelaksanaan Syariat Islam Banda Aceh	Nilai	0	65	70	75	80	85	85	DSI, Disdikday, Sekretariat MPU, Sekretariat MAA
			Penurunan angka pelanggaran terhadap Qanun Syariat Islam	Kasus	200	180	160	120	100	80	80	DSI, Disdikday, Satpol PP & WH, Sekretariat MPU, Sekretariat MAA
	Visi : Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah											
	Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga.											
2.1		Tujuan : Mewujudkan pendidikan kota Banda Aceh yang bermutu, berdaya saing, berkarakter Islami dan berprestasi	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	%	0	70	72	75	77	80	80	Disdikbud, Dinas Perpustakaan & Kearsipan, Disdikday, Sekretariat MPD
2.1.1		Sasaran 1 : Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	%	70	70	72	75	77	80	80	Disdikbud, Dinas Perpustakaan & Kearsipan, Disdikday, Sekretariat MPD
			Persentase siswa yang mampu menghafal Al-Quran	%	0	5	6	7	8	10	10	Disdikbud, Dinas Perpustakaan & Kearsipan, Disdikday, Sekretariat MPD
			Tingkat Prestasi kota di POPDA	Peringkat		Peringkat 4	-	Peringkat 3	-	Peringkat 2	Peringkat 2	Dispora

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Target Kinerja Sasaran					Target Kinerja Pada Akhir RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
				Satuan	Volume	2018	2019	2020	2021	2022		
	Visi : Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah											
	Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat											
3.1		Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusive dan berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB	%	3,06	3,41	3,60	3,78	3,96	4,04	4,04	Disnaker, Diskop UKM & Dag, DP2KP, DLHK3, BPKK, DPMPTSP, Dispar, DPMG, Baitul Mal, Dinas PUPR, Dinsos
3.1.1		Sasaran 1 : Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan PDRB	%	3,06	3,41	3,60	3,78	3,96	4,04	4,04	Disnaker, Diskop, UKM dan Dag, DP2KP, DLHK3, BPKK, DPMPTSP, Dispar, Dinsos, DPMG
			Koefisien Gini	Indeks	0,314	0,325	0,321	0,319	0,317	0,315	0,315	
			Angka kemiskinan	Jiwa	18.710	18.621	18.531	18.442	18.352	18.263	18.263	Dinsos, Disnaker, Sekretariat Baitul Mal, Diskop UKM & Dag, DPMG, DP2KP
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,75	7,35	6,95	6,55	6,08	5,68	5,68	Dinsos, Disnaker, Sekretariat Baitul Mal, Diskop UKM & Dag
			Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	118.000.000.000**	15	25	50	75	100	100	DPMPTSP
			Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	287.109	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	2.000.000	Dispar, Dinas PUPR
	Visi : Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah											
	Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat											
4.1		Tujuan : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	IKS	0,3	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	Dinkes, RSU Meuraxa
4.1.1		Sasaran 1 : Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	IKS	0,3	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	Dinkes, RSU Meuraxa

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Target Kinerja Sasaran					Target Kinerja Pada Akhir RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
				Satuan	Volume	2018	2019	2020	2021	2022		
	Visi : Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah											
	Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik											
5.1		Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Pemeringkatan pemerintahan berbasis elektronik	Indeks	2,6 (CC)	2,65 (CC)	2,7 (CC)	2,8 (CC)	2,9 (CC)	3 (B)	3 (B)	Sekretariat Daerah, Bappeda, Sekretariat DPRK, BKPSDM, Disdukcapil, Kesbangpol, Inspektorat, BPKK, Diskominfo, Satpol PP & WH, DPMG, DLHK3, DP2KP, Kecamatan
5.1.1		Sasaran 1 : Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	70	70	75	80	85	90	90	Sekretariat Daerah, Bappeda, Sekretariat DPRK, BKPSDM, Disdukcapil, Kesbangpol, DPMG, Inspektorat, Satpol PP & WH, Kecamatan
5.1.2		Sasaran 2 : Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Nilai Pemeringkatan pemerintahan berbasis elektronik	Indeks	2,6 (CC)	2,65 (CC)	2,7 (CC)	2,8 (CC)	2,9 (CC)	3 (B)	3 (B)	Sekretariat Daerah, Diskominfotik, DP2KP, DLHK3, BPKK
	Visi : Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah											
	Misi 6 : Membangun Infrastruktur Kota yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan											
6.1		Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana kota yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	60,90	61,40	61,90	62,40	62,90	63,40	63,40	Sekretariat Daerah, Bappeda, Dinas PUPR, DLHK3, Dinas Perkim, DPKP, Dishub,BPBD
6.1.1		Sasaran 1 : Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Kota Layak Huni	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	60,90	61,40	61,90	62,40	62,90	63,40	63,40	Sekretariat Daerah, Bappeda, Dinas PUPR, DLHK3, Dinas Perkim, DPKP, Dishub,BPBD
6.1.2		Sasaran 2: Mitigasi kebencanaan yang tangguh	Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks	0,79	0,80	0,81	0,83	0,85	0,86	0,86	BPBD, DPKP

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Target Kinerja Sasaran					Target Kinerja Pada Akhir RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
				Satuan	Volume	2018	2019	2020	2021	2022		
6.1.3		Sasaran 3 : Pemenuhan kebutuhan energi listrik dari sumber energi terbarukan	Jumlah daya pasokan listrik dari energi terbarukan	KWp	14,76	14,76	21,76	28,76	35,76	42,76	42,76	DLHK3
	Visi : Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah											
	MISI 7 : Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
7.1		Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta pengendalian penduduk	Persentase Indikator Kota Layak Anak yang dipenuhi	%	53	53	56	59	62	65	65	DP3AP2KB
7.1.1		Sasaran 1 : Pemerataan pembangunan berbasis gender dan ramah anak	Index Pembangunan Gender (IPG)	%	95,66	95,66	96,02	96,38	96,74	97,10	97,10	DP3AP2KB
			Persentase Indikator Kota Layak Anak yang dipenuhi	%	53	53	56	59	62	65	65	DP3AP2KB
7.1.2		Sasaran 2 : Pengendalian pertumbuhan penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	DP3AP2KB

* Kegiatan Survey Pelaksanaan Syariat Islam baru dilakukan pada tahun 2018

** persentase peningkatan nilai investasi tahun 2017 tidak dapat dihitung karena data investasi 2016 belum menggunakan sistem OSS (online single submission) sistem OSS digunakan sejak tahun 2017

5.4 Keselarasan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) kota Banda Aceh Dengan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh.

Tabel 5.2

Tabel Keselarasan Misi RPJM dan Misi RPJP

MISI RPJM 2012-2022	MISI RPJP 2007-2027
Misi 1 : Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang Aqidah, Syariah, dan Akhlak.	1. Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah
Misi 7 : Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
Misi 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah disertai dengan penegakan hukum.
Misi 6 : Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	3. Mewujudkan pembangunan Kota Banda Aceh yang nyaman, aman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.	4. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota pendidikan yang berkualitas.
Misi 4 : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	6. Mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang sehat, cerdas dan berkualitas
Misi 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat	7. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota wisata berbasis masyarakat dan budaya Islami.
	5. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan, industri dan perikanan.

5.5 Keselarasan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Dengan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA).

Tabel 5.3

Tabel Keselarasan Misi RPJM dan Misi RPJMA

MISI RPJM 2017-2022	MISI RPJMA 2017-2022
Misi 1 : Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan syiar Islam.	Misi 2 : Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah.
Misi 7 : Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Misi 3 : Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki.
Misi 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Misi 1 : Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Misi 6 : Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	Misi 10 : Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur berkelanjutan dan terintegrasi.
MISI 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga	Misi 4 : Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat regional dan nasional.
MISI 4 : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Misi 5 : Mewujudkan akses layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial secara terintegrasi.
MISI 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat	Misi 8 : Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi dan industri kreatif yang kompetitif.
	Misi 6 : Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.

	Misi 9 : Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
	Misi 7 : Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbaharukan.

5.6 Keselarasan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kota Banda Aceh dengan Misi Rencana Tata Ruang Wilayah Kerja (RTRW) Kota Banda Aceh.

Tabel 5.4

Tabel Misi RPJM dan Strategi RTRWK

MISI RPJM 2017-2022	STRATEGI RTRWK
MISI 1 : Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan syiar Islam.	KEBIJAKAN 1: Meningkatkan pelayanan kota secara merata dan berhirarki.
MISI 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga	KEBIJAKAN 2 : a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kota secara merata ke seluruh wilayah kota. b. Mewujudkan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
MISI 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat	KEBIJAKAN 3 : a. Melestarikan fungsi lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan kota dalam jangka panjang; b. Mewujudkan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
MISI 4 : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	KEBIJAKAN 4 : a. Menetapkan kawasan perlindungan setempat, Ruang Terbuka Hijau dan kawasan cagar budaya. b. Mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. c. Melestarikan nilai-nilai budaya dan sejarah d. Mengembangkan kawasan baru yang didorong perkembangannya dimasa mendatang.
MISI 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	
MISI 6 : Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	KEBIJAKAN 6 : a. Mengendalikan kegiatan pada kawasan rawan bencana b. Meningkatkan upaya mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana
MISI 7 : Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	KEBIJAKAN 7 : a. Mewujudkan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; b. Mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. c. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kota dalam pengembangan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan regional;

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan penting dan mendesak pelaksanaannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Demikian juga dengan program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD yang bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022, maka Pemerintah Daerah akan melaksanakannya melalui 7 (tujuh) misi yang telah disusun melalui strategi-strategi. Strategi juga merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah *(strategy focussed-management).* Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Untuk pencapaian ***Misi Pertama : Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Bidang Aqidah, Syariah, dan Akhlak*** adalah melalui strategi Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencegah pendangkalan aqidah dan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur penegak syariat Islam. Hal ini dilakukan dengan arah kebijakan yaitu : Memperkuat peran organisasi masyarakat dalam mencegah pendangkalan aqidah

Strategi untuk pencapaian ***Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga*** adalah melalui Peningkatan peran orang tua, komite sekolah, MPD dan *stakeholder* lainnya dalam pembangunan pendidikan, Meningkatkan Kapasitas Guru dalam multimedia pembelajaran, Melakukan Sertifikasi Keahlian Pemuda, penyediaan dan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana yang representatif. Hal ini dilakukan dengan beberapa arah kebijakan yaitu : Penguatan Kemitraan Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat, menciptakan Budaya baca bagi Masyarakat, membangun sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional

Strategi untuk pencapaian ***Misi ketiga yaitu : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat*** adalah melalui strategi menumbuh kembangkan kawasan strategis perdagangan, pariwisata, pertanian dan perikanan, meningkatkan peran UMKM dan penataan pedagang kaki lima, menjaga stabilitas harga dan sitribusi barang kebutuhan pokok, membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk membantu permodalan UMKM secara professional, memaksimalkan sumber-sumber retribusi dan pajak daerah, meningkatnya potensi daerah, promosi dan kerjasama investasi, meningkatnya promosi investasi dalam rangka mendatangkan investor, jumlah kontribusi sektor wisata terhadap PDRB, Memberikan bantuan tepat sasaran sesuai klaster serta peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong.

Hal ini dilakukan dengan beberapa arah kebijakan yaitu : Meningkatkan pertumbuhan riil dan kontribusi riil sektor perekonomian kota, menyusun Peraturan Walikota tentang penetapan lokasi PKL, menginstentifkan peran TPID dan mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Ketahanan pangan, memfasilitasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi lembaga berbadan Hukum, melakukan

upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, mempermudah proses perizinan dan non perizinan, menjalin kerjasama dengan investor, mempermudah izin pariwisata, menyusun regulasi tentang penyaluran bantuan, klaster serta pemberdayaan masyarakat gampong melalui pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran dan pendampingan dalam pemanfaatan BUMG demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong.

Strategi untuk pencapaian ***Misi keempat yaitu : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat*** adalah melalui strategi Membangun dan meningkatkan sistem pelayanan kesehatan terintegrasi, Meningkatkan kemitraan dengan *stakeholder* kesehatan dan Meningkatkan Kualitas sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang memadai. Hal ini dilakukan dengan beberapa arah kebijakan yaitu : Pengembangan sistem layanan kesehatan, Meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas daerah, Mengoptimalkan keterlibatan para pihak terkait, Meningkatkan peran serta masyarakat, Pengembangan SDM, Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, Standarisasi mutu dan layanan kesehatan.

Strategi untuk pencapaian ***Misi kelima yaitu : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*** adalah melalui dua sasaran yaitu Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi dan Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kedua sasaran tersebut dicapai melalui strategi Penataan jumlah dan distribusi ASN sesuai kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme, Meningkatkan kapasitas dan kualitas perencanaan, pelaporan dan evaluasi sesuai prosedur (SOP) dan Penyediaan dan peningkatan terhadap domain/aspek penilaian pemeringkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis eletronik, Peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur gampong.

Strategi untuk pencapaian ***Misi keenam yaitu : Membangun Infrastruktur Kota yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan*** adalah Peningkatan pengawasan terhadap pencurian air dan kebocoran pipa serta peningkatan SDM karyawan PDAM, Pemenuhan kebutuhan energi listrik dari sumber energi terbarukan, Peningkatan jumlah jalan dalam kondisi baik, Peningkatan kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan dan pedesaan, Penataan dan pengembangan sistim jaringan transportasi secara merata, Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH Kota yang berestetika dan infrastruktur lainnya, Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan kepada masyarakat terhadap mitigasi bencana dan peningkatan prasarana dan sarana mitigasi kebencanaan, Pengembangan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan berupa Bio Gas, PLTA, tenaga surya, tenaga Angin dan tenaga gelombang laut.

Hal ini dilakukan dengan beberapa arah kebijakan yaitu : Penegakan hukum terhadap pelaku penyambungan liar air minum, Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH, sarana dan prasarana mitigasi bencana dan pelatihan kebencanaan kepada masyarakat, Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan, Meningkatkan daya tampung sampah dengan penyediaan wadah sampah yang memadai pada TPS yang terdistribusi merata di setiap gampong dan pengolahannya menjadi energi terbarukan, Pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase dan jalan serta sistem jaringan transportasi secara rutin dan berkelanjutan, Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah setempat (on-side) dan terpusat (of-side), Meningkatkan Penyediaaan Rumah layak huni, dan rumah khusus dan rusunawa,

Strategi untuk pencapaian ***Misi ketujuh yaitu : Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*** adalah melalui strategi Membuka akses bagi perempuan termasuk perempuan disabilitas untuk mendapatkan kesempatan peningkatan kualitas hidup dan kemampuan dalam segala bidang, Peningkatan fasilitas layanan P2TP2A dan unit layanan lainnya serta gugus tugas perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat, Meningkatkan pemahaman serta penguatan kelembagaan multi *stakeholder* terkait PUHA melalui advokasi, sosialisasi dan kemitraan, dan Memperkuat program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Hal ini dilakukan dengan beberapa arah kebijakan yaitu : Pembinaan peningkatan kapasitas perempuan untuk memperbaiki kualitas hidup perempuan termasuk perempuan berkebutuhan khusus di semua bidang pembangunan, Meningkatkann pemerataan ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang anak, Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Banda Aceh.

Lebih jelasnya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi dapat dilihat pada Tabel. 6. 1:

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan 2017 - 2022

VISI : Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah						
Misi		**Tujuan**		**Sasaran**		**Strategi**
Misi 1 : Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang Aqidah, Syariah, dan Akhlak						
	1.1	Terwujudnya nilai-nilai Islami dalam seluruh aspek kehidupan warga Kota Banda Aceh	1.1.1	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam	1.1.1.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencegah pendangkalan aqidah
					1.1.1.2	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur penegak syariat Islam
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga						
	2.1	Mewujudkan pendidikan Kota Banda Aceh yang bermutu, berdaya saing, berkarakter Islami dan berprestasi	2.1.1	Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan	2.1.1.1	Peningkatan peran orang tua, komite sekolah, MPD, dan stakeholder lainnya dalam pembangunan pendidikan
					2.1.1.2	Peningkatan kapasitas guru dalam multimedia pembelajaran
					2.1.1.3	Melakukan Sertifikasi Keahlian Pemuda, penyediaan dan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana yang representatif
Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat						
	3.1	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan	3.1.1	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	3.1.1.1	Menumbuh kembangkan kawasan strategis perdagangan, pariwisata, pertanian dan perikanan
					3.1.1.2	Peningkatan peran UMKM dan penataan pedagang kaki lima
					3.1.1.3	Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk membantu permodalan UMKM secara profesional
					3.1.1.4	Memaksimalkan sumber penerimaan, retribusi dan pajak daerah
					3.1.1.5	Mewujudkan pengembangan sentra industri dengan pemetaan terhadap potensi Industri
					3.1.1.6	Peningkatan potensi daerah melalui promosi dan kerjasama investasi dengan berbagai pihak
					3.1.1.7	Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata
					3.1.1.8	Penyediaan fasilitas wisata syariah yang diminati manca negara dan Timur Tengah
					3.1.1.9	Memberikan bantuan tepat sasaran sesuai klaster
					3.1.1.10	Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok
					3.1.1.11	Penyediaan lapangan kerja dan lapangan usaha yang sesuai keahliannya
					3.1.1.12	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat gampong
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat						
	4.1	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	4.1.1	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat (IKS)	4.1.1.1	Peningkatan dan penyediaan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi
					4.1.1.2	Peningkatan kemitraan dengan stakeholder kesehatan yang profesional.
					4.1.1.3	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas kesehatan yang memadai
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
	5.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	5.1.1	Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi	5.1.1.1	Penataan jumlah dan distribusi ASN sesuai kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme
					5.1.1.2	Peningkatan kapasitas dan kualitas perencanaan, pelaporan dan evaluasi sesuai prosedur (SOP) yang ada
					5.1.1.3	Peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur gampong
			5.1.2	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	5.1.2.1	Penyediaan dan peningkatan terhadap domain/aspek penilaian Pemeringkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi
Misi 6 : Membangun Infrastruktur Kota Yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan						
	6.1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana kota yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan	6.1.1	Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Kota Layak Huni	6.1.1.1	Peningkatan pengawasan terhadap pencurian air dan kebocoran pipa serta peningkatan SDM karyawan PDAM
					6.1.1.2	Pemenuhan kebutuhan energi listrik dari sumber energi terbarukan
					6.1.1.3	Peningkatan jumlah jalan dalam kondisi baik
					6.1.1.4	Peningkatan kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan dan pedesaan
					6.1.1.5	Penataan dan pengembangan sistim jaringan transportasi secara merata
					6.1.1.6	Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH Kota yang berestetika dan infrastruktur lainnya
			6.1.2	Mitigasi kebencanaan yang tangguh	6.1.2.1	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan kepada masyarakat terhadap mitigasi bencana dan peningkatan prasarana dan sarana mitigasi kebencanaan.
			6.1.3	Pemenuhan kebutuhan energi listrik dari sumber energi terbarukan	6.1.3.1	Pengembangan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan berupa Bio Gas, PLTA, tenaga surya, tenaga Angin dan tenaga gelombang laut.
Misi 7 : Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
	7.1	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta pengendalian penduduk	7.1.1	Pemerataan pembangunan berbasis gender dan ramah anak	7.1.1.1	Membuka akses bagi perempuan untuk mendapatkan kesempatan peningkatan kualitas hidup dan kemampuan dalam segala bidang
					7.1.1.2	Peningkatan fasilitas layanan P2TP2A dan unit layanan lainnya serta gugus tugas perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat
					7.1.1.3	Peningkatan pemahaman serta penguatan kelembagaan multi stakeholder terkait PUHA melalui advokasi, sosialisasi dan kemitraan
			7.1.2	Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	7.1.2.1	Memperkuat program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Tabel 6.2

ARAH KEBIJAKAN Kota Banda Aceh
Tahun 2017 - 2022

ARAH KEBIJAKAN				
Tahun 2018	**Tahun 2019**	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**
Memperkuat peran masyarakat dalam mencegah pendangkalan aqidah	Infrastruktur ramah lingkungan, mendukung kualitas kesehatan, dan layak anak	Penguatan Kemitraan Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi riil sektor perekonomian serta memperkokoh peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Program Pembangunan Daerah

Proses penjabaran Visi dan Misi pembangunan Kota Banda Aceh selanjutnya setelah tujuan, sasaran, strategi adalah kebijakan umum dan program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaannya. Kebijakan umum pada hakekatnya merupakan resume dari semua arah kebijakan pembangunan yang dipilih, sementara program prioritas merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang terkait langsung dengan pelaksanaan visi dan misi RPJMD. Selain program prioritas, program yang disajikan dalam RPJMD ini juga menuangkan program yang terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun operasional pemerintahan sebagai landasan pelaksanaan penyusunan Renstra SKPD agar terjalin ikatan yang tidak terputus antara RPJMD dengan Renstra SKPD.

Secara rinci Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif dapat dilihat dalam tabel 6.3 sebagai berikut:

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
			Satuan	Volume	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Visi : Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah																
	MISI 1 : Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang Aqidah, Syariah, dan Akhlak																
1.1	**Tujuan : Terwujudnya nilai-nilai Islami dalam seluruh aspek kehidupan warga Kota Banda Aceh**	**Indikator : Peningkatan Nilai Capaian Survey pelaksanaan Syariat Islam Banda Aceh**	**Nilai**	**0***	**65**		**70**		**75**		**80**		**85**		**85**		**DSI, Satpol PP & WH, Disdikday, Sekretariat MPU, Sekretariat MAA**
1.1.1	**Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam**	**Nilai Survey Pelaksanaan Syariat Islam**	**Nilai**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**85**		**85**		DSI, Disdikday, Sekretariat MPU, Sekretariat MAA
	Program penelitian dan pengembangan syariat islam	Persentase tersebarnya informasi Syariat Islam Kepada Masyarakat	%	100	20 %	458.085.250	20 %	480.989.513	20 %	505.038.988	20 %	530.290.938	20 %	556.805.484	100 %	2.531.210.173	DSI
	Program Usaha Dakwah Generasi Muda dan Kader Dakwah	Persentase meningkatnya Kapasitas Generasi Muda	%	100	20 %	3.157.852.500	20 %	348.345.125	20 %	365.762.381	20 %	384.050.500	20 %	403.253.025	100 %	4.659.263.532	DSI
	Program Pembinaan Aqidah Umat	Persentase terbinanya Aqidah Umat	%	20	20 %	58.706.800	20 %	61.642.140	20 %	64.724.247	20 %	67.960.459	20 %	71.358.482	100 %	324.392.129	DSI
	Program Pembinaan Fardhu Kifayah	Persentase terpenuhinya Pemahaman Tentang Fardhu Kifayah	%	100	20 %	1.686.972.700	20 %	170.000.000	20 %	178.500.000	20 %	187.425.000	20 %	196.796.250	100 %	2.419.693.950	DSI
	Program Penyemarakan Syiar Islam	Persentase Terlaksananya penyemarakan syiar islam	%	0%	20 %	1.164.946.000	20 %	945.749.300	20 %	2.984.825.861	20 %	3.179.509.914	20 %	5.388.472.445	100 %	13.663.503.520	DSI, Sekretariat MAA
	Program Peningkatan dan Sumber Daya Ulama	Persentase meningkatnya peran serta ulama dan hubungan yang harmonis pada pemerintah	%	100	100%	109.012.600	100%	114.463.230	100%	120.186.392	100%	126.195.711	100%	132.505.497	100%	602.363.429	Sekretariat MPU
	Program Pengelolaan dan Pembinaan Manajemen Dayah/Pesantren	Persentase meningkatnya tata kelola dayah dan kemandirian dayah	%	0	100%	352.526.750	100%	370.153.088	100%	388.660.742	100%	408.093.779	100%	428.498.468	100%	1.947.932.826	Disdikday
		Penurunan Angka Pelanggaran terhadap Qanun Syariat Islam	**Kasus**	**200**	**180**		**160**		**120**		**100**		**80**		**80**		**DSI, Disdikday, Satpol PP & WH, Sekretariat MPU, Sekretariat MAA**
	Program Pembinaan dan pengembangan syariat islam	Persentase terlaksananya Pembinaan Syariat Islam secara Maksimal	%	50	100%	19.315.000	in	50.280.750	100%	52.794.788	100%	55.434.527	100%	58.206.253	100 %	236.031.318	Satpol PP & WH
	Program Pengembangan Ukhuwah Islamiyah	Persentase terciptanya muslimah berilmu, beramal dan berakhlak mulia	%	100	100%	57.367.203	100%	85.160.190	100%	89.418.200	100%	93.889.110	100%	98.583.565	100%	424.418.268	Sekretariat MPU
	Program Eksitensi Umara dan Ulama	Persentase terlaksananya penguatan kapasitas Ulama	%	0	0	0	100%	50.000.000	100%	52.500.000	100%	55.125.000	100%	160.000.000	100%	317.625.000	Sekretariat MPU
	Program Penelitian dan Pengembangan syariat Islam	Persentase terdatanya paham keagamaan yang berkembang dalam masyarakat	%	100	100%	160.127.252	100%	168.133.615	100%	176.540.295	100%	185.367.310	100%	194.635.676	100%	884.804.148	Sekretariat MPU
	Program Penyuluhan Agama Islam Dan Sosialisasi Qanun	Persentase terlaksananya Penyuluhan Hukum Islam	%	100	20 %	2.402.046.900	20 %	150.000.000	20 %	157.500.000	20 %	165.375.000	20 %	173.643.750	100 %	3.048.565.650	DSI
	Program Keserasian Kebijakan Pelaksanaan Syariat Islam	Persentase Terlaksananya Keserasian Kebijakan Pelaksanaan Syariat Islam	%	15	0	0	25 %	50.000.000	25 %	52.500.000	25 %	55.125.000	25 %	57.881.250	100 %	215.506.250	DSI
	Program Pemberdayaan Santri/Guru Dayah/Pesantren	Persentase meningkatnya kualitas kelulusan santri dan kompetensi guru	%	0	100%	676.042.500	100%	250.000.000	100%	262.500.000	100%	275.625.000	100%	289.406.250	100%	1.753.573.750	Disdikday
	Program Pelestarian Adat Istiadat Sesuai Dengan Syariat	Persentase tercapainya pelestarian adat istiadat yang ada dalam masyarakat sesuai dengan syariat islam	%	100	100%	30.664.500	100%	32.197.725	100%	33.807.611	100%	35.497.992	100%	37.272.891	100%	169.440.719	Sekretariat MAA
	Total					**Rp 10.333.665.955**		**Rp 3.327.114.675**		**Rp 5.485.259.505**		**Rp 5.804.965.240**		**Rp 8.247.319.286**		**Rp 33.198.324.661**	

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
			Satuan	Volume	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga.																
2.1	**Mewujudkan Pendidikan Kota Banda Aceh yang Bermutu, Berdaya Saing, Berkarakter Islami dan Berprestasi**	**Persentase Sekolah yang memenuhi SNP**	**%**	**0**	**70**		**72**		**75**		**77**		**80**		**80**		**Disdikbud, Dinas Perpustakaan & Kearsipan, Disdikday, Sekretariat MPD**
2.1.1	**Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan**	**Persentase Sekolah yang memenuhi SNP**	**%**	**0**	**70**		**72**		**75**		**77**		**80**		**80**		**Disdikbud, Dinas Perpustakaan & Kearsipan, Disdikday, Sekretariat MPD**
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase meningkatnya angka partisipasi kasar TK	%	84,14	89%	1.308.733.500	91,39%	610.000.000	91%	640.500.000	97%	672.525.000	99%	706.151.250	100%	3.937.909.750	Disdikbud
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase tuntasnya Wajib Belajar Sembilan Tahun yg bermutu dan Islami	%	98,7	98,90%	39.027.025.600	99,00%	40.047.096.921	99,30%	46.125.321.902	99,50%	52.909.594.774	100%	58.503.016.101	100%	236.612.055.298	Disdikbud
		Persentase jumlah kepala sekolah/guru yang bersertifikat workshop sosialisasi pendidikan dasar	%	0	20%	39.891.570	20%	41.886.149	20%	43.980.456	20%	46.179.479	20%	48.488.453	100%	220.426.106	Sekretariat MPD
	Program Pendidikan Non Formal	Persentase terselenggaranya pendidikan non formal	%	98,70%	100%	0	100%	509.974.650	100%	535.473.382	100%	562.247.051	100%	590.359.404	100%	2.198.054.487	Disdikbud
	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Terselenggaranya pendidikan non formal	%	98,70%	100%	650.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	650.000.000	Dispora
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase tenaga pendidik mengikuti diklat kompetensi sesuai bidangnya	%	100	76%	508.801.983	83,73%	534.242.082	84%	560.954.186	88%	589.001.896	93%	618.451.990	93%	2.811.452.137	Disdikbud
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik sudah kualifikasi akademik minimal S1 dan sudah tersertifikasi pendidik	%	2135 org	100%	868.575.000	100%	912.003.750	100%	957.603.938	100%	1.005.484.134	100%	1.055.758.341	100%	4.799.425.163	Disdikbud
		Persentase tenaga pendidik yang telah memiliki kompetensi membuat karya ilmiah	%	0	100%	0	100%	35.000.000	100%	36.750.000	100%	38.587.500	100%	40.516.875	100%	150.854.375	Sekretariat MPD
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jumlah perpustakaan yang dibina	%	80	100%	348.773.000	100%	124.711.650	100%	130.947.233	100%	108.662.207	100%	1.114.095.317	100%	1.827.189.407	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
		Persentase Jumlah Pemustaka/Jumlah Penduduk Banda Aceh	%	53	5,50%	93.866.500	6,10%	0	6,70%	0	7,40%	0	81,00%	0	8,10%	93.866.500	Disdikbud
		Persentase Siswa yang Mampu Menghafal Al-quran	**%**	**0**	**5**		**6**		**7**		**8**		**10**		**10**		**Disdikbud, Dinas Perpustakaan & Kearsipan, Disdikday, Sekretariat MPD**
	Program Pembinaan dan pengembangan syariat islam	Persentase terlaksananya Pembinaan Syariat Islam secara Maksimal	%	50	20%	3.085.630.550	100%	2.623.500.000	20%	2.864.925.000	20%	3.008.171.250	20%	3.158.579.813	100 %	14.740.806.613	DSI
	Program Event Nasional Dayah / Pesantren	Persentase Meningkatnya jumlah santri yang mengikuti event nasional dayah/pesantren	%	0	0	0	100%	250.000.000	100%	262.500.000	100%	275.625.000	100%	289.406.250	100%	1.077.531.250	Disdikday
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah / Pesantren / Balai Pengajian	Persentase tersedianya sarana prasarana yang sesuai standar	%	100	100%	2.497.725.000	100%	60.000.000	100%	63.000.000	100%	66.150.000	100%	69.457.500	100%	2.756.332.500	Disdikday

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
			Satuan	Volume	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tingkat Prestasi Kota di POPDA	**Peringkat**		**Peringkat 4**		**-**		**Peringkat 3**		**-**		**Peringkat 2**		**Peringkat 2**		**Dispora**
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Meningkatnya Prestasi olahraga masyarakat di kota Banda Aceh	%	100	0	0	100%	757.500.000	100%	795.375.000	100%	835.143.750	100%	876.900.938	100%	3.264.919.688	Dispora
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Meningkatnya Prestasi olahraga masyarakat di kota Banda Aceh	%	100	100%	722.881.500	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%	722.881.500	Disdikbud
	Program Pengembangan dan Keserasian kebijakan pemuda	Persentase Meningkatnya Kesinambungan kerjasama dengan masyarakat	%	100	100%	0	100%	50.000.000	100%	52.500.000	100%	55.125.000	100%	57.881.250	100%	215.506.250	Dispora
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase meningkatnya Partisipasi pemuda	%	100	100%	698.807.000	100%	195.561.900	100%	205.339.995	100%	215.606.995	100%	226.387.344	100%	1.541.703.234	Dispora
	Program Pendidikan Menengah	Persentase meningkatnya pendidikan Menengah	%	100	100%	54.942.500	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	54.942.500	Dispora
		Persentase meningkatnya pendidikan Menengah	%	20%	20%	24.269.290	40%	25.482.755	60%	26.756.892	80%	28.094.737	100%	29.499.474	100%	134.103.147	Sekretariat MPD
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100	0	0	25	200.000.000	25	210.000.000	25	220.500.000	25	231.525.000	100%	862.025.000	Dispora
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Meningkatnya Prestasi olahraga masyarakat di kota Banda Aceh	%	100	100%	722.881.500	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%	722.881.500	Disdikbud
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Meningkatnya Prestasi olahraga masyarakat di kota Banda Aceh	%	100	0	0	100%	757.500.000	100%	795.375.000	100%	835.143.750	100%	876.900.938	100%	3.264.919.688	Dispora
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100%	3.998.786.000	100%	1.200.000.000	100%	1.260.000.000	100%	1.323.000.000	100%	2.389.150.000	100%	10.170.936.000	Dispora
	Total					**Rp 54.651.590.493**		**Rp 48.934.459.856**		**Rp 55.567.302.984**		**Rp 62.794.842.522**		**Rp 70.882.526.238**		**Rp 292.830.722.092**	
	Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat																
3,1	**Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusive dan berkelanjutan**	**Indikator: Pertumbuhan PDRB**	**%**	**3,06**	**3,41**		**3,60**		**3,78**		**3,96**		**4,04**		**4,04**		**Disnaker, Diskop UKM & Dag, DP2KP, DLHK3, BPKK, DPMPTSP, Dispar, DPMG, Baitul Mal, Dinas PUPR, Dinsos**
3.1.1	**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**	**Pertumbuhan PDRB**	**%**	**3,06**	**3,41**		**3,60**		**3,78**		**3,96**		**4,04**		**4,04**		**Disnaker, Diskop, UKM dan Dag, DP2KP, DLHK3, BPKK, DPMPTSP, Dispar, Dinsos, DPMG**
		Koefisien Gini	**Indeks**	**0,314**	**0,325**		**0,321**		**0,319**		**0,317**		**0,315**		**0,315**		
		Angka kemiskinan	**Jiwa**	**18.710**	**18.621**		**18.531**		**18.442**		**18.352**		**18.263**		**18.263**	**-**	**Dinsos, Disnaker, Sekretariat Baitul Mal, Diskop UKM & Dag, DPMG, DP2KP**
	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Persentase terciptanya iklim usaha mikro yang kondusif	%	100	100%	10.401.170.050	100%	7.282.822.800	100%	8.011.105.080	100%	8.812.215.588	100%	11.693.437.147	100%	46.200.750.665	Diskop UKM & Dag
	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Persentase berkembangnya jumlah wirausaha yang unggul dan kompetitif	%	100	100%	72.385.440	100%	231.873.984	100%	255.061.382	100%	280.567.521	100%	308.624.273	100%	1.148.512.600	Diskop UKM & Dag
	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Persentase terlaksananya promosi usaha mikro	%	0	100%	120.000.000	100%	132.000.000	100%	145.200.000	100%	159.720.000	100%	175.692.000	100%	732.612.000	Diskop UKM & Dag
	Program Penyemarakan Syiar Islam	Persentase tercapaianya penyemarakan syariat islam	%	10,98	19,95%	19.099.435.000	19,83%	18.989.297.801	19,95%	19.103.037.691	20,07%	19.217.989.574	20,19%	19.334.189.053	100%	95.743.949.119	Sekretariat Baitul Mal
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase meningkatnya Kesejahteraan Petani	%	100	100%	0	100%	80.000.000	100%	88.000.000	100%	96.800.000	100%	106.480.000	100%	371.280.000	DP2KP

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
			Satuan	Volume	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian	%	100	100%	21.477.000	100%	40.500.000	100%	44.312.900	100%	48.158.000	100%	37.698.000	100%	192.145.900	DP2KP
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Persentase terbinanya pelaku usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan	%	0	100%	32.525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	32.525.000	DP2KP
	Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan	%	100	100%	156.995.850	100%	160.719.600	100%	166.320.580	20%	153.979.809	100%	159.471.433	100%	797.487.272	Disnaker
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase terfasilitasinya pembinaan BUMG, UMKM Usaha Teknologi tepat guna	%	100	100%	360.181.650	100%	750.750.000	100%	788.260.000	100%	827.705.000	100%	815.230.000	100%	3.542.126.650	DPMG
	Program Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah	Persentase pemantauan Pendistribusian Kuota BBM dan Gas	%	0	0%	-	100%	279,874,838	100%	300,000,000	100%	310,000,000	100%	320,000,000	100%	1.209.874.838	DPMG
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase meningkatnya jumlah aparatur gampong dan kecamatan yang mendapatkan pembinaan APBG	%	100	100%	337.281.000	100%	242.500.000	100%	254.600.000	100%	267.400.000	100%	280.800.000	100%	1.382.581.000	DPMG
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan gampong	%	60	20%	1.083.776.800	20%	1.152.900.000	20%	1.243.190.000	20%	1.307.131.000	20%	2.334.731.000	100%	7.121.728.800	DPMG
	Program Sinkronisasi Pengentasan Kemiskinan	Persentase terkoordinasi perumusan kebiajakan penanggulangan	%	100	100%	19.230.400	100%	26.250.000	100%	27.575.000	100%	22.261.592	100%	30.385.000	100%	125.701.992	DPMG
		Tingkat Pengangguran Terbuka	**Persen**	**7,75**	**7,35**		**6,95**		**6,55**		**6,08**		**5,68**		**5,68**		**Dinsos, Disnaker, Sekretariat Baitul Mal, Diskop UKM & Dag**
	Program perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase Jumlah pasar, toko/swalayan yg diawasi dan direhab serta pelaksanaan tera ulang	%	100	100%	4.589.340.950	100%	6.410.458.600	100%	5.409.004.460	100%	7.556.904.906	100%	8.559.095.397	100%	32.524.804.313	Diskop UKM & Dag
	Program peningkatan Efiensi perdagangan dalam Negeri	Persentase informasi harga pasar tentang harga pokok barang penting dan strategis serta terlaksananya pasar rakyat dan pengawasan pendistribusi LP3	%	100	100%	533.198.300	100%	483.151.005	100%	529.129.462	100%	579.588.932	100%	634.971.675	100%	2.760.039.374	Diskop UKM & Dag
	Progam pembinaan pedagang kaki lima	Persentase tertatanya pedagang kaki lima dan asongan	%	100	0	0	100%	100.000.000	100%	50.000.000	100%	110.500.000	100%	50.000.000	100%	310.500.000	Diskop UKM & Dag
	Program peningkatan pelayanan pasar	Persentase meningkatnya pelayanan dan pengawasan pasar	%	100	100%	5.375.253.073	100%	5.644.015.727	100%	5.926.216.513	100%	5.926.216.513	100%	7.926.216.513	100%	30.797.918.339	Diskop UKM & Dag
	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Persentase Gampong yang Memiliki Minimal satu Produk Industri kecil Menengah	%	100	100%	6.087.881.740	100%	2.708.213.248	100%	2.871.345.235	100%	3.005.887.759	100%	5.070.469.104	100%	19.743.797.086	Disnaker
	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan kualitas dan produktifitas pencari kerja	%	100	100%	712.235.650	100%	627.250.000	100%	527.000.000	100%	578.000.000	100%	578.000.000	100%	3.022.485.650	Disnaker
	Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase angkatan kerja (usia kerja 15-64 tahun)	%	100	100%	256.638.000	100%	99.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	665.638.000	Disnaker
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi industri	Persentase Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Perajin Tekstil	%	0	0	0	0	0	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	242.000.000	100%	662.000.000	Disnaker
	Program Penataan Struktur Industri	Persentase Jumlah Penataan	%	100	100%	72.477.200	100%	138.000.000	100%	158.700.000	100%	174.570.000	100%	176.315.700	100%	720.062.900	Disnaker

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
			Satuan	Volume	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase meningkatnya kesejahteraan bagi fakir miskin,KAT dan PMKS	%	0	48%	1.060.460.300	73%	580.460.300	75%	609.483.315	100%	639.957.481	100%	671.955.355	100%	3.562.316.751	Dinsos
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	0	12%	4.198.240.000	45%	4.408.152.000	60%	4.628.559.600	75%	4.859.987.580	99%	5.102.986.959	100%	23.197.926.139	Dinsos
	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase pembinaan bagi anak terlantar	%	0	0	0	0	0	100%	390.310.000	0	0	0	0	100%	390.310.000	Dinsos
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase terlaksananya pembinaan bagi penyandang cacat dan trauma	%	0,4	46%	40.000.000	62%	42.000.000	79%	44.100.000	83%	46.305.000	98%	48.620.250	98%	221.025.250	Dinsos
	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Persentase meningkatnya pelayanan panti asuhan/ panti jompo	%	100	100%	1.597.496.800	100%	1.677.371.640	100%	1.761.240.222	100%	1.849.302.233	100%	1.941.767.345	100%	8.827.178.240	Dinsos
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase meningkatnya pelayanan Orsos terhadap masyarakat gampong	%	90	0	0	92,00%	17.931.000	99,00%	18.827.550	100,00%	19.768.928	0	0	100%	56.527.478	Dinsos
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan	%	100	100%	532.833.400	100%	3.116.018.800	100%	3.244.727.195	100%	2.712.541.264	100%	2.762.463.157	100%	12.368.583.816	DP2KP
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Persentase peningkatan penyuluh Pertanian/perkebunan yang terampil	%	100	100%	52.797.150	100%	75.022.720	100%	82.524.992	100%	90.777.491	100%	113.275.000	100%	414.397.353	DP2KP
		Persentase Peningkatan Nilai Investasi	**%**	**118.000.000.000 ****	**15%**		**25%**		**50%**		**75%**		**100%**		**100%**		**DPMPTSP**
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	Persentase tersedianya Layanan Perizinan Kepada Pelaku Usaha	%	60	100%	77.501.000	100%	110.000.000	100%	115.000.000	100%	120.000.000	100%	325.000.000	100%	747.501.000	DPMPTSP
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase adanya Promosi dan Kerjasama Investasi	%	9	100%	32.549.780	100%	180.000.000	100%	174.000.000	100%	196.000.000	100%	200.000.000	100%	782.549.780	DPMPTSP
	Program Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah	Persentase Jumlah Perizinan	%	1	100%	31.160.000	100%	90.860.000	100%	99.946.000	100%	109.940.600	100%	120.934.660	100%	452.841.260	DPMPTSP
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Adanya Peraturan Perundang-Undangan terkait Perizinan	%	0	100%	0	100%	42.000.000	100%	44.100.000	100%	46.305.000	100%	48.620.250	100%	181.025.250	DPMPTSP
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase adanya informasi terhadap layanan publik	%	0	100%	80.700.000,00	100%%	178.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.090.000.000	100%	1.020.000.000	100%	3.968.700.000	DPMPTSP
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Adanya Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi	%	0	100%	18.547.500	100%	180.000.000	100%	135.000.000	100%	160.000.000	100%	175.000.000	100%	668.547.500	DPMPTSP
					100%											-	
		Jumlah kunjungan wisatawan	**Orang**	**287.109**	**300.000**		**350.000**		**400.000**		**450.000**		**500.000**		**2.000.000**		**Dispar, Dinas PUPR**
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana kepariwisataan	%	100	100%	669.340.000	100%	6.000.000.000	100%	5.700.000.000	100%	5.200.000.000	100%	5.400.000.000	100%	22.969.340.000	Dispar
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas promosi wisata kota banda aceh	%	100	100%	4.144.005.000	100%	4.765.000.000	100%	4.905.000.000	100%	5.445.000.000	100%	5.585.000.000	100%	24.844.005.000	Dispar
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja Dinas Pariwisata	%	0	0	0	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	100.000.000	Dispar
	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase Terlaksananya kerjasama dengan pelaku usaha jasa pariwisata	%	100	100%	778.590.235	100%	1.190.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.390.000.000	100%	1.450.000.000	100%	6.058.590.235	Dispar

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
			Satuan	Volume	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Susunan Tata Ruang Dan Tata Bangunan	Persentase meningkatnya penataan Ruang dan Tata Bangunan	%	0	84	27.982.616.205	84	27.753.400.000	84	36.633.985.000	84	40.465.659.000	84	40.338.854.000	84	171.174.514.205	Dinas PUPR
	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase jumlah penataan bangunan dan Kawasan	%	0	0	0	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.000.000.000	Dinas PUPR
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase tertatanya ruang yang sesuai RTRW	%	0	100%	1.902.963.300	100%	964.000.000	100%	1.011.000.000	100%	1.060.250.000	100%	1.111.800.000	100%	6.050.013.300	Dinas PUPR
																-	
	Total					**Rp 92.531.283.773**		**Rp 96.944.919.225**		**Rp 108.620.862.177**		**Rp 115.222.390.770**		**Rp 125.315.083.270**		**Rp 537.844.414.053**	
	MISI 4 :Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat																
4.1	**Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat**	**Indikator: Indeks Keluarga Sehat (IKS)**	**IKS**	**0,3**	**0,5**		**0,6**		**0,7**		**0,8**		**0,9**		**0,9**		**Dinkes, RSU Meuraxa**
4.1.1	**Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat**	**Indeks Keluarga Sehat (IKS)**	**IKS**	**0,3**	**0,5**		**0,6**		**0,7**		**0,8**		**0,9**		**0,9**		**Dinkes, RSU Meuraxa**
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase meningkatnya derajat kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dan remaja	%	100	100%	22.414.529.694	100%	22.809.439.216	100%	26.959.849.957	100%	30.771.525.618	100%	34.865.316.839	100%	137.820.661.324	Dinkes
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase meningkatnya partisipasi masrakat di dalam program kesehatan	%	100	100%	1.392.000.500	100%	1.433.760.515	100%	1.476.773.330	100%	1.521.076.530	100%	1.566.708.826	100%	7.390.319.702	Dinkes
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase angka kejadian kasus penyakit menular (DBD)	%	0,75	75%	697.572.950	78%	776.344.069	96%	786.067.077	95%	803.540.364	95%	822.923.609	95%	3.886.448.069	Dinkes
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase cakupan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan	%	100	100%	336.249.000	100%	359.092.305	100%	464.057.217	100%	411.369.111	100%	441.278.336	100%	2.012.045.970	Dinkes
	Program Sistem Informasi Kesehatan	Persentase meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Program/ Regulasi Kesehatan-	%	0,9	90%	0	91%	50.000.000	92%	72.500.000	95%	76.125.000	96%	79.931.250	96%	278.556.250	Dinkes
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase terselenggaranya standarisasi unit2 pemberi pelkes	%	0	0	1.052.698.450	90%	1.785.401.102	98%	1.634.901.576	98%	1.724.593.656	94%	1.822.717.795	94%	8.020.312.579	Dinkes
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase tolok ukur kinerja	%	100%	100%	122.289.560.000	100%	140.960.563.980	100%	162.482.231.498	100%	187.289.797.990	100%	215.884.950.052	100%	828.907.103.521	RSU Meuraxa
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya kinerja pelayanan pemerintah daerah	%	0,9	90%	0	91%	450.000.000	93%	472.500.000	93%	496.125.000	94%	520.931.250	94%	1.939.556.250	RSU Meuraxa
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase meningkatnya pelayanan kegsehatan	%	100	100%	14.418.000.000	100%	14.850.540.000	100%	15.296.056.200	100%	15.754.937.886	100%	16.227.586.023	100%	76.547.120.109	RSU Meuraxa
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase meningkatnya status gizi masyarakat Kota Banda Aceh	%	0	100%	177.193.625	100%	182.509.434	100%	187.984.717	100%	193.624.258	100%	199.432.986	100%	940.745.020	Dinkes
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase penerapan KTR di Kota Banda Aceh	%	0,9	90%	812.815.032	95%	1.000.080.860	96%	1.115.312.327	96%	1.251.054.805	95%	1.376.009.457	95%	5.555.272.481	Dinkes
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase meningkatnya optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di UPK	%	0,8	80%	6.134.966.000	83%	8.784.731.550	95%	8.811.982.155	95%	9.761.818.288	95%	9.493.189.473	95%	42.986.687.466	Dinkes
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase menurunnya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian Bayi (AKB)	%	0,9	90%	62.618.600	96%	35.000.000	95%	69.037.007	96%	72.488.857	95%	76.113.300	95%	315.257.763	Dinkes
	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan bagi lansia	%	0,83	90%	0	95%	46.441.000	95%	48.763.050	95%	51.201.203	95%	53.761.263	95%	200.166.516	Dinkes

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
			Satuan	Volume	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase menurunnya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian Bayi (AKB)	%	0,9	90%	2.804.112.400	95%	3.004.941.013	95%	3.224.619.606	95%	3.465.141.992	95%	3.728.721.837	95%	16.227.536.847	Dinkes
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya kinerja pelayanan pemerintah daerah	%	0,9	90%	1.457.163.000							94%	1.525.000.000	94%	2.982.163.000	Dinkes
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	%	60%	65%	107.088.500	67%	102.112.000	69%	157.217.600	71%	165.078.480	73%	173.332.404	73%	704.828.984	Dinkes
	Total					**Rp 174.156.567.751**		**Rp 196.630.957.045**		**Rp 223.259.853.316**		**Rp 253.809.499.039**		**Rp 288.857.904.700**		**Rp 1.136.714.781.851**	
	MISI 5 :Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.																
5.1	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**	**Indikator: Indeks RB**	**Indeks**	**CC**	**CC**		**B**		**B**		**BB**		**BB**		**BB**		**Sekretariat Daerah, Bappeda, Sekretariat DPRK, BKPSDM, Disdukcapil, Kesbangpol, Inspektorat, BPKK, Diskominfo, Satpol PP & WH, DPMG, DLHK3, DP2KP, Kecamatan**
5.1.1	**Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**%**	**70**	**70**		**75**		**80**		**85**		**90**		**90**		**Sekretariat Daerah, Bappeda, Sekretariat DPRK, BKPSDM, Disdukcapil, Kesbangpol, DPMG, Inspektorat, Satpol PP & WH, Kecamatan**
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase meningkatnya perencanaan pembangunan ekonomi	%	100	100%	84.248.390	100%	188.460.810	100%	192.883.850	100%	247.528.042	100%	252.402.445	100%	965.523.537	Bappeda
	Program perencanaan pembangunan sosial budaya	Persentase meningkatnya perencanaan pembangunan sosial budaya	%	0	100%	201.038.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	220.000.000	100%	270.000.000	100%	931.038.000	Bappeda
	Program Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Kota	Persentase meningkatnya pengembangan kapasitas Pemerintah Kota	%	100	100%	216.011.000	100%	529.015.310	100%	555.466.076	100%	583.239.379	100%	612.401.348	100%	2.496.133.113	Bag. Organisasi
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas kinerja aparatur	%	20	20%	1.258.419.000	20%	1.821.339.950	20%		20%	2.008.027.295	20%	2.108.428.660	100%	9.108.621.852	BKPSDM
	Program pemeliharaan ketentraman dan pencegahan tindak kriminal	Persentase cakupan penegakan PERDA/Qanun	%	70	73%	592.668.500	75%	687.301.925	78%	721.667.021	80%	757.750.372	80%	795.637.891	80%	3.555.025.709	Satpol PP & WH
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase meningkatnya keahlian SatLinmas Gampong dalam rangka pemberdayaan masyarakat	%	0	100%	93.490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	93.490.000	Satpol PP & WH
	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase jumlah Linmas siaga dalam pengamanan pemilu dan pemilukada	%	100	0	0	100%	550.000.000	0 org	0	100%	94.500.000	100%	99.225.000	100%	743.725.000	Satpol PP & WH
	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase meningkatnya keahlian PPNS Profesional	%	60	60%	72.718.000	76%	166.353.900	88%	174.671.595	100%	183.405.175	100%	88.389.183	100%	685.537.853	Satpol PP & WH
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Cakupan penanganan KanTranTibMas	%	100	100%	365.115.000	100%	828.370.750	100%	869.789.288	100%	923.216.252	100%	969.377.064	100%	3.955.868.354	Satpol PP & WH
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Masyarakat yang terlayani dibidang Kependudukan	%	0	100%	1.167.504.810	100%	1.248.256.185	100%	1.382.208.730	100%	1.530.069.778	100%	1.693.346.696	100%	7.021.386.199	Disdukcapil
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan pemerintah dalam penataan pemerintahan	%	100	100%	884.414.180	100%	1.085.336.349	100%	984.258.207	100%	1.033.471.118	100%	1.247.887.672	100%	5.235.368.126	Bagian Tata Pemerintahan

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
			Satuan	Volume	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	%	100	100%	6.096.526.000	100%	6.303.666.500	100%	5.782.452.275	100%	5.815.324.839	100%	5.838.341.031	100%	29.836.310.645	Sekretariat DPRK
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase tersedianya APIP yang berkualitas dan mempunyai integritas tinggi	%	100	100%	33.584.000	100%	52.698.200	100%	55.333.110	100%	38.877.678	100%	40.821.562	100%	221.314.550	Inspektorat
	Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Persentase terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh	%	0	8%	30.000.000	8%	153.250.000	8%	160.912.500	8%	168.958.125	8%	177.406.031	40%	690.526.656	Inspektorat
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Presentase meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan	%	0	100%	672.205.500	100%	705.815.775	100%	741.106.564	100%	778.161.892	100%	817.069.987	100%	3.714.359.717	Bagian Hukum
		Persentase terciptanya tertib administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan pada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh	%	100	100%	1.370.948.600	100%	1.466.996.030	100%	1.540.345.832	100%	1.617.363.123	100%	1.698.231.279	100%	7.693.884.864	Inspektorat
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100%	768.154.780	100%	889.652.420	100%	864.890.645	100%	1.807.235.177	100%	2.351.696.936	100%	6.681.629.957	Bappeda
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Meningkatnya pelayanan pemerintahan kecamatan	%	0	100%	4.144.835.933	100%	3.380.168.512	100%	3.513.106.699	100%	4.470.636.252	100%	3.906.449.803	100%	19.415.197.199	Seluruh Kecamatan
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase meningkatnya kemampuan aparatur gampong dalam menjalankan roda pemerintahan	%	100	100%	2.459.549.100	100%	1.697.400.000	100%	1.720.200.000	100%	1.881.760.000	100%	2.942.250.000	100%	10.701.159.100	DPMG
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Jenis Reusam Gampong dan Peningkatan Pengelolaan dan Realisasi Pengelolaan Keuangan Gampong	%	0	0%	-	100%	181.476.189	100%	190.549.998	100%	200.077.498	100%	210.081.373	100%	782.185.059	DPMG
	Program Pemeliharaan Kantran tibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase tersedianya data Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	%	100	100%	89.327.500	100%	65.000.000	100%	252.846.613	100%	261.797.012	100%	271.084.172	100%	940.055.297	Kesbangpol
	Program Pengembangan Kawasan Kebangsaan	Persentase terlaksananya pembinaan masyarakat dalam berwawasan kebangsaan	%	0	100%	278.391.000	100%	371.742.730	100%	382.895.012	100%	394.381.862	100%	406.213.318	100%	1.833.623.922	Kesbangpol
5.1.2	**Meningkatnya Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**	**Nilai Pemeringkatan pemerintahan berbasis elektronik**	**Indeks**	**2,6 (CC)**	**2,65 (CC)**		**2,7 (CC)**		**2,8 (CC)**		**2,9 (CC)**		**3 (B)**		**3 (B)**		**Sekretariat Daerah, Diskominfotik, DP2KP, DLHK3, BPKK**
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase terwujudnya sistem pemerintahan yang berbasia TIK dan masyarakat dapat terlayani secara elektronik	%	20	20%	339.368.730	20%	1.171.587.167	20%	1.199.029.058	20%	9	20%	1.321.929.537	100%	5.290.895.003	Diskominfotik
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Terlaksananya informasi dan pengetahuan terhadap masyarakat	%	100	0	0	100%	24.000.000	100%	25.455.000	100%	48.824.200	100%	53.706.620	100%	151.985.820	DP2KP
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase tersedianya sistem informasi	%	100	100%	1.176.071.600	100%	828.071.600	100%	869.475.180	100%	912.948.939	100%	958.586.386	100%	4.745.163.705	Bagian Adm. Pembangunan
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase terserapnya informasi pelaksanaan kepemerintahan kepada masyarakat	%	20	20%	1.079.189.765	20%	946.546.718	20%	993.874.054	20%	1.043.567.757	20%	2.095.746.145	20%	6.158.924.439	Diskominfotik

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
			Satuan	Volume	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Persentase terpeuhinya data base statistik daerah	%	20	20%	62.805.820	20%	472.696.111	20%	496.330.917	20%	521.147.462	20%	547.204.835	100%	2.100.185.145	Diskominfotik
	Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Persentase terpenuhinya data base infokom	%	0	0	0	20%	72.450.000	20%	76.072.500	20%	79.876.125	20%	83.869.931	80%	312.268.556	Diskominfotik
	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase terpenuhinya peningkatan SDM bidang Kominfo	%	20	20%	48.242.600	20%	100.654.730	20%	105.687.467	20%	110.971.840	20%	116.520.432	100%	482.077.069	Diskominfotik
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase kegiatan yang memamfaatkan teknologi informasi	%	100	100%	622.871.150	100%	669.364.708	100%	702.832.943	100%	737.974.591	100%	774.873.320	100%	3.507.916.712	Bagian Adm. Pembangunan, Bag Hukum, Bag ULP
	Program pengembangan data/informasi	Persentase Meningkatnya keterlibatan public dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan	%	100	100%	103.520.000	100%	73.500.000	100%	55.125.000	100%	81.033.750	100%	85.085.437	100%	398.264.187	DLHK3
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyampaian laporan Kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai SAP yang berbasis akrual	%	0	100%	259.744.500	100%	197.850.500	100%	197.850.500	100%	205.326.000	100%	210.295.000	100%	1.071.066.500	BPKK
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparansi	%	100	100%	5.751.903.700	100%	6.169.240.765	100%	6.222.997.325	100%	6.271.709.325	100%	6.312.117.325	100%	30.727.968.440	BPKK
	Total					**Rp 30.322.867.158**		**Rp 33.218.263.833**		**Rp 31.150.313.959**		**Rp 35.029.160.867**		**Rp 39.356.676.419**		**Rp 140.449.645.345**	
	MISI 6 : Membangun Infrastruktur Kota yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan																
6.1	**Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana kota yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan**	**Indikator: Indeks Kota Layak Huni**	**Indeks**	**60,90**	**61,40**		**61,90**		**62,40**		**62,90**		**63,40**		**63,40**		**Sekretariat Daerah, Bappeda, Dinas PUPR, DLHK3, Dinas Perkim, DPKP, Dishub,BPBD**
6.1.1	**Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Pencapaian Kota Layak Huni**	**Indeks Kota Layak Huni**	**Indeks**	**60,90**	**61,40**		**61,90**		**62,40**		**62,90**		**63,40**		**63,40**		**Sekretariat Daerah, Bappeda, Dinas PUPR, DLHK3, Dinas Perkim, DPKP, Dishub,BPBD**
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan besar	Persentase Terfasilitasinya Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan	%	100	100%	137.198.250	100%	207.058.163	100%	217.411.071	100%	228.281.624	100%	239.695.705	100%	1.029.644.813	Dinas Perkim
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Persentase meningkatnya layanan pemasangan air minum dan air limbah	%	0	85%	10.299.750.000	85%	10.300.575.000	85%	8.581.900.000	85%	8.961.000.000	85%	9.359.200.000	85%	47.502.425.000	Dinas PUPR
	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase tersedianya fasilitasi kerja sama pemberdayaan masyarakat perkotaan	%	0	0	0	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	600.000.000	Dinas PUPR
	Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase meningkatnya kebersihan kota dan pengurangan sampah	%	100	100%	4.643.987.668	100%	6.833.829.885	100%	9.730.410.293	100%	10.344.722.447	100%	11.649.758.569	100%	43.202.708.862	DLHK3
		Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk	%	35	35		37		40		43		45		45	-	DLHK3
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	%	100	100%	625.324.000	100%	630.000.000	100%	661.500.000	100%	694.575.000	100%	729.303.749	100%	3.340.702.749	DLHK3
	Program Pengendalian dan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran lingkungan	%	100	100%	344.700.500	100%	1.711.500.000	100%	1.797.075.000	100%	1.886.928.750	100%	3.981.275.186	100%	9.721.479.436	DLHK3
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase peningkatan perlindungan dan konservasi lingkungan	%	100	0	0	100%	250.000.000	0	0	100%	250.000.000	0	0	100%	500.000.000	DLHK3

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
			Satuan	Volume	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	%	0	0	0	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	10.000.000.000	Dinas PUPR
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase meningkatnya kualitas saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun/dipelihara	%	0	100%	10.149.289.880	100%	11.165.000.000	100%	12.500.000.000	100%	12.800.000.000	100%	13.100.000.000	100%	59.714.289.880	Dinas PUPR
	Program Pengendalian Banjir	Persentase meningkatnya kapasitas pengendalikan Banjir kiriman	%	0	100%	280.060.000	100%	1.300.000.000	100%	1.365.000.000	100%	1.433.250.000	100%	1.504.900.000	100%	5.883.210.000	Dinas PUPR
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Meningkatnya Luas Lingkungan Sehat	%	100	100%	0	100%	50.000.000	100%	52.500.000	100%	55.125.000	100%	57.881.250	100%	215.506.250	Dinas Perkim
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan pengembangan perumahan	%	100	100%	3.653.951.606	100%	3.626.650.236	100%	3.807.982.748	100%	3.998.381.886	100%	4.198.300.980	100%	19.285.267.456	Dinas Perkim
	Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase meningkatnya layanan pemasangan air minum dan air limbah	%	0	85%	10.299.750.000	85%	10.300.575.000	85%	8.581.900.000	85%	8.961.000.000	85%	9.359.200.000	85%	47.502.425.000	Dinas PUPR
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Persentase meningkatnya Kualitas Kontrukti Jalan sesuai Spesifikasi	%	100	100%	9.829.807.500	100%	11.812.700.000	100%	12.250.000.000	100%	11.700.000.000	100%	12.200.000.000	100%	57.792.507.500	Dinas PUPR
	Program Penigkatan Sarana dan Prasarana dan dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase lancarnya Pelaksanaan Infrastuktur Kebinamargaan	%	0	0	0	0	0	100%	2.750.000.000	100%	2.750.000.000	0	0	100%	5.500.000.000	Dinas PUPR
	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Meningkatnya kerjasama pembangunan	%	100	100%	281.484.100	100%	295.558.305	100%	310.336.220	100%	425.853.031	100%	442.145.683	100%	1.755.377.339	Bappeda
		Persentase tersedianya fasilitasi kerja sama pemberdayaan masyarakat perkotaan	%	0	0	0	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	600.000.000	Dinas PUPR
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase bertambahnya umur dan prasarana fasilitas LLAJ guna meningkatan peningkatan keselamatan penguna jasa/jalan	%	100	100%	477.750.000	100%	535.350.000	100%	562.117.500	100%	590.223.375	100%	619.734.544	100%	2.785.175.419	Dishub
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase pelayanan jasa angkutan dan menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas serta tertibnya lalu lintas	%	100	100%	2.109.494.600	100%	2.451.457.830	100%	2.371.530.722	100%	2.487.607.258	100%	3.235.258.870	100%	12.655.349.280	Dishub
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana perhubungan	Persentase peningkatan pelayanan terminal	%	0	0	0	100%	1.200.000.000	100%	2.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	6.000.000.000	100%	14.200.000.000	Dishub
	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase bertambahnya Fasilitas perlengkapan jalan guna peningkatan keselamatan pengguna jalan	%	90	90%	2.592.403.400	93%	7.180.608.570	95%	10.989.638.999	97%	9.439.120.948	100%	15.520.326.995	100%	45.722.098.912	Dishub
	Program Peningkatan Kalaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang laik jalan	%	75	0	0	80%	50.000.000	82%	402.500.000	85%	422.625.000	88%	443.756.250	88%	1.318.881.250	Dishub
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase bertambahnya jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan guna peningkatan pengeloloan terminal darat dan ASDP	%	12	20%	138,600,000	20%	1,650,000,000	20%	3,312,500,000	20%	3,775,625,000	20%	7,039,406,250	60%	15,916,131,250	Dishub
	Program Peningkatan Susunan Tata Ruang Dan Tata Bangunan	Persentase meningkatnya penataan Ruang dan Tata Bangunan	%	0	84	27.982.616.205	84	27.753.400.000	84	36.633.985.000	84	40.465.659.000	84	40.338.854.000	84	171.174.514.205	Dinas PUPR

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
			Satuan	Volume	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase jumlah dokumen Perencanaan tata ruang	%	0	0	0	100	2.386.000.000	100	2.406.500.000	100	2.428.125.000	100	2.450.900.000	100	9.671.525.000	Dinas PUPR
	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase jumlah penataan bangunan dan Kawasan	%	0	0	0	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.000.000.000	Dinas PUPR
	Program Pengendalian Pemanfaatan ruang	Persentase tersusunnya rencana pengawasan pemanfaatan ruang	%	100	100%	49.250.000	100%	105.908.550	100%	111.203.978	100%	116.764.176	100%	122.602.385	100%	505.729.089	Bagian Administrasi Pembangunan
		Persentase tertatanya ruang yang sesuai RTRW	%	0	100%	1.902.963.300	100%	964.000.000	100%	1.011.000.000	100%	1.060.250.000	100%	1.111.800.000	100%	6.050.013.300	Dinas PUPR
	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase peningkatan kualitas lingkungan	%	0	0	0	100%	3.149.413.650	100%	13.121.502.580	100%	31.068.304.563	100%	41.612.329.524	100%	88.951.550.317	Dinas PUPR
		Persentase peningkatan kualitas lingkungan	%	100	100%	3.308.200.000	100%	4.140.000.000	100%	4.347.000.000	100%	4.564.350.000	100%	12.694.016.197	100%	29.053.566.197	DLHK3
6.1.2	**Mitigasi Kebencanaan yang Tangguh**	**Indeks kapasitas daerah dalam Penanggulangan bencana**	**Indeks**	**0,79 (kategori sedang)**	**0,80**		**0,81**		**0,83**		**0,85**		**0,86**		**0,86**		**BPBD, DPKP**
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase meningkatnya penanganan bencana	%	100	100%	508.342.621	100%	2.266.652.000	100%	2.379.984.600	100%	2.498.983.830	100%	4.623.933.022	100%	12.277.896.073	BPBD
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase meningkatnya penanganan bencana	%	100	20%	289.155.000	20%	814.391.100	20%	1.022.063.655	20%	882.619.839	20%	938.310.080	100%	3.946.539.674	DPKP
																-	
6.1.3	**Pemenuhan kebutuhan energi listrik dari sumber energi terbarukan**	**Jumlah Daya Pasokan Listrik dari Energi terbarukan**	**KWp**	**14,76**	**14,76**		**21,76**		**28,76**		**35,76**		**42,76**		**42,76**		**DLHK3**
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Persentase peningkatan Jumlah daya pasokan listrik terbarukan	%	0	0	0	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	2.050.000.000	DLHK3
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	%	100	100%	1.715.886.000	100%	5.680.000.000	100%	7.764.000.000	100%	7.852.200.000	100%	8.044.810.000	100%	31.056.896.000	DLHK3
	Total					**Rp 91.481.364.630**		**Rp 120.710.628.289**		**Rp 151.279.042.366**		**Rp 176.915.950.727**		**Rp 208.178.292.989**		**Rp 746.565.279.001**	
	MISI 7 :Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.																
7.1	**Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta pengendalian penduduk**	**Persentase Indikator Kota Layak Anak yang dipenuhi**	**%**	**53**	**53**		**56**		**59**		**62**		**65**		**65**	**-**	**DP3AP2KB**
7.1.1	**Pemerataan Pembangunan Berbasis Gender dan Ramah Anak**	**Index Pembangunan Gender (IPG)**	**%**	**95,66**	**95,66**		**96,02**		**96,38**		**96,74**		**97,1**		**97,1**		**DP3AP2KB**
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	%	95	95%	647.068.500	96%	728.171.925	97%	764.580.521	98%	802.809.547	99%	842.950.025	100%	3.785.580.518	DP3AP2KB
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan	%	98	98 %	75.912.500	98.5%	79.708.125	98,50%	83.693.531	99%	87.878.208	99%	92.272.118	100%	419.464.482	DP3AP2KB
		Persentase Indikator Kota Layak Anak yang dipenuhi	**%**	**53**	**53**		**56**		**59**		**62**		**65**		**65**		**DP3AP2KB**
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase kasus yang ditangani	%	100	100%	61.200.000	100%	64.260.000	100%	67.473.000	100%	70.846.650	100%	74.388.983	100%	338.168.633	DP3AP2KB

Kode	Sasaran/Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
			Satuan	Volume	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.1.2	**Pengendalian Pertumbuhan Penduduk**	**Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk**	**%**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0**	**DP3AP2KB**
	Program Keluarga Berencana	Persentase meningkatnya kesertaan berKB (keluarga berencana)	%	86	90%	3.082.990.000	91%	3.429.853.000	92%	3.815.760.000	93%	4.245.100.000	94%	4.722.775.000	95%	19.296.478.000	DP3AP2KB
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase jumlah pengurus PIK remaja yang tersosialisasi	%	100	0	0	0	0	100%	48.726.090	100%	51.162.395	100%	53.720.514	100%	153.608.999	DP3AP2KB
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase derajat kesehatan PUS	%	0	0	0	0	0	100%	3.924.812	100%	4.121.052	100%	4.327.105	100%	12.372.969	DP3AP2KB
	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina keluarga	Persentase jumlah tenaga pendamping poktan	%	100	0	0	0	0	100%	27.312.233	100%	28.677.844	100%	30.111.736	100%	86.101.813	DP3AP2KB
	Total					**Rp 3.867.171.000**		**Rp 4.301.993.050**		**Rp 4.811.470.188**		**Rp 5.290.595.696**		**Rp 5.820.545.481**		**Rp 24.091.775.414**	
	Total seluruh Misi					**Rp 457.344.510.760**		**Rp 504.068.335.971**		**Rp 580.174.104.494**		**Rp 654.867.404.861**		**Rp 746.658.348.382**		**Rp 2.943.112.704.469**	

* Kegiatan Survey Pelaksanaan Syariat Islam baru dilakukan pada tahun 2018

** persentase peningkatan nilai investasi tahun 2017 tidak dapat dihitung karena data investasi 2016 belum menggunakan sistem OSS (online single submission) sistem OSS digunakan sejak tahun 2017

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat Program Prioritas dalam pencapaian visi misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerja, pagu Indikatif target, perangkat Daerah sebagai penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Proses penjabaran Visi dan Misi pembangunan kota Banda Aceh selanjutnya setelah tujuan, sasaran, strategi dan program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaannya. Program prioritas merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang terkait langsung dengan pelaksanaan visi dan misi RPJMD. Selain program prioritas, program yang disajikan dalam RPJMD ini juga menuangkan program yang terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun operasional pemerintahan sebagai landasan pelaksanaan penyusunan Renstra SKPD agar terjalin ikatan yang tidak terputus antara RPJMD dengan Renstra SKPD.

Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan. Dalam ab ini, dari semua program prioritas yang telah ditentukan selanjutnya akan dipilih program yang akan menjadi program unggulan yang merupakan program prioritas utama Walikota dalam mencapai visi dan misi RPJMD

Dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam tabel 7.2

Tabel 7.1
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2017 s/d 2022
Kota Banda Aceh

No	Uraian	Pertumbuhan (%)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)
1	**PENDAPATAN**		**1.210.549.597.835**	**1.357.348.165.016**	**1.522.293.982.854**	**1.707.679.428.100**	**1.916.093.279.766**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**27,21%**	**294.413.666.761**	**338.055.328.103**	**388.228.772.505**	**445.918.475.065**	**512.258.043.420**
1.1.1	Pajak Daerah	15,47%	70.409.835.927	81.304.475.320	93.884.861.681	108.411.833.644	125.186.589.868
1.1.2	Retribusi Daerah	10,49%	29.331.430.000	32.406.936.803	35.804.921.647	39.559.197.525	43.707.122.843
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17,91%	1.100.000.000	1.296.963.396	1.529.194.592	1.803.008.556	2.125.851.000
1.1.4	Zakat	14,84%	18.604.500.000	21.365.190.216	24.535.534.574	28.176.320.957	32.357.357.459
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15,27%	174.967.900.834	201.681.762.368	232.474.260.010	267.968.114.384	308.881.122.250
1.2	**Dana Perimbangan**	**11,26%**	**771.483.628.000**	**858.352.684.513**	**955.003.196.789**	**1.062.536.556.747**	**1.182.178.173.037**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	11,26%	49.810.056.000	55.418.668.306	61.658.810.357	68.601.592.403	76.326.131.708
1.2.2	Dana Alokasi Umum	11,26%	591.711.772.000	658.338.517.527	732.467.434.601	814.943.267.737	906.705.879.684
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	11,26%	129.961.800.000	144.595.498.680	160.876.951.831	178.991.696.608	199.146.161.646
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**11,26%**	**144.652.303.074**	**160.940.152.400**	**179.062.013.560**	**199.224.396.287**	**221.657.063.309**
1.3.1	Hibah	11,26%	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	11,26%	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	11,26%	29.192.637.074	32.479.728.009	36.136.945.382	40.205.965.432	44.733.157.140
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	11,26%	99.964.666.000	111.220.687.392	123.744.136.792	137.677.726.595	153.180.238.609
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau pemerintah Daerah Lainnya	11,26%	-	-	-	-	-
1.3.6	Pendapatan Yang Sah Lainnya	11,26%	15.495.000.000	17.239.737.000	19.180.931.386	21.340.704.260	23.743.667.560
2	**Belanja**	**11,96%**	**1.213.749.597.835**	**1.360.548.165.016**	**1.525.493.982.854**	**1.710.879.428.100**	**1.919.293.279.766**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**11,96%**	**619.335.677.156**	**695.774.581.029**	**778.989.220.920**	**872.156.331.742**	**976.466.229.018**
2.1.1	Belanja Pegawai	11,96%	466.062.996.703	525.833.093.994	588.722.732.035	659.133.970.787	737.966.393.693
2.1.2	Belanja Bunga	11,96%	3.400.000.000	3.806.640.000	4.261.914.144	4.771.639.076	5.342.327.109
2.1.4	Belanja Hibah	11,96%	10.440.000.000	9.858.078.000	11.037.104.129	12.357.141.783	13.835.055.940

No	Uraian	Pertumbuhan (%)	2018	2019	2020	2021	2022
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11,96%	2.618.000.000	3.099.052.800	3.469.699.515	3.884.675.577	4.349.282.776
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	11,96%	131.814.680.453	147.579.716.235	165.230.250.297	184.991.788.232	207.116.806.105
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	11,96%	5.000.000.000	5.598.000.000	6.267.520.800	7.017.116.288	7.856.363.396
2.2	**Belanja Langsung**	**11,96%**	**594.413.920.679**	**664.773.583.987**	**746.504.761.934**	**838.723.096.358**	**942.827.050.748**
2.2.1	Belanja Pegawai	11,96%	98.721.144.825	109.664.290.569	122.780.139.721	137.464.644.432	153.905.415.906
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,96%	412.378.345.285	463.535.546.551	521.198.655.221	586.470.379.282	660.404.908.709
2.2.3	Belanja Modal	11,96%	83.314.430.569	91.573.746.867	102.525.966.992	114.788.072.644	128.516.726.133
	Surplus / (Defisit)		**(3.200.000.000)**	**(3.200.000.000)**	**(3.200.000.000)**	**(3.200.000.000)**	**(3.200.000.000)**
3	**Pembiayaan**	**0,00%**	**3.200.000.000**	**3.200.000.000**	**3.200.000.000**	**3.200.000.000**	**3.200.000.000**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00%	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00%	11.800.000.000	11.800.000.000	11.800.000.000	11.800.000.000	11.800.000.000
	Pembiayaan Netto		**-0**	**0**	**0**	**-0**	**0**

Tabel 7.2.

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Tahun 2017-2022

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Priorits Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017-2022)		
		Satuan	Volume	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Layanan Urusan Wajib Dasar																
PENDIDIKAN					**46.685.188.663**		**47.666.600.841**		**54.125.801.018**		**61.310.097.845**		**67.323.544.326**	**0**	**277.111.232.693**	**Disdikbud**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	3.593.642.920	100%	3.593.642.920	100%	3.773.325.066	100%	3.961.991.319	100%	4.160.090.885	100	19.082.693.111	Disdikbud
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	157.106.300	100%	164.961.615	100%	173.209.696	100%	181.870.181	100%	190.963.690	100	868.111.481	Disdikbud
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	1.102.200.000	100%	1.157.310.000	100%	1.215.175.500	100%	1.275.934.275	100%	1.339.730.989	100	6.090.350.764	Disdikbud
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase meningkatnya angka partisipasi kasar PAUD	%	84,14	89%	1.308.733.500	91,39%	610.000.000	91%	640.500.000	97%	672.525.000	99%	706.151.250	100%	3.937.909.750	Disdikbud
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Tuntasnya Wajib Belajar Sembilan Tahun yg bermutu dan Islami	%	98,7	98,90%	39.027.025.600	99,00%	40.047.096.921	99,30%	46.125.321.902	99,50%	52.909.594.774	100%	58.503.016.101	100%	236.612.055.298	Disdikbud
	Persentase jumlah kepala sekolah/guru yang bersertifikat workshop sosialisasi pendidikan dasar	%	0	20 %	39.891.570	20 %	41.886.149	20 %	43.980.456	20 %	46.179.479	20 %	48.488.453	100 %	220.426.106	Sekretariat MPD
Program Pendidikan Non Formal	Persentase terselenggaranya pendidikan non formal	%	98,70%	100%	0	100%	509.974.650	100%	535.473.382	100%	562.247.051	100%	590.359.404	100%	2.198.054.487	Disdikbud
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik sudah kualifikasi akademik minimal S1 dan sudah tersertifikasi pendidik	%	2135 org	100%	868.575.000	100%	912.003.750	100%	957.603.938	100%	1.005.484.134	100%	1.055.758.341	100%	4.799.425.163	Disdikbud
	Persentase tenaga pendidik yang telah memiliki kompetensi membuat karya ilmiah	%	0	100%	0	100%	35.000.000	100%	36.750.000	100%	38.587.500	100%	40.516.875	100%	150.854.375	Sekretariat MPD
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase tenaga pendidik mengikuti diklat kompetensi sesuai bidangnya	%	100	76%	508.801.983	83,73%	534.242.082	84%	560.954.186	88%	589.001.896	93%	618.451.990	93%	2.811.452.137	Disdikbud
	Persentase anggota/komite sekolah yang menerapkan manajemen pelayanan pendidikan	%	0	0	0	100%	35.000.000	100%	36.750.000	100%	38.587.500	100%	40.516.875	100%	150.854.375	Sekretariat MPD
Program Pendidikan Menengah	Persentase meningkatnya pendidikan Menengah	%	100	100%	54.942.500	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	54.942.500	Dispora
	Persentase meningkatnya Peran Pendidikan Menengah	%	20%	20%	24.269.290	40%	25.482.755	60%	26.756.892	80%	28.094.737	100%	29.499.474	100%	134.103.147	Sekretariat MPD
KESEHATAN					**179.834.030.764**		**203.515.940.707**		**230.601.995.249**		**261.622.456.280**		**297.164.082.005**		**1.172.738.505.006**	**Dinkes**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100	2.989.761.853	100	3.145.245.789	100	3.309.430.971	100	3.482.864.406	100	3.666.133.281	100	16.593.436.300	Dinkes
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	2.380.801.160	100	2.577.726.902	100	2.793.268.860	100	3.029.345.337	100	3.288.081.746	100	14.069.224.005	Dinkes
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100	306.900.000	100	316.107.000	100	325.590.210	100	335.357.916	100	345.418.654	100	1.629.373.780	Dinkes
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis	%	100	0	0	100%	20.000.000	100%	21.000.000	100%	22.050.000	100%	23.152.500	100%	86.202.500	Dinkes

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Priorits Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017-2022)		
		Satuan	Volume	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase angka kejadian kasus penyakit menular (DBD, HIV, TB, dan lain lain) di Kota Banda Aceh	%	0,75	75%	697.572.950	78%	776.344.069	96%	786.067.077	95%	803.540.364	95%	822.923.609	95%	3.886.448.069	Dinkes
Program Penyakit yang Dapat dicegah dengan Imunisasi	Persentase Cakupan Desa UCI	%	79	80%	0	83%	160.539.829	85%	191.371.825	87%	205.252.363	90%	211.132.900	90%	768.296.917	Dinkes
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase cakupan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan	%	100	100%	336.249.000	100%	359.092.305	100%	464.057.217	100%	411.369.111	100%	441.278.336	100%	2.012.045.970	Dinkes
Program Penyakit Tidak Menular	Persentase menurunnya kasus penyakit tidak menular DM, Hipertensi, ODGJ, dan lain-lain di Kota Banda Aceh				0		165.364.143		176.480.067		186.837.219		193.445.723		722.127.152	Dinkes
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase menurunnya AKB melalui program anak balita	%	0,9	90%	62.618.600	96%	35.000.000	95%	69.037.007	96%	72.488.857	95%	76.113.300	95%	315.257.765	Dinkes
Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase menurunnya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian Bayi (AKB)	%	0,9	90%	2.804.112.400	95%	3.004.941.013	95%	3.224.619.606	95%	3.465.141.992	95%	3.728.721.837	95%	16.227.536.847	Dinkes
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase meningkatnya status gizi masyarakat Kota Banda Aceh	%	0	100%	177.193.625	100%	182.509.434	100%	187.984.717	100%	193.624.258	100%	199.432.986	100%	940.745.020	Dinkes
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat di dalam program kesehatan	%	100	100%	1.392.000.500	100%	1.433.760.515	100%	1.476.773.330	100%	1.521.076.530	100%	1.566.708.826	100%	7.390.319.702	Dinkes
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan penerapan KTR di Kota Banda Aceh dan Cakupan TTU/TPM yang memenuhi syarat Higiene Sanitasi	%	50 dan 80	50 dan 83	812.815.032	55 dan 85	1.000.080.860	60 dan 87	1.115.312.327	65 dan 90	1.251.054.805	70 dan 93	1.376.009.457	70 dan 93	5.555.272.481	Dinkes
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase terselenggaranya standarisasi unit2 pemberi pelkes	%	30	85%	1.052.698.450	100%	1.785.401.102	100%	1.634.901.576	100%	1.724.593.656	100%	1.822.717.795	100%	8.020.312.579	Dinkes
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Cakupan pemanfaatan sarana dan prasarana di Unit pelayanan kesehatan	%	70	70%	6.134.966.000	73%	8.784.731.550	75%	8.811.982.155	77%	9.761.818.288	80%	9.493.189.473	80%	42.986.687.466	Dinkes
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketersediaan Lahan untuk kepentingan umum pemerintah dan publik	%	90	90%	1.457.163.000							94%	1.525.000.000	94%	2.982.163.000	Dinkes
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Unit layanan kesehatan yang melaksanakan program UKM untuk pencapaian target SPM	%	100	100%	22.414.529.694	100%	22.809.439.216	100%	26.959.849.957	100%	30.771.525.618	100%	34.865.316.839	100%	137.820.661.324	Dinkes
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan Pelayanan kesehatan bagi lansia	%	0	0%	0	95%	46.441.000	95%	48.763.050	95%	51.201.203	95%	53.761.263	95%	200.166.515	Dinkes
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar pelayanan dan perizinan	%	85%	92%	107.088.500	92%	102.112.000	95%	157.217.600	95%	165.078.480	97%	173.332.404	97%	704.828.984	Dinkes
Program Sistem Informasi Kesehatan	Persentase meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Program/ Regulasi Kesehatan-	%	0	0%	0	91%	50.000.000	92%	72.500.000	95%	76.125.000	96%	79.931.250	96%	278.556.250	Dinkes
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	0	0	100	500.000.000	100	525.000.000	100	551.250.000	100	578.812.500	100	2.155.062.500	BLUD RSU Meuraxa
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya kinerja pelayanan pemerintah daerah	%	90%	0	0	91%	450.000.000	93%	472.500.000	93%	496.125.000	94%	520.931.250	94%	1.939.556.250	BLUD RSU Meuraxa
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase meningkatnya pelayanan kesehatan	%	100	100%	14.418.000.000	100%	14.850.540.000	100%	15.296.056.200	100%	15.754.937.886	100%	16.227.586.023	100%	76.547.120.109	BLUD RSU Meuraxa
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase tolok ukur kinerja	%	100%	100%	122.289.560.000	100%	140.960.563.980	100%	162.482.231.498	100%	187.289.797.990	100%	215.884.950.052	100%	828.907.103.521	BLUD RSU Meuraxa

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Priorits Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017-2022)		
		Satuan	Volume	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					**75.509.117.890**		**90.477.678.550**		**108.282.313.978**		**113.589.095.176**		**113.540.232.385**		**501.398.437.979**	**Dinas PUPR**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100	1.836.176.500	100	2.070.370.000	100	2.202.970.000	100	2.344.522.000	100	2.496.151.000	100	10.950.189.500	Dinas PUPR
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	2.838.737.505	100	6.252.400.000	100	6.844.120.000	100	7.200.300.000	100	7.521.825.000	100	30.657.382.505	Dinas PUPR
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100	59.900.000	100	50.085.000	100	110.785.000	100	119.100.000	100	128.300.000	100	468.170.000	Dinas PUPR
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis	%	100	0	0	0	0	100%	90.750.000	100%	99.825.000	100%	109.800.000	100%	300.375.000	Dinas PUPR
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase meningkatnya Kualitas Kontruksi Jalan dan jembatan sesuai Spesifikasi	%	100	100%	10.280.567.000	100%	13.417.240.000	100%	18.524.100.000	100%	19.210.300.000	100%	20.195.900.000	100%	81.628.107.000	Dinas PUPR
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase meningkatnya kualitas saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun/dipelihara	%	0	100%	10.149.289.880	100%	11.165.000.000	100%	12.500.000.000	100%	12.800.000.000	100%	13.100.000.000	100%	59.714.289.880	Dinas PUPR
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Persentase meningkatnya Kualitas Kontruksi Jalan sesuai Spesifikasi	%	100	100%	9.829.807.500	100%	11.812.700.000	100%	12.250.000.000	100%	11.700.000.000	100%	12.200.000.000	100%	57.792.507.500	Dinas PUPR
Program Penigkatan Sarana dan Prasarana dan dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase lancarnya Pelaksanaan Infrastuktur Kebinamargaan	%	0	0	0	0	0	100%	2.750.000.000	100%	2.750.000.000	0	0	100%	5.500.000.000	Dinas PUPR
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	%	0	0	0	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	10.000.000.000	Dinas PUPR
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Persentase meningkatnya layanan pemasangan air minum dan air limbah	%	0	85%	10.299.750.000	85%	10.300.575.000	85%	8.581.900.000	85%	8.961.000.000	85%	9.359.200.000	85%	47.502.425.000	Dinas PUPR
Program Pengendalian Banjir	Persentase meningkatnya kapasitas pengendalikan Banjir kiriman	%	0	100%	280.060.000	100%	1.300.000.000	100%	1.365.000.000	100%	1.433.250.000	100%	1.504.900.000	100%	5.883.210.000	Dinas PUPR
Program Peningkatan Susunan Tata Ruang Dan Tata Bangunan	Persentase meningkatnya penataan Ruang dan Tata Bangunan	%	0	84	27.982.616.205	84	27.753.400.000	84	36.633.985.000	84	40.465.659.000	84	40.338.854.000	84	173.174.514.205	Dinas PUPR
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase jumlah dokumen Perencanaan tata ruang	%	0	0	0	100	2.386.000.000	100	2.406.500.000	100	2.428.125.000	100	2.450.900.000	100	9.671.525.000	Dinas PUPR
Program Pemanfaatan Ruang	Persentase jumlah penataan bangunan dan Kawasan	%	0	0	0	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.000.000.000	Dinas PUPR
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase tertatanya ruang yang sesuai RTRW	%	0	100%	1.902.963.300	100%	964.000.000	100%	1.011.000.000	100%	1.060.250.000	100%	1.111.800.000	100%	6.050.013.300	Dinas PUPR
	Persentase keteraturan pemanfaatan ruang	%	100	100%	49.250.000	100%	105.908.550	100%	111.203.978	100%	116.764.176	100%	122.602.385	100%	505.729.089	Bagian Administrasi Pembangunan
Program Kerjasama Pembangunan	Persentase tersedianya fasilitasi kerja sama pemberdayaan masyarakat perkotaan	%	0	0	0	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	600.000.000	Dinas PUPR
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					**6.574.227.986**		**5.736.889.236**		**6.023.733.698**		**6.324.920.382**		**6.641.166.402**		**31.300.937.703**	**DINAS PERKIM**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	1.213.783.410	100%	1.202.175.881	100%	1.262.284.675	100%	1.325.398.908	100%	1.391.668.854	100%	6.395.311.728	Dinas Perkim
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	1.531.324.720	100%	618.034.956	100%	648.936.704	100%	681.383.539	100%	715.452.716	100%	4.195.132.635	Dinas Perkim
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	37.970.000	100%	32.970.000	100%	34.618.500	100%	36.349.425	100%	38.166.896	100%	180.074.821	Dinas Perkim
Program Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan pengembangan perumahan	%	100	100%	3.653.951.606	100%	3.626.650.236	100%	3.807.982.748	100%	3.998.381.886	100%	4.198.300.980	100%	19.285.267.456	Dinas Perkim
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Meningkatnya Luas Lingkungan Sehat	%	100	100%	0	100%	50.000.000	100%	52.500.000	100%	55.125.000	100%	57.881.250	100%	215.506.250	Dinas Perkim
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan besar	Persentase Terfasilitasinya Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan	%	100	100%	137.198.250	100%	207.058.163	100%	217.411.071	100%	228.281.624	100%	239.695.705	100%	1.029.644.813	Dinas Perkim

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Priorits Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017-2022)		
		Satuan	Volume	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		**%**	**100**	**100%**	**14.330.438.566**	**100%**	**23.314.837.192**	**100%**	**21.794.073.559**	**100%**	**31.452.820.962**	**100%**	**36.011.940.260**	**100%**	**126.904.110.540**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	1.631.620.130	100%	2.740.631.537	100%	3.834.663.113	100%	9.966.396.269	100%	10.464.716.082	100%	28.638.027.131	DPKP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	752.254.050	100%	3.389.866.753	100%	983.439.595	100%	2.365.028.016	100%	4.083.637.160	100%	11.574.225.574	DPKP
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	118.195.000	100%	122.800.000	100%	127.405.000	100%	132.010.000	100%	136.615.000	100%	637.025.000	DPKP
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase meningkatnya penanganan bencana	%	0	20%	289.155.000	20%	814.391.100	20%	1.022.063.655	20%	882.619.839	20%	938.310.080	100%	3.946.539.674	DPKP
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	6.364.607.491	100%	6.682.837.866	100%	7.016.979.759	100%	7.367.828.747	100%	7.736.220.184	100%	35.168.474.047	SATPOL PP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	2.282.905.079	100%	3.624.491.556	100%	2.966.616.525	100%	4.254.171.314	100%	3.952.486.480	100%	17.080.670.954	SATPOL PP
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	306.710.000	100%	322.045.500	100%	338.147.775	100%	605.055.164	100%	635.307.922	100%	2.207.266.361	SATPOL PP
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis	%	0	71.42%	28.550.000	77.14%	54.977.500	82.85%	57.726.375	91.42%	60.612.694	100%	63.643.328	100%	265.509.897	SATPOL PP
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Cakupan penanganan KanTranTibMas	%	100	100%	365.115.000	100%	828.370.750	100%	869.789.288	100%	923.216.252	100%	969.377.064	100%	3.955.868.354	SATPOL PP
Program pemeliharaan ketentraman dan pencegahan tindak kriminal	Persentase cakupan penegakan PERDA/Qanun	%	70	73%	592.668.500	75%	687.301.925	78%	721.667.021	80%	757.750.372	80%	795.637.891	80%	3.555.025.709	SATPOL PP
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase meningkatnya keahlian SatLinmas Gampong dalam rangka pemberdayaan masyarakat	%	0	100%	93.490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	93.490.000	SATPOL PP
Program pendidikan politik masyarakat	Persentase jumlah Linmas siaga dalam pengamanan pemilu dan pemilukada	%	100	0	0	100%	550.000.000	0 org	0	100%	94.500.000	100%	99.225.000	100%	743.725.000	SATPOL PP
Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase meningkatnya keahlian PPNS Profesional	%	60	60%	72.718.000	76%	166.353.900	88%	174.671.595	100%	183.405.175	100%	88.389.183	100%	685.537.853	SATPOL PP
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase terlaksananya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan dalam wilayah Kota Banda Aceh	%	100	100%	93.788.750	100%	148.478.100	100%	154.902.005	100%	161.617.105	100%	168.637.061	100%	727.423.021	Badan Kesbangpol
Program Pemeliharaan Kantran tibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase tersedianya data Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	%	100	100%	89.327.500	100%	65.000.000	100%	252.846.613	100%	261.797.012	100%	271.084.172	100%	940.055.297	Badan Kesbangpol
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	466.282.295	100%	489.596.410	100%	514.076.230	100%	539.780.042	100%	566.769.044	100%	2.576.504.021	BPBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	234.659.150	100%	314.042.296	100%	329.744.410	100%	346.231.631	100%	363.543.212	100%	1.588.220.699	BPBD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	40.050.000	100%	47.000.000	100%	49.350.000	100%	51.817.500	100%	54.408.375	100%	242.625.875	BPBD
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase meningkatnya penanganan bencana	%	100	100%	508.342.621	100%	2.266.652.000	100%	2.379.984.600	100%	2.498.983.830	100%	4.623.933.022	100%	12.277.896.073	BPBD
SOSIAL					**7.560.191.400**		**7.423.108.955**		**8.184.574.403**		**8.183.977.623**		**8.572.419.130**		**39.924.271.511**	**Dinsos**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	447.573.300	100%	469.951.965	100%	493.449.563	100%	518.122.041	100%	544.028.143	100%	2.473.125.013	Dinsos
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	193.221.000	100%	202.882.050	100%	213.026.153	100%	223.677.460	100%	234.861.333	100%	1.067.667.996	Dinsos
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	23.200.000	100%	24.360.000	100%	25.578.000	100%	26.856.900	100%	28.199.745	100%	128.194.645	Dinsos

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Priorits Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017-2022)		
		Satuan	Volume	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase meningkatnya kesejahteraan bagi fakir miskin,KAT dan PMKS	%	0	48%	1.060.460.300	73%	580.460.300	75%	609.483.315	100%	639.957.481	100%	671.955.355	100%	3.562.316.751	Dinsos
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	0	12%	4.198.240.000	45%	4.408.152.000	60%	4.628.559.600	75%	4.859.987.580	99%	5.102.986.959	99%	23.197.926.139	Dinsos
Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase pembinaan bagi anak terlantar	%	0	0	0	0	0	100%	390.310.000	0	0	0	0	100%	390.310.000	Dinsos
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase terlaksananya pembinaan bagi penyandang cacat dan trauma	%	0,4	46%	40.000.000	62%	42.000.000	79%	44.100.000	83%	46.305.000	98%	48.620.250	98%	221.025.250	Dinsos
Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Persentase meningkatnya pelayanan panti asuhan/ panti jompo	%	100	100%	1.597.496.800	100%	1.677.371.640	100%	1.761.240.222	100%	1.849.302.233	100%	1.941.767.345	100%	8.827.178.240	Dinsos
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase meningkatnya pelayanan Orsos terhadap masyarakat gampong	%	90	0	0	92,00%	17.931.000	99,00%	18.827.550	100,00%	19.768.928	0	0	100%	56.527.478	Dinsos
Layanan Urusan Wajib Non Dasar																
TENAGA KERJA					**2.321.167.547**		**2.080.492.355**		**2.376.242.724**		**2.512.648.060**		**2.622.923.097**		**11.913.473.783**	**Disnaker**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	795.317.047	100%	658.933.055	100%	671.035.219	100%	723.186.980	100%	759.346.329	100%	3.607.818.630	DISNAKER
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	380.001.000	100%	516.109.700	100%	692.482.925	100%	717.107.071	100%	752.712.425	100%	3.058.413.121	DISNAKER
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	19.980.000	100%	18.480.000	100%	19.404.000	100%	20.374.200	100%	21.392.910	100%	99.631.110	DISNAKER
Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan kualitas dan produktifitas pencari kerja	%	100	100%	712.235.650	100%	627.250.000	100%	527.000.000	100%	578.000.000	100%	578.000.000	100%	3.022.485.650	DISNAKER
Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase angkatan kerja (usia kerja 15-64 tahun)	%	100	100%	256.638.000	100%	99.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	665.638.000	DISNAKER
Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan	%	100	100%	156.995.850	100%	160.719.600	100%	166.320.580	100%	153.979.809	100%	159.471.433	100%	797.487.272	DISNAKER
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi industri	Persentase Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Perajin Tekstil	%	0	0	0	0	0	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	242.000.000	100%	662.000.000	DISNAKER
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK					**1.683.473.808**		**1.677.397.498**		**1.761.267.373**		**1.849.330.742**		**1.941.797.279**		**8.913.266.701**	**DP3AP2KB**
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	425.946.058	100%	447.243.361	100%	469.605.529	100%	493.085.805	100%	517.740.096	100%	2.353.620.849	DP3AP2KB
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	207.046.750	100%	217.399.088	100%	228.269.042	100%	239.682.494	100%	251.666.619	100%	1.144.063.992	DP3AP2KB
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	25.300.000	100%	26.565.000	100%	27.893.250	100%	29.287.913	100%	30.752.308	100%	139.798.471	DP3AP2KB
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase kasus yang ditangani	%	100	100%	61.200.000	100%	64.260.000	100%	67.473.000	100%	70.846.650	100%	74.388.983	100%	338.168.633	DP3AP2KB
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	%	95	95%	647.068.500	96%	728.171.925	97%	764.580.521	98%	802.809.547	99%	842.950.025	100%	3.785.580.518	DP3AP2KB
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan	%	98	98 %	75.912.500	98.5%	79.708.125	98,50%	83.693.531	99%	87.878.208	99%	92.272.118	100%	419.464.482	DP3AP2KB
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase meningkatnya peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	%	0	97%	241.000.000	97%	114.050.000	98%	119.752.500	98%	125.740.125	99%	132.027.131	100%	732.569.756	DP3AP2KB

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Priorits Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017-2022)		
		Satuan	Volume	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PANGAN					**3.767.553.802**		**7.383.832.840**		**4.121.711.123**		**4.551.350.353**		**6.005.825.387**		**25.830.273.504**	**DP2KP**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	884.893.152	100%	779.237.666	100%	857.161.432	100%	942.877.576	100%	1.037.165.334	100%	4.501.335.160	DP2KP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	266.952.900	100%	347.375.014	100%	382.112.515	100%	420.323.768	100%	462.356.143	100%	1.879.120.340	DP2KP
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	56.100.000	100%	50.600.000	100%	56.100.000	100%	61.600.000	100%	67.100.000	100%	291.500.000	DP2KP
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase menurunnya penyakit menular Ternak/Hewan	%	100	100%	99.288.000,00	100%	175.600.160,00	100%	193.160.176,00	100%	209.230.608,60	100%	230.153.670,00	100%	907.432.615	DP2KP
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase pendistribusian Ternak	%	100	100%	2.299.011.250	100%	1.285.000.000	100%	1.413.500.000	100%	1.554.850.000	100%	2.710.335.000	100%	9.262.696.250	DP2KP
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana Pertenakan	%	100	100%	161.308.500	100%	4.712.020.000	100%	1.183.222.000	100%	1.301.544.200	100%	1.431.698.620	100%	8.789.793.320	DP2KP
Program Pengawasan Kesmavet	Persentase Produksi Hasil Ternak yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal)	%	100	100%	0	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	13.310.000	100%	46.410.000	DP2KP
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Terlaksananya informasi dan pengetahuan terhadap masyarakat	%	100	0	0	100%	24.000.000	100%	25.455.000	100%	48.824.200	100%	53.706.620	100%	151.985.820	DP2KP
LINGKUNGAN HIDUP					**50.790.359.602**		**59.758.009.881**		**76.584.867.535**		**97.801.781.907**		**125.912.179.427**		**410.847.198.352**	**DLHK3**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	32.060.324.184	100%	29.067.572.615	100%	30.520.951.246	100%	32.046.998.810	100%	35.649.348.749	100%	159.345.195.604	DLHK3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	7.407.677.750	100%	7.084.293.931	100%	7.438.508.626	100%	7.810.434.058	100%	10.200.955.761	100%	39.941.870.126	DLHK3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	549.939.500	100%	553.899.800	100%	560.594.790	100%	609.624.529	100%	618.055.755	100%	2.892.114.374	DLHK3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis	%	100	100%	30.800.000	100%	84.000.000	100%	88.200.000	100%	92.610.000	100%	97.240.500	100%	392.850.500	DLHK3
Program pengembangan data/informasi	Persentase Meningkatnya keterlibatan publik dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan	%	100	100%	103.520.000	100%	73.500.000	100%	55.125.000	100%	81.033.750	100%	85.085.437	100%	398.264.187	DLHK3
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase meningkatnya kebersihan kota dan pengurangan sampah	%	100	100%	4.643.987.668	100%	6.833.829.885	100%	9.730.410.293	100%	10.344.722.447	100%	11.649.758.569	100%	43.202.708.862	DLHK3
Program Pengendalian dan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran lingkungan	%	100	100%	344.700.500	100%	1.711.500.000	100%	1.797.075.000	100%	1.886.928.750	100%	3.981.275.186	100%	9.721.479.436	DLHK3
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase peningkatan perlindungan dan konservasi lingkungan	%	100	0	0	100%	250.000.000	0	0	100%	250.000.000	0	0	100%	500.000.000	DLHK3
		lokasi	0			2 lokasi		0 lokasi		2 Lokasi		0 lokasi		4 Lokasi		
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	%	100	100%	625.324.000	100%	630.000.000	100%	661.500.000	100%	694.575.000	100%	729.303.749	100%	3.340.702.749	DLHK3
Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)	Persentase peningkatan kualitas lingkungan	%	0	0	0	100%	3.149.413.650	100%	13.121.502.580	100%	31.068.304.563	100%	41.612.329.524	100%	88.951.550.317	Dinas PUPR
		bulan	0			2.5Ha		2.5Ha		2.5Ha		2.5Ha		10Ha		
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase meningkatnya kualitas RTH publik	%	100	100%	3.308.200.000	100%	4.140.000.000	100%	4.347.000.000	100%	4.564.350.000	100%	12.694.016.197	100%	29.053.566.197	DLHK3
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah melalui pelayanan LPJU	%	100	100%	1.715.886.000	100%	5.680.000.000	100%	7.764.000.000	100%	7.852.200.000	100%	8.044.810.000	100%	31.056.896.000	DLHK3
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Persentase peningkatan Jumlah sumber pasokan listrik terbarukan	%	100	100%	0	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	2.050.000.000	DLHK3
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					**2.345.657.550**		**2.520.499.062**		**2.710.563.751**		**2.917.342.549**		**3.142.483.106**		**13.636.546.019**	**Disdukcapil**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	1.089.298.510	100%	1.178.945.936	100%	1.230.393.232	100%	1.284.412.894	100%	1.341.133.539	100%	6.124.184.110	Disdukcapil

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Priorits Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017-2022)		
		Satuan	Volume	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	64.104.230	100%	67.309.442	100%	70.674.914	100%	74.208.659	100%	77.919.092	100%	354.216.337	Disdukcapil
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	24.750.000	100%	25.987.500	100%	27.286.875	100%	28.651.219	100%	30.083.780	100%	136.759.373	Disdukcapil
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Masyarakat yang terlayani dibidang Kependudukan	%	0	100%	1.167.504.810	100%	1.248.256.185	100%	1.382.208.730	100%	1.530.069.778	100%	1.693.346.696	100%	7.021.386.199	Disdukcapil
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					**5.410.892.100**		**6.810.226.027**		**7.262.360.998**		**7.584.160.090**		**10.623.392.373**		**37.691.031.588**	**DPMG**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	755.919.700	100%	505.200.000	100%	623.661.000	100%	662.485.000	100%	695.530.000	100%	3.242.795.700	DPMG
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	324.631.000	100%	389.660.000	100%	448.395.000	100%	356.410.000	100%	159.100.000	100%	1.678.196.000	DPMG
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	21.450.000	100%	37.040.000	100%	38.900.000	100%	40.840.000	100%	42.880.000	100%	181.110.000	DPMG
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase meningkatnya jumlah aparatur gampong dan kecamatan yang mendapatkan pembinaan APBG	%	100	100%	337.281.000	100%	242.500.000	100%	254.600.000	100%	267.400.000	100%	280.800.000	100%	1.382.581.000	DPMG
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase terfasilitasinya pembinaan BUMG, UMKM Usaha Teknologi tepat guna	%	100	100%	360.181.650	100%	750.750.000	100%	788.260.000	100%	827.705.000	100%	815.230.000	100%	3.542.126.650	DPMG
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan gampong	%	60	20%	1.083.776.800	20%	1.152.900.000	20%	1.243.190.000	20%	1.307.131.000	20%	2.334.731.000	100%	7.121.728.800	DPMG
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase meningkatnya kemampuan aparatur gampong dalam menjalankan roda pemerintahan	%	100	100%	2.459.549.100	100%	1.697.400.000	100%	1.720.200.000	100%	1.881.760.000	100%	2.942.250.000	100%	10.701.159.100	DPMG
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong	Persentase meningkatnya sarana dan prasarana mukim dan gampong	%	100	0	0	100%	1.312.500.000	100%	1.380.625.000	100%	1.449.380.000	100%	2.520.775.000	100%	6.663.280.000	DPMG
Program Penguatan Kelembagaan Mukim dan Aparatur	Persentase meningkatnya Penguatan Kelembagaan Mukim dan Gampong	%	20	100%	21.669.200	100%	98.175.000	100%	103.080.000	100%	108.225.000	100%	113.655.000	100%	444.804.200	DPMG
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Jenis Reusam Gampong dan Peningkatan Pengelolaan dan Realisasi Pengelolaan Keuangan Gampong	%	0	0	0	100%	181.476.189	100%	190.549.998	100%	200.077.498	100%	210.081.373	100%	782.185.059	DPMG
Program Sinkronisasi Pengentasan Kemiskinan	Persentase terkoordinasi perumusan kebiajakan penanggulangan	%	100	100%	19.230.400	100%	26.250.000	100%	27.575.000	100%	22.261.592	100%	30.385.000	100%	125.701.992	DPMG
Program Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah	Persentase pemantauan Pendistribusian Kuota BBM dan Gas	%	0	0	0	100%	279.874.838	100%	300.000.000	100%	310.000.000	100%	320.000.000	100%	1.209.874.838	DPMG
Fasilitasi Pendapatan dan Kekayaan Gampong	Persentase terinvetarisir aset/ kekayaan gampong	%	60	100%	27.203.250	100%	136.500.000	100%	143.325.000	100%	150.485.000	100%	157.975.000	100%	615.488.250	DPMG
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					**3.082.990.000**		**3.429.853.000**		**3.895.723.135**		**4.329.061.291**		**4.810.934.355**		**19.548.561.781**	
Program Keluarga Berencana	Persentase meningkatnya kesertaan berKB (keluarga berencana)	%	86	90%	3.082.990.000	91%	3.429.853.000	92%	3.815.760.000	93%	4.245.100.000	94%	4.722.775.000	95,00%	19.296.478.000	DP3AP2KB
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase jumlah pengurus PIK remaja yang tersosialisasi	%	100	0	0	0	0	100%	48.726.090	100%	51.162.395	100%	53.720.514	100%	153.608.999	DP3AP2KB
Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase derajat kesehatan PUS	%	0	0	0	0	0	100%	3.924.812	100%	4.121.052	100%	4.327.105	100%	12.372.969	DP3AP2KB
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase jumlah tenaga pendamping poktan	%	100	0	0	0	0	100%	27.312.233	100%	28.677.844	100%	30.111.736	100%	86.101.813	DP3AP2KB

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Priorits Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017-2022)		
		Satuan	Volume	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PERHUBUNGAN					**8.656.668.000**		**16.723.195.020**		**23.516.854.772**		**25.547.547.024**		**37.564.078.525**		**112.008.343.341**	**DINAS PERHUBUNGAN**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	2.672.642.000	100%	2.836.004.220	100%	2.977.804.431	100%	2.886.544.167	100%	2.712.504.276	100%	14.085.499.094	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	490.978.000	100%	615.526.900	100%	656.303.245	100%	689.118.407	100%	1.723.574.328	100%	4.175.500.880	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	174.800.000	100%	174.247.500	100%	212.959.875	100%	223.607.869	100%	234.788.262	100%	1.020.403.506	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis	%	0	0	0	100%	30.000.000	100%	31.500.000	100%	33.075.000	100%	34.728.750	100%	129.303.750	Dinas Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase bertambahnya jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan guna peningkatan pengeloloan terminal darat dan ASDP	%	12	20%	138.600.000	20%	1.650.000.000	20%	3.312.500.000	20%	3.775.625.000	20%	7.039.406.250	60%	15.916.131.250	Dinas Perhubungan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase bertambahnya umur dan prasarana fasilitas LLAJ guna meningkatan peningkatan keselamatan penguna jasa/jalan	%	100	100%	477.750.000	100%	535.350.000	100%	562.117.500	100%	590.223.375	100%	619.734.544	100%	2.785.175.419	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase pelayanan jasa angkutan dan menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas serta tertibnya lalu lintas	%	100	100%	2.109.494.600	100%	2.451.457.830	100%	2.371.530.722	100%	2.487.607.258	100%	3.235.258.870	100%	12.655.349.280	Dinas Perhubungan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana perhubungan	Persentase peningkatan pelayanan terminal	%	0	0	0	100%	1.200.000.000	100%	2.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	6.000.000.000	100%	14.200.000.000	Dinas Perhubungan
Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase bertambahnya Fasilitas perlengkapan jalan guna peningkatan keselamatan pengguna jalan	%	90	91%	2.592.403.400	93%	7.180.608.570	95%	10.989.638.999	97%	9.439.120.948	100%	15.520.326.995	100%	45.722.098.912	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Kalaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang laik jalan	%	75	0	0	80%	50.000.000	82%	402.500.000	85%	422.625.000	88%	443.756.250	88%	1.318.881.250	Dinas Perhubungan
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					**2.706.429.695**		**4.142.364.500**		**5.945.245.258**		**5.672.507.521**		**6.814.480.396**		**25.281.027.370**	**DISKOMINFO**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	949.716.000	100%	952.217.280	100%	999.828.144	100%	1.049.819.551	100%	1.102.310.529	100%	5.053.891.504	DISKOMINFO
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	129.356.780	100%	234.541.494	100%	460.068.568	100%	503.071.997	100%	505.073.096	100%	1.832.111.935	DISKOMINFO
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	17.050.000	100%	13.671.000	100%	14.354.550	100%	15.072.278	100%	21.825.891	100%	81.973.719	DISKOMINFO
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase terwujudnya sistem pemerintahan yang berbasia TIK dan masyarakat dapat terlayani secara elektronik	%	20	20%	339.368.730	20%	1.171.587.167	20%	1.199.029.058	20%	1.258.980.511	20%	1.321.929.537	100%	5.290.895.003	DISKOMINFO
Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Persentase terpeuhinya data base statistik daerah	%	20	20%	62.805.820	20%	472.696.111	20%	496.330.917	20%	521.147.462	20%	547.204.835	100%	2.100.185.145	DISKOMINFO
Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Persentase terpenuhinya data base infokom	%	0	0	0	20%	72.450.000	20%	76.072.500	20%	79.876.125	20%	83.869.931	80%	312.268.556	DISKOMINFO
Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase terpenuhinya peningkatan SDM bidang Kominfo	%	20	20%	48.242.600	20%	100.654.730	20%	105.687.467	20%	110.971.840	20%	116.520.432	100%	482.077.069	DISKOMINFO
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase adanya Informasi Terhadap layanan Publik	%	0	100%	80.700.000	100%	178.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.090.000.000	100%	1.020.000.000	100%	3.968.700.000	DPMPTSP
Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase terserapnya informasi pelaksanaan kepemerintahan kepada masyarakat	%	20	20%	1.079.189.765	20%	946.546.718	20%	993.874.054	20%	1.043.567.757	20%	2.095.746.145	100%	6.158.924.439	DISKOMINFO
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					**21.863.705.081**		**21.202.874.310**		**21.312.116.012**		**24.488.661.197**		**30.529.249.001**		**119.396.605.602**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	538.123.200	100%	599.059.720	100%	658.965.692	100%	724.862.261	100%	797.348.487	100%	3.318.359.361	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Priorits Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017-2022)		
		Satuan	Volume	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	143.282.800	100%	172.111.080	100%	167.322.188	100%	184.054.407	100%	214.429.333	100%	881.199.808	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	31.350.000	100%	76.320.000	100%	83.952.000	100%	92.347.200	100%	101.581.920	100%	385.551.120	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Persentase terciptanya iklim usaha mikro yang kondusif	%	100	100%	10.401.170.050	100%	7.282.822.800	100%	8.011.105.080	100%	8.812.215.588	100%	11.693.437.147	100%	46.200.750.665	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Persentase berkembangnya jumlah wirausaha yang unggul dan kompetitif	%	100	100%	72.385.440	100%	231.873.984	100%	255.061.382	100%	280.567.521	100%	308.624.273	100%	1.148.512.600	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Persentase terlaksananya promosi usaha mikro	%	0	100%	120.000.000	100%	132.000.000	100%	145.200.000	100%	159.720.000	100%	175.692.000	100%	732.612.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase Update dan jumlah koperasi aktif yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	%	100	100%	59.601.268	100%	71.061.395	100%	76.159.235	100%	61.683.869	100%	67.852.256	100%	336.358.024	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Program perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase Jumlah pasar, toko/swalayan yg diawasi dan direhab serta pelaksanaan tera ulang	%	100	100%	4.589.340.950	100%	6.410.458.600	100%	5.409.004.460	100%	7.556.904.906	100%	8.559.095.397	100%	32.524.804.313	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Program peningkatan Efiensi perdagangan dalam Negeri	Persentase informasi harga pasar tentang harga pokok barang penting dan strategis serta terlaksananya pasar rakyat dan pengawasan pendistribusi LP3	%	100	100%	533.198.300	100%	483.151.005	100%	529.129.462	100%	579.588.932	100%	634.971.675	100%	2.760.039.374	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Progam pembinaan pedagang kaki lima	Persentase tertatanya pedagang kaki lima dan asongan	%	100	0	0	100%	100.000.000	100%	50.000.000	100%	110.500.000	100%	50.000.000	100%	310.500.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Program peningkatan pelayanan pasar	Persentase meningkatnya pelayanan dan pengawasan pasar	%	100	100%	5.375.253.073	100%	5.644.015.727	100%	5.926.216.513	100%	5.926.216.513	100%	7.926.216.513	100%	30.797.918.339	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
PENANAMAN MODAL					**813.402.144**		**1.872.544.100**		**1.379.630.100**		**1.511.378.600**		**1.750.687.910**		**7.327.642.854**	**DPMPTSP**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	560.989.604	100%	602.633.000	100%	624.133.000	100%	662.633.000	100%	684.633.000	100%	3.135.021.604	DPMPTSP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	70.654.260	100%	652.251.100	100%	172.251.100	100%	200.500.000	100%	180.500.000	100%	1.276.156.460	DPMPTSP
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	22.000.000	100%	14.800.000	100%	15.200.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	84.000.000	DPMPTSP
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	Persentase tersedianya Layanan Perizinan Kepada Pelaku Usaha	%	60	100%	77.501.000	100%	110.000.000	100%	115.000.000	100%	120.000.000	100%	325.000.000	100%	747.501.000	DPMPTSP
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase adanya Promosi dan Kerjasama Investasi	%	9	100%	32.549.780	100%	180.000.000	100%	174.000.000	100%	196.000.000	100%	200.000.000	100%	782.549.780	DPMPTSP
Program Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah	Persentase Jumlah Perizinan	%	100	100%	31.160.000	100%	90.860.000	100%	99.946.000	100%	109.940.600	100%	120.934.660	100%	452.841.260	DPMPTSP
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Adanya Peraturan Perundang-Undangan terkait Perizinan	%	0	100%	0	100%	42.000.000	100%	44.100.000	100%	46.305.000	100%	48.620.250	100%	181.025.250	DPMPTSP
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Adanya Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi	%	0	100%	18.547.500	100%	180.000.000	100%	135.000.000	100%	160.000.000	100%	175.000.000	100%	668.547.500	DPMPTSP
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					**6.663.016.500**		**3.025.231.000**		**3.176.492.550**		**3.335.317.178**		**4.502.083.036**		**20.702.140.264**	**Dispora**
Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	323.396.016	100%	339.565.817	100%	356.544.108	100%	374.371.313	100%	393.089.879	100%	1.786.967.132	Dispora
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	247.130.984	100%	259.487.533	100%	272.461.910	100%	286.085.005	100%	300.389.256	100%	1.365.554.688	Dispora
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	22.015.000	100%	23.115.750	100%	24.271.538	100%	25.485.114	100%	26.759.370	100%	121.646.772	Dispora
Program Pengembangan dan Keserasian kebijakan pemuda	Persentase Meningkatnya Kesinambungan kerjasama dengan masyarakat	%	100	100%	0	100%	50.000.000	100%	52.500.000	100%	55.125.000	100%	57.881.250	100%	215.506.250	Dispora

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Priorits Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017-2022)		
		Satuan	Volume	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase meningkatnya Partisipasi pemuda	%	100	100%	698.807.000	100%	195.561.900	100%	205.339.995	100%	215.606.995	100%	226.387.344	100%	1.541.703.234	Dispora
Program Pendidikan Non Formal	Persentase Terselenggaranya pendidikan non formal	%	98,70%	100%	650.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	650.000.000	Dispora
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100	0	0	100%	200.000.000	100%	210.000.000	100%	220.500.000	100%	231.525.000	100%	862.025.000	Dispora
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Meningkatnya Prestasi olahraga masyarakat di kota Banda Aceh	%	100	100%	722.881.500	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%	722.881.500	Disdikbud
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Meningkatnya Prestasi olahraga masyarakat di kota Banda Aceh	%	100	0	0	100%	757.500.000	100%	795.375.000	100%	835.143.750	100%	876.900.938	100%	3.264.919.688	Dispora
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100%	3.998.786.000	100%	1.200.000.000	100%	1.260.000.000	100%	1.323.000.000	100%	2.389.150.000	100%	10.170.936.000	Dispora
KEBUDAYAAN					**690.777.250**		**815.316.113**		**844.259.246**		**874.649.537**		**906.559.342**		**4.131.561.487**	
Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Meningkatnya partisipasi dan produktivitas pelaku seni dan budaya	%	20	50%	109.436.500	51%	114.908.325	53%	120.653.741	55%	126.686.428	58%	133.020.750	58%	604.705.744	Disdikbud
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Terpeliharanya gedung, situs dan cagar budaya	%	70	75,57%	156.147.000	83,73%	163.954.350	83,73%	172.152.068	88,14%	180.759.671	92,78%	189.797.654	92,78%	862.810.743	Disdikbud
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persetase Terlaksananya fasilitasi kepada sanggar seni dan budaya	%	90	93%	425.193.750	95,24%	236.453.438	95%	236.453.438	95%	236.453.438	95%	236.453.438	95%	1.371.007.500	Disdikbud
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya pembebasan situs budaya	%	100	0	0	100%	300.000.000	100%	315.000.000	100%	330.750.000	100%	347.287.500	100%	1.293.037.500	Disdikbud
PERPUSTAKAAN					**881.281.539**		**615.285.791**		**646.050.080**		**649.520.197**		**1.681.996.207**		**4.474.133.815**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	322.080.289	100%	338.184.303	100%	355.093.519	100%	372.848.195	100%	391.490.604	100%	1.779.696.910	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	102.811.750	100%	107.952.338	100%	113.349.954	100%	119.017.452	100%	124.968.325	100%	568.099.819	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	13.750.000	100%	14.437.500	100%	15.159.375	100%	15.917.344	100%	16.713.211	100%	75.977.430	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis	%	100	100%	0	100%	30.000.000	100%	31.500.000	100%	33.075.000	100%	34.728.750	100%	129.303.750	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jumlah perpustakaan yang dibina	%	80	100%	348.773.000	100%	124.711.650	100%	130.947.233	100%	108.662.207	100%	1.114.095.317	100%	1.827.189.407	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
	Persentase Jumlah Pemustaka/Jumlah Penduduk Banda Aceh	%	53	5,50%	93.866.500	6,10%	0	6,70%	0	7,40%	0	81,00%	0	8,10%	93.866.500	Disdikbud
KEARSIPAN					**12.877.500**		**13.907.700**		**15.020.316**		**16.221.941**		**17.519.697**		**75.547.154**	**Dinas Perpustakaan & Kearsipan**
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase meningkatnya jumlah Dokumen/Arsip Daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	%	0	100%	12.877.500	100%	13.907.700	100%	15.020.316	100%	16.221.941	100%	17.519.697	100%	75.547.154	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
LAYANAN URUSAN PILIHAN																
PARIWISATA					**7.199.321.372**		**14.568.210.641**		**14.315.545.465**		**14.629.147.198**		**15.074.647.198**		**65.786.871.874**	**DISPAR**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	1.226.739.387	100%	1.347.115.891	100%	1.872.724.465	100%	1.875.826.198	100%	1.875.826.198	100%	8.198.232.139	DISPAR
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	359.746.750	100%	1.134.694.750	100%	510.921.000	100%	575.921.000	100%	675.921.000	100%	3.257.204.500	DISPAR
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	20.900.000	100%	26.400.000	100%	31.900.000	100%	37.400.000	100%	42.900.000	100%	159.500.000	DISPAR

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Priorits Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017-2022)		
		Satuan	Volume	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas promosi wisata kota banda aceh	%	100	100%	4.144.005.000	100%	4.765.000.000	100%	4.905.000.000	100%	5.445.000.000	100%	5.585.000.000	100%	24.844.005.000	DISPAR
		Kegiatan /Event	13 keg, 13 event	13 keg, 13 event		17 Keg, 14 event		19 keg, 15 event		19 keg, 16 event		21 keg, 17 event		89 keg, 75 event		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase tingkat kapasitas sumber daya aparatur	%	100	100%	0	100%	80.000.000	100%	20.000.000	100%	80.000.000	100%	20.000.000	100%	200.000.000	DISPAR
		Kegiatan	0	0 Kegiatan		1 Keg		1 Keg		1 Keg		1 Keg		4 Kegiatan		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja	%	0	0	0	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	100.000.000	DISPAR
		Kegiatan	0	0 Kegiatan		1 Keg		1 Keg		1 Keg		1 Keg		4 Kegiatan		
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana kepariwisataan	%	100	100%	669.340.000	100%	6.000.000.000	100%	5.700.000.000	100%	5.200.000.000	100%	5.400.000.000	100%	22.969.340.000	DISPAR
		Kegiatan/Unit	6 keg, 13 unit	6 keg, 13 unit		11 keg, 3 unit		11 keg, 23 unit		11 keg, 3 unit		11 keg, 23 unit		50 keg, 65 unit		
Program Pengembangan Kemitraan	Persentase Terlaksananya kerjasama dengan pelaku usaha jasa pariwisata	%	100	100%	778.590.235	100%	1.190.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.390.000.000	100%	1.450.000.000	100%	6.058.590.235	DISPAR
		Kali	30	30 kali		30 kali, 6 keg		30 kali, 11 keg		35 kali, 12 keg		35 kali, 12 keg		155 kali, 41 keg		
PERTANIAN					**1.645.394.650**		**4.377.541.520**		**4.728.565.087**		**4.597.076.755**		**4.582.996.157**		**19.931.574.169**	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Persentase Terpenuhinya persentase peningkatan ketahanan pangan	%	100	100%	1.005.762.100	100%	1.066.000.000	100%	1.269.000.000	100%	1.648.800.000	100%	1.563.080.000	100%	6.552.642.100	DP2KP
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian	%	100	100%	21.477.000	100%	40.500.000	100%	44.312.900	100%	48.158.000	100%	37.698.000	100%	192.145.900	DP2KP
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan	%	100	100%	532.833.400	100%	3.116.018.800	100%	3.244.727.195	100%	2.712.541.264	100%	2.762.463.157	100%	12.368.583.816	DP2KP
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Persentase peningkatan penyuluh Pertanian/perkebunan yang terampil	%	100	100%	52.797.150	100%	75.022.720	100%	82.524.992	100%	90.777.491	100%	113.275.000	100%	414.397.353	DP2KP
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Persentase terbinanya pelaku usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan	%	0	100%	32.525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	32.525.000	DP2KP
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase meningkatnya Kesejahteraan Petani	%	100	100%	0	100%	80.000.000	100%	88.000.000	100%	96.800.000	100%	106.480.000	100%	371.280.000	DP2KP
KELAUTAN DAN PERIKANAN					**2.635.133.700**		**11.800.000.000**		**13.400.000.000**		**13.700.000.000**		**7.800.000.000**		**49.335.133.700**	**DP2KP**
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Persentase terlaksananya pembinaan pada kelompok masyarakat pesisir	%	35	100%	1.197.577.500	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	3.197.577.500	DP2KP
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase perkembangan usaha perikanan rakyat	%	30	35%	1.437.556.200	35%	3.100.000.000	40%	3.300.000.000	45%	3.600.000.000	50%	3.100.000.000	55%	14.537.556.200	DP2KP
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase terbinannya pelaku usaha perikanan tangkap	%	0	0	0	100%	4.000.000.000	100%	4.700.000.000	100%	4.700.000.000	100%	2.000.000.000	100%	15.400.000.000	DP2KP
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase terbinannya pelaku usaha perikanan tangkap	%	0	0	0	100%	4.000.000.000	100%	4.700.000.000	100%	4.700.000.000	100%	2.000.000.000	100%	15.400.000.000	DP2KP
program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Prikanan	Persentase terbinannya pelaku usaha pengolahan hasil kelautan dan prikanan	%	25	0	0	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	800.000.000	DP2KP
PERINDUSTRIAN					**6.160.358.940**		**2.846.213.248**		**3.030.045.235**		**3.180.457.759**		**5.246.784.804**		**20.463.859.986**	
Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Persentase Gampong yang Memiliki Minimal satu Produk Industri kecil Menengah	%	100	100%	6.087.881.740	100%	2.708.213.248	100%	2.871.345.235	100%	3.005.887.759	100%	5.070.469.104	100%	19.743.797.086	DISNAKER
Program Penataan Struktur Industri	Persentase Jumlah Penataan	%	100	100%	72.477.200	100%	138.000.000	100%	158.700.000	100%	174.570.000	100%	176.315.700	100%	720.062.900	DISNAKER

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Priorits Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017-2022)		
		Satuan	Volume	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PENUNJANG URUSAN																
PERENCANAAN PEMBANGUNAN					**4.863.733.788**		**5.165.222.746**		**5.439.733.880**		**7.686.720.574**		**8.516.804.604**		**31.672.215.592**	**BAPPEDA**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	1.085.606.358	100%	1.085.524.426	100%	1.216.045.043	100%	1.634.747.295	100%	1.706.884.660	100%	6.728.807.782	BAPPEDA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	1.002.529.800	100%	1.052.656.290	100%	1.105.289.105	100%	1.310.553.560	100%	1.368.581.238	100%	5.839.609.992	BAPPEDA
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	31.350.000	100%	56.017.500	100%	78.818.375	100%	61.759.294	100%	64.847.258	100%	292.792.427	BAPPEDA
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis	%	100	100%	35.000.000	100%	36.750.000	100%	38.587.500	100%	40.516.875	100%	42.542.719	100%	193.397.094	BAPPEDA
Pengembangan Data/Informasi	Persentase meningkatnya pengembangan data/informasi	%	100	100%	884.126.680	100%	948.333.015	100%	994.749.665	100%	1.293.487.148	100%	1.344.661.506	100%	5.465.358.013	BAPPEDA
Program Kerjasama Pembangunan	Persentase meningkatnya kerjasama pembangunan	%	100	100%	281.484.100	100%	295.558.305	100%	310.336.220	100%	425.853.031	100%	442.145.683	100%	1.755.377.339	BAPPEDA
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase meningkatnya perencanaan pembangunan wilayah strategis	%	100	100%	223.465.010	100%	234.638.261	100%	246.370.174	100%	308.688.682	100%	321.623.116	100%	1.334.785.243	BAPPEDA
Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar	Persentase Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar	%	100	100%	173.934.970	100%	182.631.720	100%	191.763.305	100%	251.351.470	100%	261.419.043	100%	1.061.100.508	BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100%	768.154.780	100%	889.652.420	100%	864.890.645	100%	1.807.235.177	100%	2.351.696.936	100%	6.681.629.957	BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keikutsertaan dalam pameran pelayanan publik	%	100	100%	43.650.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	90.000.000	100%	373.650.000	DPMPTSP
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	%	49.145.700	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	49.145.700	Bagian Organisasi
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase meningkatnya perencanaan pembangunan ekonomi	%	100	100%	84.248.390	100%	188.460.810	100%	192.883.850	100%	247.528.042	100%	252.402.445	100%	965.523.537	BAPPEDA
Program perencanaan pembangunan sosial budaya	Persentase meningkatnya perencanaan pembangunan sosial budaya	%	100	100%	201.038.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	220.000.000	100%	270.000.000	100%	931.038.000	BAPPEDA
KEUANGAN					**13.931.792.400**		**12.509.401.565**		**12.563.158.125**		**12.569.345.625**		**12.614.722.625**		**64.188.420.340**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	2.562.468.950	100%	2.570.248.800	100%	2.570.248.800	100%	2.570.248.800	100%	2.570.248.800	100%	12.843.464.150	BPKK
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	70	75	5.273.425.250	80	3.457.661.500	83	3.457.661.500	86	3.407.661.500	90	3.407.661.500	90	19.004.071.250	BPKK
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	85	74	74.250.000	90	104.400.000	93	104.400.000	96	104.400.000	98	104.400.000	98	491.850.000	BPKK
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis	%	100	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	50.000.000	BPKK
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyampaian laporan Kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai SAP yang berbasis akrual	%	0	100%	259.744.500	100%	197.850.500	100%	197.850.500	100%	205.326.000	100%	210.295.000	100%	1.071.066.500	BPKK
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terlaksananya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparansi	%	100	100%	5.751.903.700	100%	6.169.240.765	100%	6.222.997.325	100%	6.271.709.325	100%	6.312.117.325	100%	30.727.968.440	BPKK
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					**10.799.826.969**		**11.742.132.517**		**11.492.841.593**		**11.811.233.623**		**12.134.045.254**		**57.980.079.957**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	1.419.273.000	100%	1.490.236.650	100%	1.564.748.483	100%	1.642.985.907	100%	1.725.135.202	100%	7.842.379.241	BKPSDM
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	273.277.969	100%	286.941.867	100%	301.288.961	100%	316.353.409	100%	332.171.079	100%	1.510.033.285	BKPSDM

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Priorits Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017-2022)		
		Satuan	Volume	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	37.950.000	100%	39.847.500	100%	41.839.875	100%	43.931.869	100%	46.128.462	100%	209.697.706	BKPSDM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis	%	20	20%	50.000.000	20%	52.500.000	20%	55.125.000	20%	57.881.250	20%	60.775.313	100%	276.281.563	BKPSDM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis	%	20	20%	640.381.000	20%	672.400.050	20%	706.020.053	20%	741.321.055	20%	778.387.108	100%	3.538.509.266	BKPSDM
	Persentase meningkatnya kapasitas SDM aparatur	%	100	100%	976.000.000	100%	1.024.800.000	100%	1.076.040.000	100%	1.129.842.000	100%	1.186.334.100	100%	5.393.016.100	Sekretariat DPRK
	Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur	%	100	100%	48.000.000	100%	50.400.000	100%	52.920.000	100%	55.566.000	100%	58.344.300	100%	265.230.300	Bagian Umum
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas kinerja aparatur	%	20	20%	1.258.419.000	20%	1.821.339.950	20%	1.912.406.948	20%	2.008.027.295	20%	2.108.428.660	100%	9.108.621.852	BKPSDM
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	%	100	100%	6.096.526.000	100%	6.303.666.500	100%	5.782.452.275	100%	5.815.324.839	100%	5.838.341.031	100%	29.836.310.645	Sekretariat DPRK
PENGAWASAN					**2.177.106.996**		**2.474.647.346**		**2.598.379.714**		**2.709.076.611**		**2.844.530.441**		**12.803.741.108**	**Inspektorat**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	501.942.396	100%	527.039.516	100%	553.391.492	100%	581.061.066	100%	610.114.119	100%	2.773.548.589	Inspektorat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	216.982.000	100%	227.831.100	100%	239.222.655	100%	251.183.788	100%	263.742.977	100%	1.198.962.520	Inspektorat
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	23.650.000	100%	46.832.500	100%	49.174.125	100%	51.632.831	100%	54.214.473	100%	225.503.929	Inspektorat
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase terciptanya tertib administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan pada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh	%	100	100%	1.370.948.600	100%	1.466.996.030	100%	1.540.345.832	100%	1.617.363.123	100%	1.698.231.279	100%	7.693.884.864	Inspektorat
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase tersedianya APIP yang berkualitas dan mempunyai integritas tinggi	%	100	100%	33.584.000	100%	52.698.200	100%	55.333.110	100%	38.877.678	100%	40.821.562	100%	221.314.550	Inspektorat
Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Persentase terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh	%	0	8%	30.000.000	8%	153.250.000	8%	160.912.500	8%	168.958.125	8%	177.406.031	40%	690.526.656	Inspektorat
SEKRETARIAT DEWAN					**14.897.618.750**		**13.731.953.437**		**14.483.819.860**		**14.876.642.102**		**16.703.105.458**		**74.693.139.607**	**Sekretariat DPRK**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	10.916.582.826	100%	11.454.421.967	100%	12.019.153.066,00	100%	12.612.120.719,00	100%	14.234.736.755,00	100%	61.237.015.333	Sekretariat DPRK
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	3.420.210.924	100%	1.892.706.470	100%	2.078.091.794	100%	1.997.246.383	100%	2.080.358.703	100%	11.468.614.274	Sekretariat DPRK
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	560.825.000	100%	384.825.000	100%	386.575.000	100%	267.275.000	100%	388.010.000	100%	1.987.510.000	Sekretariat DPRK
SEKRETARIAT DAERAH					**34.423.341.079**		**33.541.419.523**		**37.508.412.253**		**39.399.881.867**		**41.560.115.448**		**186.433.170.171**	**SEKDA**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	16.160.176.690	100%	15.278.757.313	100%	18.126.372.521	100%	19.032.691.147	100%	19.994.168.295	100%	88.592.165.966	Bagian Umum, Bagian Humas
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	3.051.518.000	100%	3.416.243.900	100%	3.587.056.095	100%	3.766.408.900	100%	3.954.729.345	100%	17.775.956.240	Bagian Umum
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	431.500.000	100%	453.075.000	100%	475.728.750	100%	499.515.188	100%	524.490.947	100%	2.384.309.884	Bagian Umum
Program Pemberdayaan Sarana Ibadah	Persentase pelayanan operasional Sarana Ibadah	%	100	0	504.600.000	100%	112.950.000	100%	118.597.500	100%	124.527.375	100%	130.753.744	100%	991.428.619	Bagian Isra
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Daerah	Persentase pelayanan pendidikan daerah	%	100	0	500.000.000									100%	500.000.000	Bagian Isra
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/WKDH	Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	%	100	100%	1.773.100.000	100%	1.861.755.000	100%	1.954.842.750	100%	2.052.584.888	100%	2.155.214.132	100%	9.797.496.769	Bagian Umum

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Priorits Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017-2022)		
		Satuan	Volume	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Profesionalisme sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kualitas dan profesionalisme para aparatur	%	100	100%	94.459.100	100%	113.817.500	100%	119.508.375	100%	125.483.794	100%	131.757.983	100%	585.026.752	Bagian ULP
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	100%	34.133.000	100%	330.200.000	100%	361.300.000	100%	395.414.000	100%	432.838.600	100%	1.553.885.600	Bagian Adm Pembangunan, Bagian ULP
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur																
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Presentase peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan	%	0	100%	672.205.500	100%	705.815.775	100%	741.106.564	100%	778.161.892	100%	817.069.987	100%	3.714.359.717	Bagian Hukum
	Presentase laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah	%	0	0	282.206.910	100%	266.390.810	100%	279.710.351	100%	293.695.868	100%	308.380.661	100%	1.430.384.600	Bagian Tata Pemerintahan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase tersedianya Sistem Informasi	%	100	100%	1.176.071.600	100%	828.071.600	100%	869.475.180	100%	912.948.939	100%	958.596.386	100%	4.745.163.705	Bagian Adm. Pembangunan
Program Kerjasama Informasi Media Massa	Persentase Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah yang	%	100	100%	3.883.273.829	100%	4.077.437.520	100%	4.281.309.396	100%	4.495.374.866	100%	4.720.143.610	100%	21.457.539.222	bagian Humas
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi	%	100	100%	622.871.150	100%	669.364.708	100%	702.832.943	100%	737.974.591	100%	774.873.320	100%	3.507.916.712	Bagian Hukum, Bagian ULP, Bagian Adm. Pembangunan
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketersediaan peraturan perundang-undangan	%	0	100%	468.089.470	100%	262.528.613	100%	275.655.044	100%	289.437.796	100%	303.909.686	100%	1.599.620.608	Bagian Hukum
Program pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa	%	100	100%	22.448.180	100%	23.570.589	100%	24.749.118	100%	25.986.574	100%	27.285.903	100%	124.040.365	Bagian Tata Pemerintahan
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan pemerintahan dalam penataan pemerintahan	%	100	100%	884.414.180	100%	1.085.336.949	100%	984.258.207	100%	1.033.471.118	100%	1.247.887.672	100%	5.235.368.126	Bagian Tata Pemerintahan
	Persentase Pelayanan Pemerintah Daerah	%	100	100%	101.432.000	100%	106.503.600	100%	111.828.780	100%	117.420.219	100%	123.291.230	100%	560.475.829	bagian humas
	Persentase Pelayanan Pemerintah dalam pelayanan barang dan jasa	%	100	100%	760.811.800	100%	798.852.390	100%	838.795.010	100%	880.734.760	100%	924.771.498	100%	4.203.965.457	bagian ULP
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tersedianya laporan capaian kinerja pemerintah kota banda aceh	%	0	100%	93.471.640	100%	98.145.222	100%	103.052.483	100%	108.205.107	100%	113.615.363	100%	516.489.815	Bagian Organisasi
Program Pendidikan Kedinasan	Persentase tersedianya pelatihan dan dokumen kepegawaian	%	0	100%	26.362.650	100%	27.680.783	100%	29.064.822	100%	30.518.063	100%	32.043.966	100%	145.670.283	Bagian Organisasi
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Terbinannya SDM aparatur	%	100	100%	178.373.480	100%	187.292.154	100%	543.656.762	100%	570.839.600	100%	599.381.580	100%	2.079.543.576	Bagian Organisasi
Program Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas Pemerintah Kota	%	100	100%	216.011.000	100%	529.015.310	100%	555.466.076	100%	583.239.379	100%	612.401.348	100%	2.496.133.113	Bagian Organisasi
Program Menyemarakkan Syiar Islam	Persentase kegiatan penyemarakan Syiar Islam yang terlaksana	%	100	100%	1.230.449.700	100%	1.291.972.185	100%	1.356.570.794	100%	1.424.399.334	100%	1.495.619.301	100%	6.799.011.314	Bagian Isra
Program Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam	Persentase pembinaan dan pengembangan Syariat Islam	%	100	100%	398.286.000		-		0		0		0	100%	398.286.000	Bagian Isra
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi	%	100	100%	0	100%	121.436.250	100%	127.508.063	100%	133.883.466	100%	140.577.639	100%	523.405.417	Bagian adm Perekonomian
Program Kerjasama Pembangunan	Persentase peningkatan kerjasama pembangunan	%	100	100%	56.907.250	100%	59.752.613	100%	62.740.243	100%	65.877.255	100%	69.171.118	100%	314.448.479	Bagian adm Perekonomian
Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan informasi pembangunan	%	100	100%	0	100%	63.564.250	100%	66.742.463	100%	70.079.586	100%	73.583.565	100%	273.969.864	Bagian adm Perekonomian
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase peningkatan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	%	0	0	0	100%	52.000.000	100%	54.600.000	100%	57.330.000	100%	60.196.500	100%	224.126.500	Bagian adm Perekonomian
Program pengembangan Pembangunan Perekonomian Daerah	Persentase meningkatkan pembangunan dan perekonomian	%	100	100%	800.167.950	100%	719.889.490	100%	755.883.965	100%	793.678.163	100%	833.362.071	100%	3.902.981.638	Bagian adm Perekonomian, Adm Pembangunan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Priorits Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017-2022)		
		Satuan	Volume	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					**1.804.215.357**		**2.441.737.333**		**1.928.182.930**		**1.997.659.888**		**2.602.202.729**		**10.773.998.238**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	444.783.107	100%	461.188.200	100%	482.935.110	100%	507.081.866	100%	532.435.959	100%	2.428.424.243	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	43.296.500	100%	75.461.325	100%	79.234.391	100%	83.196.111	100%	87.355.916	100%	368.544.243	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	17.600.000	100%	18.480.000	100%	19.404.000	100%	20.374.200	100%	21.392.910	100%	97.251.110	Badan Kesbangpol
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase terlaksana nya pembinaan Masyarakat dalam berwawasan Kebangsaan di Kota Banda Aceh	%	0	100%	278.391.000	100%	371.742.730	100%	382.895.012	100%	394.381.862	100%	406.213.318	100%	1.833.623.922	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Pemberan tasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase terlaksananya Penyuluhanpencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	%	100	100%	856.041.500	100%	506.041.500	100%	521.222.745	100%	536.859.427	100%	552.965.210	100%	2.973.130.383	Badan Kesbangpol
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase jumlah masyarakat yang mendapat pendidikan politik	%	100	100%	88.935.500	100%	91.603.565	100%	94.351.672	100%	97.182.222	100%	100.097.689	100%	472.170.648	Badan Kesbangpol
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	%	100	100%	75.167.750	100%	179.220.013	100%		100%	0	100%	0	100%	254.387.763	Badan Kesbangpol
Program Pengembangan budaya dan etika politik	Persentase tersedianya dokumen hasil pemantauan perkembangan politik di daerah	%	100	0	0	100%	30.000.000	100%	30.900.000	100%	31.827.000	100%	32.781.810	100%	125.508.810	Badan Kesbangpol
Program Pembinaan Partai Politik dan Pemilu	Persentase terlaksananya sosialisasi undang-undang politik dan Verifikasi permohonan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik	%	100	100%	0	100%	95.000.000	100%	97.850.000	100%	100.785.500	100%	103.809.065	100%	397.444.565	Badan Kesbangpol
Program monitoring investasi di daerah dalam rangka ketahanan ekonomi	Persentase tersedianya data identifikasi investasi yang berkembang di daerah dalam rangka ketahanan ekonomi	%	100	0	0	100%	30.000.000	100%	30.900.000	100%	31.827.000	100%	32.781.810	100%	125.508.810	Badan Kesbangpol
Program Koordinasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Stabilitas dan Ketersediaan bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat di daerah dalam rangka ketahanan ekonomi	Persentase tersedianya data bahan kebutuhan pokok masyarakat di daerah	%	6	0	0	100%	30.000.000	100%	30.900.000	100%	31.827.000	100%	32.781.810	100%	125.508.810	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Peran serta apresiasi masyarakat terhadap perkembangan kesenian daerah dalam rangka ketahanan budaya	Persentase terlaksananya kegiatan lomba lagu kebangsaan dan lagu daerah dan gelar budaya nusantara dan temu tokoh adat	%	100	0	0	100%	20.000.000	100%	20.600.000	100%	21.218.000	100%	21.854.540	100%	83.672.540	Badan Kesbangpol
Program fasilitasi Penguatan TIM Koordinasi PAKEM dalam rangka Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi Penanganan Permasalahan Aliran-Aliran Keagamaan di Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan permasalahan aliran-aliran keagamaan di daerah	%	100	0	0	100%	33.000.000	100%	33.990.000	100%	35.009.700	100%	36.059.991	100%	138.059.691	Badan Kesbangpol
Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase tersedianya data organisasi kemasyarakatan	%	100	0	0	100%	50.000.000	100%	51.500.000	100%	53.045.000	100%	54.636.350	100%	209.181.350	Badan Kesbangpol
Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	Persentase terlaksananya pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	%	100	0	0	100%	50.000.000	100%	51.500.000	100%	53.045.000	100%	54.636.350	100%	209.181.350	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pemantauan pelaksanaan pemilu dan pemilukada	%	100	0	0	100%	400.000.000	0	0	0	0	100%	532.400.000	100%	932.400.000	Badan Kesbangpol

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Priorits Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017-2022)		
		Satuan	Volume	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
KECAMATAN					**7.097.470.795**		**7.351.792.209**		**7.643.331.172**		**11.784.615.415**		**8.422.196.989**		**42.299.406.580**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	323.666.200	100%	292.152.235	100%	297.995.280	100%	303.955.186	100%	310.034.289	100%	1.527.803.190	KEC.KUTA ALAM
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	48.682.400	100%	300.754.140	100%	306.769.223	100%	312.904.607	100%	319.162.699	100%	1.288.273.069	KEC.KUTA ALAM
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	18.700.000	100%	23.868.000	100%	24.345.360	100%	24.832.267	100%	25.328.913	100%	117.074.540	KEC.KUTA ALAM
Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Persentase lancarnya kegiatan pemerintahan di kecamatan	%	100	100%	335.662.500	100%	545.130.534	100%	556.033.145	100%	567.153.808	100%	592.156.884	100%	2.596.136.870	KEC.KUTA ALAM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	278.335.325	100%	291.307.091	100%	305.872.446	100%	321.166.068	100%	337.224.372	100%	1.533.905.302	KEC.BAITURRAHMAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	58.270.400	100%	76.067.670	100%	79.871.054	100%	83.864.606	100%	88.057.836	100%	386.131.567	KEC.BAITURRAHMAN
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	14.850.000	100%	19.477.500	100%	20.451.375	100%	21.473.944	100%	22.547.641	100%	98.800.460	KEC.BAITURRAHMAN
Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Persentase meningkatnya Pelayanan Pemerintahan kecamatan	%	141	20%	358.165.750	40%	327.221.391	60%	343.582.461	80%	360.761.584	100%	378.799.663	100%	1.768.530.849	KEC.BAITURRAHMAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	243.721.393	100%	255.907.463	100%	268.702.836	100%	282.137.978	100%	296.244.876	100%	1.346.714.545	KEC. MEURAXA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	58.021.400	100%	91.241.220	100%	95.803.281	100%	100.593.445	100%	105.623.117	100%	451.282.463	KEC. MEURAXA
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	12.650.000	100%	20.173.125	100%	21.181.781	100%	22.240.870	100%	23.352.914	100%	99.598.690	KEC. MEURAXA
Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Persentase lancarnya pelayanan pemerintahan kecamatan	%	100	100%	342.402.133	100%	365.671.048	100%	383.954.600	100%	642.402.133	100%	423.309.947	100%	2.157.739.862	KEC. MEURAXA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	316.742.000	100%	332.579.100	100%	349.208.055	100%	366.668.458	100%	385.001.881	100%	1.750.199.493	KEC. SYIAH KUALA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	68.519.900	100%	191.945.895	100%	201.543.190	100%	211.620.349	100%	222.201.367	100%	895.830.701	KEC. SYIAH KUALA
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	14.850.000	100%	33.592.500	100%	35.272.125	100%	37.035.731	100%	38.887.518	100%	159.637.874	KEC. SYIAH KUALA
Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintahan kecamatan	%	100	20%	375.385.000	20%	492.069.250	20%	516.672.713	20%	542.506.348	20%	569.631.666	100%	2.496.264.976	KEC. SYIAH KUALA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	218.567.774	100%	237.667.500	100%	236.510.256	100%	262.028.419	100%	275.129.840	100%	1.229.903.789	KEC.BANDA RAYA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	18.005.000	100%	213.459.150	100%	227.888.500	100%	217.229.225	100%	228.090.686	100%	904.672.561	KEC.BANDA RAYA
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	14.300.000	100%	18.900.000	100%	19.845.000	100%	20.837.250	100%	21.879.113	100%	95.761.363	KEC.BANDA RAYA
Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Persentase jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan gampong	%	100	100%	1.346.343.100	100%	342.109.505	100%	330.214.982	100%	894.975.730	100%	379.892.006	100%	3.293.535.323	KEC.BANDA RAYA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	190.088.000	100%	209.096.800	100%	230.006.480	100%	253.007.128	100%	278.307.841	100%	1.160.506.249	KEC. KUTA RAJA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	53.363.000	100%	91.094.300	100%	100.203.730	100%	3.110.224.103	100%	121.246.513	100%	3.476.131.646	KEC. KUTA RAJA
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	12.650.000	100%	33.915.000	100%	21.246.500	100%	23.371.150	100%	25.054.865	100%	116.237.515	KEC. KUTA RAJA
Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Persentase lancarnya pelayanan Pemeritahan Kecamatan	%	60	60%	347.604.500	20%	396.515.350	20%	436.166.885	20%	479.783.574	20%	527.761.931	100%	2.187.832.239	KEC. KUTA RAJA

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Priorits Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017-2022)		
		Satuan	Volume	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	226.152.350	100%	236.514.968	100%	248.340.716	100%	260.757.752	100%	273.795.639	100%	1.245.561.424	KEC. JAYA BARU
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	51.141.310	100%	158.698.376	100%	166.633.294	100%	174.964.959	100%	183.713.207	100%	735.151.146	KEC. JAYA BARU
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	13.750.000	100%	16.380.000	100%	17.199.000	100%	18.058.950	100%	18.961.898	100%	84.349.848	KEC. JAYA BARU
Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Persentase lancarnya pelayanan pemerintahan kecamatan	%	100	100%	350.771.000	100%	282.209.340	100%	296.319.807	100%	311.135.797	100%	326.692.587	100%	1.567.128.532	KEC. JAYA BARU
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	250.329.410	100%	277.783.253	100%	283.338.918	100%	289.005.696	100%	294.785.810	100%	1.395.243.088	KEC. LUENG BATA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	54.384.000	100%	128.164.913	100%	130.728.211	100%	133.342.775	100%	136.009.630	100%	582.629.529	KEC. LUENG BATA
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	12.100.000	100%	21.993.750	100%	22.433.625	100%	22.882.298	100%	23.339.943	100%	102.749.616	KEC. LUENG BATA
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Persentase lancarnya pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	100%	339.081.450	100%	351.403.069	100%	358.431.130	100%	365.599.753	100%	386.571.748	100%	1.801.087.149	KEC. LUENG BATA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	332.909.000	100%	348.609.450	100%	366.039.923	100%	384.341.919	100%	403.559.015	100%	1.835.459.306	KEC. ULEE KARENG
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	31.386.000	100%	32.955.300	100%	34.603.065	100%	36.333.218	100%	38.149.879	100%	173.427.462	KEC. ULEE KARENG
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	16.500.000	100%	17.325.000	100%	18.191.250	100%	19.100.813	100%	20.055.853	100%	91.172.916	KEC. ULEE KARENG
Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Persentase lancarnya pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	100%	349.420.500	100%	277.839.025	100%	291.730.976	100%	306.317.525	100%	321.633.401	100%	1.546.941.428	KEC. ULEE KARENG
KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN ACEH																
PENDIDIKAN					**4.367.105.250**		**1.834.273.385**		**1.925.987.054**		**2.022.286.407**		**2.123.400.727**		**12.273.052.824**	**Dinas Pendidikan Dayah**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	280.281.450	100%	294.295.523	100%	309.010.299	100%	324.460.814	100%	340.683.854	100%	1.548.731.939	Dinas Pendidikan Dayah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	209.888.000	100%	220.382.400	100%	231.401.520	100%	242.971.596	100%	255.120.176	100%	1.159.763.692	Dinas Pendidikan Dayah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	10.450.000	100%	10.972.500	100%	11.521.125	100%	12.097.181	100%	12.702.040	100%	57.742.847	Dinas Pendidikan Dayah
Program Pengelolaan dan Pembinaan Manajemen Dayah/Pesantren	Persentase meningkatnya tata kelola dayah dan kemandirian dayah	%	0	100%	352.526.750	100%	370.153.088	100%	388.660.742	100%	408.093.779	100%	428.498.468	100%	1.947.932.826	Dinas Pendidikan Dayah
Program Pemberdayaan Santri/Guru Dayah/Pesantren	Persentase meningkatnya kualitas kelulusan santri dan kompetensi guru	%	0	100%	676.042.500	100%	250.000.000	100%	262.500.000	100%	275.625.000	100%	289.406.250	100%	1.753.573.750	Dinas Pendidikan Dayah
Program Event Nasional Dayah / Pesantren	Persentase Meningkatnya jumlah santri yang mengikuti event nasional dayah/pesantren	%	0	0	0	100%	250.000.000	100%	262.500.000	100%	275.625.000	100%	289.406.250	100%	1.077.531.250	Dinas Pendidikan Dayah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah / Pesantren / Balai Pengajian	Persentase tersedianya sarana prasarana yang sesuai standar	%	100	100%	2.497.725.000	100%	60.000.000	100%	63.000.000	100%	66.150.000	100%	69.457.500	100%	2.756.332.500	Dinas Pendidikan Dayah
Program Penelitian dan pengembangan Syariat Islam	Persentase Jumlah Objek penelitian dan pengembangan syariat islam	%	500	0	0	100%	42.000.000	100%	44.100.000	100%	46.305.000	100%	48.620.250	100%	181.025.250	BAITUL MAL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	294.809.500	100%	309.549.975	100%	325.027.474	100%	341.278.847	100%	358.342.790	100%	1.629.008.586	Sekretariat MPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	20.138.000	100%	21.144.900	100%	22.202.145	100%	23.312.252	100%	24.477.865	100%	111.275.162	Sekretariat MPD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	5.500.000	100%	5.775.000	100%	6.063.750	100%	6.366.938	100%	6.685.284	100%	30.390.972	Sekretariat MPD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Priorits Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017-2022)		
		Satuan	Volume	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Aceh	Persentase terlaksananya Musda untuk pemilihan pengurus MPD periode 2017-2022	%	0	100%	19.744.050	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	19.744.050	Sekretariat MPD
KEBUDAYAAN					**21.134.844.350**		**20.671.445.829**		**22.861.082.216**		**23.209.379.085**		**25.575.135.075**		**113.451.886.555**	**Sekretariat MAA**
Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	522.891.550	100%	549.036.128	100%	576.487.934	100%	605.312.331	100%	635.577.947	100%	2.889.305.889	Sekretariat MAA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	69.747.500	100%	73.234.875	100%	76.896.619	100%	80.741.450	100%	84.778.522	100%	385.398.966	Sekretariat MAA
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	6.600.000	100%	6.930.000	100%	7.276.500	100%	7.640.325	100%	8.022.341	100%	36.469.166	Sekretariat MAA
Program penyemarakan syiar islam	Persentase Terbangun tata kehidupan masyarakat yang islami berdasarkan pengamalan Syari'at Islam	%	100	100%	413.826.000	100%	119.517.300	100%	125.493.165	100%	131.767.823	100%	138.356.214	100%	928.960.503	Sekretariat MAA
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Aceh	Persentase Meningkatnya peranan Gampong dalam penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat serta penegakan Syari'at Islam	%	100	100%	240.559.800	100%	75.000.000	100%	78.750.000	100%	82.687.500	100%	86.821.875	100%	563.819.175	Sekretariat MAA
Program Penyemarakan Syiar Islam	Persentase Terlaksananya penyemarakan syiar islam	%	0	20%	751.120.000	20 %	826.232.000	20 %	2.859.332.696	20 %	3.047.742.091	20 %	5.250.116.231	100 %	12.734.543.018	DSI
Program Penyemarakan Syiar Islam	Persentase Tercapainya penyemarakan syariat islam	%	10,98	19,95%	19.099.435.000	19,83%	18.989.297.801	19,95%	19.103.037.691	20,07%	19.217.989.574	20,19%	19.334.189.053	100%	95.743.949.119	BAITUL MAL
Program Pelestarian Adat-istiadat sesuai dengan Syariat	Persentase Tercapainya Pelestarian Adat Istiadat yang ada dalam masyarakat sesuai dengan Syari'at Islam	%	100	100%	30.664.500	100%	32.197.725	100%	33.807.611	100%	35.497.992	100%	37.272.891	100%	169.440.719	Sekretariat MAA
KEAGAMAAN					**19.093.208.896**		**9.511.508.011**		**8.024.780.469**		**8.424.726.993**		**8.946.789.592**		**54.001.013.961**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	401.252.475	100%	421.315.099	100%	442.380.854	100%	464.499.896	100%	487.724.891	100%	2.217.173.215	DSI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	124.426.500	100%	130.647.825	100%	137.180.216	100%	144.039.227	100%	151.241.188	100%	687.534.957	DSI
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	15.400.000	100%	16.170.000	100%	16.978.500	100%	17.827.425	100%	18.718.796	100%	85.094.721	DSI
Program Pembinaan Dan Pengembangan Syariat Islam	Persentase terlaksananya Pembinaan Syariat Islam secara Maksimal	%	50	20 %	3.085.630.550	20 %	2.623.500.000	20 %	2.864.925.000	20 %	3.008.171.250	20,00%	3.158.579.813	100 %	14.740.806.613	DSI
Program Pembinaan Dan Pengembangan Syariat Islam	Persentase tingkat penanganan terhadap pelanggaran qanun syariat islam	%	70	60%	19.315.000	68%	50.280.750	80%	52.794.788	90%	55.434.527	100%	58.206.253	100%	236.031.318	SATPOL PP
Program Penelitian Dan Pengembangan Syariat Islam	Persentase tersebarnya informasi Syariat Islam Kepada Masyarakat	%	100	20 %	458.085.250	20 %	480.989.513	20 %	505.038.988	20 %	530.290.938	20 %	556.805.484	100 %	2.531.210.173	DSI
Program Usaha Dakwah Generasi Muda dan Kader Dakwah	Persentase terlaksananya Usaha Dakwah Generasi Muda dan Kader Dakwah	%	0	0	0	100%	26.250.000	100%	27.562.500	100%	28.940.625	100%	30.387.656	100%	113.140.781	BAITUL MAL
Program Usaha Dakwah Generasi Muda dan Kader Dakwah	Persentase meningkatnya Kapasitas Generasi Muda	%	100	20 %	3.157.852.500	20 %	348.345.125	20 %	365.762.381	20 %	384.050.500	20 %	403.253.025	100 %	4.659.263.532	DSI
Program Pemberdayaan Sarana Ibadah	Persentase terbinanya Administrasi dan Managemen Sarana Ibadah	%	1	20 %	3.885.236.600	20 %	326.850.000	20 %	343.192.500	20 %	360.352.125	20 %	378.369.731	100 %	5.294.000.956	DSI
Program Pembinaan Aqidah Umat	Persentase terbinanya Aqidah Umat	%	20	20 %	58.706.800	20 %	61.642.140	20 %	64.724.247	20 %	67.960.459	20 %	71.358.482	100 %	324.392.129	DSI
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan keagamaan	%	100	20 %	1.383.426.300	20 %	1.962.597.615	20 %						100 %	3.346.023.915	DSI
Program Penyuluhan Agama Islam Dan Sosialisasi Qanun	Persentase terlaksananya Penyuluhan Hukum Islam	%	1	20 %	2.402.046.900	20 %	150.000.000	20 %	157.500.000	20 %	165.375.000	20 %	173.643.750	100 %	3.048.565.650	DSI
Program Keserasian Kebijakan Pelaksanaan Syariat Islam	Persentase Terlaksananya Keserasian Kebijakan Pelaksanaan Syariat Islam	%	15	0	0	25 %	50.000.000	25 %	52.500.000	25 %	55.125.000	25 %	57.881.250	100 %	215.506.250	DSI

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Priorits Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017-2022)		
		Satuan	Volume	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pembinaan Fardhu Kifayah	Persentase terpenuhinya Pemahaman Tentang Fardhu Kifayah	%	100	20 %	1.686.972.700	20 %	170.000.000	20 %	178.500.000	20 %	187.425.000	20 %	196.796.250	100 %	2.419.693.950	DSI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	1.077.714.250	100%	1.169.356.264	100%	1.217.291.131	100%	1.278.155.688	100%	1.342.063.472	100%	6.084.580.805	BAITUL MAL
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	73.089.600	100%	77.675.409	100%	81.559.179	100%	85.637.138	100%	89.918.995	100%	407.880.321	BAITUL MAL
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	25.850.000	100%	25.850.000	100%	25.850.000	100%	25.850.000	100%	25.850.000	100%	129.250.000	BAITUL MAL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100%	821.642.416	100%	862.724.537	100%	905.860.764	100%	951.153.802	100%	998.711.492	100%	4.540.093.010	Sekretariat MPU
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100%	37.904.000	100%	39.799.200	100%	41.789.160	100%	43.878.618	100%	46.072.549	100%	209.443.527	Sekretariat MPU
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100%	52.150.000	100%	54.757.500	100%	57.495.375	100%	60.370.144	100%	63.388.651	100%	288.161.670	Sekretariat MPU
Program Peningkatan dan Sumber Daya Ulama	Persentase meningkatnya peran serta ulama dan hubungan yang harmonis pada pemerintah	%	100	100%	109.012.600	100%	114.463.230	100%	120.186.392	100%	126.195.711	100%	132.505.497	100%	602.363.429	Sekretariat MPU
Program Pembinaan Dan Pengembangan Syariat Islam	Persentase Baitul Mal Gampong yang dibina	%	20	30	0	50	45.000.000	70	47.250.000	90	49.612.500	100	52.093.125	100	193.955.625	BAITUL MAL
Program Penelitian dan Pengembangan syariat Islam	Persentase terdatanya paham keagamaan yang berkembang dalam masyarakat	%	100	100%	160.127.252	100%	168.133.615	100%	176.540.295	100%	185.367.310	100%	194.635.676	100%	884.804.148	Sekretariat MPU
Program Pengembangan Ukhuwah Islamiyah	Persentase terciptanya muslimah berilmu, beramal dan berakhlak mulia	%	100	100%	57.367.203	100%	85.160.190	100%	89.418.200	100%	93.889.110	100%	98.583.565	100%	424.418.268	Sekretariat MPU
Program Eksitensi Umara dan Ulama	Persentase terlaksananya penguatan kapasitas Ulama	%	0	0	0	100%	50.000.000	100%	52.500.000	100%	55.125.000	100%	160.000.000	100%	317.625.000	Sekretariat MPU
Total					**594.413.920.679**		**664.773.583.988**		**746.504.761.934**		**838.723.096.359**		**942.827.050.748**		**3.787.242.413.708**	

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan kedalam tabel 8-1 dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Banda Aceh yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan yang disajikan pada tabel 8-2, sebagai berikut:

Tabel 8-1
Penetapan Indikator Kinerja Utama

No	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	BIDANG URUSAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	4	5	6	7	8
MISI 1 : Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang Aqidah, Syariah, dan Akhlak						
Tujuan : Terwujudnya nilai-nilai Islami dalam seluruh aspek kehidupan warga Kota Banda Aceh						
	Nilai Survey Pelaksanaan Syariat Islam Banda Aceh	65	70	75	80	85
	Penurunan Angka Pelanggaran terhadap Qanun Syariat Islam	180 Kasus	160 Kasus	120 Kasus	100 Kasus	80 Kasus
MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga						
Tujuan : Mewujudkan pendidikan Kota Banda Aceh yang bermutu berdaya saing , berkarakter Islami dan berprestasi						
	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	70%	72%	75%	77%	80%
	Persentase siswa yang mampu menghafal Al-Quran	5%	6%	7%	8%	10%
	Tingkat Prestasi kota di POPDA	Peringkat 4	-	Peringkat 3	-	Peringkat 2
MISI 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat.						
Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusive dan berkelanjutan						
	Pertumbuhan PDRB	3,41%	3,60%	3,78%	3,96%	4,04%
	Koefisien Gini	0,325	0,321	0,319	0,317	0,315
	Angka kemiskinan	18.621 Jiwa	18.531 Jiwa	18.442 Jiwa	18.352 Jiwa	18.263 Jiwa
	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,35%	6,95%	6,55%	6,08%	5,68%
	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	15%	25%	50%	75%	100%
	Jumlah kunjungan wisatawan	300.000 org	350.000 org	400.000 org	450.000 org	500.000 org
MISI 4 : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat						
Tujuan : Meningkatkan status kesehatan masyarakat						
	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
MISI 5 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik						
Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	75	80	85	90
	Nilai Pemeringkatan pemerintahan berbasis elektronik	2,65 (cc)	2,7 (cc)	2,8 (cc)	2,9 (cc)	3,0 (B)
MISI 6 : Membangun Infrastruktur Kota yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan						
Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana serta Prasarana Kota yang Berwawasan Lingkungan dan Berkesinambungan						
	Indeks Kota Layak Huni	61,40	61,90	62,40	62,90	63,40
	Indeks Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	0,80	0,81	0,83	0,85	0,86
	Jumlah daya Pasokan listrik dari energi terbarukan	14,76 KWp	21,76 KWp	28,76 KWp	35,76 KWp	42,76 KWp
MISI 7 : Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Pengendalian Penduduk						
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,66%	96,02%	96,38%	96,74%	97,10%
	Persentase Indikator Kota Layak Anak yang dipenuhi	53%	56%	59%	62%	65%
	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%

Tabel 8-2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Terhadap Capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Fokus/aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemb	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	OPD
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Fokus Kesejahteraan Masyarakat:							
	Pertumbuhan PDRB*	3,41	3,60	3,78	3,96	4,04	4,04	
	Laju Inflasi*	3,76	4,11	4,19	4,26	4,34	4,34	
	PDRB per kapita*	68.220.360	71.772.420	75.324.480	78.876.540	82.428.600	82.428.600	
	Koefisien Gini*	0,325	0,321	0,319	0,317	0,315	0,315	
	Persentase Penduduk Miskin*	7,31	6,94	6,74	6,54	6,33	6,33	
	Pengeluaran per kapita*	1.995.457	2.086.281	2.176.565	2.266.849	2.357.133	2.357.133	
	IPM*	84,42	84,49	84,96	85,43	85,9	85,9	
1	Angka Melek Huruf	100	100	100	100	100	100	Disdikbud
2	Angka rata-rata lama sekolah	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	Disdikbud
3	Angka usia harapan hidup	72	72,2	72,5	72,7	73	73	Dinkes
4	Persentase balita gizi buruk	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	Dinkes
5	Prevalensi balita gizi kurang	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	Dinkes
6	Cakupan Desa Siaga Aktif	61,1	61,5	61,5	61,8	70,0	70,0	Dinkes
7	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	61,42%	61,80%	62,17%	62,59%	62,96%	62,96%	Disnaker
8	Rasio penduduk yang bekerja	88,45%	88,86%	89,27%	89,68%	90,08%	90,08%	Disnaker
9	Tingkat pengangguran terbuka	7,35%	6,95%	6,55%	6,08%	5,68%	5,68%	Disnaker
10	Peroleh Opini dari BPK terhadap laporan Keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPKK
11	Persentase target PAD Kota	12%	12%	12%	12%	12%	12%	BPKK
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Layanan Urusan Wajib Dasar							
1	**PENDIDIKAN**							
1.1	Persentase Sekolah Dasar (SD) Dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)	70%	72%	75%	77%	80%	80%	Disdikbud

No	Fokus/aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemb	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	OPD
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)	70%	72%	75%	77%	80%	80%	Disdikbud
1.3	Persentase lulusan SD yang mampu menghafal minimal satu juz Al Qur'an	5%	6%	7%	8%	10%	10%	Disdikbud
1.4	Persentase lulusan SMP yang mampu menghafal minimal dua juz Al Qur'an	5%	6%	7%	8%	10%	10%	Disdikbud
1.5	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi	27%	30%	35%	41%	50%	50%	Disdikbud
1.6	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang Terakreditasi	11%	20%	31%	40%	49%	49%	Disdikbud
1.7	Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI/Paket A)	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	Disdikbud
1.8	Angka Partisipasi Murni (APM SMP/MTs/Paket B)	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	Disdikbud
1.9	Angka Partisipasi Sekolah (APS SD/MI/Paket A)	99,35	99,50	99,65	99,70	99,84	100	Disdikbud
1.10	Angka Partisipasi Sekolah (APS SMP/MTs/Paket B)	72,50	73,80	74,64	75,50	76,36	77,30	Disdikbud
1.11	Angka Putus Sekolah (APS SD/MI/Paket A)	0	0	0	0	0	0	Disdikbud
1.12	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	0	0	0	0	0	0	Disdikbud
1.13	Angka Kelulusan (AL) (SD/MI/Paket A)	100	100	100	100	100	100	Disdikbud
1.14	Angka Kelulusan (AL) (SMP/MTs/Paket B)	100	100	100	100	100	100	Disdikbud
1.15	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	Disdikbud
	Fasilitas Pendidikan :							Disdikbud
1.16	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi Ruang kelas baik	98,70	98,72	98,81	98,97	99,00	99,21	Disdikbud
1.17	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi ruang kelas baik	89,78	89,90	90.02	90.15	90.20	90,25	Disdikbud

No	Fokus/aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemb	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	OPD
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah :							Disdikbud
1.18	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI(%)	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	Disdikbud
1.19	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs(%)	0,33	0,33	0,34	0,34	0,33	0,33	Disdikbud
	Rasio guru/murid:							Disdikbud
1.20	Rasio guru/murid jenjang pendidikan dasar (SD/MI)	01:20	01:20	01:20	01:20	01:20	01:20	Disdikbud
1.21	Rasio guru/murid jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs)	01:24	01:24	01:22	01:20	01:20	01:20	Disdikbud
1.22	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85,70	87,60	88,32	89,50	90,20	90,50	Disdikbud
1.23	Jumlah sosialisasi/workshop kebijakan pendidikan bagi lembaga kemitraan keluarga, komite sekolah, orang tua siswa dan MPD	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	0	8 Keg	Disdikbud
1.24	Jumlah sekolah yang tersedia ruang kelas,ruang pimpinan,ruang guru, ruang ibadah,perpustakaan, Lab IPA, UKS, ruang OSIS, jamban, gudang dan lapangan tempat bermain/ olahraga	5 sek	7 sek	10 sek	10 sek	6 sek	97 sekolah	Disdikbud
1.25	Jumlah pengawas, kepala sekolah, guru dan tenaga administari yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi dan pendidikan karakter	500 org	500 org	600 org	678 org	450 org	2628 org	Disdikbud
1.26	Terpenuhinya biaya operasi non personalia untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama	SD Rp. 1.200.000/ siswa/ tahun SMP Rp. 1.400.000/ siswa/ tahun	0	SD Rp. 1.400.000/ siswa/ tahun SMP Rp. 1.600.000/ siswa/ tahun	0	0 SMP Rp. 1.200.000/ siswa/ tahun	SD Rp. 1.400.000/ siswa/ tahun SMP Rp. 1.800.000/ siswa/ tahun	Disdikbud
1.27	jumlah lembaga Pendidikan Vocasional Non Formal yang akan diakrediatsi	5 lembaga	5 lembaga	6 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	28 lembaga	Disdikbud

No	Fokus/aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemb	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	OPD
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**KESEHATAN**							
2.1	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	35	33	31	29	27	27	Dinkes
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	996	996	997	997	997	997	Dinkes
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	4	4	3	3	2	2	Dinkes
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	Dinkes
2.5	Rasio posyandu persatuan balita	1 Posyandu : 230 balita	1 Posyandu : 220 balita	1 Posyandu : 210 balita	1 Posyandu : 200 balita	1 Posyandu : 190 balita	1 Posyandu : 190 balita	Dinkes
2.6	Rasio Puskesmas,poliklinik,pustu persatuan penduduk	1 Puskesmas : 20.000 penduduk	1 Puskesmas : 20.000 penduduk	1 Puskesmas : 20.000 penduduk	1 Puskesmas : 20.000 penduduk	1 Puskesmas : 20.000 penduduk	1 Puskesmas : 20.000 penduduk	Dinkes
2.7	Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk	0,4907	0,5187	0,5456	0,5715	0,5966	0,5966	Dinkes
		1 RS : 20.000 Penduduk	1 RS : 19.000 Penduduk	1 RS : 18.000 Penduduk	1 RS : 17.000 Penduduk	1 RS : 16.000 Penduduk	1 RS : 16.000 Penduduk	Dinkes
2.8	Rasio dokter persatuan penduduk	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	Dinkes
		1 : 5000	1 : 5000	1 : 5000	1 : 5000	1 : 5000	1 : 5000	Dinkes
2.9	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	Dinkes
		1 : 3300	1 : 3300	1 : 3300	1 : 3300	1 : 3300	1 : 3300	Dinkes
2.10	setiap Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	97%	97%	98%	98%	99%	99%	Dinkes
2.11	Setiap Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	98%	98%	99%	99%	99%	99%	Dinkes
2.12	Setiap Bayi Baru Lahir Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar	75%	77%	79%	80%	85%	85%	Dinkes
2.13	Setiap Balita Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar	60%	63%	65%	70%	73%	73%	Dinkes
2.14	Setiap Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	98%	98,3%	98,5%	99%	99%	99%	Dinkes

No	Fokus/aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemb	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	OPD
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.15	Setiap Warga Negara Indonesia Usia 15 sd 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	55%	60%	65%	67%	70%	70%	Dinkes
2.16	Setiap Warga Negara Indonesia Usia 60 Tahun ke atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	55%	60%	65%	67%	70%	70%	Dinkes
2.17	Setiap Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	55%	60%	65%	67%	70%	70%	Dinkes
2.18	Setiap Penderita Diabetes Melitus Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	55%	60%	65%	67%	70%	70%	Dinkes
2.19	Setiap Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standar	85%	87%	90%	95%	97%	97%	Dinkes
2.20	Setiap Orang Beresiko Terinfeksi HIV (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, Waria/ Transgender, Pengguna NAPZA dan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar	3%	5%	7%	9%	12%	12%	Dinkes
2.21	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	50	55	55	60	60	60	Dinkes
2.22	Cakupan pelayanan anak balita	50	55	55	60	60	60	Dinkes
2.23	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100	100	100	100	100	100	Dinkes
2.24	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	90	90	90	90	90	90	Dinkes
2.25	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	Dinkes
2.26	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100	100	100	100	Dinkes

No	Fokus/aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemb	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	OPD
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.27	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100	100	Dinkes
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							
3.1	Persentase Cakupan Layanan Air Minum	93%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PUPR
3.2	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	91,78%	91,79%	91,81%	91,84%	91,97%	91,97%	Dinas PUPR
3.3	Persentase Drainase Kota Dalam Kondisi Baik	81%	83%	85%	87,05%	90%	90%	Dinas PUPR
3.4	Persen Gampong yang Terkoneksi Drainase dalam Kondisi Baik	78%	79%	80%	81%	82%	82%	Dinas PUPR
3.5	Persentase Pengurangan Luas Genangan	51%	52,5%	54%	55,5%	57%	57%	Dinas PUPR
3.6	Proporsi Panjang jaringan jalan Dalam Kondisi Baik	85,92%	88,32%	90,72%	93,12%	95,52%	95,52%	Dinas PUPR
3.7	Persentase penduduk berakses air minum	72%	74%	76%	78%	80%	80%	Dinas PUPR
3.8	Persentase Panjang Jalan yang Terkoneksi dalam Kondisi Baik	65,16%	66,86%	68,56%	70,26%	71,96%	71,96%	Dinas PUPR
3.9	Bertambahnya Panjang Jalan Baru	0 km	0 km	0,5 km	0,5 km	1 km	2 km	Dinas PUPR
3.10	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	14,76%	15,29%	15,29%	16,33%	16,89%	16,89%	Dinas PUPR
3.11	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	66,02%	69,11%	72,20%	75,28%	78,37%	78,37%	Dinas PUPR
3.12	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	73,11%	73,42%	73,72%	74,01%	74,30%	74,30%	Dinas PUPR
3.13	Ketaatan terhadap RTRW	73,57%	76,07%	78,57%	81,07%	83,57%	83,57%	Dinas PUPR

No	Fokus/aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemb	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	OPD
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.14	Persentase bangunan Umum yang Memiliki Aksesibilitas	31,80%	33,07%	37,05%	40%	42%	42%	Dinas PUPR
3.15	Aparatur Yang Memahami Aturan Tata Ruang	1.850 aparatur	2.100 aparatur	2.350 aparatur	2.600 aparatur	2.850 aparatur	2.850 aparatur	Dinas PUPR
3.16	Masyarakat Yang Memahami Dan Taat Aturan Tata Ruang	1.800 masyarakat	2.200 masyarakat	2.600 masyarakat	3.000 masyarakat	3.400 masyarakat	3.400 masyarakat	Dinas PUPR
3.17	Jumlah Pemilik Lahan Yang Mendapatkan Insentif dan Disentif	15 Objek	30 Objek	45 Objek	60 Objek	75 Objek	75 Objek	Dinas PUPR
3.18	Jumlah kawasan Strategis Yang Tertata	0 kawasan	0 kawasan	0 kawasan	0 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	Dinas PUPR
4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							
4.1	Rasio rumah layak huni	22,69	22,79	22,89	22,99	23	23	perkim
4.2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	99,69	99,77	99,85	99,92	99,98	99,98	perkim
4.3	Persentase Luas Pemukiman yang Tertata	96,61%	96,96%	97,30%	97,65%	98,00%	98%	perkim
4.4	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	6,5%	5,5%	4,5%	3,5%	2,5%	2,5%	perkim
4.5	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	1%	1%	1%	1%	1%	1%	perkim
4.6	Propinsi rumah tangga kumuh perkotaan	2,16%	2,09%	2,02%	1,95%	1,88%	1,81%	perkim
4.7	Cakupan lingkungan Yang sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	96,61%	96,96%	97,30%	97,65%	98,00%	98,00%	perkim
5.	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							
5.1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	4,50	5,00	5,50	6,50	7,38	7,38	Satpol PP & WH
5.2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	78%	80,40%	81,60%	84,80%	86,80%	86,80%	Satpol PP & WH

No	Fokus/aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemb	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	OPD
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3	Persentase Penegakan PERDA	70%	70%	75%	75%	80%	80%	Satpol PP & WH
5.4	Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana)	6 Destana	7 Destana	8 Destana	9 Destana	10 Destana	10 Destana	BPBD
5.5	Persentase Ketersediaan Insfrastruktur Mitigasi Bencana	80%	85%	90%	95%	100%	100%	BPBD
5.6	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	73,34%	85,56%	85,56%	85,56%	85,56%	85,56%	DPKP
5.7	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	86,56%	86,56%	86,56%	86,56%	86,56%	86,56%	DPKP
5.8	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi	44,73%	58,18%	66,90%	90,64%	90,64%	90,64%	DPKP
5.9	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 pada WMK	33,33%	50%	50%	66,67%	66,67%	66,67%	DPKP
5.10	Jumlah kasus Konflik Sosial Masyarakat	63 Kasus	62 Kasus	59 Kasus	55 Kasus	50 Kasus	50 Kasus	Kesbangpol
5.11	Tersedianya regulasi yang efektif dan efisien	45	45	45	45	45	225	Bagian Hukum Setda
6.	**SOSIAL**							
6.1	Persentase PMKS yang Mampu Memiliki Kemandirian Ekonomi	0,30%	0,50%	0,80%	1,00%	1,30%	1,30%	Dinas Sosial
6.2	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial	9%	27%	55%	82%	100%	100%	Dinas Sosial
6.3	Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Tersertifikasi Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial	5%	18%	33%	50%	70%	70%	Dinas Sosial
6.4	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	37%	39%	40%	42%	44%	16,23%	Dinas Sosial
6.5	Persentase PMKS yang Tertangani	37%	39%	40%	42%	44%	16,23%	Dinas Sosial
6.6	Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk pemenuhan Kebutuhan Dasar	67,2%	67,2%	67,2%	67,2%	67,2%	67,2%	Dinas Sosial

No	Fokus/aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemb	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	OPD
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.7	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	55,56%	55,56%	66,67%	77,78%	100%	100%	Dinas Sosial
6.8	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	31%	32,5%	34%	35,6%	37,2%	37,2%	Dinas Sosial
6.10	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan uang duka	270 Jiwa	350 Jiwa	370 Jiwa	400 Jiwa	430 Jiwa	1820 Jiwa	Dinas Sosial
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
1	**Tenaga Kerja**							
1.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	11,55%	11,14%	10,73%	10,32%	9,92%	9,92%	Disnaker
1.2	Jumlah Industri Kecil Menengah Produktif	2542	2563	2594	2621	2647	2647	Disnaker
1.3	Jumlah Penetapan Sentra Industri	1	1	1	1	2	2	Disnaker
1.4	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	38,00%	40,00%	42,00%	44,00%	46,00%	46,00%	Disnaker
1.5	Persentase penyelesaian perselisihan buruh dengan pengusaha	95,71%	95,71%	97,14%	94,29%	94,29%	94,29%	Disnaker
1.6	Jumlah Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek/BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan aktif	8.575	8.602	8.666	8.690	8.715	8.715	Disnaker
1.7	Rasio daya serap tenaga kerja	17,95%	21,42%	24,73%	27,16%	30,00%	30,00%	Disnaker
1.8	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	40,24	40,26	39,60	39,37	38,64	38,64	Disnaker
1.9	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	95,71%	95,71%	97,14%	97,14%	98,57%	98,57%	Disnaker

No	Fokus/aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemb	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	OPD
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.10	Bersaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	72,73	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	Disnaker
1.11	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	72,73	72,73	72,73	72,73	72,73	72,73	Disnaker
1.12	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan	75,47	76,92	76,92	76,92	76,92	76,92	Disnaker
1.13	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	2,10%	2,20%	2,20%	2,20%	2,25%	2,25%	Disnaker
1.14	Kontribusi Rumah Tangga terhadap PDRB sektor Industri	25,62%	25,62%	25,62%	25,62%	25,62%	25,62%	Disnaker
1.15	Pertumbuhan Industri	5,39%	5,50%	5,88%	6,20%	6,55%	6,55%	Disnaker
1.16	Besaran pekerja/buruh yang menjadi program JAMSOSTEK	39,98%	49,99%	59,99%	69,99%	85,99%	85,99%	Disnaker
1.17	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	94,55%	94,86%	95,00%	95,11%	97,14%	97,14%	Disnaker
2.	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							
2.1	Cakupan peserta KB aktif	44%	45%	46%	47%	48%	48%	Dinas P3AP2KB
2.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	24%	24%	32%	32%	32%	32%	Dinas P3AP2KB
2.3	Rasio KDRT	0,38%	0,41%	0,42%	0,45%	0,44%	0,44%	Dinas P3AP2KB
2.4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas P3AP2KB
2.5	Persentase penanganan kasus KDRT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas P3AP2KB
2.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas P3AP2KB

No	Fokus/aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemb	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	OPD
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas P3AP2KB
2.8	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	44%	45%	46%	47%	48%	48%	Dinas P3AP2KB
2.9	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	34%	34%	33,5%	33%	33%	33%	Dinas P3AP2KB
2.10	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	21%	22%	23%	24%	25%	25%	Dinas P3AP2KB
2.11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	57%	59%	61%	63%	65%	65%	Dinas P3AP2KB
2.12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	36%	37%	38%	39%	40%	40%	Dinas P3AP2KB
2.13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	24%	26%	28%	30%	32%	32%	Dinas P3AP2KB
2.14	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas P3AP2KB
2.15	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas P3AP2KB
2.16	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas P3AP2KB
2.17	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas P3AP2KB
2.18	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	56%	56%	56%	56%	56%	56%	Dinas P3AP2KB

No	Fokus/aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemb	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	OPD
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.19	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas P3AP2KB
2.20	Rata-rata usia kawin pertama wanita	21%	21%	21%	21%	21%	21%	Dinas P3AP2KB
3	**PANGAN**							
3.1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	0,76 Kg	0,78 Kg	0,80 Kg	0,82 Kg	0,84 Kg	0,84 kg	DP2KP
3.2	Persentase Keanekaragaman Pangan	60,38%	61,59%	62,80%	64,01%	65,22%	65,22%	DP2KP
3.3	Jumlah Produksi Ternak							
	a. Sapi	656 Ton	663 Ton	650 Ton	682 Ton	690 Ton	690 Ton	DP2KP
	b. Unggas	395 Ton	414 Ton	433 Ton	452 Ton	471 Ton	471 Ton	DP2KP
	c. Kambing	4.455 Ton	4.667 Ton	4.879 Ton	5.091 Ton	5.303 Ton	5.303 Ton	DP2KP
3.4	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	228 Ton	233 Ton	238 Ton	243 Ton	248 Ton	248 Ton	DP2KP
3.5	Jumlah Produksi Hasil Perikanan Tangkap	9.200 Ton	9.400 Ton	9.600 Ton	9.800 Ton	10.000 Ton	10.000 Ton	DP2KP
3.6	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	50,7 Ton	51,71 Ton	52,72 Ton	53,73 Ton	54,74 Ton	54,74 Ton	DP2KP
4	**LINGKUNGAN HIDUP**							
4.1	Menurunnya TPS Liar	70	50	30	15	0	0	DLHK3
4.2	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	14,76%	15,29%	15,81%	16,33%	16,89%	16,89%	DLHK3
4.3	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ramah Anak	10%	20%	30%	40%	50%	50%	DLHK3
4.4	Persentase Penerangan Jalan Umum	61,74%	63,05%	64,35%	65,66%	66,96%	66,96%	DLHK3
4.5	Cakupan Pelayanan Persampahan (Persentase Penduduk Terlayani)	84%	87%	89%	91%	93%	93%	DLHK3
4.6	Penghargaan Adipura	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DLHK3

No	Fokus/aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemb	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	OPD
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							
5.1	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdukcapil
5.2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	96%	96,50%	97%	97,5%	98%	98%	Disdukcapil
5.3	Persentase Pasangan Ber-akte Nikah	62,5%	65%	67,5%	70%	72,5%	72,5%	Disdukcapil
5.4	Cakupan Kepemilikan akta kelahiran	72%	74%	76%	78%	80%	80%	Disdukcapil
5.5	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	74%	76%	78%	80%	82%	82%	Disdukcapil
5.6	Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM)	Nilai 85	Nilai 87	Nilai 89	Nilai 90	Nilai 92	Nilai 92	Disdukcapil
5.7	Persentase Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Digital	80%	82%	84%	86%	88%	88%	Disdukcapil
5.8	Persentase Peningkatan Akurasi Database Kependudukan	88%	90%	92%	94%	96%	96%	Disdukcapil
5.9	Rasio bayi berakte kelahiran	0,90	0,92	0,94	0,96	0,98	0,98	Disdukcapil
5.10	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	75%	77%	79%	81%	83%	83%	Disdukcapil
5.11	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Disdukcapil
5.12	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	Disdukcapil
6	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG**							
6.1	Jumlah BUMG yang aktif	10 BUMG	20 BUMG	30 BUMG	40 BUMG	50 BUMG	50 BUMG	DPMG
6.2	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)	60%	62%	65%	67%	70%	70%	DPMG
6.3	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan desa yang Baik	97%	98%	99%	100%	100%	100%	DPMG
6.4	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Mukim yang Baik	30%	35%	40%	45%	50%	50%	DPMG

No	Fokus/aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemb	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	OPD
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.5	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6	DPMG
6.6	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	21,7	21,8	21,9	22	22,1	22,1	DPMG
6.7	PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPMG
6.8	Posyandu Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPMG
6.9	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang baik	30%	40%	50%	60%	70%	70%	DPMG
6.10	Fasilitasi Permodalan program PUEM	350	400	450	500	550	2.250	DPMG
6.11	Prosentase Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang baik	30%	40%	50%	60%	70%	70%	DPMG
6.12	Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong yang baik	30%	40%	50%	60%	70%	70%	DPMG
7	**PERHUBUNGAN**							
7.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	1.585.103	1.600.954	1.616.963	1.633.133	1.649.464	1.649.464	Dishub
7.2	Rasio ijin trayek	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,22	Dishub
7.3	Jumlah uji kir angkutan umum	9200	9500	9700	10000	10500	10500	Dishub
7.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	Dishub
7.5	Persentase layanan Angkutan Darat	0,10%	0,11%	0,12%	0,13%	0,15%	0,15%	Dishub
7.6	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	27%	25%	23%	21%	20%	20%	Dishub
7.7	Pemasangan Rambu-rambu	94%	95%	97%	98%	100%	100%	Dishub
8	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							
8.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diskominfotik
8.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0,82	0,84	0,86	0,88	0,90	0,90	Diskominfotik

No	Fokus/aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemb	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	OPD
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telpon	82%	84%	86%	88%	90%	90%	Diskominfotik
8.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0,82	0,84	0,86	0,88	0,90	0,90	Diskominfotik
8.5	Propersi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,50	Diskominfotik
9.	**KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**							
9.1	Persentase Pertumbuhan UMKM yang Unggul	1%	1,25%	1,50%	1,75%	2%	2%	DISKOP UKM
9.2	Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro (UM) yang Memanfaatkan jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0	100 UM	110 UM	120 UM	130 UM	130 UM	DISKOP UKM
9.3	Persentase koperasi aktif	72,96%	79,13%	87,77%	92,34%	96,98%	96,98%	DISKOP UKM
9.4	Persentase Pasar yang Representatif	11,76%	23,53%	29,41%	35,29%	41,18%	41,18%	DISKOP UKM
9.5	Jumlah Usaha Mikro	12000 UM	12500 UM	13000 UM	13500 UM	14000 UM	14000 UM	DISKOP UKM
9.6	Jumlah Koperasi	503 Unit	508 Unit	515 Unit	522 Unit	529 Unit	529 Unit	DISKOP UKM
9.7	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam /Usaha Simpan Pinjam	393 Unit	400 Unit	407 Unit	414 Unit	421 Unit	421 Unit	DISKOP UKM
9.8	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro (UM)	600 UM	1000 UM	1200 UM	1400 UM	1600 UM	1600 UM	DISKOP UKM
9.9	Jumlah pasar yang sudah berfungsi optimal	12 Pasar	13 Pasar	14 Pasar	15 Pasar	16 Pasar	16 Pasar	DISKOP UKM
9.10	Jumlah pasar yang dibangun	0	0	0	18 Pasar	19 Pasar	19 Pasar	DISKOP UKM
9.11	Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang Bertanda Tera Sah	0	1000 UTTP	1100 UTTP	1200 UTTP	1300 UTTP	1300 UTTP	DISKOP UKM
9.12	Jumlah Videotron yang Memberikan Informasi Harga Bahan Pokok dan Strategis Lainnya	2 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit	6 Unit	6 Unit	DISKOP UKM

No	Fokus/aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemb	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	OPD
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	**PEMUDA DAN OLAHRAGA**							
10.1	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahrga Sesuai Standar	2 Fasilitas	3 Fasilitas	4 Fasilitas	5 Fasilitas	6 Fasilitas	6 Fasilitas	Dispora
10.2	Persentase organisasi pemuda yang aktif	87	88	88	89	90	90	Dispora
10.3	Persentase Wirausaha Muda	46	47	48	49	50	50	Dispora
10.4	Cakupan Pembinaan Olahraga	82	84	84	85	85	85	Dispora
10.5	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	68	72	78	82	87	87	Dispora
10.6	Cakupan pembinaan atlet muda	29	40	40	50	50	50	Dispora
10.7	Jumlah atlet berprestasi	28	30	31	35	37	37	Dispora
10.8	Jumlah prestasi olahraga	9	10	11	13	18	18	Dispora
11	**KEBUDAYAAN**							
11.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3 Even	5 Even	5 Even	5 Even	5 Even	23 Even	Disdikbud
11.2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	34,00	38,00	41,00	45,00	50,00	50,00	Disdikbud
11.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	3 karya	4 karya	4 karya	5 karya	5 karya	5 karya	Disdikbud
11.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	20	22	24	26	28	28	Disdikbud
11.5	Jumlah pelatihan komunitas seni dan budaya	27 Komunitas Seni	28 Kounitas Seni	27 Kounitas Seni	28 Kounitas Seni	27 Kounitas Seni	137 komunitas seni	Disdikbud
11.6	Jumlah even/festival daerah dan Nasional yang diikuti	3 Even	2 Even	2 Even	2 Even	2 Even	11 Even/festifal	Disdikbud
12	**PERPUSTAKAAN**							
12.1	Jumlah perpustakaan	48	50	52	54	56	56	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12.2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan Perpustakaan Keliling Per Tahun (org)	14.025	15.427	16,969	18.666	20.532	20.532	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Fokus/aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemb	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	OPD
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.3	Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk	17,85%	18,23%	18,59%	18,93%	19,24%	19,24%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12.4	Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	55.876	61.464	67.610	74.371	81.808	81.808	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12.5	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	0,055	0,061	0,067	0,074	0,081	0,081	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13	**KEARSIPAN**							
13.1	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	22%	27%	31%	36%	45%	45%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13.2	Peningkatan SDM Pengelola kearsipan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Layanan Urusan Pilihan								
1	**PARIWISATA**							
1.1	Jumlah Kunjungan Wisataan	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	500.000	Dinas Pariwisata
1.2	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD Kota Banda Aceh	5,1%	5,2%	5,3%	5,4%	5,5%	5,5%	Dinas Pariwisata
2	**PERTANIAN**							
2,1	Jumlah Produksi Hasil Pertanian	324	340	357	375	394	394 ton	DP2KP
3	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**							
3,1	Jumlah Produksi Hasil Perikanan	9200	9400	9600	9800	10000	10000	DP2KP
4	**PETERNAKAN**							
4,1	Jumlah Produksi Hasil Peternakan	656	663	650	682	690	690 ton	DP2KP

No	Fokus/aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemb	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	OPD
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PENUNJANG URUSAN:							
1	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**							
1,1	Persentase keselarasan program RKPK terhadap RPJMD	76%	78%	80%	82%	84%	84%	Bappeda
2	**KEUANGAN**							
2.1	Rasio kemadirian keuangan daerah	29%	30%	31%	32%	33%	33%	BPKK
2.2	Persentase peningkatan penerimaan PAD	15%	15%	15%	15%	15%	75%	BPKK
2.3	Persentase penerimaan pajak daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPKK
2.4	Persentase penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPKK
2.5	Persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD	58%	59%	60%	61%	62%	62%	BPKK
2.6	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKK
2.7	Adanya dokumen laporan barang milik daerah yang akuntabel	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen	BPKK
2.8	Adanya dokumen laporan milik daerah yang sesuai SAP dan berbasis Acrual	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen	BPKK
2.9	Adanya dokumen RAPBK dan RAPBK-P yang sesuai perundang-undangan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	10 dokumen	BPKK
2.10	Jumlah SP2D yang dikeluarkan sebagai bukti pembayaran	14262 dokumen	14280 dokumen	14290 dokumen	14300 dokumen	14310 dokumen	71442 dokumen	BPKK
2.11	Adanya dokumen pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen	BPKK
2.12	Predikat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD dari inspektorat Kota Banda Aceh	A	A	A	A	A	A	BPKK
2.13	Adanya dokumen perencanaan yang sesuai dengan perundang-undangan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	16 dokumen	BPKK
2.14	Adanya dokumen laporan kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen	BPKK

No	Fokus/aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemb	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	OPD
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.15	Adanya dokumen laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dan berbasis acrual	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	16 Laporan	BPKK
2.16	Adanya dokumen pengelolaan aset SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	10 dokumen	BPKK
3	**KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**							
3,1	Persentase Penempatan Pejabat yang sesuai dengan latar belakang Diklat Penjenjangan	87%	89%	91%	93%	95%	95%	BKPSDM
3,2	Jumlah PNS yang indisipliner	32 Org	25 Org	25 Org	19 Org	19 Org	19 Org	BKPSDM
3,3	Pelaksanaan seleksi JPT	4 JPT	4 JPT	4 JPT	3 JPT	0 JPT	0	BKPSDM
3,4	Persentase Administrator dan Pengawas yang memenuhi Standar Kompetensi	0%	15%	23%	23%	23%	23%	BKPSDM
3,5	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20%	20%	20%	20%	20%	25%	BKPSDM
3,6	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	42%	48%	54%	60%	66%	66%	BKPSDM
3,7	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	37	37	37	37	37	37	BKPSDM
3,8	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	2106	2106	2106	2106	2106	2106	BKPSDM
3,9	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2220	2220	2220	2220	2220	2220	BKPSDM
4	**INSPEKTORAT**							
4,1	Presentase tindak lanjut rekomendasi BPK	89,80%	90,52%	91,24%	91,95%	92,67%	92,67%	Inspektorat
4,2	Presentase tindak lanjut rekomendasi inspektorat Banda Aceh	76,39%	76,85%	77,20%	77,66%	78,13%	78,13%	Inspektorat

No	Fokus/aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemb	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	OPD
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**SEKRETARIAT DPRK**							
5,1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Set. DPRK Banda Aceh
5,2	Tersusun dan terintegrasi Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Set. DPRK Banda Aceh
5,3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Set. DPRK Banda Aceh
	KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN ACEH							
1.	**KEAGAMAAN**							
1.1	Peringkat Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)	Peringkat 4	-	Peringkat 2	-	Peringkat 1	Peringkat 1	Dinas Syariat Islam
1.2	Jumlah Baitul Mal Gampong Yang Baik	0	15 Baitul Mal Gampong	25 Baitul Mal Gampong	35 Baitul Mal Gampong	50 Baitul Mal Gampong	50 Baitul Mal Gampong	Baitul Mal
1.3	Jumlah Objek harta agama yang terjaga	0	500 Objek	500 Objek	500 Objek	500 Objek	500 Objek	Baitul Mal
1.4	Jumlah Muzakki	8264 muzakki	8764 muzakki	9064 muzakki	9364 muzakki	9664 muzakki	9664 muzakki	Baitul Mal
1.5	Jumlah penerima zakat	12935 mustahiq	12935 mustahiq	12935 mustahiq	12935 mustahiq	12935 mustahiq	12935 mustahiq	Baitul Mal
1.6	Persentase peningkatan penerimaan ZIS	70%	73%	75%	77%	80%	80%	Baitul Mal
1.7	Jumlah data base Dayah berbasis Teknologi	40%	50%	60%	70%	100%	100%	Disdik

No	Fokus/aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemb	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	OPD
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.8	Jumlah lulusan santri yang diterima dipeguruan tinggi	30%	60%	70%	75%	80%	80%	Disdik
1.9	Jumlah pembinaan Guru Dayah	10%	50%	60%	70%	80%	80%	Disdik
1.10	jumlah pembinaan pemberdayaan ekonomi dayah	5	5	5	5	5	25	Disdik
1.11	persentase daya yang memiliki izin operasional	33	33	34	34	34	34	Disdik
1.12	persentase dayah yang memiliki tipe sesuai dengan standar	5	5	5	5	5	20	Disdik
	Aspek Daya Saing Daerah :							Dishub
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,32	0,35	0,40	0,43	0,46	0,46	Dishub
2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	1.215.000	1.216.000	1.217.000	1.218.000	1.219.000	1.219.000	Dishub
		69.142	70.525	71.936	73.375	74.843	74.843	
3	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	1.585.103	1.600.954	1.616.963	1.633.133	1.649.464	1.649.464	Dishub
4	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	1	1	1	1	1	25	DPM-PTSP

BAB IX
PENUTUP

Pencapaian visi, misi, dan program yang telah tercantum dalam pelaksanaaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, stakeholders dan masyarakat. Target pencapaian RPJMD akan dapat dilihat pada capaian Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) setiap tahunnya.

Penyusunan RPJMD menentukan arah pengembangan kota yang akan dilaksanakan dalam pencapaian 5 tahun akan datang, cara mencapainya dan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan. Dokumen ini disusun secara transparan, akuntabel dan melibatkan masyarakat serta seluruh stakeholders dalam pengambilan keputusan.

Untuk menjamin Terwujudnya kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah akan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dengan menekankan kepada innovasi pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya. Keberhasilan pencapaian RPJMD ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan melalui upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas.

WALIKOTA BANDA ACEH

AMINULLAH USMAN